



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.107, 2016

KEMENKES. Laporan Keuangan. Berbasis Akrual.
Akuntansi. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS
AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang akan diterapkan secara penuh mulai 1 Januari 2015;
- b. bahwa untuk memberikan panduan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu menyusun pedoman akuntansi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Kementerian Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Dalam upaya penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Kementerian Kesehatan disusun Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. neraca; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 3

Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 476/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 86 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN BERBASIS
AKRUAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS
AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9, menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/barang Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagian Anggaran yang dikuasainya berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan lampiran terkait jenis Laporan Keuangan berbasis akrual meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Proses penyusunan Laporan Keuangan menggunakan software aplikasi SAIBA, Persediaan dan SIMAK-BMN.

Laporan Keuangan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk memberikan penjelasan yang memadai atas akun Realisasi Anggaran, akun Laporan Operasional, akun Laporan Perubahan Ekuitas dan akun Neraca, agar Laporan Keuangan dapat mudah dipahami bagi pembaca laporan. Di dalam CaLK juga diungkapkan tentang informasi penting lainnya terkait data pendukung Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan dibentuk Unit Akuntansi Instansi secara berjenjang yaitu (a) UAKPA/B tingkat Satuan Kerja, (b) UAPPA/B-W tingkat Wilayah, (c) UAPPA/B-E1 tingkat Eselon dan (d) UAPA/B tingkat Kementerian.

Laporan Keuangan disusun dan disampaikan setiap Bulan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan secara berjenjang dari tingkat UAKPA/B kepada UAPPA/B-W, dan seterusnya kepada UAPPA/B-E1 dan UAPA/B-Kementerian. Laporan Keuangan disertai CaLK yang disusun setiap Semester I dan Tahunan dengan pengungkapan yang memadai agar setiap pembaca laporan dapat memahami maksud sesuai esensi penyajian data-data Laporan Keuangan. Laporan Keuangan harus direviu oleh Inspektorat Jenderal, dan Laporan Keuangan disertai pernyataan tanggung jawab (*Statement of Responsibility*) yang ditandatangani oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan disampaikan setiap Semester I dan Tahunan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disusun oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good government and clean governance* dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam rangka meningkatkan tertib administrasi di bidang pertanggungjawaban keuangan negara dan untuk mendukung pelaksanaan akuntansi di lingkungan Kementerian Kesehatan secara akurat, transparan dan akuntabel yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Buku Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua pada Kementerian Kesehatan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk Uang;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1619);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2044);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.06/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ MENKES/ PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Kesehatan;

41. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/207/2015 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W) Vertikal;
42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2008 tentang Pedoman Konsolidasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
43. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
46. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
47. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9070/PB/2014 tentang Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan;
48. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1690/PB/2015 tentang Penatausahaan Dokumen Sumber dalam rangka PeLaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015;
49. Surat Direktur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Nomor S-6478/PB.6/2015 tentang Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan.
50. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 tentang Pengesahan dan/atau Revisi DIPA BLU atas Pendapatan Hibah BLU dalam bentuk Barang/Jasa

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Kementerian Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk secara teknis dan merupakan acuan bagi Unit Akuntansi Satuan Kerja, Unit Akuntansi Wilayah, Unit Akuntansi Eselon I, dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual.

2. Tujuan Khusus

- a. Mempermudah perencanaan anggaran dalam penyusunan/penelaahan rencana kerja dan anggaran dan penelaahan DIPA, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan agar pelaksanaan anggaran Kementerian Kesehatan lebih efektif dan efisien.
- b. Memberikan petunjuk/panduan yang bersifat teknis serta merupakan prosedur tetap bagi para pelaksana SAI dalam proses penyusunan Laporan Keuangan untuk mencatat, mengikhtisarkan, membukukan, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan dan barang atas pelaksanaan anggaran Kementerian Kesehatan, termasuk transaksi keuangan dan barang di luar APBN.
- c. Meningkatkan disiplin setiap Kepala Satuan Kerja sebagai entitas akuntansi untuk menyusun Laporan Keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel dengan kualitas yang lebih baik dan secara tertib dan teratur mengirimkan Laporan Keuangan setiap Bulan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan dengan tepat waktu.
- d. Meningkatkan keterampilan dan pemahaman bagi pelaksana SAI dalam melakukan penggolongan transaksi keuangan dan barang sesuai Bagan Akun Standar (BAS) khususnya akun yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- e. Mencapai keseragaman penerapan pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang serta penyajiannya dalam Laporan Keuangan, sehingga

meningkatkan daya banding di antara Laporan Keuangan entitas akuntansi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman akuntansi disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, Ruang Lingkup, Definisi Operasional.

BAB II : ORGANISASI Unit Akuntansi Instansi, meliputi:

- a. Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Instansi:
 - 1) Tingkat Satuan Kerja, 2) Tingkat Wilayah, 3) Tingkat Eselon I, dan 4) Tingkat Kementerian.
- b. Tugas Unit Akuntansi Instansi : 1). Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tingkat Satuan Kerja (UAKPA/B), 2). Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang tingkat Wilayah (UAPPA/B-W), 3). Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang tingkat Eselon I (UAPPA/B-E1), dan 4). Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan.

BAB III : LAPORAN KEUANGAN, menjelaskan tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan, Akun-akun yang digunakan, Ilustrasi Laporan Keuangan. Adapun Laporan Keuangan, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan;
6. Penyesuaian;
7. Keterkaitan Transaksi dalam Laporan Keuangan.

BAB IV : LAPORAN BARANG MILIK NEGARA, menjelaskan tentang Definisi, Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara, Akun-akun yang digunakan, ilustrasi Laporan Barang Milik Negara.

Adapun Laporan Barang Milik Negara, meliputi :

1. Laporan Barang Milik Negara (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Barang Bersejarah, Aset Tak Berwujud);
2. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan;
3. Laporan Barang Bersejarah;
4. Neraca;
5. Laporan Persediaan;
6. Laporan Penyusutan;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
9. Laporan Barang Hilang Yang Sudah Diusulkan Ke Pengelola;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Sudah Diusulkan Ke Pengelola;
11. Laporan Usulan Hibah DK/TP Yang Sudah Diusulkan;
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

BAB V : PENUTUP

E. Definisi Operasional

a. Umum

- 1) Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data yang berisi data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
- 2) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai ketentuan.
- 3) Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 4) Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disebut BAS adalah

daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan Keuangan.

- 5) Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- 6) Data transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat Satuan Kerja.
- 7) Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi.
- 8) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- 9) Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan dan barang yang digunakan sebagai sumber untuk menghasilkan data akuntansi.
- 10) Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 11) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
- 12) Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- 13) Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disebut LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya mencakup Pendapatan dan Belanja dalam satu periode pelaporan.
- 14) Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, Surplus / Defisit dari operasi, Surplus / Defisit dari kegiatan Non Operasional, Surplus / Defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- 15) Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya
- 16) Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
- 17) Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode tertentu.
- 18) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Kesehatan.
- 19) Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
- 20) Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi atau lembaga yang merupakan bagian dari unit organisasi pada Kementerian Kesehatan yang melaksanakan satu/beberapa kegiatan dari suatu program.
- 21) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri : Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah.
- 22) Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya

disebut SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.

- 23) Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disebut SiAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- 24) Sistem Akuntansi Umum, yang selanjutnya disebut SAU adalah sub SiAP yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca.
- 25) Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Kesehatan, yang diolah menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, dan didukung prosedur manual sesuai kebutuhan transaksi.
- 26) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah sub sistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan.
- 27) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan pemerintah.
- 28) Unit Akuntansi Instansi yang selanjutnya disebut UAI adalah unit organisasi Kementerian Kesehatan yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.

- 29) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
- 30) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi instansi yang bertugas melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
- 31) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit akuntansi instansi yang bertugas melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
- 32) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAPA adalah unit akuntansi instansi tingkat Kementerian Kesehatan yang bertugas melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 33) UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
- 34) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB adalah Satker/Kuasa Pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.
- 35) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPB-W adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan bertugas melakukan penggabungan laporan BMN dari UAKPB di wilayah kerjanya.
- 36) UAPPB-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi yang bertugas melakukan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
- 37) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-E1 adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang bertugas melakukan kegiatan

penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada dibawahnya.

- 38) Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPB adalah unit akuntansi BMN tingkat Kementerian Kesehatan yang bertugas melakukan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1.

b. Khusus

- 1) Pendapatan (berbasis Kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara atau oleh entitas pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan pada Kementerian Kesehatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum.
- 3) Pendapatan (berbasis Akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 4) Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang dibayarkan kepada pegawai Kementerian Kesehatan (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan sendiri, dan pekerja lain yang bukan karyawan Kementerian Kesehatan tidak termasuk dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam kelompok belanja barang dan jasa.
- 5) Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar termasuk ATK dan operasional kantor lainnya, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan, barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat.

- 6) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- 7) Belanja Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- 8) Belanja AkruaI adalah penurunan manfaat secara ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 9) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek.

BAB II
ORGANISASI UNIT AKUNTANSI INSTANSI

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat Satuan Kerja → Wilayah → Eselon I → tingkat Kementerian Kesehatan, menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) mencakup : Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), Aplikasi Persediaan, dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam rangka mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan, pada bab ini menyajikan tentang Pembentukan Organisasi dan Tugas Unit Akuntansi Instansi sesuai jenjang pelaporan, sebagai berikut:

A. Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Instansi

1. Tingkat Satuan Kerja

- a. Satuan Kerja Kantor Pusat, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja.
- b. Satuan Kerja Kantor Daerah, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja.
- c. Satuan Kerja Dekonsentrasi, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- d. Satuan Kerja Tugas Pembantuan, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala SKPD.

2. Tingkat Wilayah

- a. Satuan Kerja Kantor Pusat dan Tugas Pembantuan, tidak membentuk Unit Akuntansi Wilayah. Laporan Keuangan dan Barang disampaikan langsung kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Unit Eselon I.
- b. Satuan Kerja Kantor Daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT), Satker yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Organisasi UAPPA/B-W ditetapkan dengan keputusan Kepala Satker yang telah ditunjuk menjadi UAPPA/B-W.

- c. Satuan Kerja Dekonsentrasi, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

3. Tingkat Eselon I

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon I (UAPPA/B-E1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.

4. Tingkat Kementerian Kesehatan

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- B. Tugas Unit Akuntansi Instansi

Secara umum tugas Unit Akuntansi Instansi masing-masing jenjang pelaporan adalah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Kesehatan.

Untuk mencapai keseragaman dan percepatan dalam pelaporan, pada pedoman akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini diatur secara khusus Tugas Pokok Unit Akuntansi Instansi masing-masing jenjang pelaporan, sebagai berikut :

1. Unit Akuntansi Instansi Tingkat Satker

Tugas Pokok UAKPA

- a. Memproses dokumen sumber atas transaksi keuangan dan barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja.

Untuk dokumen sumber yang berhubungan dengan pengadaan aset, setelah dilakukan perekaman pada SAIBA, disampaikan kepada UAKPB.

- b. Menerima ADK SIMAK-BMN dari UAKPB sebagai bahan penyusunan neraca, setiap bulan.
- c. Meneliti dan menganalisis data Laporan Keuangan (LRA, LO, LPE dan Neraca) hasil input data transaksi sebelum dibuat Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Melakukan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN setiap bulan, dengan membawa LRA, LO, LPE, Neraca dan ADK. Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Tahunan TA berjalan agar diselesaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. Rekonsiliasi Internal data BMN dengan petugas SIMAK-BMN, dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
- e. Menyampaikan LRA, LO, LPE dan Neraca beserta ADK setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah bulan pelaporan berakhir kepada :
 - 1) UAPPA-W bagi Satker Vertikal dan Dekonsentrasi,
 - 2) UAPPA-E1 bagi Satker Kantor Pusat dan Tugas Pembantuan.
- f. Menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan I berupa LRA, LO, LPE dan Neraca beserta ADK selambat-lambatnya tanggal 12 April tahun berjalan kepada :
 - 1) UAPPA-W bagi Satker Vertikal dan Dekonsentrasi,
 - 2) UAPPA-E1 bagi Satker Kantor Pusat dan Tugas Pembantuan.
- g. Menyampaikan Laporan Keuangan Semester I berupa LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK beserta ADK selambat-lambatnya tanggal 12 Juli tahun berjalan kepada :
 - 1) UAPPA-W bagi Satker Vertikal dan Dekonsentrasi,
 - 2) UAPPA-E1 bagi Satker Kantor Pusat dan Tugas Pembantuan.
- h. Menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan III berupa LRA, LO, LPE, dan Neraca beserta ADK selambat-lambatnya tanggal 12 Oktober tahun berjalan kepada :
 - 1) UAPPA-W bagi Satker Vertikal dan Dekonsentrasi,

- 2) UAPPA-E1 bagi Satker Kantor Pusat dan Tugas Pembantuan.
- i. Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan tahun anggaran berjalan berupa berupa LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK beserta ADK selambat-lambatnya tanggal 20 Januari tahun berikutnya kepada :
 - 1) UAPPA-W bagi Satker Vertikal dan Dekonsentrasi,
 - 2) UAPPA-E1 bagi Satker Kantor Pusat dan Tugas Pembantuan.
- j. Untuk Satker BLU, selain menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), juga wajib menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) setiap Semester I dan Tahunan.
 - 1) Satker BLU di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan, sesuai Pedoman Akuntansi BLU.
 - 2) Satker BLU di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, sesuai Pedoman Akuntansi Keuangan BLU Poltekkes.

Dokumen Sumber UAKPA

Dokumen sumber transaksi keuangan dan barang yang dapat digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker adalah:

1. Dokumen Penerimaan, terdiri dari:
 - a. Estimasi Pendapatan yang dialokasikan
 - 1) Lampiran RKAKL formulir 4.2 (uraian anggaran pendapatan per Akun).
 - 2) PNBPN dan Hibah pada DIPA dan Dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Realisasi Pendapatan
 - 1) Bukti Penerimaan Negara (BPN);
 - 2) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
 - 3) Surat Setoran Pengembalian Pendapatan (SSPP);
 - 4) Surat Tanda Setoran (STS);
 - 5) Dokumen penerimaan lainnya yang dipersamakan.
2. Dokumen pelaksanaan anggaran
 - a. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atau RKAKL Formulir 1.5/Revisi POK atau RKAKL Formulir 1.5,

- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Revisi DIPA/APBN-P,
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya yang dipersamakan.
3. Dokumen Pengeluaran Anggaran
- a. Surat Perintah Pembayaran (SPP),
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM),
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
 - d. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB),
 - e. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B),
 - f. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B),
 - g. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL),
 - h. Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL),
 - i. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL),
 - j. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL),
 - k. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS),
 - l. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (Persetujuan MPHL-BJS),
 - m. Dokumen pengeluaran anggaran lainnya yang dipersamakan.
4. Dokumen Lainnya
- a. Kartu Pengawasan dan Memo Penyesuaian dalam rangka pembuatan Jurnal Penyesuaian,
 - b. Dokumen terkait persediaan, antara lain:Kartu Persediaan, Buku Persediaan, dan Laporan Persediaan,
 - c. Dokumen terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) antara lain: Kartu KDP dan Laporan KDP,
 - d. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan antara lain: Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Keputusan (SK) Penghapusan, Surat Penghentian dan/atau penggunaan kembali atas Aset Tetap/Aset tak Berwujud yang dalam kondisi rusak berat, Laporan Hasil Opname Fisik (LHOF), dan lain sebagainya,

- e. Dokumen Piutang antara lain: Kartu Piutang, Daftar Rekapitulasi Piutang, dan Daftar Umur Piutang.

2. Unit Akuntansi Instansi Tingkat Wilayah

Tugas Pokok UAPPA-W

2.1. UAPPA-W Dekonsentrasi

- a. Menerima, memvalidasi dan memverifikasi Arsip Data Komputer (ADK) dan menyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja yang diterima dari UAKPA/B-Satker Dekonsentrasi menjadi Laporan Keuangan tingkat Wilayah.
- b. Meneliti dan menganalisis data Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca) UAPPA-W hasil penggabungan sebelum dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Wilayah.
- c. Menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, setiap bulan.
- d. Melakukan rekonsiliasi eksternal data Laporan Realisasi Anggaran tingkat Wilayah dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, setiap Triwulan. Rekonsiliasi data Laporan Realisasi Anggaran Tahunan TA berjalan diselesaikan paling lambat tanggal 29 Januari tahun berikutnya.(KONFIRMASI)
- e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan kepada UAPPA-E1 dan Biro Keuangan dan BMN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan beserta ADK.
 - 1) Laporan Keuangan Triwulan I, selambat-lambatnya tanggal 20 April tahun berjalan

- 2) Laporan Keuangan Semesteran, selambat-lambatnya tanggal 20 Juli tahun berjalan.
- 3) Laporan Keuangan Triwulan III, selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober tahun berjalan.
- 4) Laporan Keuangan Tahunan TA berjalan, selambat-lambatnya tanggal 29 Januari tahun berikutnya.

2.2. UAPPA/B-W Kantor Daerah / Vertikal

- a. Menerima, memvalidasi dan memverifikasi Arsip Data Komputer (ADK) dan menyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja yang diterima dari UAKPA/B-Satker masing-masing Unit Eselon I yang sama di wilayahnya menjadi Laporan Keuangan tingkat Wilayah.
- b. Melakukan koordinasi dengan UAKPA/B Satker pada Unit Eselon I yang sama di wilayahnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas UAPPA/B-W.
- c. Melakukan rekonsiliasi internal data BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan, setiap Semesteran dan Tahunan.
- d. Melakukan rekonsiliasi eksternal data Laporan Realisasi Anggaran dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang AKLAP setiap triwulan. Rekonsiliasi data LRA Tahunan TA berjalan diselesaikan paling lambat tanggal 29 Januari tahun berikutnya (disesuaikan dengan Perdirjen Perbendaharaan yang berlaku mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun).
- e. Melakukan rekonsiliasi eksternal data BMN dengan Kanwil DJKN setiap Semester I, II dan Tahunan, dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi.
- f. Meneliti dan menganalisis data Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca) UAPPA-W hasil penggabungan sebelum dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Wilayah.
- g. Meneliti dan menganalisis data Laporan BMN (Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya dalam SIMAK-

- BMN) UAPPB-W hasil penggabungan sebelum dibuat Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN) Wilayah.
- h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Wilayah (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan dan ADK file kirim & backup SAIBA) UAPPA-W setiap Semesteran dan Tahunan. Untuk Laporan Keuangan Tahunan TA berjalan disampaikan paling lambat tanggal 29 Januari tahun berikutnya kepada UAPPA-E1 dan Biro Keuangan dan BMN, dibuktikan dengan Register Pengiriman.
 - i. Menyusun dan menyampaikan Laporan BMN Wilayah dan ADK UAPPB-W setiap Semester I, II dan tahunan serta Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) kepada UAPPB-E1 dan Biro Keuangan dan BMN.
 - j. Laporan Keuangan ditandatangani oleh penanggungjawab SAI UAPPA/B-W disertai Pernyataan Tanggungjawab (Statement of Responsibility/SOR).
3. Unit Akuntansi Instansi Tingkat Eselon I.
- Tugas Pokok UAPPA-E1
- a. Melakukan penggabungan data Laporan Keuangan tingkat Satker Kantor Pusat dan Tugas Pembantuan, tingkat Wilayah Dekonsentrasi dan Kantor Daerah/Vertikal menjadi Laporan Keuangan tingkat Eselon I, berdasarkan ADK Satker dan Wilayah. Dari aktivitas ini menghasilkan Laporan Keuangan berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca tingkat Eselon I.
 - b. Meneliti dan menganalisis data Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca) UAPPA-E1 hasil penggabungan sebelum dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Eselon I.
 - c. Melakukan rekonsiliasi data Laporan Realisasi Anggaran dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan setiap Semester.

- d. Melakukan *feedback* atas data-data Laporan Realisasi Anggaran yang masih berbeda, kepada Satker terkait untuk dilakukan penelusuran dokumen sumber dan di-entry, sampai tuntas.
- e. Melakukan rekonsiliasi Internal data BMN dengan petugas SIMAK-BMN, dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
- f. Melakukan pembinaan, pendampingan dan koordinasi bersama Satker dan Wilayah dalam rangka penelusuran data Laporan Keuangan, dan mendapatkan informasi penting dan hasil tindak lanjut untuk bahan penyajian dalam Catatan atas Laporan Keuangan Eselon I secara tuntas dan paripurna.
- g. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Eselon I berdasarkan CaLK yang diterima dari Satker Kantor Pusat dan Tugas Pembantuan, dan CaLK dari UAPPA-W Kantor Daerah (Vertikal) dan Dekonsentrasi serta informasi penting lainnya pada Unit Eselon I.
- h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan kepada Biro Keuangan dan BMN selaku UAPA Kementerian Kesehatan berupa : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan CaLK beserta ADK.
 - 1) Laporan Keuangan Triwulan I, selambat-lambatnya tanggal 26 April tahun berjalan.
 - 2) Laporan Keuangan Semesteran, selambat-lambatnya tanggal 25 Juli tahun berjalan.
 - 3) Laporan Keuangan Triwulan III, selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober tahun berjalan.
 - 4) Laporan Keuangan Tahunan TA berjalan (final, setelah direviu) selambat-lambatnya tanggal 8 Februari tahun berikutnya.
- i. Laporan Keuangan ditandatangani oleh pejabat Eselon I selaku penanggungjawab SAI UAPPA/B-E1 disertai Pernyataan Tanggung jawab (*Statement of Responsibility/SOR*).

4. Unit Akuntansi Instansi Tingkat Kementerian

Tugas Pokok UAPA Kementerian Kesehatan

- a. Melakukan penggabungan data Laporan Keuangan tingkat Eselon I menjadi Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan, berdasarkan Arsip Data Komputer Eselon I. Dari aktivitas ini menghasilkan Laporan Keuangan berupa : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca tingkat Kementerian.
- b. Melakukan rekonsiliasi data LRA dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan setiap semester.
- c. Melakukan *feedback* atas data-data Realisasi Anggaran yang masih berbeda, kepada Satker terkait melalui Unit Eselon I, untuk dilakukan penelusuran dokumen sumber dan di-*entry*, sampai tuntas.
- d. Melakukan rekonsiliasi internal data BMN dengan petugas SIMAK-BMN, dibuktikan dengan BAR.
- e. Melakukan pembinaan, pendampingan dan koordinasi bersama UAPPA-W dan UAPPA-E1 dalam rangka penelusuran data Laporan Keuangan, dan memperoleh informasi penting hasil tindak lanjut untuk bahan penyajian Laporan Keuangan Kemenkes secara tuntas dan paripurna.
- f. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan berdasarkan CaLK yang diterima dari Unit Eselon I serta informasi penting lainnya.
- g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan kepada Menteri Keuangan berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan CaLK beserta ADK.
 - 1) Laporan Keuangan Triwulan I, selambat-lambatnya tanggal 7 Mei tahun berjalan.
 - 2) Laporan Keuangan Semesteran, selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan.
 - 3) Laporan Keuangan Triwulan III, selambat-lambatnya tanggal 7 November tahun berjalan.

- 4) Laporan Keuangan Tahunan TA berjalan selambat-lambatnya tanggal terakhir bulan Februari tahun berikutnya.
- 5) Laporan Keuangan termasuk Kata Pengantar dan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility/SOR*) ditandatangani oleh Menteri Kesehatan disertai dengan Pernyataan Telah Dilakukan Reviu dari Inspektur Jenderal.

BAB III LAPORAN KEUANGAN

Kementerian Kesehatan selaku pengguna anggaran dan barang menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan menyusun Laporan Keuangan atas transaksi keuangan dan barang yang berada dalam tanggungjawabnya sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) mencakup Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), Aplikasi Persediaan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Penggabungan data Laporan Barang Milik Negara ke dalam Laporan Keuangan dilakukan secara berjenjang pada setiap jenjang pelaporan setelah data-data BMN telah dilakukan *entry* pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Aplikasi Persediaan.

Unit Akuntansi Instansi (UAI) masing-masing jenjang pelaporan menyusun Laporan Keuangan berupa: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Operasional; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; (4) Neraca; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Terdapat transaksi keuangan dan barang yang secara spesifik terjadi pada beberapa Satker Kementerian Kesehatan, selain itu untuk hal-hal tertentu juga terdapat perubahan kebijakan pengelolaan BMN sehingga memerlukan penyesuaian dalam perlakuan akuntansi. Agar setiap transaksi keuangan dan barang dapat lebih jelas perlakuan akuntansi dan penyajiannya dalam Laporan Keuangan maka telah ditetapkan kebijakan akuntansi Kementerian Kesehatan yang berlaku bagi Satker terkait.

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Untuk mencapai Laporan Keuangan yang berkualitas, seluruh Unit Akuntansi Instansi Kementerian Kesehatan agar melakukan

pencatatan, pembukuan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan barang dengan berpedoman:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Selain berpedoman pada ketentuan di atas, untuk beberapa transaksi keuangan dan barang pada Kementerian Kesehatan yang bersifat khusus perlu diatur tersendiri. Adapun transaksi tersebut antara lain:

1. Dana Jamkesmas

Untuk sisa dana Jamkesmas TA 2013 yang belum disetor ke Kas Negara telah disajikan dalam Laporan Keuangan Satker Setditjen Bina Upaya Kesehatan selaku pengelola DIPA sehingga saldo awalnya:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------|--------|
| 163119 | Dr | Dana Lainnya | Xxx |
| 391121 | Cr | Ekuitas | Xxx |

Informasi sisa dana Jamkesmas TA 2013 yang belum disetor ke Kas Negara berupa (nama Institusi pemberi pelayanan kesehatan dan nilainya) diperoleh dari data rincian saldo pada Laporan Keuangan TA 2014 (*Audited*) yang pada tahun 2015 belum disetorkan ke Kas Negara atau dokumen sumber SSBP (sebagai bahan input) belum diterima pada Satker Setditjen BUK.

Satker penyalur dana Jamkesmas pada Satker Setditjen BUK dengan Kode Satker 466080, dan menyampaikan bukti setor SSBP atau kode biling dari aplikasi Sistem Informasi PNBK Online (SIMPONI), atas bukti setor tersebut diserahkan kepada Unit Eselon I untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data SPAN pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Kesehatan. Terhadap perbedaan antara data SPAN dan SAI maka Unit Eselon I dapat menggunakan data hasil rekonsiliasi sebagai

bahan penelusuran dokumen sumber kepada pihak penyeter atau KPPN setempat. Hasilnya agar *di-entry* oleh Satker terkait.

Pengembalian Dana Jamkesmas Tahun 2013 dicatat sebagai setoran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sebagai pendapatan non operasional. Namun demikian mengingat ekuitas sudah diakui pada tahun sebelumnya maka atas pendapatan tersebut harus dilakukan koreksi.

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 423957 | Dr | Penerimaan Kembali Belanja Bansos TAYL | Xxx |
| 163119 | Cr | Dana Lainnya | xxx |

5. Dana Gaji dan Insentif PTT

Dengan memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per-29/PB/2007 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap, maka terhadap Gaji dan Insentif PTT untuk bulan Desember tahun berjalanyang telah dicairkan dari KPPN tetapi per 31 Desember belum dibayarkan pada tahun berjalan,harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada neraca, dengan jurnal:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------|
| 111821 | Dr | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | Xxx |
| 212191 | Cr | Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya | xxx |

Dalam hal terdapat gaji dan Insentif PTT tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 Desember karena belum diterbitkan SPM/SP2Dnya sehingga belum ada realisasi dari Kas Negara, maka Satker Biro Umum harus mencatat sebagai Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca, dengan jurnal :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------------------------|--------|
| 511411 | Dr | Beban Gaji Dokter dan Bidan PTT | Xxx |
| 212111 | Cr | Belanja Pegawai YMH Dibayar | xxx |

Belanja Pegawai YMH dibayar tersebut dicatat sebesar nilai terutang yang besarnya ditetapkan dan ditandatangani oleh KPA (Kepala Biro Umum).

6. Tunjangan Kinerja Pegawai

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden RI Nomor : 110 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka terhadap Tunjangan Kinerja Pegawai untuk bulan Desember tahun berjalan, yang dananya telah dicairkan dari KPPN tetapi per 31 Desember belum dibayarkan pada tahun berjalan, harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada neraca, dengan jurnal:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------|
| 111821 | Dr | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | Xxx |
| 212191 | Cr | Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya | xxx |

Dalam hal terdapat Tunjangan Kinerja Pegawai tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 Desember, maka Satker Biro Umum Setjen, dan/atau Satker Unit Eselon I terkait harus mencatat sebagai Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca, dengan jurnal :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|--------|
| 511xxx | Dr | Beban Gaji ... (sesuai akun belanjanya pada saat pengeluaran) | Xxx |
| 212111 | Cr | Belanja/Beban Pegawai YMH Dibayar | xxx |

Belanja Pegawai YMH dibayar tersebut dicatat sebesar nilai terutang yang besarnya ditetapkan dan ditandatangani oleh KPA.

7. Setoran PNB yang dilakukan oleh Satker dan Pihak ketiga

Setoran PNB yang dilakukan oleh Satker dan Pihak ketiga merupakan pendapatan yang masih menjadi hak Kementerian Kesehatan. PNB tersebut didasarkan pada bukti setor SSBP yang telah mendapat nomor validasi dari Bank Persepsi dengan penerbitan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2015, sedangkan mulai 1

Januari 2016 setoran menggunakan kode biling dari aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).

a. Setoran Jasa Giro dan Pengembalian Dana Jamkesmas

Seluruh PNBP atas Setoran Jasa Giro dan Pengembalian Dana Jamkesmas Tahun 2013, termasuk setoran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) dan setoran-setoran lainnya harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sebagai pendapatan non operasional.

Satker penyalur dana Jamkesmas pada Satker Setditjen BUK dengan Kode Satker 466080, dan menyampaikan bukti setor SSBP atau kode biling dari aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), atas bukti setor tersebut diserahkan kepada Unit Eselon I untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data SAU pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan.

Terhadap perbedaan antara data SAU dan SAI maka Unit Eselon I dapat menggunakan data hasil rekonsiliasi sebagai bahan penelusuran dokumen sumber kepada pihak penyetor atau KPPN setempat. Hasilnya agar *di-entry* oleh Satker terkait.

b. Pengembalian Gaji PTT

Setoran pengembalian dana gaji Dokter/Bidan PTT, yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) maupun pengembalian belanja TA berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kab/Kota/Dokter/Bidan PTT terkait, disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan menggunakan Kode Satker Biro Umum (465930). Untuk pengembalian belanja atas Dokter/Bidan PTT tahun berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kab/Kota/Dokter/Bidan disetorkan dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan menggunakan Kode Satker Biro Umum (465930).

Dokumen SSBP maupun SSPB dan menyampaikan bukti setor SSBP atau kode biling dari aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dan disampaikan ke Satker Biro Umum untuk dibukukan sebagai "Pendapatan Lain-lain" atau

“Pengembalian Belanja” pada LRA dan “Pendapatan Non Operasional” atau “Beban Non Operasional” pada Laporan Operasional pada Laporan Keuangan Satker Biro Umum.

5. Satker Vertikal Pemungut PNBP dan penggunaan akun PNBP

Melakukan langkah-langkah penyelesaian antara lain :

- a. Satker Vertikal pemungut dan pengguna PNBP agar mencantumkan Estimasi Pendapatannya dalam DIPA. Apabila masih terdapat Satker yang belum mencantumkan Estimasi PNBP, segera melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.
- b. Memperhatikan Perdirjen Nomor PER-80/PB/2011, pendapatan BLU hasil pemanfaatan dana seperti bunga/jasa giro atas dana PNBP BLU, agar dicatat sebagai “Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya” pada akun “424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU”.
- c. Estimasi dan realisasi PNBP Satker Non BLU menggunakan akun “423 Pendapatan PNBP Lainnya” dengan rincian akun:

| PENDAPATAN PNBP LAINNYA | |
|-------------------------|--|
| 4231 | Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) |
| 4232 | Pendapatan Jasa |
| 4235 | Pendapatan Pendidikan |
| 4237 | Pendapatan Iuran dan Denda |
| 4239 | Pendapatan Lain-lain |

Estimasi dan realisasi PNBP Satker BLU menggunakan akun “424 Pendapatan BLU” dengan rincian akun :

| | |
|------|---------------------------------------|
| 424 | PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM |
| 4241 | Pendapatan Jasa Layanan Umum |
| 4242 | Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum |
| 4243 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLU |
| 4249 | Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya |

Akun PNBP secara rinci (6 digit) dapat dilihat pada Lampiran tentang BAS “LRA”. Apabila masih terdapat transaksi PNBP yang belum tertampung pada BAS sesuai pedoman ini, agar dilihat pada tabel referensi dalam aplikasi SAIBA. Jika belum ada pada tabel referensi agar

berkonsultasi dengan KPPN/Dit. APK/Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.

6. Penyajian Saldo Piutang dalam Neraca

Berdasarkan jenisnya, Piutang dibedakan menjadi :

- a. Piutang PNBP berdasarkan pungutan pendapatan negara yang didukung adanya Surat Penagihan, meliputi:
 - 1) Piutang hasil pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan kesehatan lainnya.
 - 2) Piutang hasil pelayanan pendidikan.
 - 3) Piutang pendapatan Lainnya.
- b. Piutang PNBP berdasarkan perikatan, dalam bentuk pemanfaatan fasilitas/jasa milik Kementerian Kesehatan yang didukung naskah perjanjian sewa-menyewa, berupa:
 - 1) Penyewaan Gedung Kantor
 - 2) Penyewaan Rumah Dinas
- c. Piutang PNBP karena Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, yang didukung dengan bukti, berupa:
 - 1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), untuk TP/TGR yang penyelesaiannya dilakukan secara damai.
 - 2) Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, untuk TP/TGR yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan.

Terhadap TP-TGR yang belum didukung SKTJM atau Surat Ketetapan, tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Catatan:

- 1) Piutang PNBP pelayanan rumah sakit dan kesehatan lainnya berdasarkan pungutan pendapatan Negara, yang dijamin pihak ketiga (BPJS, Jamkesda, Perusahaan, dll):
 - a) Piutang yang dicatat di neraca didasarkan pada hasil verifikasi pihak penjamin yang dibuktikan dengan terbitnya Berita Acara Verifikasi atau dokumen sejenis dan dicatat sebagai Piutang Lancar.
(d disesuaikan seperti angka hasil audit TA 2014, dan piutang macet, setelah 1 tahun mengalami kemacetan)

- b) Apabila sampai dengan akhir periode penyusunan Laporan Keuangan Unaudited besaran nilai tagihannya belum ditetapkan, tidak disajikan dalam neraca tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK sesuai kondisi (dalam proses melengkapi dokumen, dalam proses verifikasi), dengan menyebutkan jumlah kisaran piutang pada kondisi tersebut.
 - c) Apabila sampai dengan akhir periode penyusunan Laporan Keuangan Audited besaran nilai tagihannya belum ditetapkan, maka disajikan dalam neraca sebagai piutang dan pendapatan sebesar estimasi dan diungkapkan secara memadai pada CaLK.
- 2) Piutang PNBp pelayanan pendidikan, diakui sebesar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang belum dibayar oleh Mahasiswa pada akhir periode pelaporan. Untuk hal ini KPA membuat dan menandatangani daftar piutang PNBp berdasarkan nilai SPP yang belum dibayar sebagai dokumen pendukung pencatatan piutang.
7. Penyajian Saldo Utang dalam Neraca
- a. Utang kepada pihak ketiga adalah utang yang timbul dari kegiatan operasional (pelayanan rumah sakit dan kesehatan lainnya, dan pelayanan pendidikan) terdiri dari: Belanja yang masih harus dibayar, honor, dan lain-lain.

Utang kepada pihak ketiga dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diterima dari pihak ketiga tetapi belum dilakukan pembayaran. Pencatatan di neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan dengan jurnal :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 52xxxx | Dr | Beban Barang sesuai akun peruntukannya | xxx |
| 212112 | Cr | Belanja Barang YMH Dibayar | xxx |

- b. Pendapatan diterima dimuka adalah merupakan penerimaan dari pihak lain (mahasiswa, pasien, vendor, STR

dokter/dokter gigi/apoteker/bidan dll) sebagai pembayaran jasa tetapi Satker belum memberikan pelayanan.

Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar nilai kas yang diterima tetapi belum memberikan barang/jasa kepada pihak lain. Pencatatan di Neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku (sampai sekarang masih pada akhir tahun saja), dengan jurnal:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|----------------|--------|--|--------|
| 423/ 424xxx | Dr | Pendapatan(sesuai karakteristik dan | xxx |
| 312211 | Cr | Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka | xxx |

Pada akhir periode pelaporan untuk mencatat Pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan, dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|----------------|--------|--|--------|
| 312211 | Dr | Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka | xxx |
| 423/ 424xxx | Cr | Pendapatan(sesuai karakteristik dan akunnya) | Xxx |

8. Penatausahaan dan Penyisihan Piutang PNBPN

- a. Penatausahaan Piutang PNBPN agar mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- b. Penyisihan Piutang PNBPN dilakukan terhadap nilai piutang yang disajikan dalam Neraca.

Penyisihan Piutang PNBPN mengacu pada PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, PMK Nomor

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

- c. Penagihan, penyisihan dan penghapusan piutang Kementerian Kesehatan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/X/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Kementerian Kesehatan.
9. Konsolidasi Laporan Keuangan Satker BLU ke Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 27 bahwa:

- a. Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- b. Penggabungan Laporan Keuangan Satker BLU pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mengoptimalkan konsolidasi Laporan Keuangan Satker BLU dalam Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan beberapa hal harus diperhatikan pada Satker Badan Layanan Umum :

- a. Melakukan tutup tahun anggaran (*cut-off*) periode pelaporan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- b. Memproses secara tuntas penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari KPPN setempat atas seluruh pendapatan dan belanja bersumber PNBPN.
- c. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), Aplikasi Persediaan, dan SIMAK-BMN secara akurat dan berkualitas yang mencakup seluruh transaksi keuangan dan barang dilengkapi dokumen sumber yang memadai.

- d. Menyampaikan Laporan Keuangan berbasis SAP secara berjenjang dan tepat waktu kepada Menteri Kesehatan, dilampirkan Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
 - e. Melakukan sinkronisasi akun atas transaksi keuangan dan barang berdasarkan dokumen sumber yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan. Apabila terdapat perbedaan saldo masing-masing akun dari dua jenis laporan tersebut agar dibuat mapping dan menjadi kertas kerja pendukung dalam proses penyusunan Laporan Keuangan.
10. Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa yang diperoleh dari Pihak Ketiga

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Satker penerima hibah langsung agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa Satker Non BLU mengacu kepada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

Hibah Uang:

- 1) Penggunaan hibah langsung bentuk Uang/Barang/Jasa yang diterima dari pihak ketiga pengesahannya agar mengikuti ketentuan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
- 2) Berdasarkan BAST maka satker melakukan penginputan secara manual dalam aplikasi SAIBA:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|--------|
| 111827 | Dr | Kas Lainnya di K/L dari hibah yang Belum disahkan | xxx |
| 218211 | Cr | Hibah Langsung Yang Belum Disahkan | xxx |

- 3) Setelah Disahkan, berdasarkan dokumen SP2HL dan SPHL yang sudah dientry maka akan terbentuk jurnal secara otomatis pada aplikasi SAIBA:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 111822 | Dr | Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah | xxx |
| 391131 | Cr | Pengesahan Hibah Langsung | xxx |
| 218211 | Dr | Hibah Langsung Yang Belum Disahkan | xxx |
| 111827 | Cr | Kas Lainnya di K/L dari hibah yang Belum disahkan | xxx |

- 4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun masih terdapat saldo hibah yang telah disahkan namun belum dipakai seluruhnya untuk membiayai pengeluaran maka di Buku Besar Akrual/Neraca akan muncul dalam aplikasi SAIBA secara otomatis dengan jurnal :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 111822 | Dr | Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah | xxx |
| 391131 | Cr | Pengesahan Hibah Langsung | xxx |

Sedangkan apabila terdapat saldo dana hibah yang belum disahkan ke KPPN maka disajikan secara manual pada:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|--------|
| 111827 | Dr | Kas Lainnya di K/L dari hibah yang Belum disahkan | xxx |
| 218211 | Cr | Hibah Langsung Yang Belum Disahkan | xxx |

Untuk sisa dana hibah berupamata uang selain rupiah agar dikonversi dengan nilai rupiah menggunakan kurs tengah BI per tanggal pelaporan.

Hibah Barang:

- 1) Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka pada SAIBA diinput dalam aplikasi SAIBA:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 1xxxxx | Dr | Aset Tetap/Persediaan Belum Diregister | xxx |
| 218211 | Cr | Hibah Langsung Yang Belum Disahkan | xxx |

- 2) Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka pada diinput dalam aplikasi Persediaan/SIMAK BMN:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 1xxxxx | Dr | Aset Tetap/Persediaan | xxx |
| 1xxxxx | Cr | Aset Tetap/Persediaan Belum Diregister | xxx |

- 3) Berdasarkan Persetujuan MPHL BJS maka pada diinput dalam aplikasi SAIBA sehingga terbentuk jurnal:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------------------------|--------|
| 218211 | Dr | Hibah Langsung Yang Belum Disahkan | xxx |
| 391131 | Cr | Pengesahan Hibah Langsung | xxx |

Hibah Jasa:

- 1) Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka pada SAIBA diinput dalam aplikasi SAIBA terbentuk jurnal :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------------------------|--------|
| 52xxxx | Dr | Beban Jasa ...(sesuai akun) | xxx |
| 218211 | Cr | Hibah Langsung Yang Belum Disahkan | xxx |

- 2) Berdasarkan Persetujuan MPHL BJS maka pada diinput dalam aplikasi SAIBA sehingga terbentuk jurnal:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------------------------|--------|
| 218211 | Dr | Hibah Langsung Yang Belum Disahkan | xxx |
| 391131 | Cr | Pengesahan Hibah Langsung | xxx |

b. Hibah Uang/Barang/Jasa Satker BLU mengikuti ketentuan dalam pengelolaan BLU

1) Hibah berbentuk uang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk uang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU bukan sebagai pendapatan BA 999.02 (Pengelola Hibah) sehingga tidak perlu melakukan registrasi hibah kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Dalam hal BLU menggunakan pendapatan hibah tersebut untuk mendanai pengeluaran belanja, Satker BLU melakukan revisi DIPA (jika pagu atas belanja terkait sudah terlampaui, tidak ada atau kurang). Selanjutnya pendapatan dan realisasi belanja yang didanai dari hibah di cantumkan dalam surat SP3B dan disampaikan kepada KPPN untuk mendapat pengesahan menjadi SP2B.

2) Hibah berbentuk barang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk Barang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran melainkan hanya dilaporkan dalam Laporan Operasional.

3) Hibah berbentuk Jasa

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk Jasa mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan No. S-6332/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran melainkan hanya dilaporkan dalam Laporan Operasional

11. Pengakuan, Pencatatan dan Pelaporan Barang Persediaan
 - a. Pembukuan Persediaan yang diperoleh dari APBN dilakukan pada Aplikasi Persediaan-sub sistem SIMAK-BMN oleh Satker yang mengadakan persediaan.
 - b. Pengalihan/Hibah BMN (Aset tetap dan Persediaan) Kemenkes kepada SKPD/pihak lain tanpa memperoleh penggantian mengacu pada PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.
 - c. Penyerahan Pengalihan/hibah BMN tersebut dibuktikan dengan penandatanganan BAST sementara antara kedua belah pihak. BMN tersebut masih dicatat dan dilaporkan oleh Satker yang mengadakan/mengirimkan sampai dengan diterbitkannya persetujuan hibah dari Pengelola Barang dan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang.
 - d. Setiap perubahan/mutasi BMN dan koreksi nilai BMN harus didasarkan BAST, dokumen kepemilikan, memo penyesuaian dan dokumen lainnya yang sah.
 - e. Satker RS BLU dapat membukukan barang Persediaan Farmasi menggunakan Aplikasi Persediaan Farmasi selain Aplikasi Persediaan-SIMAK-BMN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.
 - f. Pelaporan barang persediaan Satker RS BLU pada setiap periode pelaporan wajib disajikan melalui Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN sebagaimana dimaksud dalam surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1284/PB.6/2011 perihal Aplikasi Barang Persediaan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kodifikasi barang persediaan yang belum terakomodir dalam *database* Aplikasi Persediaan dapat menggunakan kodifikasi barang yang mendekati.
 - 2) Barang Persediaan yang dikarenakan keterbatasan aplikasi Persediaan sesuai SAP khususnya pada Satuan Kerja BLU Rumah Sakit dapat dilaporkan secara global/Per jenis barang dan sub-sub kelompok disajikan

berdasarkan *stock opname* (diinput dengan menu *stock opname* pada aplikasi persediaan sebesar selisih *stock opname* setelah dikurangi saldo awal), dengan tetap memperhitungkan nilai pembelian maupun beban agar dapat disajikan didalam aplikasi SAIBA. Adapun jurnal yang harus dilakukan :

a) Jika nilai pembelian persediaan dapat diketahui maka Satuan Kerja terkait harus melakukan langkah – langkah penjurnalan di aplikasi SAIBA sebagai berikut :

(1) Diinput dengan menu *stock opname* pada aplikasi persediaan sebesar selisih *stock opname* setelah dikurangi saldo awal, dengan jurnal yang terbentuk otomatis :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 117xxx | Dr | Persediaan ... | Xxx |
| 593xxx | Cr | Beban Persediaan ... | xxx |

(2) Jurnal Pembelian Persediaan (di jurnal berdasarkan nilai pembelian)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 117xxx | Dr | Persediaan ... | Xxx |
| 1179xx | Cr | Persediaan belum deregister | xxx |

3) Pencatatan Beban Persediaan berdasarkan *stock opname* (saldo awal ditambah pembelian dikurangi hasil *stock opname*) maka di jurnal sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 593xxx | Dr | Beban Persediaan ... | Xxx |
| 117xxx | Cr | Persediaan ... | xxx |

4) Pencatatan Beban Barang diinput melalui jurnal penyesuaian beban aset (kategori nomer 19) dengan jurnal :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 1179xx | Dr | Persediaan belum deregister | Xxx |
| 5251xx | Cr | Beban Barang ... | xxx |

b) Jika beban persediaan dapat diketahui maka Satuan Kerja terkait harus melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- (1) Diinput dengan menu *stock opname* pada aplikasi persediaan sebesar selisih *stock opname* setelah dikurangi saldo awal, dengan jurnal yang terbentuk otomatis dalam Aplikasi Persediaan :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------|--------|
| 117xxx | Dr | Persediaan ... | Xxx |
| 593xxx | Cr | Beban Persediaan. | xxx |

- (2) Jurnal beban persediaan (berdasarkan nilai beban persediaan yang dihitung)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 593xxx | Dr | Beban Persediaan ... | Xxx |
| 117xxx | Cr | Persediaan... | xxx |

- (3) Jurnal Pembelian Persediaan (di jurnal berdasarkan nilai pembelian)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 117xxx | Dr | Persediaan ... | xxx |
| 1179xx | Cr | Persediaan belum diregister | xxx |

- (4) Pencatatan Beban Barang diinput melalui jurnal penyesuaian beban aset dengan jurnal :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 1179xx | Dr | Persediaan belum deregister | xxx |
| 5251xx | Cr | Beban Barang ... | xxx |

Catatan : Persediaan kadaluarsa, rusak berat, usang berdasarkan *stock opname* yang dilakukan Satker dihapusbukukan dari Neraca melalui aplikasi Persediaan/SIMAK BMN. Selanjutnya Satker secara berjenjang segera mengusulkan penghapusan persediaan tersebut kepada Pengelola Barang.

12. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Jika Satker mempunyai KDP berbentuk fisik, penghapusan KDP tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Dalam hal KDP yang tidak berbentuk fisik seperti : dokumen perencanaan, honor, dll, penghapusan KDP tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Pengelola Barang, cukup dengan surat pernyataan KPA yang menginformasikan bahwa pembangunan fisik tidak dilanjutkan lagi.

Jurnal Penghapusan KDP :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------------------|--------|
| 53xxxx | Dr | Beban Kerugian Pelepasan Aset | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |

13. BMN pada Satuan Kerja yang tidak menerima DIPA pada TA berjalan (Satker Non Aktif)

Satker Sekretariat Ditjen/Sekretariat Badan dan Biro Keuangan dan BMN selaku penanggungjawab Unit Eselon I Setjen bertanggungjawab untuk melaporkan BMN yang berada pada Satker Non Aktif di lingkungan Unit Eselon I masing-masing.

14. BMN (Aset Tetap) BLU yang masih harus dibayar

Sesuai dengan karakteristik BLU, Satker BLU dapat memperoleh aset tetap melalui utang. Jika Satker BLU memperoleh aset definitif melalui utang, aset tersebut dicatat sebagai aset BLU dan mengakui adanya utang. Adapun jurnal pengakuan aset sebagai berikut :

Jurnal Penyesuaian Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 13xxxx | Dr | Aset Tetap belum diregister | Xxx |
| 212113 | Cr | Belanja Modal yang masih harus dibayar | xxx |

Jurnal yang terbentuk dari SIMAK BMN:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 13xxxx | Dr | Aset Tetap | Xxx |
| 13xxxx | Cr | Aset Tetap belum diregister | xxx |

Jurnal Reklas Aset Tetap BLU:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------------------------|--------|
| 13xxxx | Dr | Aset Tetap BLU | Xxx |
| 13xxxx | Cr | Aset Tetap BLU Belum Diregister | xxx |

Aset tetap BLU yang diperoleh dari utang disusutkan sejak aset tetap tersebut dimiliki/dikuasai oleh Satker BLU. Untuk itu Satker BLU ketika memperoleh aset tetap dimaksud memasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN melalui menu transaksi BMN “pembelian” dengan menggunakan tanggal dan nomor BAST. Pencatatan aset tetap tersebut menyebabkan terjadinya selisih antara penambahan aset tetap dengan realisasi belanja modal pada periode pencatatan aset tetap maupun pada periode pembayaran utang. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada saat pembayaran hutang, SP3B/SP2B yang diterbitkan oleh Satker BLU tidak perlu dimasukan lagi ke SIMAK BMN.

15. Kerjasama Operasi/Kemitraan Satker BLU dengan Pihak Ketiga

Kerjasama Operasi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Kerjasama operasi tersebut didasarkan pada peraturan Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (PA BLU) maupun Pedoman Akuntansi BLU yang mengatur Kerjasama operasi pada BLU Poltekes.

16. Pencatatan BMN yang berasal dari DK/TP

- a. Jika Satker DK/TP merealisasikan belanja untuk penunjang kegiatan menggunakan Belanja Barang (52....) maka aset dicatat dalam Aplikasi Persediaan dan penghibahan mengacu PMK Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dengan batas

waktu enam bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut belum dihibahkan, maka direklasifikasi menjadi aset tetap dan proses penghibahannya mengacu PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.

- b. BMN dibawah penguasaan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum tahun 2011 dan BMN yang telah diserahkan kepada pihak ketiga tidak disajikan sebagai aset pada Neraca Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja, Wilayah, Eselon I, dan Kemenkes tetapi tetap dicatat di Aplikasi SIMAK-BMN untuk penatausahaan dengan menggunakan menu "Penghentian BMN dari Penggunaan".
- c. Proses Hibah BMN Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum tahun 2011 mengacu kepada PMK Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.
- d. Mencatat BMN penunjang kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran berjalan dalam aplikasi persediaan termasuk barang penunjang kegiatan Dekonsentrasi yang menggunakan akun 52xx.
- e. Melakukan proses reklasifikasi BMN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum tahun anggaran 2011 menjadi "Aset yang diberhentikan dari operasional pemerintah/Aset lain-lain" sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 98/PMK.06/2013.
- f. Dalam hal aset berbentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sesuai dengan paragraf 15 PSAP 08 menyatakan bahwa "Suatu KDP akan dipindahkan ke pos Aset tetap jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan dengan dokumen sumber Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)".

17. Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset tetap dalam Neraca Kementerian Kesehatan

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Untuk aset yang dibeli dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni disusutkan selama satu semester pada Laporan Keuangan Semesteran, sedangkan untuk aset yang dibeli dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember disusutkan selama satu semester pada Laporan Keuangan Tahunan.

Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Masa Manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang TabelMasa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

| Kelompok Aset tetap | Masa Manfaat |
|--|-----------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d 20 Tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d 50 Tahun |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5 s.d 40 Tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 Tahun |

Selanjutnya untuk penerapan ke dalam LO dan Neraca dijabarkan lebih rinci sampai dengan disajikan dalam ilustrasi jurnal transaksi masing-masing akun.

18. Klaim Biaya Pelayanan

Selisih klaim biaya pelayanan kepada BPJS, Jamkesda, Asuransi, dan selisih klaim pasien Non PBI yang berpotensi tidak terbayar menimbulkan beban yang harus ditanggung rumah sakit sehingga tidak disajikan sebagai pendapatan, namun dicatat sebagai beban operasional Rumah Sakit (beban biasa) yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Secara umum akun Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan pada Laporan Realisasi Anggaran pada Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah sebagaimana tertuang dalam Bagan Akun Standar (BAS) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Untuk memudahkan pemilihan dalam penggunaan akun, pada buku pedoman ini telah dilakukan pemilahan atas akun-akun yang digunakan pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca Kementerian Kesehatan.

Akun yang disajikan pada lembar muka (*face*) Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pos Pendapatan Negara menurut sumber Pendapatan

PNBP diambil dari nama dan kode akun pendapatan (tiga digit), dan Pos Belanja Negara menurut jenis belanja diambil dari nama dan kode akun belanja (dua digit). Akun yang disajikan pada lembar muka (*face*) Laporan Operasional, yaitu Pendapatan Operasional, Beban Operasional, Pendapatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO. Akun yang disajikan pada lembar muka (*face*) Neraca, yaitu Pos Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas diambil dari nama dan kode akun Neraca (empat digit). Selanjutnya secara rinci nama dan kode akun sampai dengan enam digit yang digunakan untuk jurnal transaksi disajikan dalam lampiran.

Akun Pendapatan-Belanja pada LRA dan Pendapatan LO-Beban pada LO disajikan sebagai yang dijabarkan dalam akuntansi keuangan, sebagai berikut :

1. AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan (basis kas) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah dan/atau penerimaan BLU yang berasal dari kegiatan operasional maupun non operasional BLU.

- a. Pendapatan Kementerian Kesehatan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (tiga digit) terdiri dari:
 - 1) 423 Pendapatan PNBP Lainnya; dan
 - 2) 424 Pendapatan Badan Layanan Umum.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Bendahara Umum Negara (BUN), sedangkan untuk Pendapatan BLU diakui pada saat terbit SP2B.
- c. Anggaran Pendapatan berupa Estimasi/Target Pendapatan.
- d. Anggaran Pendapatan dicatat pada saat DIPA disahkan, dengan jurnal:

Jurnal Anggaran Pendapatan

Untuk akun Pendapatan yang terdapat di ayat jurnal hanya dengan 3 (tiga) digit, dimana akun 6 (enam) digitnya disesuaikan dengan jenis PNBP Satker didalam DIPA.

Satker Non BLU

| | | | |
|--------|----|---------------------------------------|-----|
| 423xxx | Dr | Estimasi Pendapatan Yang Dialokasikan | xxx |
| 219711 | Cr | Utang Kepada KUN | xxx |

Satker BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 424xxx | Dr | Estimasi Pendapatan | xxx |
| 219721 | Cr | Utang Kepada Kas BLU | xxx |

- e. Pendapatan (berbasis kas) dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya.

Pengembalian atas pendapatan yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

- f. Akuntansi Pendapatan akan menghasilkan LRA Pendapatan yang menggambarkan realisasi pendapatan dibandingkan dengan estimasi/target pendapatan per periode pelaporan.

Jurnal Realisasi Pendapatan Satker non BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------|--------|
| 219711 | Dr | Utang Kepada KUN | xxx |
| 423xxx | Cr | Pendapatan | xxx |

Jurnal Pengembalian Pendapatan Satker non BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------------|--------|
| 423XXX | Dr | Pengembalian Pendapatan | xxx |
| 219711 | Cr | Utang Kepada KUN | xxx |

Jurnal Realisasi Pendapatan Satker BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 219721 | Dr | Utang Kepada Kas BLU | xxx |
| 424xxx | Cr | Pendapatan BLU | xxx |

Jurnal Pengembalian Pendapatan Satker BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 424xxx | Dr | Pengembalian Pendapatan BLU | xxx |
| 219721 | Cr | Utang Kepada Kas BLU | xxx |

- g. Pendapatan (berbasis Akrual), adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan berbasis akrual adalah Pendapatan berbasis kas ditambah/dikurangi Pendapatan yang Masih Harus Diterima dan Pendapatan Diterima di muka.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh Satker karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih Satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima timbul karena imbalan atas pelayanan/fasilitas yang telah diberikan Satker kepada pihak lain belum diterima. Pada Neraca, pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai piutang.

Jenis transaksi pendapatan yang masih harus diterima di Kemenkes adalah Penerimaan PNBPN yang masih harus diterima (Piutang PNBPN) seperti PNBPN Lainnya yang Masih Harus Diterima antara lain: Pendapatan Penjualan dan Sewa, Pendapatan Jasa, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Iuran dan Denda, serta Pendapatan Lain-lain.

Jurnal Realisasi Pendapatan (PNBPN) yang Masih Harus Diterima

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------|--------|
| 114311 | Dr | Pendapatan Yang Masih Diterima | xxx |
| 423XXX | Cr | Pendapatan PNBP | xxx |

Pendapatan Diterima di Muka(Satker Non BLU) adalah pendapatan yang diterima dan sudah disetor ke Rekening KUN, namun pihak ketiga belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari Satker.

Pendapatan Diterima di Muka timbul pada saat Satker telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pada Neraca, Pendapatan Diterima di Muka disajikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

Jenis transaksi pendapatan diterima di muka di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah PNBP diterima di muka. Contohnya Pendapatan Sewa Aset.

Jurnal Realisasi Pendapatan Diterima di muka

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 423XXX | Dr | Pendapatan PNBP | xxx |
| 219212 | Cr | Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka | xxx |

Pendapatan Diterima di Muka (Satker BLU) adalah pendapatan yang diterima dan sudah disahkanoleh BUN, namun pihak ketiga belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari Satker.

Pendapatan Diterima di Muka timbul pada saat Satker telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pada Neraca, Pendapatan Diterima di Muka disajikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

Jenis transaksi pendapatan diterima di muka di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah PNBP diterima di muka. Contohnya Pendapatan Sewa Aset

Jurnal Realisasi Pendapatan Diterima di muka

| Kode Akun | Posisi | Uraian | |
|-----------|--------|--------|--|
| | | | |

| | | | Jumlah |
|--------|----|--|--------|
| 424XXX | Dr | Pendapatan PNPB BLU | xxx |
| 219212 | Cr | Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka | xxx |

h. Akun Pendapatan

- 423 Pendapatan PNPB Lainnya, dengan nama dan kode akun (empat digit dan lima digit), berlaku pada SatkerNon BLU dan Satker BLU (untuk PNPB Non Tupoksi) terdiri dari:
- 4231 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
- 42311 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
- 42312 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
- 42314 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
- 4232 Pendapatan Jasa
- 42321 Pendapatan Jasa I
- 42322 Pendapatan Jasa II
- 42324 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
- 42329 Pendapatan Jasa Lainnya
- 4235 Pendapatan Pendidikan
- 42351 Pendapatan Pendidikan
- 4236 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
- 42361 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
- 4237 Pendapatan Iuran dan Denda
- 42375 Pendapatan Denda
- 4239 Pendapatan Lain-lain
- 42391 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu
- 42392 Pendapatan Pelunasan Piutang
- 42393 Pendapatan dari Penutupan Rekening
- 42399 Pendapatan Lain-lain
- 424 Pendapatan Badan Layanan Umum, dengan nama dan kode akun (empat digit dan lima digit), berlaku hanya pada Satker BLU, terdiri dari:

| | |
|-------|---|
| 4241 | Pendapatan Jasa Layanan Umum |
| 42411 | Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat |
| 4242 | Pendapatan Hibah – Badan Layanan Umum |
| 42421 | Pendapatan Hibah Terikat |
| 42422 | Pendapatan Hibah Tidak Terikat |
| 4243 | Pendapatan Hasil Kerja Sama – BLU |
| 42431 | Pendapatan Hasil Kerja Sama – BLU. |
| 4249 | Pendapatan BLU Lainnya |
| 42491 | Pendapatan BLU Lainnya |

Secara rinci kode dan nama PNBPN akun enam digit yang digunakan dalam jurnal transaksi disajikan dalam Lampiran tentang Bagan Akun Standar “Laporan Realisasi Anggaran”. Apabila masih terdapat transaksi PNBPN yang belum tertampung pada BAS sesuai pedoman ini, agar dilihat pada tabel referensi dalam aplikasi SAIBA. Jika belum ada pada tabel referensi dalam aplikasi agar berkonsultasi dengan KPPN/Dit. APK/Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.

2. AKUNTANSI BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Untuk akun Belanja yang terdapat di ayat jurnal hanya dengan 2 (dua) digit, dimana akun 6 (enam) digitnya disesuaikan dengan Jenis Belanja masing-masing Satker didalam DIPA.

- a. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Jurnal standar akan langsung terbentuk ketika alokasi DIPA/anggaran di *entry* ke dalam aplikasi.

Jurnal Anggaran Belanja

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 115612 | Dr | Piutang dari KPPN | xxx |
| 115631 | Dr | Piutang dari Kas BLU | xxx |
| 51xxxx | Cr | Allotment Belanja Pegawai | xxx |
| 52xxxx | Cr | Allotment Belanja Barang | xxx |
| 53xxxx | Cr | Allotment Belanja Modal | xxx |
| 57xxxx | Cr | Allotment Belanja Bantuan Sosial | xxx |
| 525XXX | Cr | Allotment Belanja Barang BLU | xxx |
| 537XXX | Cr | Allotment Belanja Modal BLU | xxx |

- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening KUN atau pada saat terbitnya SP2B untuk Satker BLU. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN setelah diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D).
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Kemenkes yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial.
- d. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja Kementerian Kesehatan, adalah:
- 1) Belanja Operasi, terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Bantuan Sosial.
 - 2) Belanja Modal, terdiri dari: Belanja Aset Tetap dan Belanja Aset Lainnya.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, penggunaannya meliputi: Perolehan tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, Aset tetap lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) serta Aset tidak berwujud dan Aset lain-lain.

Koreksi atas pengeluaran belanja (Penerimaan Kembali Belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja

dibukukan sebagai Pengurang Belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai Pendapatan lain-lain.

Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri dari:

- 024.01. Sekretariat Jenderal
- 024.02. Inspektorat Jenderal
- 024.03. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- 024.04. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
- 024.05. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 024.07. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 024.11. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- 024.12. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Kementerian Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yakni:

(02) Pelayanan umum

(07) Kesehatan

- 07.01 Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 07.02 Pelayanan Kesehatan Perorangan
- 07.03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- 07.05 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- 07.90 Kesehatan Lainnya

- e. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- f. Akuntansi Belanja akan menghasilkan LRA Belanja yang menggambarkan realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran per periode pelaporan.

Jurnal Realisasi Belanja Satker Non BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------|--------|
| 51xxx | Dr | Belanja Pegawai | xxx |
| 52xxxx | Dr | Belanja Barang | xxx |
| 53xxxx | Dr | Belanja Modal | xxx |
| 57xxx | Dr | Belanja Bansos | xxx |
| 115612 | Cr | Piutang dari KPPN | xxx |

Jurnal Realisasi Belanja Satker BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 525xxx | Dr | Belanja Barang BLU | xxx |
| 537xxx | Dr | Belanja Modal BLU | xxx |
| 115631 | Cr | Piutang dari Kas BLU | xxx |

- g. Beban adalah penurunan manfaat secara ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban AkruaI antara lain:

Belanja yang masih harus dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

Belanja yang masih harus dibayar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima Kementerian Kesehatan namun sampai pada akhir periode laporan belum dilaporkan pembayaran/pelunasan atas hak tersebut kepada pegawai dan/atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban kepada pegawai dan barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya.
- 2) Kewajiban yang timbul akibat perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan yang ada, seperti belanja bantuan sosial, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan realisasi atas perjanjian komitmen tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini mengatur kewajiban

satu arah dari Kementerian Kesehatan tanpa ada hak atas barang/jasa yang diterima.

Jenis transaksi belanja yang masih harus dibayar terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar, yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pegawai, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Kementerian Kesehatan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat penyusunan laporan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

Jurnal Belanja Pegawai YMH Dibayar

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 51xxxx | Dr | Beban Gaji | xxx |
| 212111 | Cr | Belanja Pegawai YMH Dibayar | xxx |

- 2) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, terdiri dari:
 - a) Belanja barang/jasa yang masih harus dibayar.
 - b) Belanja pemeliharaan yang masih harus dibayar.
 - c) Belanja perjalanan yang masih harus dibayar.

Jurnal Belanja Barang YMH Dibayar

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------|--------|
| 52XXXX | Dr | Beban Barang | xxx |
| 212112 | Cr | Belanja Barang YMH Dibayar | xxx |

- 3) Belanja modal yang masih harus dibayar, yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Satker untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

Jurnal Belanja Modal YMH Dibayar

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------------------|--------|
| 1XXXX | Dr | Aset Tetap | xxx |
| 212113 | Cr | Belanja Modal YMH Dibayar | xxx |

4) Belanja Bantuan Sosial yang masih harus dibayar

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Jurnal Belanja YMH Dibayar

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------------------------|--------|
| 57XXXX | Dr | Beban Bantusn Sosial | xxx |
| 212115 | Cr | Belanja Bantuan Sosial YMH Dibayar | xxx |

5) Belanja Dibayar Dimuka

Merupakan pengeluaran Satker yang telah dibayarkan dari rekening KUN dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati oleh Satker.

Beban belanja dibayar dimuka diakui ketika Satker mempunyai hak klaim untuk mendapatkan atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Jurnal Belanja Dibayar di muka

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------|--------|
| 114111 | Dr | Belanja Pegawai Dibayar Dimuka | xxx |
| 114112 | Dr | Belanja Barang Dibayar Dimuka | xxx |
| 51XXXX | Cr | Beban Pegawai | xxx |
| 52XXXX | Cr | Beban Barang | xxx |

h. Akun Belanja

Akun Belanja menurut Jenis Belanja yang digunakan pada Satker Kementerian Kesehatan dengan nama dan kode akun, terdiri dari:

- 51 Belanja Pegawai
- 511 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

- 5114 Belanja Gaji Dokter PTT
- 5115 Belanja Gaji dan Tunjangan NonPNS
- 512 Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito
- 5121 Belanja Honorarium
- 5122 Belanja Lembur
- 5123 Belanja Vakasi
- 5124 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito
- 513 Belanja Kontribusi Sosial
- 5131 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
- 5132 Belanja Asuransi Kesehatan
- 52 Belanja Barang
- 521 Belanja Barang
- 5211 Belanja Barang Operasional
- 5212 Belanja Barang Non Operasional
- 5216 Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
- 522 Belanja Jasa
- 5221 Belanja Jasa
- 5223 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
- 523 Belanja Pemeliharaan
- 5231 Belanja Pemeliharaan
- 524 Belanja Perjalanan
- 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
- 5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri
- 525 Belanja Badan Layanan Umum
- 5251 Belanja Barang BLU
- 526 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
- 5261 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 5262 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
- 5263 Belanja Barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

| | |
|------|---|
| 53 | Belanja Modal |
| 531 | Belanja Modal Tanah |
| 5311 | Belanja Modal Tanah |
| 532 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
| 5321 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
| 533 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| 5331 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| 534 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| 5341 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| 535 | Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi |
| 5351 | Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi |
| 536 | Belanja Modal Lainnya |
| 5361 | Belanja Modal Lainnya |
| 537 | Belanja Modal Badan Layanan Umum |
| 5371 | Belanja Modal BLU |
| 57 | Belanja Bantuan Sosial |
| 571 | Belanja Bantuan Kompensasi Sosial |
| 5711 | Belanja Bantuan Kompensasi Sosial |
| 572 | Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan |
| 5721 | Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan |
| 5722 | Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan |
| 573 | Belanja Lembaga Sosial Lainnya |
| 5731 | Belanja Lembaga Sosial Lainnya |

Secara rinci kode dan nama Belanja akun enam digit yang digunakan dalam jurnal transaksi disajikan dalam Lampiran tentang Bagan Akun Standar “Laporan Realisasi Anggaran”.

Apabila masih terdapat transaksi Belanja yang belum tertampung pada BAS sesuai pedoman ini, agar dilihat pada tabel referensi dalam aplikasi SAIBA. Jika belum ada pada tabel referensi dalam aplikasi agar berkonsultasi dengan KPPN/Dit.APK/Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.

3. STRUKTUR DAN ISI

- a. Pendapatan Negara disajikan menurut Jenis Satker yaitu :
 - a.1. Akun 423. Pendapatan PNBP Lainnya, bagi Satker Non BLU dan BLU (PNBP Non Tupoksi).

- a.2. Akun 424. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), bagi Satker BLU (PNBP Tupoksi).
- b. Belanja Negara disajikan menurut Jenis Belanja yaitu :
 - b.1. Akun 51. Belanja Pegawai
 - b.2. Akun 52. Belanja Barang
 - b.3. Akun 53. Belanja Modal
 - b.4. Akun 57. Belanja Bantuan Sosial

Selanjutnya Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran, berupa :

- a. Pendapatan Negara menurut Jenis Satker, dan
- b. Belanja Negara menurut Sumber Dana terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Lain-lain, disajikan pada Lampiran tentang Format Laporan Realisasi Anggaran, mencakup :
 - 1) Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Satker BLU, Semesteran dan Tahunan
 - 2) Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Satker Non BLU, Semesteran dan Tahunan
 - 3) Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Wilayah Vertikal, Semesteran dan Tahunan
 - 4) Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Wilayah Dekonsentrasi, Semesteran dan Tahunan
 - 5) Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Eselon I, Semesteran dan Tahunan
 - 6) Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Kementerian, Semesteran dan Tahunan

Penyajian sesuai ilustrasi di atas dilakukan dengan cara diinput menggunakan program excel file berdasarkan data *print out* hasil aplikasi SAIBA.

C. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

1. Pengertian dan Tujuan

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non

operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Manfaat

Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Struktur dan Isi

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2. Beban.

Beban diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban;
- b) Terjadinya konsumsi aset;
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4. Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

7. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-Lo adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

1. Pengertian dan Tujuan

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

2. Manfaat

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

3. Struktur dan Isi

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal, pada tahun berjalan merupakan ekuitas akhir (audited) tahun sebelumnya.
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Penyesuaian tahun berjalan terdiri dari penyesuaian nilai aset dan penyesuaian nilai kewajiban
- d. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- e. Ekuitas akhir.

E. NERACA

Neraca adalah salah satu komponen Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban dan ekuitas.

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Satker Kementerian Kesehatan dan dapat diukur dengan satuan uang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Satker Kementerian Kesehatan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Satker Kementerian Kesehatan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

1. Aset Lancar

Adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Satker Kementerian Kesehatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang pada satu periode akuntansi.

Klasifikasi aset lancar apabila diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Jurnal mencatat Kas di Bendahara Pengeluaran (otomatis)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 111611 | Dr | Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx |
| 111613 | Dr | Kas di Bendahara Pengeluaran TUP | xxx |
| 219511 | Cr | Uang Muka dari KPPN | xxx |

Akun yang mempengaruhi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran adalah :

Posisi Debet :

- 825111 Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah
- 825112 Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- 825113 Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)

Posisi Kredit :

- (815111) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah
- (815112) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- (815113) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP(Swadana)
- (815114) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu

1.2. Kas di Bendahara Penerimaan adalah seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara.

Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam Neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral/Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Jurnal mencatat Kas di Bendahara Penerimaan diinput oleh operator SAIBA (manual)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------|--------|
| 111711 | Dr | Kas di Bendahara Penerimaan | xxx |
| 423XXX | Cr | Pendapatan PNBPN | xxx |

- 1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang selain Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari Setara Kas yang meliputi Surat Berharga dan Setara Kas Lainnya, serta Kas Lainnya Pada Kementerian Negara Lembaga yang terdiri dari : Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah.

Kas Lainnya dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat diterima dan merupakan pos/akun yang paling likuid dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam Neraca.

Dalam CaLK perlu diungkapkan tentang komponen Kas Lainnya dan Setara Kas serta Rincian menurut jenis, jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas meliputi: Kas, Bank dan Setara Kas. Sedangkan Kas dan Setara Kas yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai Aset Tidak Lancar.

Kas Lainnya dan Setara Kas berupa :

1. Bunga jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara
Jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 111821 | Dr | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | xxx |
| 4xxxxx | Cr | Pendapatan jasa lembaga keu (jasa giro) | xxx |

2. Pungutan pajak yang belum disetor ke Kas Negara
Jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 111821 | Dr | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | xxx |
| 219961 | Cr | Utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor | xxx |

3. Belanja yang tidak jadi direalisasikan atau pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Negara

Jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------|
| 111821 | Dr | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | xxx |
| 51/52xxxx | Cr | Beban Pegawai/barang | xxx |

4. Gaji/honor yang uangnya sudah ada di Bendahara Pengeluaran tetapi belum dibayarkan pada tanggal pelaporan, misal terdapat Dana Gaji dan Insentif PTT yang telah dicairkan dari KPPN tetapi per 31 Desember belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, maka harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada akun “Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran”. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------|
| 111821 | Dr | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | xxx |
| 212191 | Cr | Utang pada pihak ketiga lainnya | xxx |

5. Penerimaan hibah langsung berupa kas (dalam/luar negeri) yang belum dilakukan pengesahan sampai dengan tanggal pelaporan.

Jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------------------------|--------|
| 111822 | Dr | Kas Lainnya di K/L dari Hibah | xxx |
| 218211 | Cr | Hibah Langsung yang Belum Disahkan | xxx |

Apabila di tahun berikutnya telah terdapat penyelesaian utang atau penyetoran pendapatan maka dilakukan jurnal balik.

Untuk pencatatan saldo Dana Kas BLU yang merupakan hak dari pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 111826 | Dr | Kas Lainnya di BLU | xxx |
| 212121 | Cr | Utang Pada Pihak Ketiga BLU | xxx |
| 212193 | Cr | Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU | xxx |
| 219964 | Cr | Utang Pajak Bend. BLU yang belum disetor | xxx |

- 1.4. Kas pada Badan Layanan Umum adalah seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas Satker BLU. Kas pada BLU meliputi Kas dan Setara Kas BLU.

Kas BLU terdiri dari akun Kas dan Bank BLU, sedangkan Setara Kas-BLU terdiri dari Surat Berharga-BLU dan Setara Kas Lainnya-BLU, termasuk deposito berjangka waktu kurang dari 3 bulan (termasuk perpanjangan/*Revolving Deposit*).

Jurnal mencatat Kas pada Badan Layanan Umum

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------|--------|
| 111911 | Dr | Kas dan Bank BLU | xxx |
| 111921 | Dr | Surat Berharga – BLU | xxx |
| 111929 | Dr | Setara Kas Lainnya – BLU | xxx |
| 391111 | Cr | Ekuitas | xxx |

- 1.5. Investasi Jangka Pendek BLU adalah penempatan sejumlah dana tunai dari Satker BLU dalam instrumen keuangan di bank berjangka waktu 3 s.d 12 bulan

dengan harapan untuk memperoleh pendapatan bunga (*Yield*).

Jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------|--------|
| 113311 | Dr | Deposito BLU | xxx |
| 113319 | Dr | Investasi Lainnya BLU | xxx |
| 11xxxx | Cr | Kas...BLU | xxx |

- 1.6. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) adalah merupakan pengeluaran Satker yang telah dibayarkan dari rekening KUN dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati oleh Satker.

Pada saat pembayaran yang ditandai terbitnya SPM SP2D maka akan terbentuk jurnal (otomatis) :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------|--------|
| 51xxxx | Dr | Beban Gaji | xxx |
| 52xxxx | Dr | Beban Barang ... | xxx |
| 57xxxx | Dr | Beban Bansos | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke Entitas Lain | xxx |

Pada saat periode pelaporan masih terdapat barang/jasa yang belum diterima maka terbentuk jurnal Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*), jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------|--------|
| 114111 | Dr | Belanja Pegawai Dibayar Dimuka | xxx |
| 51xxxx | Cr | Beban Pegawai ... | xxx |

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------------------|--------|
| 114112 | Dr | Belanja Barang Dibayar Dimuka | xxx |
| 52xxxx | Cr | Beban Barang ... | xxx |

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------------------|--------|
| 114118 | Dr | Belanja Bansos Dibayar Dimuka | xxx |
| 57xxxx | Cr | Beban Bansos ... | xxx |

- 1.7. Uang Muka Belanja (*Prepayment*), adalah hak atas barang/jasa yang dimiliki sebagai akibat adanya kewajiban yang telah dibayarkan atas perjanjian yang

telah dilakukan oleh Satker, namun sampai akhir periode pelaporan barang/jasa tersebut belum diterima.

Pada saat pembayaran yang ditandai terbitnya SPM SP2D dengan akun 53xxxx maka akan terbentuk jurnal (otomatis) :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 13xxxx | Dr | Aset Tetap belum diregister | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke Entitas Lain | xxx |

Jurnal yang terbentuk dari SIMAK BMN :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 136111 | Dr | Kontruksi Dalam Pengerjaan | xxx |
| 13xxxx | Cr | Aset tetap belum diregister | xxx |

Pada saat periode pelaporan masih terdapat aset tetap atau aset lainnya belum diterima, maka akan terbentuk jurnal uang muka belanja modal. Jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------|--------|
| 114213 | Dr | Uang muka belanja modal | xxx |
| 136111 | Cr | Kontruksi Dalam Pengerjaan | xxx |

- 1.8. Piutang Bukan Pajak adalah hak Satker untuk menerima pembayaran dari entitas/pihak lain atau jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pihak tertentu sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah dan menjadi sumber PNBPN bagi Satker.

Berdasarkan jenisnya Piutang Bukan Pajak dibedakan dalam:

- a. Piutang PNBPN berdasarkan pungutan pendapatan Negara, yang didukung adanya Surat Penagihan, meliputi:
 - 1) Piutang hasil jasa pelayanan Rumah Sakit dan Kesehatan Lainnya.
 - 2) Piutang hasil pelayanan Pendidikan.

3) Piutang Pendapatan Lainnya.

b. Piutang PNBP berdasarkan perikatan, dalam bentuk pemanfaatan fasilitas/jasa milik Kemenkes yang didukung naskah perjanjian sewa-menyewa, berupa:

- 1) Penyewaan Gedung Kantor
- 2) Penyewaan Rumah Dinas

Pengakuan Piutang PNBP yaitu pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang PNBP atau saat terbitnya Surat Keputusan tentang PNBP.

Pengukuran PiutangPNBP sebesar nilai nominal.

Pengungkapan Piutang PNBP disajikan di neraca dan diungkapkan dalam CaLK, berupa:

- Rincian jenis piutang;
- Penjelasan atas penyelesaian piutang (masih di Kemenkes atau sudah diserahkan ke Direktorat Pengelolaan Piutang dan Kekayaan Negara Lainnya - Ditjen Kekayaan Negara);
- Penjelasan atas piutang bukan pajak lainnya;
- Klasifikasi Piutang PNBP (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet).

Jurnal mencatat Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak, jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------------|--------|
| 115211 | Dr | Piutang PNBP | xxx |
| 423xxx | Cr | Pendapatan PNBP ... | xxx |

1.9. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah reklasifikasi aset berupaTP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo ditahun berikutnya.Timbulnya TP/TGR, didukung bukti, berupa:

- a. SKTJM, untuk TP/TGR yang penyelesaiannya dilakukan secara damai.
- b. Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, untuk TP/TGR yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan.

Dalam pencatatannya Piutang TP/TGR dilakukan reklasifikasi sesuai tingkat likuiditasnya. Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam satu tahun yang akan datang disajikan dalam Akun “Bagian Lancar TP/TGR” dicatat sebesar nilai nominal.

Jurnal mencatat Bagian Lancar TP / TGR, jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------|--------|
| 115411 | Dr | Bagian Lancar TP / TGR | xxx |
| 152111 | Cr | Piutang Tagihan TP / TGR | xxx |

- 1.10. Piutang BLU merupakan piutang negara yang terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.

Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Piutang PNPB pelayanan rumah sakit dan kesehatan lainnya berdasarkan pungutan pendapatan, yang dijamin pihak ketiga (Askes, Jamkesmas, Jamkesda, Perusahaan, dll):

- a) Piutang yang dicatat di neraca didasarkan pada hasil verifikasi pihak penjamin yang dibuktikan dengan terbitnya Berita Acara Verifikasi atau dokumen sejenis dan dicatat sebagai Piutang Lancar (d disesuaikan seperti angka hasil audit TA 2014, dan piutang macet, setelah 1 tahun mengalami kemacetan).
- b) Apabila sampai dengan akhir periode penyusunan Laporan Keuangan Unaudited besaran nilai tagihannya belum ditetapkan, tidak disajikan dalam neraca tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK sesuai kondisi (dalam proses melengkapi dokumen, dalam proses verifikasi), dengan

menyebutkan jumlah kisaran piutang pada kondisi tersebut.

- c) Apabila setelah LK *Unaudited* dan sebelum Batas Akhir Penyusunan LK Audited terbit Berita Acara Verifikasi atau dokumen sejenis, maka dicatat sebagai koreksi Audited yang menambah Piutang Lancar.
- d) Apabila sampai dengan akhir periode penyusunan Laporan Keuangan Audited besaran nilai tagihannya belum ditetapkan, maka disajikan dalam neraca sebagai piutang dan pendapatan sebesar estimasi dan diungkapkan secara memadai pada CaLK.

Piutang PNBP pelayanan pendidikan diakui pada akhir semester pendidikan yaitu akhir bulan Februari dan Agustus.

Atas perbedaan waktu periode pelaporan pada pelayanan pendidikan menimbulkan adanya utang/piutang yang harus dicatat pada periode penyusunan Laporan Keuangan berbasis SAI yang menyajikan laporan pada akhir bulan Juni dan Desember.

Selanjutnya Jurnal atas transaksi ini disajikan pada penjelasan tentang Utang kepada pihak ketiga BLU dan Pendapatan diterima dimuka.

1.10.1. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang Kegiatan Operasional BLU adalah Piutang Pelayanan yang merupakan hak yang muncul dari penyerahan pelayanan barang/jasa atau penyerahan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Satker BLU dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan

Piutang dari kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

- a. Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa, meliputi :
 - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
 - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

- Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya.

b. Piutang BLU Lainnya meliputi :

Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional Jurnal mencatat Piutang Kegiatan Operasional BLU, jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 115711 | Dr | Piutang BLU Pelayanan Kesehatan | Xxx |
| 115712 | Dr | Piutang BLU Pelayanan Pendidikan | Xxx |
| 115719 | Dr | Piutang BLU Penyedia Barang/Jasa Lainnya | Xxx |
| 115791 | Dr | Piutang BLU Lainnya dari Kegtn Operasional | Xxx |
| 424xxx | Cr | Pendapatan BLU | xxx |

1.10.2. Piutang Kegiatan Non-Operasional BLU

Piutang Kegiatan Non-Operasional BLU adalah Piutang yang merupakan hak yang bukan berasal dari kegiatan pelayanan pokok Satker BLU. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU meliputi:

a. Piutang Sewa BLU yang terdiri :

- 1) Piutang Sewa Tanah BLU
- 2) Piutang Sewa Gedung BLU
- 3) Piutang Sewa Ruangan BLU
- 4) Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
- 5) Piutang Sewa Lainnya BLU

b. Piutang dari Penjualan Aset BLU terdiri :

- 1) Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- 2) Piutang dari Penjualan Aset Lainnya

c. Piutang BLU Lainnya

- 1) Piutang dari Kegiatan non-operasional lainnya BLU

Jurnal mencatat Piutang Kegiatan Non-Operasional BLU, jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 115891 | Dr | Piutang BLU Lainnya dari Non Operasional | xxx |
| 424xxx | Cr | Pendapatan BLU | xxx |

Piutang diakui pada saat seluruh kondisi meliputi jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh Satker BLU; tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable*) setelah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih; Piutang pelayanan yang tidak terbayar atas permintaan penjamin (diskon atau potongan tarif) menjadi beban subsidi pasien; Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan; Piutang yang tidak tertagih dihapuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku; Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan; Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain.

Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar sebesar jumlah netto, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan piutang; Piutang pelayanan yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar, sedangkan piutang pelayanan yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam penyajian Piutang, antara lain sebagai berikut:

- Rincian jenis dan jumlah piutang;

- Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk;
- Jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.

1.11. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Satker melakukan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih atas piutang yang dimiliki dan/atau dikuasainya, baik terhadap piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang.

Penghitungan penyisihan piutang tak tertagih dirinci dalam Kartu Penyisihan Piutang.

Nilai penyisihan tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap Semesteran dan Tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang.

Tata cara penetapan kualitas piutang dan besarnya tarif penyisihan sesuai PMK Nomor 69/PMK.06/2014, Piutang Non BLU diklasifikasikan berdasarkan kualitas piutang sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;

- 4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditentukan sebagai berikut:

- 1. Penyisihan Piutang tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 0,5 % dari piutang yang memiliki piutang kualitas lancar.
- 2. Penyisihan piutang tak tertagih khusus ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 10 % dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan;
 - b. 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan;
 - c. 100 % dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan.

Sedangkan untuk tatacara penetapan kualitas piutang dan besarnya tarif penyisihan Piutang BLU Rumah Sakit dan Balai sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum.

Akuntansi Penyisihan Piutang

Untuk akun Penyisihan Piutang yang terdapat di ayat jurnal hanya dengan 3 (tiga) digit, dimana akun 6 (enam) digitnya disesuaikan dengan jenis Piutang Satker.

Jurnal Penyisihan Bagian Lancar Piutang, jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|--------|
| 594411 | Dr | Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian lancar Piutang | xxx |
| 11642x | Cr | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian lancar Piutang | xxx |

Jurnal Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tidak Tertagih, jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 5949xx | Dr | Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang | xxx |
| 156xxx | Cr | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Jenis Piutang Jangka Panjang | xxx |

Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih:

Jurnal pengurangan nilai penyisihan Bagian Lancar Piutang tidak tertagih, jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|--------|
| 11642x | Dr | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian lancar Piutang | xxx |
| 594411 | Cr | Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian lancar Piutang | xxx |

Jurnal Pengurangan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jk. Panjang, jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 156xxx | Dr | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang | xxx |
| 5949xx | Cr | Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang | xxx |

Pada saat terjadi pelunasan piutang jangka panjang ditandai dengan adanya SSBP, maka akan terbentuk jurnal (otomatis) :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------|--------|
| 313121 | Dr | Diterima Dari Entitas Lain | Xxx |
| 15xxxx | Cr | Piutang Jangka Panjang | xxx |

Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang terkait pelunasan Piutang Jangka Panjang, jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 156xxx | Dr | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang | xxx |
| 594xxx | Cr | Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang | xxx |

Penghapusbukuan Piutang, jurnal diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|--------|
| 116xxx | Dr | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Pendek | Xxx |
| 15xxxx | Cr | Piutang Jangka Panjang | Xxx |

Pengungkapan pada CaLK

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;

- Rincian jenis-jenis, nama debitur, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- Dasar penghitungan penyisihan piutang menurut penggolongan kualitas piutang;
- Penjelasan mengenai restrukturisasi debitur dalam hal mengalami kesulitan pembayaran dan memiliki prospek yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi dengan cakupan pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran;
- Penambahan, pengurangan dan penghapusan jumlah piutang. Piutang dengan Agunan/Jaminan kalau ada;
- Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di K/L atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN-DJKN;

- Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Penerapan Penyisihan Piutang dalam Laporan Keuangan

Penyisihan piutang dilakukan oleh setiap Satker Kementerian Kesehatan yang memiliki piutang dan dilaporkan secara berjenjang.

- 1.12. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Klasifikasi akun persediaan mengacu kepada Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-6478/PB.6/2015 tentang penggunaan akun belanja yang menghasilkan persediaan, dan mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9070/PB/2014 tentang Penambahan Akun Belanja Barang Persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi (*stock opname*) barang secara fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan

pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai Persediaan.

Pengukuran Persediaan dari Pembelian, terdiri dari:

- Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Pengukuran Persediaan atas barang yang diproduksi sendiri:

- Biaya standar.
- Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

Pengukuran Persediaan dari Hibah

- Nilai wajar.
- Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan serta persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengungkapan

- Disajikan di neraca sebesar nilai moneterinya.
- Diungkapkan dalam CaLK, berupa:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- Kondisi persediaan;
- Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan;
- Nilai persediaan dalam neraca BMN tidak termasuk nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang, tetapi tetap diungkapkan dalam CaLK.

Jurnal mencatat Persediaan:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|--|--------|--|--------|
| 1. Persediaan Masuk : | | | |
| Saldo Awal | | | |
| 117xxx | Dr | Persediaan | xxx |
| 391113 | Cr | Koreksi persediaan nilai | xxx |
| Pembelian/Hibah Masuk | | | |
| 117xxx | Dr | Persediaan | xxx |
| 1179xx | Cr | Persediaan Belum Diregister | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 117xxx | Dr | Persediaan | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 117xxx | Dr | Persediaan | xxx |
| 49142x | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 117xxx | Dr | Persediaan | xxx |
| 491429 | Cr | Pendapatan Perolehan Lainnya | xxx |
| 2. Persediaan Keluar : | | | |
| Pemakaian | | | |
| 593xxx | Dr | Beban Persediaan | xxx |
| 117xxx | Cr | Persediaan | xxx |
| Transfer Keluar | | | |
| 31321x | Dr | Transfer Keluar | xxx |
| 117xxx | Cr | Persediaan | xxx |
| Penyerahan kepada masyarakat | | | |
| 5261xx | Dr | Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/PEMDA | xxx |
| 59312x | Cr | Persediaan untuk dijual/diserahkan pada masyarakat/PEMDA | Xxx |
| Pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga | | | |
| 593141 | Dr | Beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga | Xxx |
| 117191 | Cr | Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga | Xxx |
| Penyerahan dari Belanja Bansos | | | |
| 573112 | Dr | Beban Bantuan Sosial | Xxx |
| 11714x | Cr | Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial | Xxx |
| Rusak berat/usang | | | |
| 59611x | Dr | Beban kerugian persediaan rusak berat/usang | Xxx |
| 117xxx | Cr | Persediaan | Xxx |
| Penghapusan Lainnya | | | |
| 596111 | Dr/Cr | Beban kerugian pelepasan aset | Xxx |
| 117xxx | Cr | Persediaan | Xxx |
| 3. Koreksi | | | |
| 117xxx | Dr/Cr | Persediaan | Xxx |
| 391113 | Cr/Dr | Koreksi persediaan nilai | Xxx |
| 4. Hibah keluar | | | |
| 391113 | Dr | Koreksi persediaan nilai | Xxx |
| 117xxx | Cr | Persediaan | Xxx |
| 5. Opnam Fisik | | | |
| 117xxx | Dr/Cr | Persediaan | Xxx |
| 593xxx | Cr/Dr | Beban Persediaan | Xxx |

Pencatatan dan pelaporan barang persediaan yang belum diterima oleh Satker tujuan dan masih dalam perjalanan per 31 Desember, sebagai berikut:

1. Satker pengirim berkewajiban mencatat terlebih dahulu kedalam sistem aset yang telah dibeli dari sumber APBN;
 2. Pengalihan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) dari Kementerian Kesehatan kepada Pemda (SKPD) atau pihak lain tanpa memperoleh penggantian, maka dikategorikan hibah dan tunduk pada ketentuan yang berlaku;
 3. BMN yang dialihkan ke Pemda dengan BAST sementara antara Kementerian Kesehatan dan PEMDA;
 4. BMN masih tercatat dalam sistem dan akan dihapuskan apabila Surat Persetujuan dari Pengelola Barang telah terbit;
 5. Dokumen sumber atas mutasi (perubahan dan penghapusan), meliputi: BAST, dokumen kepemilikan, dokumen pengelolaan, dan dokumen lainnya yang sah.
- 1.13. Persediaan BLU adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Badan Layanan Umum, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jurnal mencatat Persediaan BLU

Jurnal pada saat input SP3B (otomatis) :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------|--------|
| 52511x | Dr | Beban Barang BLU | Xxx |
| 119111 | Cr | Kas di BLU | Xxx |

Jurnal yang dikirim Aplikasi SIMAK (otomatis) :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 117211 | Dr | Persediaan | Xxx |
| 117911 | Cr | Persediaan Yang Belum Diregister | Xxx |

Jurnal yang dikirim Aplikasi SIMAK (otomatis) :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------|--------|
| 59xxxx | Dr | Beban Persediaan | Xxx |
| 117xxx | Cr | Persediaan | Xxx |

Jurnal Penyesuaian diinput oleh operator SAIBA (manual) sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|--------|
| 117911 | Dr | Persediaan Yang Belum Diregister | Xxx |
| 52511x | Cr | Beban Barang BLU | Xxx |
| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
| 59xxxx | Dr | Beban Persediaan-BLU | Xxx |
| 69xxxx | Cr | Beban Persediaan | Xxx |
| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
| 117211 | Dr | Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan | Xxx |
| 117212 | Dr | Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan | Xxx |
| 117219 | Dr | Persediaan BLU Penyedia Brng/Jasa Lainnya | Xxx |
| 117xxx | Cr | Persediaan | Xxx |

Persediaan Barang Farmasi pada Rumah Sakit BLU

- 1) Persediaan pada Satker dicatat menggunakan Aplikasi Persediaan.
- 2) Dalam hal Satker menggunakan aplikasi lain/sejenis dalam mencatat dan melaporkan Barang Persediaan, maka Satker memiliki kewajiban untuk menyajikan dalam Aplikasi Persediaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dalam rincian nilai per jenis barang dan sub-sub kelompok sebagaimana maksud surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1284/PB.6/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Aplikasi Barang Persediaan dan surat Direktur BMN kepada Direktur APK Nomor S-42/KN.2/2011 tanggal 1 Februari 2011.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan Satker Kementerian Kesehatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari:

| No. | Nama Akun | No. | Nama Akun |
|------|-----------------------------|-------|---------------------------------|
| 2.1. | Tanah | 2.7. | Tanah BLU |
| 2.2. | Peralatan dan Mesin | 2.8. | Peralatan dan Mesin BLU |
| 2.3. | Gedung dan Bangunan | 2.9. | Gedung dan Bangunan BLU |
| 2.4. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.10. | Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU |
| 2.5. | Aset tetap Lainnya | 2.11. | Aset tetap Lainnya BLU |
| 2.6. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 2.12. | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU |

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Perlakuan akuntansi masing-masing akun, sebagai berikut:

2.1. Tanah adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengakuan

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah.

Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pengungkapan

- Disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya,
- Dasar penilaian yang digunakan,
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan: penambahan; pelepasan; mutasi tanah lainnya.

Jurnal mencatat Tanah :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|--|--------|--|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 131111 | Dr | Tanah | Xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | Xxx |
| Perolehan/perubahan dengan SP2D/SPHL/MPHL-BJS | | | |
| 131111 | Dr | Tanah | Xxx |
| 131211 | Cr | Tanah belum diregister | Xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 131111 | Dr | Tanah | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 131111 | Dr | Tanah | xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 131111 | Dr | Tanah | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |
| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
| 131111 | Dr | Tanah | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pertukaran | | | |
| 131111 | Dr | Tanah | xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 131111 | Dr | Tanah | xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | xxx |
| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 131111 | Dr | Tanah | xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |
| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
| 166111 | Dr | Aset Lain-lain | xxx |
| 131111 | Cr | Tanah | xxx |
| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
| 131111 | Dr | Tanah | xxx |
| 166111 | Cr | Aset Lain-lain | xxx |
| Koreksi perubahan nilai/kuantitas | | | |
| 131111 | Dr/Cr | Tanah | xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pengembangan dengan KDP | | | |
| 131111 | Dr | Tanah | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |
| Penghapusan | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 131111 | Cr | Tanah | xxx |

| Transfer keluar | | | |
|--|-------|--|-----|
| 313211 | Dr | Transfer keluar | xxx |
| 131111 | Cr | Tanah | xxx |
| Hibah keluar | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 131111 | Cr | Tanah | xxx |
| Reklasifikasi masuk/keluar | | | |
| 131111 | Dr/Cr | Tanah | xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Koreksi pencatatan | | | |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 131111 | Cr | Tanah | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 131111 | Cr | Tanah | xxx |
| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 131111 | Cr | Tanah | xxx |

- 2.2. Peralatan dan Mesin merupakan mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik berupa: alat besar, alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja, alat peraga, dll.

Pengakuan

- Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari Non-donasi: diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui.
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari Donasi, diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah (BAST).

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan. Pengembangan adalah peningkatan nilai karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran

- Pembelian: harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin siap digunakan.
- Kontrak: nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
- Swakelola: biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut).

Pengungkapan

- Disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya,
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan.
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

Jurnal mencatat Peralatan dan Mesin

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|--|--------|--|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 137111 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Perolehan/perubahan dengan SP2D/SPHL/MPHL- | | | |
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 132211 | Cr | Peralatan dan mesin belum diregister | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| 137111 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |
| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 137111 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |

| | | | |
|---|-------|--|-----|
| Pertukaran | | | |
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | xxx |
| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 137111 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |
| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
| 166111 | Dr | Aset Lain-lain | xxx |
| 137111 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 132111 | Cr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 169121 | Cr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 169121 | Dr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| 166111 | Cr | Aset Lain-lain | xxx |
| 137111 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| Reklasifikasi dari intra ke ekstra/sebaliknya | | | |
| 391116 | Dr/Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 595112 | Dr/Cr | Beban aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin | xxx |
| 137111 | Dr/Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 132111 | Cr/Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| Koreksi perubahan nilai/kuantitas | | | |
| 132111 | Dr/Cr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 137111 | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |

| Pengembangan dengan KDP | | | |
|--|-------|--|-----|
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |
| Penghapusan | | | |
| 137111 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 132111 | Cr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| Transfer keluar | | | |
| 313211 | Dr | Transfer keluar | xxx |
| 137111 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 132111 | Cr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| Hibah keluar | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 137111 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 132111 | Cr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| Reklasifikasi masuk/keluar | | | |
| 132111 | Dr/Cr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| 137111 | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| Koreksi pencatatan | | | |
| 137111 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 132111 | Cr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 137111 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 132111 | Cr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | xxx |
| 137111 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 132111 | Cr | Peralatan dan Mesin | xxx |
| Penyusutan Reguler | | | |
| 591111 | Dr | Beban penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 137111 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | xxx |

2.3. Gedung dan Bangunan merupakan seluruh bangunan dan gedung yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan. Pengembangan adalah peningkatan nilai karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan Bangunan didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

Pengungkapan

- Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya.
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan.
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

Jurnal mencatat Gedung dan Bangunan

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|--|--------|--|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 133111 | Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 137211 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Perolehan/perubahan dengan SP2D/SPHL/MPHL-BJS | | | |
| 133111 | Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 133211 | Cr | Gedung dan bangunan belum diregister | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 133111 | Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| 137211 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 133111 | Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 133111 | Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |

| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
|--|-------|--|-----|
| 133111 | Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 137211 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pertukaran | | | |
| 133111 | Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 133111 | Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | xxx |
| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 133111 | Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 137211 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |
| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
| 166111 | Dr | Aset Lain-lain | xxx |
| 137211 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 133111 | Cr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 169121 | Cr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
| 133111 | Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 169121 | Dr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| 166111 | Cr | Aset Lain-lain | xxx |
| 137211 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| Reklasifikasi dari intra ke ekstra/sebaliknya | | | |
| 391116 | Dr/Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 595113 | Dr/Cr | Beban aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin | xxx |
| 137211 | Dr/Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 133111 | Cr/Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |

| Koreksi perubahan nilai/ kuantitas | | | |
|---|--------|--|-----|
| 133111 | Dr/ Cr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 137211 | Cr/ Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 391116 | Cr/ Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pengembangan dengan KDP | | | |
| 133111 | Dr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |
| Penghapusan | | | |
| 137211 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 133111 | Cr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| Transfer keluar | | | |
| 313211 | Dr | Transfer keluar | xxx |
| 137211 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 133111 | Cr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| Hibah keluar | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 137211 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 133111 | Cr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| Reklasifikasi masuk/ keluar | | | |
| 133111 | Dr/ Cr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| 137211 | Cr/ Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| Koreksi pencatatan | | | |
| 137211 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 133111 | Cr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/ hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 137211 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 133111 | Cr | Gedung dan Bangunan | xxx |

| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
|--|----|--|-----|
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | xxx |
| 137211 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 133111 | Cr | Gedung dan Bangunan | xxx |
| Penyusutan Reguler | | | |
| 591211 | Dr | Beban penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 137211 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | xxx |

2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dikuasai oleh Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

Pengakuan

- Non-donasi: diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut
- Donasi: diakui pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah

Pengukuran

- Kontrak: biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
- Swakelola: biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Pengungkapan

- Disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya,
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.

- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan dan penghapusan.
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jurnal mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|--|--------|---|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 13411x | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 13731x | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Perolehan/perubahan dengan SP2D/SPHL/MPHL-BJS | | | |
| 13411x | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 13421x | Cr | Jalan, irigasi, dan jaringan belum diregister | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 13411x | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| 13731x | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 13411x | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 13411x | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |

| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
|--|-------|---|-----|
| 13411x | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 13731x | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pertukaran | | | |
| 13411x | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 13411x | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | xxx |
| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 13411x | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 13731x | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |
| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
| 166111 | Dr | Aset Lain-lain | xxx |
| 13731x | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 13411x | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 169121 | Cr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
| 13411x | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 169121 | Dr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| 166111 | Cr | Aset Lain-lain | xxx |
| 13731x | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| Reklasifikasi dari intra ke ekstra/sebaliknya | | | |
| 391116 | Dr/Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 595114 | Dr/Cr | Beban aset ekstrakomptabel jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 13731x | Dr/Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 13411x | Cr/Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |

| Koreksi perubahan nilai/kuantitas | | | |
|--|-------|---|-----|
| 13411x | Dr/Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 13731x | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pengembangan dengan KDP | | | |
| 13411x | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |
| Penghapusan | | | |
| 13731x | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 13411x | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| Transfer keluar | | | |
| 313211 | Dr | Transfer keluar | xxx |
| 13731x | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 13411x | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| Hibah keluar | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 13731x | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 13411x | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| Reklasifikasi masuk/keluar | | | |
| 13411x | Dr/Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| 13731x | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| Koreksi pencatatan | | | |
| 13731x | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 13411x | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 13731x | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 13411x | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |

| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
|--|----|---|-----|
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | xxx |
| 13731x | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 13411x | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx |
| Penyusutan Reguler | | | |
| 59131x | Dr | Beban penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 13731x | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |

2.5. Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Seperti koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

Pengakuan

- Non-donasi: diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut
- Donasi: diakui pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah

Pengukuran

- Kontrak: pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.
- Swakelola: biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Pengungkapan

- Disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya,
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.

- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan dan penghapusan.
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

Jurnal mencatat Aset tetap Lainnya

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|--|--------|---|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 13512x | Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 1374xx | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Perolehan/perubahan dengan SP2D/SPHL/MPHL-BJS | | | |
| 13512x | Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 139111 | Cr | Aset Tetap yang belum diregister | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 13512x | Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| 1374xx | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 13512x | Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 13512x | Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |
| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
| 13512x | Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 1374xx | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |

| | | | |
|---|-------|---|-----|
| Pertukaran | | | |
| 13512x | Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 13512x | Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | xxx |
| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 13512x | Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 1374xx | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |
| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
| 166111 | Dr | Aset Lain-lain | xxx |
| 1374xx | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 13512x | Cr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 169121 | Cr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
| 13512x | Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 169121 | Dr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| 166111 | Cr | Aset Lain-lain | xxx |
| 1374xx | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| Reklasifikasi dari intra ke ekstra/sebaliknya | | | |
| 391116 | Dr/Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 595114 | Dr/Cr | Beban aset ekstrakomptabel jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 1374xx | Dr/Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 13512x | Cr/Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| Koreksi perubahan nilai/kuantitas | | | |
| 13512x | Dr/Cr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 1374xx | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pengembangan dengan KDP | | | |
| 13512x | Dr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |

| Penghapusan | | | |
|--|-------|---|-----|
| 1374xx | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 13512x | Cr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| Transfer keluar | | | |
| 313211 | Dr | Transfer keluar | xxx |
| 1374xx | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 13512x | Cr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| Hibah keluar | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 1374xx | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 13512x | Cr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| Reklasifikasi masuk/keluar | | | |
| 13512x | Dr/Cr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 1374xx | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| koreksi pencatatan | | | |
| 1374xx | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 13512x | Cr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 1374xx | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 13512x | Cr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | xxx |
| 1374xx | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 13512x | Cr | Aset Tetap Lainnya | xxx |
| Penyusutan Reguler | | | |
| 591411 | Dr | Beban penyusutan aset tetap lainnya | xxx |
| 1374xx | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya | xxx |

2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan.

KDP mencakup tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan Aset Tetap Lainnya

yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan tanggal pelaporan belum selesai pengerjaannya.

Pengukuran

- KDP dicatat dengan biaya perolehan.
- Swakelola: biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; biaya yang dapat distribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Kontrak konstruksi: termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan pembayaran klaim pada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pengakuan

- Aset Berwujud diakui sebagai KDP, jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- KDP merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.
- KDP dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: konstruksi yang secara substansi telah selesai dikerjakan; dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan

Pengungkapan

- Rincian Kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan; dan
- Retensi.

Jurnal mencatat Konstruksi dalam Pengerjaan

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|--|--------|--|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 136111 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Perolehan/ perubahan dengan SP2D/ SPHL/ MPHL-BJS | | | |
| 136111 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| 13xxxx | Cr | Aset Tetap belum diregister | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 136111 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |

| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
|--|-------|--|-----|
| 136111 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 13xxxx | Dr | Aset Tetap | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx |
| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
| 136111 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pertukaran | | | |
| 136111 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 136111 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | xxx |
| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 136111 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |
| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
| 166111 | Dr | Aset Lain-lain | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
| 136111 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| 166111 | Cr | Aset Lain-lain | xxx |
| Koreksi perubahan nilai/ kuantitas | | | |
| 136111 | Dr/Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Penghapusan | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |

| Transfer keluar | | | |
|--|-------|--|-----|
| 313211 | Dr | Transfer keluar | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| Hibah keluar | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| Reklasifikasi masuk/keluar | | | |
| 136111 | Dr/Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Koreksi pencatatan | | | |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | Xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |
| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | Xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | Xxx |
| 136111 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx |

Terhadap pengelolaan BMN di Satker yang tidak menerima DIPA di tahun berjalan, atas aset Satker tersebut dapat dilakukan dilikuidasi oleh Satker yang masih aktif, maka Satker yang tidak aktif berkewajiban untuk menyelesaikan transfer aset (*in/out*) dan melaporkan ke Eselon I untuk menihilkan. Secara teknis, untuk proses *back up* Satker mati dapat dilakukan dengan mengambil ke *back-up* UAPB. Sedangkan atas Satker yang tidak aktif tetapi belum dilikuidasi oleh Satker aktif, maka pelaporan atas aset Satker tersebut dilakukan oleh Unit Eselon-1 terkait.

Reklasifikasi BMN DK/TP Menjadi Aset Lain-lain

- a. BMN DK/TP yang sedang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dicatat sebagai Aset tetap atau Persediaan sesuai dengan substansinya.
- b. BMN DK/TP yang belum mendapat persetujuan Pemindahtanganan dari Pengelola Barang tetapi telah

diserahkan kepada pihak ketiga, dicatat sebagai Aset Lainnya pada Neraca LK Kemenkes di tahun berjalan.

- c. Proses Hibah BMN Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum tahun 2011 mengacu kepada PMK Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari DanaDekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

2.7. Tanah BLU adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Badan Layanan Umum dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengakuan

Kepemilikan atas tanah BLU ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah.

Pengukuran

Tanah BLU dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah BLU dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah BLU didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

Pengungkapan

- Disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya,
- Dasar penilaian yang digunakan,
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan: penambahan; pelepasan; mutasi tanah lainnya.

Jurnal mencatat Tanah BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|---|--------|--|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 131311 | Dr | Tanah BLU | Xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Perolehan/perubahan dengan SP2D/SPHL/MPHL-BJS | | | |
| 131311 | Dr | Tanah BLU | Xxx |
| 131411 | Cr | Tanah belum diregister BLU | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 131311 | Dr | Tanah BLU | Xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 131311 | Dr | Tanah BLU | Xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 131311 | Dr | Tanah BLU | Xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
| 131311 | Dr | Tanah BLU | Xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pertukaran | | | |
| 131311 | Dr | Tanah BLU | Xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |

| | | | |
|--|-------|--|-----|
| Perolehan Lainnya | | | |
| 131311 | Dr | Tanah BLU | Xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | Xxx |
| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 131311 | Dr | Tanah BLU | Xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | Xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |
| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
| 166211 | Dr | Aset Lain-lain BLU | Xxx |
| 131311 | Cr | Tanah BLU | xxx |
| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
| 131311 | Dr | Tanah BLU | Xxx |
| 166211 | Cr | Aset Lain-lain BLU | xxx |
| Koreksi perubahan nilai/kuantitas | | | |
| 131311 | Dr/Cr | Tanah BLU | Xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pengembangan dengan KDP | | | |
| 131311 | Dr | Tanah BLU | Xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Penghapusan | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | Xxx |
| 131311 | Cr | Tanah BLU | xxx |
| Transfer keluar | | | |
| 313211 | Dr | Transfer keluar | Xxx |
| 131311 | Cr | Tanah BLU | xxx |
| Hibah keluar | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | Xxx |
| 131311 | Cr | Tanah BLU | xxx |
| Reklasifikasi masuk/keluar | | | |
| 131311 | Dr/Cr | Tanah BLU | Xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Koreksi pencatatan | | | |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | Xxx |
| 131311 | Cr | Tanah BLU | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | Xxx |
| 131311 | Cr | Tanah BLU | xxx |
| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | Xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | Xxx |
| 131311 | Cr | Tanah BLU | xxx |

2.8. Peralatan dan Mesin BLU merupakan mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai pada Badan Layanan Umum. Wujud fisiknya dapat berupa: alat besar,

alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat lab, komputer, alat keselamatan kerja, alat peraga, dll.

Pengakuan

Peralatan dan mesin BLU yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Peralatan dan mesin BLU yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin BLU tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin BLU menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin BLU tersebut sampai siap dipakai.

Pengungkapan

- Disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya,
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai,
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan dan penghapusan,
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

Jurnal mencatat Peralatan dan Mesin BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|---|--------|--|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 132311 | Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 137121 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Perolehan/perubahan dengan SP2D/SPHL/MPHL-BJS | | | |
| 132311 | Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 132411 | Cr | Peralatan dan mesin belum diregister BLU | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 132311 | Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| 137121 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 132311 | Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 132311 | Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
| 132311 | Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 137121 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pertukaran | | | |
| 132311 | Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 132311 | Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | xxx |
| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 132311 | Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 137121 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |

| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
|---|-------|--|-----|
| 166211 | Dr | Aset Lain-lain BLU | xxx |
| 137121 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 132311 | Cr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 169121 | Cr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
| 132311 | Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 169121 | Dr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| 166211 | Cr | Aset Lain-lain BLU | xxx |
| 137121 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| Reklasifikasi dari intra ke ekstra/sebaliknya | | | |
| 391116 | Dr/Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 595112 | Dr/Cr | Beban aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin | xxx |
| 137121 | Dr/Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 132311 | Cr/Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| Koreksi perubahan nilai/kuantitas | | | |
| 132311 | Dr/Cr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 137121 | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pengembangan dengan KDP | | | |
| 132311 | Dr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Penghapusan | | | |
| 137121 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 132311 | Cr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| Transfer keluar | | | |
| 313211 | Dr | Transfer keluar | xxx |
| 137121 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 132311 | Cr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |

| Hibah keluar | | | |
|--|-------|--|-----|
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 137121 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 132311 | Cr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| Reklasifikasi masuk/keluar | | | |
| 132311 | Dr/Cr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| 137121 | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| Koreksi pencatatan | | | |
| 137121 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 132311 | Cr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 137121 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 132311 | Cr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | xxx |
| 137121 | Dr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 132311 | Cr | Peralatan dan Mesin BLU | xxx |
| Penyusutan Reguler | | | |
| 591111 | Dr | Beban penyusutan peralatan dan mesin | xxx |
| 137121 | Cr | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |

- 2.9. Gedung dan Bangunan BLU merupakan seluruh bangunan dan gedung yang dibeli atau dibangun untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Gedung dan Bangunan BLU yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut

siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui.

Gedung dan Bangunan BLU yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan BLU tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Gedung dan Bangunan BLU dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan BLU dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

Pengungkapan

- Gedung dan Bangunan disajikan di neraca sebesar nilai moneterinya,
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai,
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan dan penghapusan,
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

Jurnal mencatat Gedung dan Bangunan BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|---|--------|--|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 133311 | Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 137221 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Perolehan/perubahan dengan SP2D/SPHL/MPHL-BJS | | | |
| 133311 | Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 133411 | Cr | Gedung dan bangunan belum diregister BLU | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 133311 | Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| 137221 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 133311 | Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 133311 | Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
| 133311 | Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 137221 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pertukaran | | | |
| 133311 | Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 133311 | Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | xxx |
| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 133311 | Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 137221 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |

| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
|---|-------|--|-----|
| 166211 | Dr | Aset Lain-lain BLU | xxx |
| 137221 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 133311 | Cr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 169121 | Cr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
| 133311 | Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 169121 | Dr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain | xxx |
| 166211 | Cr | Aset Lain-lain BLU | xxx |
| 137221 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| Reklasifikasi dari intra ke ekstra/sebaliknya | | | |
| 391116 | Dr/Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 595113 | Dr/Cr | Beban aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin | xxx |
| 137221 | Dr/Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 133311 | Cr/Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| Koreksi perubahan nilai/kuantitas | | | |
| 133311 | Dr/Cr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 137221 | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pengembangan dengan KDP | | | |
| 133311 | Dr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Penghapusan | | | |
| 137221 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 133311 | Cr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| Transfer keluar | | | |
| 313211 | Dr | Transfer keluar | xxx |
| 137221 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 133311 | Cr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |

| Hibah keluar | | | |
|--|-------|--|-----|
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 137221 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 133311 | Cr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| Reklasifikasi masuk/keluar | | | |
| 133311 | Dr/Cr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| 137221 | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| Koreksi pencatatan | | | |
| 137221 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 133311 | Cr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 137221 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 133311 | Cr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | xxx |
| 137221 | Dr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 133311 | Cr | Gedung dan Bangunan BLU | xxx |
| Penyusutan Reguler | | | |
| 591121 | Dr | Beban penyusutan peralatan dan mesin BLU | xxx |
| 137221 | Cr | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU | xxx |

2.10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU merupakan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun Badan Layanan Umum serta dikuasi oleh BLU dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU yang diperoleh dari donasi diakui pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU menggambarkan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU tersebut sampai siap dipakai.

Pengungkapan

- Disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya,
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai,
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan,
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jurnal mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|------------|--------|---|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 134311 | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 137321 | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |

| Perolehan/perubahan dengan SP2D/SPHL/MPHL-BJS | | | |
|--|----|---|-----|
| 134311 | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 134411 | Cr | Jalan, irigasi, dan jaringan belum diregister BLU | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 134311 | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| 137321 | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 134311 | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 134311 | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
| 134311 | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 137321 | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pertukaran | | | |
| 134311 | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 134311 | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | xxx |
| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 134311 | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 137321 | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |
| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
| 166211 | Dr | Aset Lain-lain BLU | xxx |
| 137321 | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 134311 | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 169211 | Cr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain BLU | xxx |

| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
|---|-------|---|-----|
| 134311 | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 169211 | Dr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain BLU | xxx |
| 166211 | Cr | Aset Lain-lain BLU | xxx |
| 137321 | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| Reklasifikasi dari intra ke ekstra/sebaliknya | | | |
| 391116 | Dr/Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 595114 | Dr/Cr | Beban aset ekstrakomptabel jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| 137321 | Dr/Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 134311 | Cr/Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| Koreksi perubahan nilai/kuantitas | | | |
| 134311 | Dr/Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 137321 | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pengembangan dengan KDP | | | |
| 134311 | Dr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Penghapusan | | | |
| 137321 | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 134311 | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| Transfer keluar | | | |
| 313211 | Dr | Transfer keluar | xxx |
| 137321 | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 134311 | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |

| Hibah keluar | | | |
|--|-------|---|-----|
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 137321 | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 134311 | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| Reklasifikasi masuk/keluar | | | |
| 134311 | Dr/Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| 137321 | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| Koreksi pencatatan | | | |
| 137321 | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 134311 | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | xxx |
| 137321 | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 134311 | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | xxx |
| 137321 | Dr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 134311 | Cr | Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | xxx |
| Penyusutan Reguler | | | |
| 591321 | Dr | Beban penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |
| 137321 | Cr | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU | xxx |

- 2.11. Aset Tetap Lainnya BLU merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Aset Tetap Lainnya BLU yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset

tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya BLU yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya BLU tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya BLU menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya BLU tersebut sampai siap dipakai.

Pengungkapan

- Disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya,
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai,
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan dan penghapusan,
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya BLU.

Jurnal mencatat Aset tetap Lainnya BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|--|--------|---|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 135211 | Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 137421 | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Perolehan/perubahan dengan SP2D/SPHL/MPHL-BJS | | | |
| 135211 | Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 139111 | Cr | Aset Tetap Lainnya yang belum diregister | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 135211 | Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| 137421 | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 135211 | Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 135211 | Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
| 135211 | Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 137421 | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pertukaran | | | |
| 135211 | Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 135211 | Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | xxx |

| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
|--|-------|---|-----|
| 135211 | Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | Xxx |
| 137421 | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |
| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
| 166211 | Dr | Aset Lain-lain BLU | Xxx |
| 137421 | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 135211 | Cr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 169211 | Cr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain BLU | xxx |
| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
| 135211 | Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 169211 | Dr | Akumulasi penyusutan aset lain-lain BLU | Xxx |
| 166211 | Cr | Aset Lain-lain BLU | xxx |
| 137421 | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| Reklasifikasi dari intra ke ekstra/sebaliknya | | | |
| 391116 | Dr/Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | Xxx |
| 595125 | Dr/Cr | Beban aset ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 137421 | Dr/Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 135211 | Cr/Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| Koreksi perubahan nilai/kuantitas | | | |
| 135211 | Dr/Cr | Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 137421 | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pengembangan dengan KDP | | | |
| 135211 | Dr | Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU | xxx |

| Penghapusan | | | |
|--|-------|---|-----|
| 137421 | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | Xxx |
| 135211 | Cr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| Transfer keluar | | | |
| 313211 | Dr | Transfer keluar | Xxx |
| 137421 | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 135211 | Cr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| Hibah keluar | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | Xxx |
| 137421 | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 135211 | Cr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| Reklasifikasi masuk/keluar | | | |
| 135211 | Dr/Cr | Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 137421 | Cr/Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| Koreksi pencatatan | | | |
| 137421 | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 135211 | Cr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | Xxx |
| 137421 | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 135211 | Cr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | Xxx |
| 137421 | Dr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | Xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| 135211 | Cr | Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |
| Penyusutan Reguler | | | |
| 591421 | Dr | Beban penyusutan aset tetap lainnya BLU | Xxx |
| 137421 | Cr | Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU | xxx |

- 2.12. Kontruksi dalam Pengerjaan BLU merupakan aset-aset Badan Layanan Umum yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal Laporan Keuangan.

Pengakuan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.

Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU dilakukan setiap terjadi realisasi pengeluaran yang dilakukan secara bertahap.

Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU dicatat sebesar biaya perolehan.

Pengungkapan

- Rincian Kontrak Konstruksi Dalam Pengerjaan berikut tingkat penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaiannya,
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya,
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan,
- Uang muka kerja yang diberikan, dan
- Retensi

Jurnal mencatat Kontruksi dalam Pengerjaan BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|---|--------|--|--------|
| Saldo Awal | | | |
| 136211 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Perolehan/perubahan dengan SP2D/SPHL/MPHL-BJS | | | |
| 136211 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |
| 13xxxx | Cr | Aset Tetap belum diregister BLU | xxx |
| Transfer masuk | | | |
| 136211 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |
| 313221 | Cr | Transfer masuk | xxx |
| Perolehan sitaan/rampasan | | | |
| 136211 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan sitaan/rampasan | xxx |
| Penyelesaian pembangunan dengan KDP | | | |
| 13xxxx | Dr | Aset TetapBLU | Xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Pembatalan penghapusan/reklasifikasi masuk | | | |
| 136211 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Pertukaran | | | |
| 136211 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |
| 491411 | Cr | Pendapatan pelepasan aset | xxx |
| Perolehan Lainnya | | | |
| 136211 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |
| 491249 | Cr | Pendapatan perolehan aset lainnya | xxx |

| Reklasifikasi dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
|--|-------|--|-----|
| 136211 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | Xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan ke entitas lain | xxx |
| Reklasifikasi ke aset lain-lain | | | |
| 166211 | Dr | Aset Lain-lain BLU | Xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Reklasifikasi dari aset lain-lain | | | |
| 136211 | Dr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |
| 166211 | Cr | Aset Lain-lain BLU | xxx |
| Koreksi perubahan nilai/kuantitas | | | |
| 136211 | Dr/Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Penghapusan | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | Xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Transfer keluar | | | |
| 313211 | Dr | Transfer keluar | Xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Hibah keluar | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | Xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Reklasifikasi masuk/keluar | | | |
| 136211 | Dr/Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |
| 391116 | Cr/Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | xxx |
| Koreksi pencatatan | | | |
| 391116 | Dr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | Xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | xxx |
| Usulan penghapusan barang rusak berat/hilang ke pengelola barang | | | |
| 596111 | Dr | Beban kerugian pelepasan aset | Xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |

| Reklasifikasi ke Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | | | |
|--|----|--|-----|
| 313121 | Dr | Diterima dari entitas lain | Xxx |
| 391116 | Cr | Koreksi nilai aset tetap non revaluasi | Xxx |
| 136211 | Cr | Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | Xxx |

3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas/pihak lain yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun. Piutang jangka panjang pada Satker Kementerian Kesehatan berupa TP/TGR, terdiri dari :

- 3.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
- 3.2. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU

Uraian secara rinci masing-masing akun dan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

3.1. Tagihan TP/TGR adalah proses yang dilakukan terhadap Bendahara dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara pada Satker Non BLU dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TP dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara.

TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam SKTJM setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara.

Tagihan TP/TGR disajikan sebesar nilai tagihan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Jurnal mencatat Tagihan TP/TGR

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 152111 | Dr | Piutang TP/TGR | Xxx |
| 42392x | Cr | Pendapatan Penyelesaian Piutang TP/TGR | Xxx |

Jurnal mencatat Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 5949xx | Dr | Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR | Xxx |
| 156311 | Cr | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP-TGR | Xxx |

- 3.2. Tagihan TP/TGR – BLU adalah proses yang dilakukan terhadap Bendahara dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara pada Sakter BLU dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TP dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara.

TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam SKTJM setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara.

Jurnal untuk mencatat Tagihan TP/TGR BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 152211 | Dr | Piutang TP/TGR -BLU | Xxx |
| 42392x | Cr | Pendapatan Penyelesaian Piutang TP/TGR BLU | Xxx |

Jurnal mencatat Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 594941 | Dr | Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR BLU | Xxx |
| 156411 | Cr | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP-TGR BLU | Xxx |

4. Aset Lainnya

Adalah Aset yang terdapat pada Satker Kementerian Kesehatan yang tidak dapat masuk dalam kelompok Aset Lancar, Aset tetap, dan Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

- 4.1. Aset Tidak Berwujud, pada Satker Non BLU meliputi: *Goodwill*, Hak Cipta, *Royalty*, Paten, *Software*, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, Aset tak Berwujud Lainnya.
- 4.2. Aset Tidak Berwujud BLU, terdapat pada Satker BLU
- 4.3. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
- 4.4. Aset Lain-lain
- 4.5. Aset Lain-lain BLU.

Uraian secara rinci masing-masing akun dan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- 4.1. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan pada Satker Non BLU yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal fisik lainnya atau sebesar nilai yang dibayarkan untuk mendapatkan hak atas penggunaan Aset Tak Berwujud tersebut.

Jurnal mencatat Aset tak Berwujud

Jurnal yang terbentuk pada saat perekaman SP2D (otomatis)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------------------------|--------|
| 166411 | Dr | Aset Lainnya Yang Belum Diregister | xxx |
| 313111 | Cr | Ditagihkan Ke Entitas Lain | xxx |

Jurnal mencatat Kiriman Simak (otomatis)

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------------------------|--------|
| 162111 | Dr | <i>Goodwill</i> | xxx |
| 162121 | Dr | Hak Cipta | xxx |
| 162131 | Dr | Royalti | xxx |
| 162141 | Dr | Paten | xxx |
| 162151 | Dr | <i>Software</i> | xxx |
| 162161 | Dr | Lisensi | xxx |
| 162171 | Dr | Hasil Kajian/Penelitian | xxx |
| 162191 | Dr | Aset Tak Berwujud Lainnya | xxx |
| 166411 | Cr | Aset Lainnya Yang Belum Diregister | xxx |

- 4.2. Aset Tak Berwujud BLU adalah aset non keuangan pada SatkerBLU yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Jurnal mencatat Aset Tak Berwujud BLU:

Pada saat input SP3B terbentuk jurnal (otomatis) :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 139111 | Dr | Aset Tetap Yang Belum Diregister | xxx |
| 111911 | Cr | Kas di BLU | xxx |

Jurnal Aset Tak Berwujud yang dikirim Aplikasi SIMAK (otomatis):

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 162151 | Dr | <i>Software</i> | xxx |
| 162121 | Dr | Hak Cipta | xxx |
| 162131 | Dr | Royalti | xxx |
| 162141 | Dr | Paten | xxx |
| 162191 | Dr | Aset Tak Berwujud Lainnya | xxx |
| 139111 | Cr | Aset Tetap Yang Belum Diregister | xxx |

Jurnal Penyesuaian yang dilakukan oleh Operator SAIBA (manual):

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------------------------|--------|
| 162211 | Dr | Software – BLU | xxx |
| 162221 | Dr | Hak Cipta – BLU | xxx |
| 162231 | Dr | Royalti – BLU | xxx |
| 162241 | Dr | Paten – BLU | xxx |
| 162291 | Dr | Aset Tak Berwujud Lainnya – BLU | xxx |
| 162151 | Cr | Software | xxx |
| 162121 | Cr | Hak Cipta | xxx |
| 162131 | Cr | Royalti | Xxx |
| 162141 | Cr | Paten | xxx |
| 162191 | Cr | Aset Tak Berwujud Lainnya – | xxx |

- 4.3. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan akun aset lainnya yang digunakan untuk mencatat sisa dana yang alokasinya hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan tertentu seperti: Dana Jamkesmas. Jurnal mencatat Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dilakukan oleh Operator SAIBA (manual) :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------|--------|
| 163119 | Dr | Dana Lainnya | Xxx |
| 391121 | Cr | Ekuitas | xxx |

Pengembalian Dana Jamkesmas Tahun 2013 dicatat sebagai setoran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sebagai pendapatan non operasional. Namun demikian mengingat ekuitas sudah diakui pada tahun sebelumnya maka atas pendapatan tersebut harus dilakukan koreksi dengan jurnal :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 423957 | Dr | Penerimaan Kembali Belanja Bansos TAYL | xxx |
| 163119 | Cr | Dana Lainnya | xxx |

- 4.4. Aset Lain-Lain merupakan pos aset lainnya yang digunakan untuk mencatat antara lain: Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan dihentikan dari penggunaannya. Jurnal mencatat Aset Lain-Lain

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------------------------|--------|
| 137xxx | Dr | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | xxx |
| 13xxxx | Cr | Aset Tetap | Xxx |

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|--------|
| 166112 | Dr | Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan | xxx |
| 169122 | Cr | Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam Pemerintahan | xxx |

- 4.5 Aset Lain-Lain BLU merupakan pos aset lainnya yang digunakan untuk mencatat: Piutang dalam proses penghapusan dan/atau telah serahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) DJKN, Aset dalam proses hibah, aset telah dihentikan dari operasional pemerintah, dari Satker BLU.

Jurnal mencatat Aset Lain-Lain BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------------------------|--------|
| 137xxx | Dr | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BLU | xxx |
| 13xxxx | Cr | Aset Tetap BLU | xxx |

Jurnal mencatat Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BLU

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|--------|
| 166113 | Dr | Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan BLU | xxx |
| 169212 | Cr | Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam Pemerintahan BLU | xxx |

5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban pada Satker Kementerian Kesehatan yang diharapkan untuk dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- 5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan utang yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum

membayarkan kewajibannya atas dana SPM-LS kepada pihak ketiga, seperti: uang honor, SPPD yang belum dibayarkan, belanjajasa listrik/telepon, kenaikan atas gaji PNS/tunjangan/rapel gaji, dll yang belum dibayarkan pada akhir periode pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga BLU merupakan kewajiban yang timbul karena pengadaan material, investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan BLU.

Utang kepada pihak ketiga BLU adalah utang yang timbul dari kegiatan operasional BLU (pelayanan rumah sakit dan kesehatan lainnya, pendidikan) terdiri dari belanja yang masih harus dibayar, honor, dll. Diakui pada saat BLU telah menerima barang/jasa dari pihak ketiga tetapi belum dilakukan pembayaran. Pencatatan di Neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan.

Jurnal Utang Kepada Pihak Ketiga

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 51xxxx | Dr | Beban Pegawai | xxx |
| 212111 | Cr | Belanja Pegawai YMH dibayar | xxx |
| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
| 52xxxx | Dr | Beban Barang | xxx |
| 212112 | Cr | Belanja Barang YMH dibayar | xxx |
| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
| 57xxxx | Dr | Beban Bansos | xxx |
| 212115 | Cr | Belanja Bansos YMH dibayar | xxx |

Untuk dana gaji PTT yang belum dibayarkan, jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------|
| 111821 | Dr | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | xxx |
| 212191 | Cr | Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya | xxx |

- 5.2. Pendapatan Diterima Dimuka yaitu pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang. Merupakan penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu (misal : PNBPN, Sewa), tetapi belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga.

Pada Satker BLU, pendapatan diterima dimuka adalah termasuk penerimaan pendapatan dari pihak lain (mahasiswa, pasien, vendor, dll) sebagai pembayaran jasa BLU tetapi belum diberikan pelayanan.

Diakui pada saat Satker dan SatkerBLU telah menerima kas tetapi belum memberikan barang/jasa kepada pihak lain. Pencatatan di Neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan.

Jurnal Pendapatan Diterima Dimuka

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 42xxxx | Dr | Pendapatan | xxx |
| 312211 | Cr | Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka | xxx |

- 5.3. Uang Muka dari KPPN merupakan utang yang timbul akibat Bendahara Satker pada tanggal Neraca belum menyeter sisa UP/TUP. Merupakan akun penyeimbang/lawan dari Kas di Bendahara Pengeluaran pada kelompok akun Aset Lancar.

Jurnal mencatat Uang Muka dari KPPN

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------------------|--------|
| 111611 | Dr | Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx |
| 219511 | Cr | Uang Muka dari KPPN | Xxx |

- 5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan akun kewajiban jangka pendek untuk mencatat kewajiban lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Utang Kepada Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka,

Uang Muka dari KPPN, dan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Jurnal Utang Jangka Pendek Lainnya

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------|
| 111821 | Dr | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | xxx |
| 212191 | Cr | Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya | xxx |

6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki SatkerKementerian Kesehatan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban

7. Ilustrasi Neraca Lengkap (Tahunan)

| KEMENTERIAN KESEHATAN RI | | | |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| N E R A C A | | | |
| Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 | | | |
| URAIAN | 31 Desember 20x1 | 31 Desember 20x0 | KENAIKAN (PENURUNAN) |
| | | Audited | |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Kas di Bendahara Penerimaan | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Kas pada BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Investasi jangka pendek BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Belanja dibayar di muka | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Uang Muka Belanja | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Piutang Bukan Pajak | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Piutang Bukan Pajak (Neto) | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Bagian Lancar Tagihan TGR | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Bagian Lancar Tagihan TGR (Neto) | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Piutang Kegiatan Operasional BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Piutang Kegiatan Operasional BLU (Neto) | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Piutang Kegiatan Non Operasional BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Penyisihan Piutang Kegiatan Non | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Piutang Kegiatan Non Operasional BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Persediaan | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Persediaan BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| JUMLAH ASET LANCAR | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Tanah BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Peralatan dan Mesin | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Peralatan dan Mesin BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Gedung dan Bangunan | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Gedung dan Bangunan BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Aset tetap Lainnya | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Aset tetap Lainnya BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Akumulasi Penyusutan Aset tetap | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| JUMLAH ASET TETAP | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | |
| Tagihan TP/ TGR | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Tagihan TP/ TGR (Neto) | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Tagihan TP/ TGR BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Tagihan TP/ TGR BLU (Neto) | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Piutang Jangka Panjang Lainnya | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Piutang Jangka Panjang Lainnya (Neto) | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset tidak berwujud | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Aset tidak berwujud BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Dana yang Dibatasi Penggunaannya | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Aset Lain-lain | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Aset Lain-lain BLU | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi AsetLain | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| JUMLAH ASET LAINNYA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| JUMLAH ASET | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang kepada Pihak ketiga | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Hibah yang belum disahkan | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Pendapatan Diterima Dimuka | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Uang Muka dari KPPN | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Pendapatan Yang Ditangguhkan | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| JUMLAH KEWAJIBAN | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| EKUITAS DANA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| EKUITAS DANA LANCAR | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| JUMLAH EKUITAS DANA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

Selanjutnya Ilustrasi Neraca masing-masing jenjang pelaporan dan sesuai Jenis Satker (Non BLU dan BLU) disajikan dalam Lampiran, mencakup :

1. Ilustrasi Neraca Satker BLU, Semesteran dan Tahunan
2. Ilustrasi Neraca Satker Non BLU, Semesteran dan Tahunan
3. Ilustrasi Neraca Wilayah Vertikal, Semesteran dan Tahunan
4. Ilustrasi Neraca Wilayah Dekonsentrasi, Semesteran dan Tahunan
5. Ilustrasi Neraca Eselon I, Semesteran dan Tahunan
6. Ilustrasi Neraca Kementerian, Semesteran dan Tahunan.

Penyajian sesuai ilustrasi diatas dilakukan dengan cara dientry menggunakan program excel file, berdasarkan data *print out* hasil aplikasi SAIBA.

F. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. CaLK juga menyajikan informasi penting yang berkaitan dengan profil Satuan Kerja dan/atau entitas pelaporan, pelaksanaan anggaran yang tidak masuk LRA dan pengelolaan BMN yang tidak masuk dalam Neraca, serta informasi penting lainnya dalam upaya mendukung kejelasan Laporan Keuangan.

CaLK disusun dan dilaporkan pada setiap akhir Semesteran dan Tahunan disampaikan dalam satu kesatuan dengan Laporan Keuangan Lainnya ke Unit Akuntansi Instansi di atasnya.

CaLK dibuat dengan tujuan:

1. Laporan Keuangan mudah dipahami
2. Menghindari salah paham (*misleading*)
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap akun penting
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas
5. Pengungkapan secara paripurna (*full disclosure*)

Secara umum ketentuan penyajian CaLK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan CaLK

1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Nilai realisasi pendapatan dan belanja secara netto dijelaskan dalam ringkasan CaLK, dalam penjelasan umum pendapatan dan belanja disajikan data brutto dan diuraikan pengembalian pendapatan dan belanja, sedangkan pada penjelasan per akun disajikan secara netto dengan membandingkan data Laporan Keuangan tahun sebelumnya.

a. Pendapatan

Penjelasan tentang pendapatan meliputi: Estimasi/Target dan Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan yaitu:

1) Realisasi Pendapatan

- a) Realisasi Pendapatan didasarkan kepada Laporan Realisasi Pendapatan Bulanan/Triwulanan (LRPS.B/W01) yang memuat mengenai realisasi pendapatan PNBPN dan Hibah. Laporan ini digunakan untuk menjelaskan LRA Pendapatan dan Belanja bruto.

Untuk menjelaskan realisasi per-jenis pendapatan (dua digit) dapat mengambil angka laporan LRA Semester/Tahunan (LRAS/T) dan menambahkannya dengan angka pada pengembalian pendapatan. Laporan ini digunakan untuk menjelaskan LRA Pendapatan secara neto pada ringkasan CaLK. Jelaskan pula pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) serta pendapatan hibah.

- b) Dalam penjelasan Laporan Realisasi Pendapatan perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa akun yang berhubungan dengan Neraca, misalnya:
- Pendapatan angsuran/pelunasan TP/TGR yang berhubungan dengan akun di Neraca.

- Penjualan aset yang berhubungan dengan akun aset tetap dalam neraca yaitu pengurangan aset tetap.
- c) Dalam penjelasan analisis atas pendapatan, nilai rupiah realisasi/absolut dan proporsi/prosentase) agar dibandingkan dengan estimasi/target dan realisasi tahun sebelumnya.
- 2) Realisasi Pengembalian Pendapatan
- Realisasi pengembalian pendapatan didasarkan kepada Laporan Pengembalian Pendapatan Bulanan/Triwulanan (LPPE.B/W01) yang memuat mengenai realisasi pengembalian pendapatan PNPB dan Hibah. Agar dijelaskan realisasi pengembalian pendapatan pada CaLK.
- 3) Selain penjelasan pendapatan dan pengembalian pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 yang mendasarkan data sesuai format hasil aplikasi sebagaimana disebutkan di atas, agar dibuat pula penjelasan sesuai jenjang pelaporan:
- a) CaLK Satker, menjelaskan pendapatan per jenis pendapatan dari akun (empat digit).
 - b) CaLK Wilayah, menjelaskan pendapatan per jenis pendapatan (empat digit) masing-masing Satker dan data dibuat rekap dalam tabel excel.
 - c) CaLK Unit Eselon I, menjelaskan pendapatan per jenis pendapatan (empat digit) masing-masing Satker dan data dibuat dalam tabel excel, dan direkap menurut Jenis Kewenangan.
 - d) CaLK Kementerian, menjelaskan pendapatan per jenis pendapatan (empat digit) masing-masing Satker dan data dibuat dalam tabel excel, dan direkap menurut Jenis Kewenangan dan Unit Eselon I.
- 4) Sedapat mungkin dijelaskan pula adanya realisasi pendapatan PNPB yang diperoleh dari sumber pendapatan yang tidak ditargetkan (bila ada) dan

diuraikan pula sumber PNBPN yang tidak ditargetkan tersebut.

b. Belanja

Penjelasan tentang belanja meliputi: Anggaran dan Realisasi Belanja serta Realisasi Pengembalian Belanja, yaitu:

1) Realisasi Belanja

Laporan Realisasi Belanja Bulanan/Triwulanan (LRBS.B/W01) yang memuat mengenai realisasi belanja Satuan Kerja, laporan ini digunakan untuk menjelaskan LRA Belanja secara bruto pada penjelasan LRA Belanja.

Untuk menjelaskan realisasi per- jenis belanja (dua digit) dapat mengambil angka pada laporan LRA (LRAS/T) dan menambahkannya dengan angka pada Laporan Pengembalian Belanja berdasarkan jenis belanjanya. Laporan ini digunakan untuk menjelaskan LRA Belanja secara neto pada ringkasan CaLK.

Dalam penjelasannya (nilai rupiah/absolut dan proporsi/prosentase) agar dibandingkan dengan anggarannya dan realisasi tahun sebelumnya.

2) Realisasi Pengembalian Belanja

Penjelasan mengenai realisasi pengembalian belanja dapat diambil dari Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Bulanan/Triwulanan (LRBS.B/W01) dan kelompokkan ke dalam jenis belanja.

3) Selain penjelasan belanja dan pengembalian belanja sesuai ketentuan PMK Nomor 177/PMK/2015 yang mendasarkan data sesuai format hasil aplikasi sebagaimana disebutkan di atas, agar dibuat pula penjelasan sesuai jenjang pelaporan:

- a) CaLK Satker, menjelaskan belanja per program dan kegiatan.
- b) CaLK Wilayah, menjelaskan belanja per program dan kegiatan masing-masing Satker dan data dibuat rekap dalam tabel excel.
- c) CaLK Unit Eselon I, menjelaskan belanja per program masing-masing Satker dan data dibuat

dalam tabel excel, dan direkap menurut Jenis Belanja, Sumber Dana, Jenis Kewenangan.

d) CaLK Kementerian, menjelaskan belanja per program, jenis belanja masing-masing Satker dan data dibuat dalam tabel excel, dan direkap menurut Jenis Belanja, Sumber dana, Jenis Kewenangan, dan Unit Eselon I.

4) Sedapat mungkin dijelaskan pula adanya realisasi belanja yang diuraikan sesuai detail belanja (enam digit) yang mencapai proporsi terbesar dan diuraikan pula sebab-sebab tingginya realisasi belanja termasuk jika ada realisasi belanja yang realisasinya melebihi PAGU anggarannya.

2. Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter.

a. Pendapatan – LO

1) Pengakuan Pendapatan – LO :

- a) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- c) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

- d) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
 - e) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 2) Klasifikasi Sumber Pendapatan – LO :
- a) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.
 - b) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Penyajian Pengembalian atas Pendapatan – LO :
- a) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 - b) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-21 recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
 - c) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-25 recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

b. Beban

1) Pengakuan Beban dilakukan pada saat :

- a) Timbulnya Kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara/Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
- b) Terjadinya Konsumsi Aset, adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah.
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi: (a) Metode garis lurus (*straight line method*); (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*); (c) Metode unit produksi (*unit of production method*).

- d) Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

2) Klasifikasi Beban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

- a) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain.
- b) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- c) Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3) Penyajian atas Koreksi atas Beban

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, dan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Yaitu pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Termasuk didalamnya antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

e. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan (c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos yang disajikan antara lain :

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas Akhir

Penyajian atas penjelasan pos-pos tersebut memiliki struktur sebagai berikut :

- Perbandingan dengan periode yang lalu
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu
- Rincian yang diperlukan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan

4. Penjelasan Neraca

Penyajian dan pengungkapan saldo masing-masing akun neraca agar disandingkan dengan saldo neraca sebelumnya. Untuk Laporan Keuangan Tahunan harus dibandingkan dengan Neraca Tahunan tahun sebelumnya setelah diaudit (*audited*).

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas pada Neraca merupakan hasil penerimaan dana UP/TUP dikurangi dengan penyetoran UP/TUP yang disetorkan sebelum tanggal 31 Desember

Jika pada akhir tahun (31 Desember ...) masih terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, maka agar diteliti kebenaran saldo kas tersebut. Apabila saldo kas telah disetorkan setelah tahun anggaran (bulan Januari), jelaskan dan lampirkan SSBP untuk penyetoran kas tersebut.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas pada Neraca merupakan hasil penginputan melalui Jurnal Aset yang didasarkan pada saldo kas pada pembukuan Bendahara Penerimaan.

Jika pada akhir tahun masih terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang dananya belum disetor ke Kas Negara. Maka agar diteliti kebenaran saldo kas tersebut. Apabila saldo kas tersebut telah disetorkan setelah tahun anggaran (bulan Januari), maka agar dijelaskan dan dilampirkan SSBP untuk penyetoran kas tersebut.

c. Kas Lainnya dan Setara Kas

Mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan (UP). Beberapa kemungkinan adanya “Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran” dapat terjadi karena:

- 1) Adanya pendapatan yang telah diterima tetapi pada tanggal neraca belum disetor ke Kas Negara, meliputi:
 - a) Bunga dan Jasa Giro Rekening yang belum menerapkan program *Treasury National Polling* (TNP),
Terhadap kondisi ini kontra akunnya “Pendapatan PNBK”
 - b) Pungutan pajak yang belum disetor ke Kas Negara, Terhadap kondisi ini kontra akunnya “Utang Pajak Yang Akan Disetor”
 - c) Pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Negara.
- 2) Adanya kewajiban Satker kepada pihak lain, yaitu: Jika ada dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran seperti: Uang Honor yang belum dibayarkan, atau SPPD yang belum dibagikan kepada pihak lain.

Terhadap kondisi ini seharusnya *diinput* dengan kontra akun “212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya” atau pada akun “212121 Utang Pada Pihak Ketiga BLU”.

d. Piutang

Saldo Piutang pada Neraca merupakan hasil penginputan melalui Jurnal Aset yang didasarkan atas saldo piutang pada pembukuan piutang.

Jika pada periode pelaporan masih terdapat saldo, agar dijelaskan masing-masing akun Piutang, yaitu:

- Piutang PNBPN, dicatat berdasarkan Surat Penagihan (SPN/Surat Perjanjian dan/atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) PNBPN yang sampai tanggal neraca belum dibayar oleh wajib bayar dan harus dilaporkan di neraca sebagai Piutang PNBPN. Atas saldo tersebut dirinci sesuai wajib bayar.
- Piutang berdasarkan Perikatan, dicatat berdasarkan Perjanjian (Sewa-menyewa) yang ada yang sampai dengan tanggal neraca belum dibayar oleh wajib bayar dan harus dilaporkan di neraca sebagai piutang sewa.
- Bagian Lancar TP/TGR dicatat berdasarkan nilai nominal yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Saldo yang disajikan berdasarkan hasil perhitungan sesuai jadwal pembayaran dari pihak wajib bayar disertai dokumen SSBP atas pembayaran tersebut, sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- Piutang Bukan Pajak Lainnya, dicatat berdasarkan piutang di luar Piutang PNBPN, Piutang Sewa-menyewa, dan Bagian Lancar TP/TGR.
- Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di buat berdasarkan Klasifikasi Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

e. Persediaan

Saldo Persediaan pada Neraca didasarkan pada pembukuan persediaan didukung hasil *stock opname* fisik barang. Jika terdapat perbedaan antara hasil Aplikasi Persediaan dengan *stock opname*, maka sebab-sebab perbedaannya harus dijelaskan dalam CaLK.

f. Aset tetap

Saldo Aset tetap pada Neraca didasarkan pada pengiriman data SIMAK-BMN. Saldo Aset tetap pada Neraca harus sama dengan Saldo pada Laporan Barang.

Untuk menginput data Aset tetap, didasarkan pada:

- Saldo Awal, merupakan saldo dari neraca periode sebelumnya.
- Mutasi Tambah, merupakan saldo mutasi tambah laporan barang ditambah dengan penginputan Saldo Awal pada tahun anggaran berjalan yang angkanya diambil dari Laporan Barang
- Mutasi Kurang, merupakan saldo dari mutasi kurang Laporan Barang
- Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset tetap berdasarkan tabel masa manfaat dan disusutkan dengan metode garis lurus.
- Saldo Akhir, merupakan saldo dari saldo akhir Laporan SIMAK-BMN.

Uraian mengenai mutasi Aset/BMN didasarkan pada transaksi BMN yang telah direkam dalam Aplikasi SIMAK-BMN yang mencakup :

- 1) Mutasi BMN yang disebabkan adanya realisasi belanja (belanja Modal, Belanja Bahan/Barang) yang menghasilkan penambahan BMN.
- 2) Mutasi BMN yang disebabkan bukan dari hasil belanja seperti (hibah masuk, transfer masuk, hasil input realisasi belanja tahun lalu, Reklafisikasi KDP, dll) yang menyebabkan penambahan BMN.
- 3) Mutasi BMN yang disebabkan bukan dari hasil belanja seperti (hibah keluar, transfer keluar, penghapusan, reklasifikasi ke Aset Lainnya, dll) yang menyebabkan pengurangan BMN.

Selanjutnya untuk dapat menjelaskan mutasi penambahan dan pengurangan aset, dapat dilihat dari CaLBMN yang dibuat oleh petugas SIMAK-BMN. Penjelasan dapat dilakukan dengan meminta daftar transaksi berdasarkan periode laporan dari petugas SIMAK-BMN.

Selain itu harus diungkapkan mengenai penambahan BMN, yang berasal dari realisasi belanja tahun berjalan (Belanja Modal, Belanja Bahan/Belanja Barang) maupun sumber lainnya. Dan penjelasan atas terjadinya pengurangan aset tetap.

Rincian realisasi Belanja Modal dapat diambil dari Neraca Percobaan. Perlu diperhatikan bahwa realisasi Belanja Modal paling tidak harus sama dengan penambahan aset pada Laporan Barang, jika tidak sama beberapa kemungkinan penyebabnya:

- Belum dilakukan pencatatan atau entry BMN pada SIMAK-BMN.
- Pengembangan Aset/BMN pihak lain yang dilaksanakan dari Belanja Modal, sehingga penambahan BMN tidak dapat dilakukan oleh Satker yang bersangkutan.
- Terdapat pembelian BMN yang berasal dari Belanja Barang/Belanja Bahan, atau
- Terdapat Belanja Modal yang realisasinya bukan berupa aset tetap.

g. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang berupa Tagihan TP/TGR, untuk periode satu tahun anggaran saldo ini tidak berubah, kecuali jika ada penambahan data baru atau pengurangan karena adanya penghapusan/pelunasan Tagihan TP/TGR.

Saldo Tagihan TP/TGR akan direklasifikasi ke dalam "Bagian Lancar TP/TGR" untuk Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo pada periode satu tahun anggaran berikutnya.

h. Aset Lainnya

Hal-hal yang harus dijelaskan dalam CaLK atas Aset Lainnya, mencakup:

- 1) Aset Tak Berwujud adalah adanya mutasi penambahan/pengurangan, termasuk pada Satker BLU.
- 2) Aset Lain-lain, dapat berupa:
 - a) Aset/Piutang dalam proses penghapusan/penagihan dan/atau telah diserahkan kepada PUPN-DJKN, agar dijelaskan kendala/permasalahan yang dihadapi dalam proses tersebut.

- b) Aset DK/TP yang dalam proses hibah, agar dijelaskan kendala/permasalahan yang dihadapi dalam proses hibah tersebut.
- 3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya berupa Saldo Dana Jamkesmas pada Satker Setditjen BUK, agar dijelaskan sumber data dan posisi saldo masing-masing penerima dana Jamkesmas pada Satker Vertikal (BLU dan Non BLU).
- i. Kewajiban Jangka Pendek
 - Merupakan akun lawan dari akun-akun Lancar yang telah sajikan pada posisi debet kelompok akun Aset Lancar.
Penjelasannya mengikuti hal-hal yang terkait dengan penjelasan pada akun Lancar tersebut.
Selain itu juga terdapat:
 - 1) Utang kepada Pihak Ketiga merupakan akun lawan dari Ekuitas Dana Lancar berupa: Dana YHDU Pembayaran Hutang Jangka Pendek.
 - 2) Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun lawan dari Ekuitas Dana Lancar berupa: Barang/Jasa yang Harus Diserahkan.
Penjelasannya mengikuti hal-hal yang terkait dengan penjelasan pada akun Ekuitas tersebut.

5. Penjelasan Hal-Hal Penting Terkait Laporan Keuangan

Hal penting terkait Laporan Keuangan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi antara lain :

- a. Rekening Pemerintah (APBN dan Hibah)
- b. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
- c. Informasi Akrual atas transaksi Pendapatan dan Belanja
- d. Permasalahan dalam Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- e. Dan lain-lain.

G. PENYESUAIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN NERACA

Penyesuaian merupakan sarana memutakhirkan data dalam akuntansi berbasis akrual. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban akrual, sehingga

laporan yang akan disajikan memenuhi konsep periodesitas dan bahkan dapat memenuhi prinsip *matching cost againts revenue*, walaupun dalam pemerintahan tidak terlalu ditonjolkan. Dengan penyesuaian pendapatan dapat disajikan sesuai dengan nilai pendapatan yang sesungguhnya yaitu semua hak yang sudah diterima maupun belum diterima, tidak sebatas kas yang diterima saja. Demikian pula beban, yang merupakan kewajiban atau pengorbanan yang terjadi pada periode akuntansi tersebut.

Penyesuaian dilakukan antara lain untuk:

1. Kas di Bendahara Penerimaan
2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima/Piutang Pajak/PNBP
3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
4. Pendapatan Diterima Dimuka
5. Belanja Dibayar Di Muka
6. Uang Muka Belanja
7. Belanja yang Masih Harus Dibayar
8. Persediaan
9. Penyisihan Piutang
10. Penyusutan
11. Koreksi Antar Beban
12. Piutang Jangka Panjang
13. Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
14. Piutang Jangka Pendek
15. Transfer Masuk
16. Transfer Keluar
17. Koreksi Beban Aset
18. Kas Lainnya di BLU
19. Uang Muka Belanja
20. Perolehan Aset
21. Koreksi Piutang/Utang
22. Hibah Langsung

1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Satker yang masih ada pada akhir periode pelaporan mengindikasikan masih adanya penerimaan negara yang belum disetor ke Kas Negara. Penerimaan tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan LRA, tetapi

sudah harus diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional.

- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 08) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 111711 | Dr | Kas di Bendahara Penerimaan | Xxx |
| 423xxx | Cr | Pendapatan... | xxx |

Contoh :

Apabila pada akhir tahun 20x0 saldo Kas Bendahara di Penerimaan sebesar Rp 10 juta, yang kemudian disetorkan pada Januari 20X1 :

- ✓ Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada akhir tahun:
 - sudah merupakan pendapatan di LO dan belum merupakan pendapatan di LRA (karena Kas-nya belum diterima oleh Kas Negara)

| Laporan Operasional | 20x0 | 20x1 | Laporan Realisasi Anggaran | 20x0 | 20x1 |
|---------------------|---------|------|----------------------------|------|---------|
| Pendapatan PNPB | 10 juta | 0 | Pendapatan PNPB | 0 | 10 juta |

- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 31 Desember 20x0 | Kas di Bendahara Penerimaan | 10 juta | |
| | Pendapatan PNPB | | 10 juta |

- ✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0 :

| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisas | Laporan Operasional | 20x0 | | |
|----------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| Pendapatan PNPB | 100 juta | 0 | Pendapatan PNPB | 10 juta | | |
| | | | Surplus LO | 10 juta | | |
| | | | | | | |
| Laporan Perubahan Ekuitas | 20x0 | | Neraca | | | |
| Ekuitas Awal | 0 | | Aset : | | Kewajiban | 0 |
| Surplus/ defisit LO | 10 juta | | Kas di Bendahara Penerimaan | 10 juta | Ekuitas | 10 juta |
| Transaksi antar entitas | 0 | | Jumlah Aset | 10 juta | Jumlah Kewajiban + Ekuitas | 10 juta |
| Ekuitas Akhir | 10 juta | | | | | |

Bila pada periode berikutnya terdapat penyetoran uang yang ada pada Bendahara Penerimaan di atas, pada saat tersebut juga dilakukan penyesuaian saldo kas dan pendapatan yang telah tercatat di Bendahara Penerimaan. Misalnya saldo kas di

Bendahara Penerimaan per 31 Desember 20x0 disetor ke Kas Negara pada tanggal 2 Januari 20x1. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal penyetoran adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|----------------|-----------------------------|---------|---------|
| 2 Januari 20x1 | Pendapatan Sewa | 10 juta | |
| | Kas di Bendahara Penerimaan | | 10 juta |

2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan bukan pajak yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara. Pendapatan ini belum dicatat sebagai pendapatan menurut basis kas, tetapi sudah dapat diakui sebagai pendapatan akrual dalam Laporan Operasional dan harus disajikan di Neraca sebagai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengakuan pendapatan ini seperti surat perjanjian, transaksi bisnis berjangka, surat keputusan pembebanan, dan lain-lain. Jika terdapat dokumen seperti diatas dan diketahui ataudapat dihitung nilainya maka dicatat dalam Jurnal Penyesuaian sebagai berikut:

- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 02) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------|
| 114311 | Dr | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | Xxx |
| 423xxx | Cr | Pendapatan... | Xxx |
| 424xxx | Cr | Pendapatan BLU... | Xxx |

Contoh :

- ✓ Pada akhir Desember 20x0 telah disewakan gedung kepada pihak III yang baru dibayarkan pada Januari 20x1 sebesar Rp 10 juta:
- ✓ Saldo Pendapatan PNBPN pada akhir tahun :
 - sudah merupakan pendapatan di LO dan belum merupakan pendapatan di LRA (Karena Kas-nya belum diterima oleh Kas Negara)

| | | | | | |
|---------------------|---------|------|----------------------------|------|---------|
| Laporan Operasional | 20x0 | 20x1 | Laporan Realisasi Anggaran | 20x0 | 20x1 |
| Pendapatan Sewa | 10 juta | 0 | Pendapatan Sewa | 0 | 10 juta |

Pada Neraca tahun 20x0 dicatat juga piutang :
 “Pendapatan yang Masih Harus Diterima” sebesar Rp 10 juta :

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------|--|---------|---------|
| Des 31 | Pendapatan PNBPN yang Masih Harus Diterima | 10 juta | |
| | Pendapatan Sewa | | 10 juta |

- ✓ Pada tahun 20x0 walaupun uang sewa belum diterima, namun Laporan Operasional sudah harus mencatat adanya Pendapatan Sewa :

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|-----------------|---------|---------|
| Desember 20x0 | Piutang PNBPN | 10 juta | |
| | Pendapatan Sewa | | 10 juta |

- ✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0:

| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisasi | Laporan Operasional | 20x0 |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------|---------|
| Pendapatan Sewa | 100 juta | 0 | Pendapatan Sewa | 10 juta |
| | | | Surplus LO | 10 juta |

| Laporan Perubahan Ekuitas | 20x0 | Neraca | | | |
|---------------------------|---------|---------------|-----------|--------------------------|---------|
| Ekuitas Awal | 0 | Aset : | Kewajiban | 0 | |
| Surplus/defisit LO | 10 juta | Piutang PNBPN | 10 juta | Ekuitas | 10 juta |
| Transaksi antar entitas | 0 | Jumlah Aset | 10 juta | Jumlah Kewajiban+Ekuitas | 10 juta |
| Ekuitas Akhir | 10 juta | | | | |

Bila pada periode berikutnya terdapat pembayaran atas piutang yang tersaji pada Laporan Keuangan akhir tahun pada saat tersebut juga dilakukan penyesuaian saldo piutang. Misalnya wajib bayar PNBPN pada Januari20x1 melakukan pelunasan pembayaran atas piutang PNBPN Tahun 20x0. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal penyetoran adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|--------------|------------------|---------|---------|
| Januari 20x1 | Pendapatan PNBPN | 10 juta | |
| | Piutang PNBPN | | 10 juta |

3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan, dapat berupa bunga jasa giro

yang belum disetor kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai, atau pajak yang belum disetor.

Dalam hal tersebut harus disajikan sesuai dengan substansinya. Jurnal yang mungkin akan dibuat adalah sebagai berikut:

✓ Diinput melalui jurnal reklasifikasi neraca sebagai berikut:

a. Honorarium milik pihak ketiga

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------|
| 111821 | Dr | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | xxx |
| 212191 | Cr | Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya | xxx |

✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 09) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 111821 | Dr | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | xxx |
| 423221 | Cr | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) | xxx |

b. Bunga, Jasa Giro

✓ Diinput melalui jurnal reklasifikasi neraca sebagai berikut:

c. Pajak Yang Belum Disetor

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 111821 | Dr | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | xxx |
| 219961 | Cr | Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor | xxx |

Contoh :

a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan bunga jasa giro yang belum disetor (misal saldo akhir tahun 20x0 Rp 10 juta). Sudah merupakan pendapatan di LO dan belum merupakan pendapatan di LRA (Karena Kas-nya belum diterima oleh Kas Negara):

| Laporan Operasional | 20x0 | 20x1 | Laporan Realisasi Anggaran | 20x0 | 20x1 |
|----------------------|---------|------|----------------------------|------|---------|
| Pendapatan Jasa Giro | 10 juta | 0 | Pendapatan Jasa Giro | 0 | 10 juta |

- ✓ Pada tahun 20x0 pada Laporan Operasional sudah harus mencatat adanya Pendapatan Jasa Giro :

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|
| Desember 20x0 | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 10 juta | |
| | Pendapatan Jasa Giro/PNBP | | 10 juta |

- ✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0:

| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisasi | | Laporan Operasional | 20x0 | |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| Pendapatan Jasa Giro | 100 juta | 0 | | Pendapatan Jasa Giro | 10 juta | |
| | | | | Surplus LO | 10 juta | |
| Laporan Perubahan Ekuitas | | | | Neraca | | |
| Ekuitas Awal | 0 | | Aset : | | Kewajiban | 0 |
| Surplus/defisit LO | 10 juta | | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 10 juta | Ekuitas | 10 juta |
| Transaksi antar entitas | 0 | | Jumlah Aset | 10 juta | Jumlah Kewajiban + Ekuitas | 10 juta |
| Ekuitas Akhir | 10 juta | | | | | |

Bila pada periode berikutnya terdapat penyetoran uang yang ada pada Bendahara Pengeluaran di atas pada saat tersebut juga dilakukan penyesuaian saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran. Misalnya saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 20x0 disetor ke Kas Negara pada tanggal 5 Januari 20x1. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal penyetoran adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------|
| Januari 20x1 | Pendapatan Jasa Giro/PNBP | 10 juta | |
| | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | | 10 juta |

Jurnal di atas berlaku juga untuk penyetoran saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 20x1, yang dilakukan pada tahun 20x0

- b. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan uang pihak ketiga karena realisasi belanja yang telah terjadi (dibebankan pada DIPA dan terbit SPM/SP2D), tetapi belum diserahkan kepada yang berhak.
 - ✓ Telah diterbitkan SPM/SP2D belanja honor Rp 75 juta. Pada Akhir tahun 20x0 terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berupa honor yang belum

diberikan ke pegawai sebesar Rp 10 juta, yang kemudian diberikan pada Januari 20x1 :

| Laporan Operasional | 20x0 | 20x1 | Laporan Realisasi Anggaran | 20x0 | 20x1 |
|---------------------|---------|------|----------------------------|---------|------|
| Beban Honor | 10 juta | 0 | Belanja Honor | 10 juta | 0 |

Skema diatas menunjukkan bahwa pada saat dikeluarkan SPM/SP2D berarti honor sudah merupakan belanja di LRA dan juga sudah merupakan beban di LO seluruhnya meskipun masih ada Rp 10 juta yang belum diserahkan. Jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|
| Desember 20x0 | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 10 juta | |
| | Utang Kepada Pihak Ketiga | | 10 juta |

✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0:

| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisasi | Laporan Operasional | 20x0 | | |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|---------------------------|---------|
| Belanja Honor | 100 juta | 75 juta | Beban Honor | 75 juta | | |
| | | | Defisit LO | -75 juta | | |
| | | | Neraca | | | |
| Laporan Perubahan Ekuitas | 20x0 | | Aset : | | Kewajiban | 10 juta |
| Ekuitas Awal | 0 | | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 10 juta | Ekuitas | 0 |
| Surplus/Defisit LO | -75 juta | | Jumlah Aset | 10 juta | Jumlah Kewajiban+ Ekuitas | 10 juta |
| Transaksi antar entitas | 75 juta | | | | | |
| Ekuitas Akhir | 0 | | | | | |

Pada saat uang pihak ketiga diserahkan kepada yang berhak, dilakukan penyesuaian kembali atas saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran dan utang kepada pihak ketiga.

c. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran, tetapi belum disetor ke kas negara. Pajak ini seharusnya segera disetor ke kas negara, dan merupakan pendapatan pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Dalam hal ini tidak tercatat apapun pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan

terkait akun Hutang Pajak yang hanya tercatat pada Neraca. Misal potongan pajak yang belum disetor sebesar Rp 10 juta :

| Neraca 20x0 | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| Aset : | | Kewajiban | 10 juta |
| Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 10 juta | Ekuitas | 0 |
| Jumlah Aset | 10 juta | Jumlah Kewajiban+ Ekuitas | 10 juta |

Atas pajak yang belum disetor tersebut jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|--|---------|---------|
| Desember 20x0 | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 10 juta | |
| | Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor | | 10 juta |

Akun Potongan pajak yang belum disetor merupakan akun kewajiban bagi satuan kerja pada K/L. Pada saat konsolidasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) akun ini dieliminasi dengan akun pendapatan pajak.

4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening Kas Negara tetapi belum menjadi hak Pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan ini dapat berupa kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak (WP), Pembayaran PNBPN untuk masa melebihi tanggal pelaporan, dan lain-lain.

- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 01) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 423xxx | Dr | Pendapatan... | xxx |
| 424xxx | Dr | Pendapatan... | xxx |
| 219211 | Cr | Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka | xxx |
| 219212 | Cr | Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | xxx |

Contoh :

a. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Pada akhir Desember 20x0 diterima uang sewa gedung yang langsung disetor ke Kas Negara (SSBP) sebesar Rp 10 juta. Gedung tersebut disewakan untuk periode Januari 20x1.

| | | | | | |
|---------------------|------|---------|----------------------------|---------|------|
| Laporan Operasional | 20x0 | 20x1 | Laporan Realisasi Anggaran | 20x0 | 20x1 |
| Pendapatan Sewa | 0 | 10 juta | Pendapatan Sewa | 10 juta | 0 |

Pada saat penginputan SSBP tersebut ke dalam aplikasi SAIBA di Desember 20x0, secara otomatis akan tercatat Pendapatan Sewa pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 10 juta yang seharusnya secara akrual tidak boleh tercatat di Laporan Operasional, melainkan hanya di Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut :

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| Desember 20x0 | Pendapatan Sewa | 10 juta | |
| | Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | | 10 juta |

✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------|------|-------------------|----------|
| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisasi | Laporan Operasional | | | |
| Pendapatan Sewa | 100 juta | 10 juta | Pendapatan Sewa | 20x0 | 0 | |
| | | | Surplus LO | | 0 | |
| | | | | | | |
| Laporan | 20x0 | | Neraca | | | |
| Ekuitas Awal | 0 | | Aset : | 0 | Kewajiban | 10 juta |
| Surplus/ defisit LO | 0 | | | | Ekuitas | -10 juta |
| Transaksi antar entitas | -10 juta | | Jumlah Aset | 0 | Jumlah Kewajiban+ | 0 |
| Ekuitas Akhir | -10 juta | | | | | |

b. Pendapatan yang diterima dimuka untuk masa yang melewati tanggal pelaporan (lintas periode).

Pada Maret 20x0 diterima uang sewa gedung sebesar Rp 36 juta dan langsung disetor ke Kas Negara (SSBP). Gedung tersebut disewakan untuk periode Maret 20x0 sampai dengan Februari 2018 (36 bulan).

| | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|------|
| Laporan Realisasi Anggaran | 20x0 | 20x1 | 2017 | 2018 |
| Pendapatan Sewa | 36 juta | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|
| Laporan Operasional | 20x0 | 20x1 | 2017 | 2018 |
| Pendapatan Sewa | 10 juta | 12 juta | 12 juta | 2 juta |

Pada saat penginputan SSBP tersebut ke dalam aplikasi SAIBA di Maret 20x0, secara otomatis akan tercatat Pendapatan Sewa pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 36 juta yang seharusnya secara akrual tidak boleh tercatat di Laporan Operasional sejumlah tersebut, melainkan hanya Rp 10 juta di Laporan Operasional dan Rp 26 juta di Neraca sebagai kewajiban Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| Desember 20x0 | Pendapatan Sewa | 26 juta | |
| | Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | | 26 juta |

Jumlah diatas berasal dari total yang diterima sebesar Rp 36 juta dikurangi dengan hak pendapatan periode yang bersangkutan, yaitu Rp 10 juta.

✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0:

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------|------|---------------------------|----------|
| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisasi | Laporan Operasional | 20x0 | | |
| Pendapatan Sewa | 100 juta | 36 juta | Pendapatan Sewa | 10 | | |
| | | | Surplus LO | 10 | | |
| Laporan Perubahan Ekuitas | 20x0 | | Neraca | | | |
| Ekuitas Awal | 0 | | Aset : | 0 | Kewajiban | 26 juta |
| Surplus/ defisit LO | 10 juta | | | | Ekuitas | -26 juta |
| Transaksi antar entitas | -36 juta | | Jumlah Aset | 0 | Jumlah Kewajiban+ Ekuitas | 0 |
| Ekuitas Akhir | -26 juta | | | | | |

Untuk periode berikutnya secara berkala dilakukan pengakuan pendapatan untuk masing-masing porsi pengakuan, yaitu sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| Maret 20x1 | Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | 12 juta | |
| | Pendapatan Sewa | | 12 juta |
| Maret 2017 | Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | 12 juta | |
| | Pendapatan Sewa | | 12 juta |
| Februari 2018 | Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | 2 juta | |
| | Pendapatan Sewa | | 2 juta |

5. Belanja Dibayar Di Muka

Belanja dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Untuk mengidentifikasi belanja dibayar dimuka perlu melihat dokumen pengadaan barang dan jasa menyangkut masa kontrak atau waktu pelayanan jasa yang akan diberikan khususnya jasa. Seperti jasa sewa, domain website, dan kontrak jangka panjang lainnya dalam posisi Pemerintah sebagai pemberi kerja. Jika masa pelayanan penyedia melebihi atau melewati tahun anggaran maka dilakukan koreksi terhadap beban pada Laporan Operasional dan disajikan pada pos belanja dibayar dimuka pada Neraca.

- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 03) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------------------------|--------|
| 11411x | Dr | Belanja Dibayar Dimuka | xxx |
| 51xxxx | Cr | Beban Pegawai Dibayar Dimuka... | xxx |
| 52xxxx | Cr | Beban Barang Dibayar Dimuka... | xxx |
| 57xxxx | Cr | Beban Bansos Dibayar Dimuka... | xxx |

Contoh :

a. Belanja/Beban Dibayar Dimuka

Pada Desember 20x0 membayar sewa gedung sebesar Rp 10 juta. Gedung tersebut akan digunakan pada Januari 20x1.

| Laporan Operasional | 20x0 | 20x1 | Laporan Realisasi Anggaran | 20x0 | 20x1 |
|---------------------|------|---------|----------------------------|---------|------|
| Beban Sewa | 0 | 10 juta | Belanja Sewa | 10 juta | 0 |

Pada saat penginputan SPM/SP2D tersebut ke dalam aplikasi SAIBA di Desember 20x0, secara otomatis akan tercatat Belanja/Beban Sewa pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 10 juta yang seharusnya secara akrual tidak boleh tercatat di Laporan Operasional di tahun 20x0, melainkan hanya sebagai Belanja Sewa Dibayar Dimuka di Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|---------------------------------------|---------|---------|
| Desember 20x0 | Belanja Sewa Dibayar Dimuka (prepaid) | 10 juta | |
| | Beban Sewa | | 10 juta |

✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0:

| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisasi | Laporan Operasional | 20x0 | | |
|----------------------------|----------|-----------|----------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| Belanja Sewa | 100 juta | 10 juta | Beban Sewa | 0 | | |
| | | | Surplus/ Defisit LO | 0 | | |
| | | | Neraca | | | |
| Laporan Perubahan Ekuitas | 20x0 | | Aset : | | Kewajiban | 0 |
| Ekuitas Awal | 0 | | Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | 10 juta | Ekuitas | 10 juta |
| Surplus/defisit LO | 0 juta | | Jumlah Aset | 10 juta | Jumlah Kewajiban+ Ekuitas | 10 juta |
| Transaksi antar entitas | 10 juta | | | | | |
| Ekuitas Akhir | 10 juta | | | | | |

b. Belanja/Beban Dibayar Dimuka untuk masa yang melewati tanggal pelaporan (lintas periode)

Pada Maret 20x0 membayar uang sewa gedung sebesar Rp 36 juta. Gedung tersebut disewa untuk periode Maret 20x0 sampai dengan Februari 2018 (36 bulan)

| Laporan Realisasi Anggaran | 20x0 | 20x1 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|---------|------|------|------|
| Belanja Sewa | 36 juta | 0 | 0 | 0 |

| Laporan Operasional | 20x0 | 20x1 | 2017 | 2018 |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|
| Beban Sewa | 10 juta | 12 juta | 12 juta | 2 juta |

Pada saat penginputan SPM/SP2D tersebut ke dalam aplikasi SAIBA di Maret 20x0, secara otomatis akan tercatat Beban Sewa pada Laporan Operasional dan Belanja Sewa pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 36 juta yang seharusnya secara akrual tidak boleh tercatat di Laporan Operasional sejumlah tersebut, melainkan hanya Rp 10 juta di Laporan Operasional dan Rp 26 juta di Neraca sebagai kewajiban Belanja Sewa Dibayar Dimuka. Maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut :

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|
| Desember 20x0 | Belanja Sewa Dibayar Dimuka | 26 juta | |
| | Beban Sewa | | 26 juta |

Jumlah diatas berasal dari total yang diterima sebesar Rp 36 juta dikurangi dengan porsi belanja/beban periode yang bersangkutan, yaitu Rp 10 juta.

✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0:

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------|---------------------------|---------|
| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisasi | Laporan Operasional 20x0 | | | |
| Belanja Sewa | 100 juta | 36 juta | Beban Sewa | 10 juta | | |
| | | | Defisit LO | -10 juta | | |
| Laporan Perubahan Ekuitas | 20x0 | | Neraca | | | |
| Ekuitas Awal | 0 | | Aset : | 0 | Kewajiban | 0 |
| Surplus/defisit LO | -10 juta | | Belanja Sewa Dibayar Dimuka | 25 juta | Ekuitas | 26 juta |
| Transaksi antar entitas | 36 juta | | Jumlah Aset | 25 juta | Jumlah Kewajiban+ Ekuitas | 26 juta |
| Ekuitas Akhir | 26 juta | | | | | |

Untuk periode berikutnya secara berkala dilakukan pengakuan beban untuk masing-masing porsi pengakuan, yaitu sebagai berikut :

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|
| Maret 20x1 | Beban Sewa | 12 juta | |
| | Beban Sewa Diterima Dimuka | | 12 juta |
| Maret 2017 | Beban Sewa | 12 juta | |
| | Beban Sewa Diterima Dimuka | | 12 juta |
| Februari 2018 | Beban Sewa | 2 juta | |
| | Beban Sewa Diterima Dimuka | | 2 juta |

6. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja adalah pembayaran dimuka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan menyerahkan hasil pekerjaan/jasa. Apabila ada pembayaran Uang Muka Belanja sedangkan prestasi pekerjaan belum diselesaikan seluruhnya atau sebagian, atau pembayaran tersebut belum dikembalikan, maka terhadap pengeluaran belanja tersebut pada tanggal pelaporan dicatat sebagai Uang Muka Belanja dan mengkredit akun beban yang sesuai.

- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 22) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------------------|--------|
| 114211 | Dr | Uang Muka Belanja Pegawai | xxx |
| 114212 | Dr | Uang Muka Belanja Barang | xxx |
| 114213 | Dr | Uang Muka Belanja Modal | xxx |
| 114217 | Dr | Uang Muka Belanja Bansos | xxx |
| 51xxxx | Cr | Beban Pegawai... | xxx |
| 52xxxx | Cr | Beban Barang... | xxx |
| 57xxxx | Cr | Beban Bansos | xxx |

Contoh :

Pada bulan September 20x0 seorang Pegawai diberikan persekot pegawai sebesar Rp20.000.000,- sampai akhir tahun yang sudah dilakukan pengembalian melalui potongan gaji sebesar Rp5.000.000,-:

| Laporan Operasional | 20x0 | | 20x1 | |
|---------------------|---------|------|-----------------|---------|
| | 20x0 | 20x1 | 20x0 | 20x1 |
| Beban Pegawai | 20 juta | 0 | Belanja Pegawai | 15 juta |

Atas jumlah yang belum dikembalikan/terrealisasi tersebut dibuat penyesuaian sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|---------------------------|---------|---------|
| Desember 20x0 | Uang Muka Belanja Pegawai | 15 juta | |
| | Beban Pegawai | | 15 juta |

✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0:

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisasi | Laporan Operasional | 20x0 | | |
| Belanja Pegawai | 20 juta | 15 juta | Beban Pegawai | 5 juta | | |
| | | | Defisit LO | 5 juta | | |
| Laporan Perubahan Ekuitas | | | Neraca | | | |
| Ekuitas Awal | 20x0 | | Aset : | 0 | Kewajiban | 0 |
| Surplus/ defisit LO | -5 juta | | Uang Muka Belanja Pegawai | 15 juta | Ekuitas | 15 juta |
| Transaksi antar entitas | 20 juta | | Jumlah Aset | 15 juta | Jumlah Kewajiban+ Ekuitas | 15 juta |
| Ekuitas Akhir | 15 juta | | | | | |

Atas pengembalian melalui potongan berikutnya dicatat sebagai pengurang Akun Uang Muka Belanja Pegawai :

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|-----------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Periode Pengembalian 201x.. | Beban Pegawai | 15 juta | |
| | Uang Muka Belanja Pegawai | | 15 juta |

7. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dapat dibayarkan. Tagihan pihak ketiga belum dapat dibayarkan bisa saja disebabkan dana yang tersedia pada tahun berjalan tidak mencukupi, atau belum dibayarkan karena alasan lain, sehingga harus menunggu anggaran tahun berikutnya. Kewajiban yang belum dapat dibayarkan adalah kewajiban pemerintah kepada pegawai atau pihak ketiga yang pada tahun berjalan belum dibayarkan karena belum diajukan pembayarannya atau dana yang tersedia tidak mencukupi.

✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 04) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|--------|
| 117911 | Dr | Persediaan yang Belum Diregister | xxx |
| 212112 | Cr | Beban Barang yang Masih Harus Dibayar | xxx |
| 212115 | Cr | Beban Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar | xxx |
| 13xxxx | Dr | Aset Tetap Yang Belum Diregister | xxx |
| 212112 | Cr | Beban Barang yang Masih Harus Dibayar | xxx |
| 212113 | Cr | Beban Modal yang Masih Harus Dibayar | xxx |
| 51xxxx | Dr | Beban Pegawai... | xxx |
| 212111 | Cr | Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar | xxx |
| 52xxxx | Dr | Beban Barang... | xxx |
| 212112 | Cr | Beban Barang yang Masih Harus Dibayar | xxx |

Beban yang masih harus dibayar dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar;
- b. Belanja Barang yang masih harus dibayar;
- c. Belanja Modal yang masih harus dibayar;
- d. Belanja Bantuan Sosial yang masih harus dibayar.

Belanja yang masih harus dibayar tersebut di atas harus diidentifikasi pada akhir tahun oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan bahwa terdapat beban yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan bukan perkiraan/estimasi, seperti: SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan, daftar hadir, tagihan dari penyedia barang/jasa, BAST dan lain sebagainya. Selanjutnya dibuatkan daftar untuk diserahkan kepada petugas/bagian akuntansi (SAI) untuk dibuat rekapitulasi dan memo jurnal penyesuaian.

- Pada Beban Pegawai, dalam menghitung besarnya Beban pegawai yang masih harus dibayar maka perlu diperhitungkan semua komponen Beban pegawai yang terutang yang akan dibayarkan pada periode berikutnya. Semua komponen Beban tersebut seperti kenaikan golongan pegawai akan berpengaruh pada tunjangan istri, tunjangan anak dan lain-lain.
- Pada Beban Jasa, dalam menentukan beban jasa yang terutang biasanya didukung berupa dokumen atau informasi elektronik yang menunjukkan beban jasa yang terutang pada akhir periode pelaporan, seperti tagihan rekening listrik, rekening telepon dan lain-lain.
- Khusus untuk Beban modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban Laporan Operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan Beban modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban, dan diakui dalam Neraca.
- Pada saat pembayaran Beban-Beban yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian

dengan cara mendebet akun Beban yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama.

Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

Contoh :

- Pada Januari 20x1 diterima tagihan listrik bulan Desember 20x0 yang baru akan dibayar pada Januari 20x1 sebesar Rp 10 juta.

| | | | | | |
|---------------------|---------|------|----------------------------|------|---------|
| Laporan Operasional | 20x0 | 20x1 | Laporan Realisasi Anggaran | 20x0 | 20x1 |
| Beban Jasa | 10 juta | 0 | Belanja Jasa | 0 | 10 juta |

Untuk beban jasa yang belum dibayar sampai akhir tahun dan masih harus dibayar dibuat jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------|---------------------------------------|---------|---------|
| Desember 20x0 | Beban Jasa | 10 juta | |
| | Belanja Jasa yang Masih Harus Dibayar | | 10 juta |

- ✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0:

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------|----------|---------------------------|----------|
| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisasi | Laporan Operasional | 20x0 | | |
| Belanja Jasa | 100 juta | 0 juta | Beban Jasa | 10 juta | | |
| | | | Defisit LO | -10 juta | | |
| Laporan Perubahan Ekuitas | 20x0 | | Neraca | | | |
| Ekuitas Awal | 0 | | Aset : | | Kewajiban | 10 juta |
| Surplus/defisit LO | -10 juta | | | 0 | Ekuitas | -10 juta |
| Transaksi antar entitas | 0 | | Jumlah Aset | 0 | Jumlah Kewajiban+ Ekuitas | 0 |
| Ekuitas Akhir | -10 juta | | | | | |

- Pada Belanja Pegawai, dalam menghitung besarnya belanja pegawai yang masih harus dibayar maka perlu diperhitungkan semua komponen belanja pegawai yang terutang yang akan dibayarkan pada periode berikutnya. Semua komponen belanja tersebut seperti kenaikan golongan pegawai akan berpengaruh pada tunjangan istri, tunjangan anak dan lain-lain.
- Pada Belanja Jasa, dalam menentukan beban jasa yang terutang biasanya didukung berupa dokumen atau

informasi elektronik yang menunjukkan beban jasa yang terutang pada akhir periode pelaporan, seperti tagihan rekening listrik, rekening telepon dan lain-lain.

- Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban Laporan Operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban, dan diakui dalam Neraca.
- Pada saat pembayaran belanja-belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama :

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| Periode pembayaran 201x.. | Belanja Jasa yang Masih Harus Dibayar | 10 juta | |
| | Beban Jasa | | 10 juta |

Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

8. Persediaan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban bantuan sosial.

Untuk ketiga macam persediaan tersebut, beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun secara fisik persediaan masih ada, namun tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang persediaan, dengan demikian jurnal penyesuaiannya yang dibuat dengan contoh selisih sejumlah Rp 10 juta di akhir periode tahun anggaran 20x0 sebagai berikut:

- ✓ Diinput melalui jurnal kiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------------------------------|--------|
| | Dr | Beban Persediaan | Xxx |
| | Dr | Beban Pemeliharaan | Xxx |
| | Dr | Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat | Xxx |
| 57xxxx | Dr | Beban Bansos... | xxx |
| 117xxx | Cr | Persediaan... | xxx |

Contoh :

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|--|--|---------|---------|
| Desember 31 | Beban Persediaan/Beban Pemeliharaan/Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat/Beban Bansos | 10 juta | |
| | Persediaan | | 10 juta |
| Untuk mencatat sisa persediaan umum serta untuk mencatat selisih kurang persediaan hasil opname fisikpersediaan dari belanja | | | |

- ✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0:

| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisasi | Laporan Operasional | 20x0 | | |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------|----------|---------------------------|----------|
| Belanja xxx | 100 juta | 0 | Beban | 10 juta | | |
| | | | Defisit LO | -10 juta | | |
| Neraca | | | | | | |
| Laporan Perubahan Ekuitas | 20x0 | | Aset : | | Kewajiban | 0 |
| Ekuitas Awal | 0 | | Persediaan | -10 juta | Ekuitas | -10 juta |
| Surplus/ defisit LO | -10 juta | | Jumlah Aset | -10 juta | Jumlah Kewajiban+ Ekuitas | -10 juta |
| Transaksi antar entitas | 0 | | | | | |
| Ekuitas Akhir | -10 juta | | | | | |

9. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan pada akhir periode dalam rangka penyajian nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Penyisihan piutang dilakukandengan cara mengestimasi berapa penyisihan piutang yang diestimasi dalamrangka penyajian wajar tersebut yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sehingga pada penerapan pertama kali telah diakuissebagai beban penyisihan tak tertagih.

Dalam hal sudah terdapat saldo pada akun penyisihan piutang tak tertagihsebelum dilakukan penyesuaian, maka jumlah beban penyisihan memperhitungkansaldo akun penyisihan piutang tak tertagih. Dalam hal bersaldo negatif,maka beban penyisihan piutang tak tertagih dapat dikredit dan disajikan dalamLaporan Operasional sebagai beban negatif.

- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 05) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|------------------------------------|--------|
| 116xxx | Dr | Penyisihan Piutang Tak Tertagih... | xxx |
| 594xxx | Cr | Beban Penyisihan Piutang... | xxx |
| Atau | | | |
| 594xxx | Dr | Beban Penyisihan Piutang... | xxx |
| 116xxx | Cr | Penyisihan Piutang Tak Tertagih... | xxx |

Contoh :

- a. Perhitungan penyisihan piutang > Saldo penyisihan piutang

Misal: Hasil perhitungan penyisihan piutang 100 juta

Saldo penyisihan piutang 70 juta

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|-------------|---------------------------------------|---------|---------|
| Desember 31 | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 30 juta | |
| | Penyisihan Piutang Tak Tertagih | | 30 juta |

- b. Perhitungan penyisihan piutang < Saldo penyisihan piutang

Misal: Hasil perhitungan penyisihan piutang 70 juta

Saldo penyisihan piutang 100 juta

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|-------------|---------------------------------------|----------|----------|
| Desember 31 | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | -30 juta | |
| | Penyisihan Piutang Tak Tertagih | | -30 juta |

- c. Perhitungan penyisihan piutang = Saldo penyisihan piutang

Misal : Hasil perhitungan penyisihan piutang 70 juta

Saldo penyisihan piutang 100 juta

Tidak ada jurnal

- d. Saldo penyisihan piutang minus (-)

Misal : Hasil perhitungan penyisihan piutang 100 juta

Saldo penyisihan piutang -30 juta

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|-------------|---------------------------------------|----------|----------|
| Desember 31 | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 130 juta | |
| | Penyisihan Piutang Tak Tertagih | | 130 juta |

Apabila piutang telah disisihkan 100% dan telah diterbitkan surat keputusan penghapusan piutang, maka dilakukan pencatatan dengan mendebet akun penyisihan piutang tak tertagih mengkredit akun piutang.

Keterkaitan akun pada tiap laporan adalah:

- 1) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Laporan Operasional yang menghasilkan defisit Laporan Operasional yang juga tertera dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan

mempengaruhi Ekuitas Akhir di dalamnya. Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas haruslah bernilai sama dengan yang ada dalam Neraca

- 2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagai pengurang Aset dalam Neraca dan mempengaruhi nilai Ekuitas Akhir hasil dari pengurangan dengan Kewajiban

10. Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapatdisusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untukmasing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Sehingga padawaktu dilakukan penyusutan dibuat jurnal sebagai berikut:

- ✓ Diinput melalui jurnal kiriman dari Aplikasi SIMAK sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------------|--------|
| 591xxx | Dr | Beban Penyusutan... | Xxx |
| 137xxx | Cr | Akumulasi Penyusutan... | xxx |

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset tak berwujud secara sistematis yangdilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Nilai amortisasimasing-masing periode diakui sebagai beban amortisasi yang disajikan di Laporan Operasional dan mengurangi nilai buku aset tak berwujud pada Neraca. Sehingga pada saat dilakukan amortisasi dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

- ✓ Diinput melalui jurnal kiriman dari SIMAK-BMN sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------------|--------|
| 592xxx | Dr | Beban Amortisasi... | Xxx |
| 16931x | Cr | Akumulasi Amortisasi... | xxx |

Contoh :

Pada Januari 20x0 dibeli Komputer sebesar Rp 10 juta dengan masa manfaat 4 tahun, maka perbandingan antar Laporan adalah:

| Akun | 20x0 | 20x1 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| Neraca | | | | | |
| Peralatan dan Mesin | 10 juta | 10 juta | 10 juta | 10 juta | 10 juta |
| Akumulasi Penyusutan | (2.5 juta) | (5 juta) | (7.5 juta) | (10 juta) | (10 juta) |
| Peralatan dan Mesin Netto | 7.5 juta | 5 juta | 2.5 juta | 0 | 0 |
| Laporan Operasional | | | | | |
| Beban Penyusutan | 2.5 juta | 2.5 juta | 2.5 juta | 2.5 juta | 0 |
| Laporan Realisasi Anggaran | | | | | |
| Belanja Modal | 10 juta | 0 | 0 | 0 | 0 |

✓ Pengaruh transaksi pada Laporan lainnya di tahun 20x0 :

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|---------------------------|----------|
| Laporan Realisasi Anggaran | Pagu | Realisasi | Laporan Operasional | 20x0 | | |
| Belanja Modal | 100 juta | 10 juta | Beban Penyusutan | 2.5 juta | | |
| | | | Defisit LO | -2.5 juta | | |
| | | | | | | |
| Laporan Perubahan Ekuitas | 20x0 | | Neraca | | | |
| Ekuitas Awal | 0 | | Aset : | | Kewajiban | 0 |
| Surplus/defisit LO | -2.5 juta | | Peralatan dan Mesin | 10 juta | Ekuitas | 7.5 juta |
| Transaksi antar entitas | 10 juta | | Akumulasi penyusutan | -2.5 juta | | |
| Ekuitas Akhir | 7.5 juta | | Jumlah Aset | 7.5 juta | Jumlah Kewajiban+ Ekuitas | 7.5 juta |

11. Koreksi Antar Beban

Koreksi antar beban adalah koreksi beban yang terlanjur dicatat pada akun yang salah menjadi akun beban yang seharusnya. Contoh: Satuan Kerja mencatat pembayaran gaji supir dengan menggunakan akun beban persediaan-Beban keperluan perkantoran (521111) sehingga dicatat sebagai berikut:

✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 11) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------|--------|
| 51xxxx | Dr | Beban Pegawai | Xxx |
| 52xxxx | Cr | Beban Barang | xxx |

Contoh:

a. Satuan Kerja mencatat pembayaran gaji sopir dengan menggunakan akun belanja pemeliharaan sehingga dicatat sebagai berikut:

| Jurnal Kas | Debet | Kredit | Jurnal Akrua | Debet | Kredit |
|----------------------|-------|--------|----------------------------|-------|--------|
| Belanja Pemeliharaan | xxx | | Beban Pemeliharaan | Xxx | |
| Utang kepada KUN | | Xxx | Ditagihkan ke Entitas Lain | | Xxx |

Atas transaksi tersebut seharusnya dicatat sebagai beban jasa, jika diketahui padakesalahan pada periode berjalan, dilakukan koreksi dokumen sumber berupa ralat SPP/SPM. Jika diketahui pada proses penyusunan laporan keuangan dan tidak memungkinkan adanya ralat SPP/SPM, maka dilakukan jurnal koreksi antar beban sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|-------------|--------------------|-------|--------|
| Desember 31 | Beban Jasa Lainnya | xxx | |
| | Beban pemeliharaan | | xxx |

Hal ini dilakukan hanya jika proses ralat SPM/SP2D tidak dapat dilakukan oleh Satuan kerja.

b. Koreksi Antar Beban dan Aset

Contoh :

Terjadi kesalahan penerbitan SPM/SP2D, pengecatan gedung yang seharusnya dibebankan pada akun belanja barang pemeliharaan (523xxx), namun dibebankan pada akun belanja modal (53xxxx), dan tidak dapat dilakukan lagi ralat SPM/SP2D. Apabila tidak dilakukan koreksi, maka pada Neraca telah muncul akun Aset tetap yang Belum Diregister. Untuk membetulkannya, maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|-------------|----------------------------------|-------|--------|
| Desember 31 | Beban pemeliharaan | xxx | |
| | Aset tetap yang belum diregister | | xxx |

Setelah dilakukan jurnal ini, maka pada Neraca akun Aset tetap yang belum diregister telah hilang dan muncul akun beban pemeliharaan.

Contoh sebaliknya adalah terjadi kesalahan penerbitan SPM/SP2D, pembelian printer yang seharusnya dibebankan pada akun belanja modal (53xxxx), namun dibebankan pada akun belanja pemeliharaan (523xxx), dan tidak dapat dilakukan lagi koreksi SPM/SP2D. Apabila tidak dilakukan koreksi, maka pada LO akan muncul beban pemeliharaan. Untuk membetulkannya, dilakukan jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|-------------|----------------------------------|-------|--------|
| Desember 31 | Aset tetap yang belum diregister | xxx | |
| | Beban Pemeliharaan | | xxx |

Setelah dilakukan jurnal ini, maka pada Neraca telah muncul Aset tetap yang belum diregister dan pengurangan beban pemeliharaan pada LO.

12. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang merupakan pembentukan pembukuan piutang yang memiliki masa jatuh tempo yang lebih dari 12 (dua belas) bulan. Jenis piutang tersebut antara lain :

1. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran;
2. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
3. Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah;
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang jangka panjang merupakan aset non lancar yang setiap periode pelaporan memperhitungkan kemungkinan pencairan untuk satu periode pelaporan. Setiap awal periode pelaporan, dilakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke dalam Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang sebesar perhitungan kemungkinan dapat dicairkannya untuk satu periode pelaporan tersebut.

Piutang Jangka Panjang dan Bagian Lancarnya setiap semester dilakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang sebagaimana penilaian kualitas pada Piutang PNBK.

Piutang Jangka Panjang diakui berdasarkan dokumen sumber berdasarkan ketentuan yang berlaku. Atas dasar dokumen sumber tersebut dilakukan perekaman pembentukan Piutang Jangka Panjang dengan mendebet akun piutang jangka panjang dan disisi kredit adalah pendapatan terkait piutang jangka panjang.

- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 14) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 15xxxx | Dr | Piutang Jangka Panjang... | xxx |
| 423xxx | Cr | Pendapatan Negara Bukan Pajak... | xxx |
| 424xxx | Cr | Pendapatan BLU... | xxx |

Contoh :

Telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan ditandatangani atas nama Cahyo karena

menghilangkan Kendaraan Dinas senilai Rp100 Juta yang akan dibayarkan selama 15 tahun melalui pemotongan gaji.

Masa jatuh tempo lebih dari setahun sehingga harus dicatat sebagai Piutang Jangka Panjang.

1. Atas dasar SKTM, maka dibuatkan kartu pengawasan piutang TGR a.n Cahyo;
2. Buat Memo Penyesuaian yang ditandatangani ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab;
3. Atas Dasar Memo Penyesuaian, Lakukan jurnal pada Aplikasi SAIBA dengan menggunakan kategori Piutang Jangka Panjang seperti berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|-------------|
| 152111 | Dr | Piutang TagihanTP/TGR | 100.000.000 |
| 423921 | Cr | Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara | 100.000.000 |

13. Pelepasan Aset Tetap/ Aset Lainnya

Pelepasan aset tetap/aset lainnya adalah pemindahtanganan aset tetap/aset lainnya yang dimiliki pemerintah kepada pihak lain. Dengan pelepasan aset tetap/aset lainnya tersebut maka aset tetap/aset lainnya perlu dikeluarkan dari neraca pemerintah.

Pelepasan aset tetap/aset lainnya dapat dilakukan melalui :

1. Penjualan;
2. Dipertukarkan;
3. D hibahkan;
4. Dijadikan penyertaan modal negara.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal negara, dikeluarkan 1 dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara.

- ✓ Dihasilkan melalui aplikasi SIMAK-BMN secara otomatis (kategori 15), sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 596xxx | Dr | Beban Kerugian Pelepasan Aset... | xxx |
| 13xxxx | Cr | Aset... | xxx |
| | | | |
| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
| 13xxxx | Dr | Akumulasi Penyusutan Aset... | xxx |
| 596xxx | Dr | Beban Pelepasan Aset... | xxx |

Contoh :

Pada tanggal 10 November 2015 Sebuah mobil dengan harga perolehan Rp200.000.000,- dengan akumulasi penyusutan Rp 40.000.000,- dijual senilai Rp 170.000.000,-. Hasil penjualan tersebut disetor ke Kas Negara menggunakan dokumen SSBP dengan menggunakan akun 423122 (Pendapatan dari Penjualan Peralatan Mesin).

Penjualan Aset Tetap merupakan transaksi pelepasan aset dimana beban kerugian pelepasan akan diakui sebesar nilai buku dari aset tetap. Selisih antara pendapatan dari hasil penjualan aset tetap dan beban kerugian pelepasan aset akan menjadi surplus/defisit pada Laporan Operasional.

Jurnal Penghapusan Aset Tetap di Neraca

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------|-------------|
| 596111 | Dr | Beban Pelepasan Aset | 160.000.000 |
| 132111 | Cr | Peralatan dan Mesin | 160.000.000 |

Jurnal Penghapusan Akumulasi Penyusutan di Neraca

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|------------|
| 137111 | Dr | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 40.000.000 |
| 132111 | Cr | Peralatan dan Mesin | 40.000.000 |

Pada laporan neraca, Aset tetap berupa Peralatan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin akan berkurang senilai Rp.200.000.000,- dan Rp.40.000.000,-. Pada Laporan Operasional bulan November 2015, pada Bagian Kegiatan Non Operasional akan diperoleh Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Senilai Rp170.000.000 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp.160.000.000,- sehingga diperoleh Surplus senilai Rp10.000.000,- seperti gambar di bawah ini:

| Uraian | Jumlah |
|--|-------------|
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | 170.000.000 |
| Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | 160.000.000 |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 10.000.000 |
| Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | 10.000.000 |

14. Piutang Jangka Pendek

Piutang Jangka Pendek dikhususkan untuk mencatat pembentukan piutang yang memiliki masa jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan. Piutang jangka pendek meliputi Piutang Pajak dan Piutang PNBP yang pengakuannya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau;
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Secara standar jurnal pembentukan piutang adalah piutang (debit) dan pendapatan (kredit) dan apabila terjadi pelunasan adalah pendapatan (debit) dan piutang (kredit).

✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 16) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 115xxx | Dr | Piutang Jangka Pendek... | xxx |
| 423xxx | Cr | Pendapatan Negara Bukan Pajak... | xxx |
| 424xxx | Cr | Pendapatan BLU... | xxx |

Contoh :

Pada tanggal 1 Juli 2015, berdasarkan Surat Penagihan No. SPN 12/0115, satker membukukan piutang PNBP atas pendapatan Sewa Gedung untuk ATM Bank ABC yang jatuh tempo tanggal 30 Juni 2015 senilai Rp25.000.000,-. Pada tanggal 1 Agustus 2015 melunasi piutang tersebut dengan melampirkan dokumen SSBP dengan akun 423141 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan).

Adanya Surat Penagihan sudah menjadi dokumen sumber cukup untuk mencatat piutang PNBP baru, sehingga diperlukan pencatatan pembentukan Piutang PNBP baru.

- a. Pada tanggal 1 Juli 2015, atas dasar surat penagihan membuat Memo Penyesuaian dan membukukan piutang Jurnal Penyesuaian

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|------------|
| 115211 | Dr | Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak | 25.000.000 |
| 423141 | Cr | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 25.000.000 |

- b. Pada tanggal 1 Agustus 2015, Atas dasar dokumen SSBP sebagai bukti pelunasan dari Bank ABC,
- c. Atas dasar pelunasan tersebut, susun Memo Penyesuaian untuk melakukan penyesuaian Nilai piutang di neraca.

Jurnal Penyesuaian

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------------|
| 115211 | Dr | Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak | (25.000.000) |
| 423141 | Cr | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | (25.000.000) |

15. Transfer Masuk

Transfer masuk ini adalah penerimaan aset atau kewajiban dari satu entitas ke entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi. Transfer masuk dapat terjadi pada tingkat bawah (antar satker dalam satu kementerian/lembaga) atau pada tingkat atas (antar satker dan antar kementerian/lembaga).

Jenis transfer masuk dapat terdiri dari :

1. Transfer masuk berupa aset tetap
 2. Transfer masuk berupa persediaan
 3. Transfer masuk berupa kewajiban
 4. Transfer masuk berupa aset lancar/aset non-lancar
- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 17) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 11xxxx | Dr | Aset Lancar... | xxx |
| 12xxxx | Dr | Investasi Jangka Panjang... | Xxx |
| 15xxxx | Dr | Piutang Jangka Panjang.. | xxx |
| 16xxxx | Dr | Aset Lainnya... | xxx |
| 313221 | Cr | Transfer Masuk | xxx |

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------|--------|
| 313221 | Dr | Transfer Masuk | Xxx |
| 21xxxx | Cr | Kewajiban... | xxx |

- ✓ Dihasilkan dari aplikasi SIMAK BMN sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|----------------|--------|
| 117xxx | Dr | Persediaan | xxx |
| 13xxxx | Dr | Aset Tetap | xxx |
| 21xxxx | Cr | Transfer Masuk | xxx |

Contoh :

Pada tanggal 30 Juni 2015, satker memperoleh peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor angkutan darat dari satker lain dalam satu eselon 1 suatu kementerian dengan nilai perolehan aset Rp 25 juta dengan akumulasi penyusutan Rp 3 juta.

Transaksi penerimaan berupa aset tetap yang berasal dari satu unit eselon yang sama dikategorikan sebagai transaksi transfer masuk. Pencatatan transfer masuk tidak hanya mencatat perolehan aset tetapnya namun juga termasuk juga akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut. Dokumen sumber pencatatan adalah Berita Acara Serah Terima aset tetap.

Atas dasar BAST dilakukan penginputan dalam SIMAK BMN dan terbentuk jurnal seperti di bawah ini:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|------------|
| 132111 | Dr | Peralatan dan Mesin | 25.000.000 |
| 137111 | Cr | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 3.000.000 |
| 313221 | Cr | Transfer Masuk | 22.000.000 |

16. Transfer Keluar

Transfer Keluar adalah pengiriman aset atau kewajiban dari satu entitas ke entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi. Transfer keluar dapat terjadi pada tingkat bawah (antar satker dalam satu kementerian/lembaga) atau pada tingkat atas (antar satker dan antar kementerian/lembaga).

Jenis transfer keluar dapat terdiri dari :

1. Transfer keluar berupa aset tetap
 2. Transfer keluar berupa persediaan
 3. Transfer keluar berupa kewajiban
 4. Transfer keluar berupa aset lancar/aset non-lancar
- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 18) sebagai

berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 313211 | Dr | Transfer Keluar | Xxx |
| 11xxxx | Cr | Aset Lancar... | xxx |
| 11xxxx | Cr | Aset Lancar... | xxx |
| 12xxxx | Cr | Investasi Jangka Panjang... | xxx |
| 15xxxx | Cr | Piutang Jangka Panjang.. | xxx |
| 16xxxx | Cr | Aset Lainnya... | xxx |

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| 21xxxx | Dr | Kewajiban... | Xxx |
| 313211 | Cr | Transfer Keluar | xxx |

Terbentuk secara otomatis dari SIMAK BMN

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| 313211 | Dr | Transfer Keluar | Xxx |
| 117xxx | Cr | Persediaan | Xxx |

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|--------|
| 313211 | Dr | Transfer Keluar | Xxx |
| 137111 | Cr | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | Xxx |
| 132111 | Cr | Peralatan dan Mesin | xxx |

Contoh :

Pada tanggal 30 Juni 2015, satker mentransfer peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor angkutan darat kepada satker ABC yang masih dalam satu eselon 1 suatu kementerian dengan nilai perolehan aset Rp 31 juta dengan akumulasi penyusutan Rp 2,5 juta.

Transaksi pelepasan berupa aset tetap yang berasal dari satu unit eselon yang sama dikategorikan sebagai transaksi transfer keluar. Pencatatan jurnal transfer keluar tidak hanya mencatat pelepasan aset tetapnya namun juga termasuk juga penghapusan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut. Dokumen sumber pencatatan adalah Berita Acara Serah Terima aset tetap.

Atas dasar BAST maka diinput dalam SIMAK BMN sehingga terbentuk jurnal seperti di bawah ini :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--|------------|
| 313211 | Dr | Transfer Keluar | 28.500.000 |
| 137111 | Dr | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 2.500.000 |
| 132111 | Cr | Peralatan dan Mesin | 31.000.000 |

17. Koreksi Beban Aset

Koreksi Beban-Aset merupakan pencatatan koreksi atas kesalahan pembebanan akun belanja yang seharusnya tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan persediaan namun pada realisasinya menghasilkan aset berupa aset tetap/asep lainnya dan persediaan atau sebaliknya. Penjurnalan dilakukan dalam hal tidak dimungkinkan untuk melakukan ralat SPM/SP2D.

- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 19) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------------------|--------|
| 117911 | Dr | Persediaan Belum Diregister | xxx |
| 13xxxx | Dr | Aset Tetap Belum Diregister | xxx |
| 16xxxx | Dr | Aset Lainnya Belum Diregister | xxx |
| 52xxxx | Cr | Beban Barang... | xxx |
| 57xxxx | Cr | Beban Bansos... | xxx |
| 59xxxx | Cr | Beban Penyesuaian | xxx |

Contoh:

Pada tanggal 7 Desember 2015, satker menerbitkan SPM kemudian terbit SP2D oleh KPPN dengan akun 521111 (belanja keperluan perkantoran) senilai Rp15.000.000,- yang kemudian diketahui bahwa dari belanja tersebut, senilai Rp10.000.000,- menghasilkan persediaan dan telah dicatat di Aplikasi Persediaan. Maka di akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian seperti di bawah ini :

Pada saat satker menginput SPM dengan akun 521111, jurnal yang terbentuk adalah :

(D) Beban Operasional Perkantoran Rp15juta

(K) Ditagihkan ke Entitas Lain Rp15juta

Atas persediaan yang diinput akan mengirim jurnal :

(D) Barang Konsumsi Rp10juta

(K) Persediaan Belum Diregister Rp10juta

Sehingga pada neraca akan muncul akun “persediaan belum diregister” bernilai negatif senilai (Rp 10 juta) yang tidak diperkenankan ada pada laporan neraca satker pada akhir tahun 2015. Oleh sebab itu perlu dilakukan koreksi Beban Operasional Perkantoran senilai Rp 10 juta, karena Akun 521111 tidak menghasilkan persediaan.

Langkah yang harus dilakukan :

- a. Dibuat memo penyesuaian;
- b. Lakukan koreksi Beban Operasional Perkantoran menjadi Persediaan Belum diregister :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-----------------------------|------------|
| 117911 | Dr | Persediaan belum diregister | 10.000.000 |
| 521111 | Cr | Beban Keperluan Kantor | 10.000.000 |

18. Kas Lainnya BLU

Kas Lainnya di BLU merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan operasional Badan Layanan Umum (BLU) yang diterima namun hingga akhir periode pelaporan belum dilakukan pengesahan ke KPPN dengan SP3BLU.

- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 21) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|--------------------|--------|
| 111826 | Dr | Kas Lainnya di BLU | xxx |
| 424xxx | Cr | Pendapatan BLU... | xxx |

Contoh :

Rumah Sakit ABC yang merupakan Satker BLU mencatat pendapatan dari bulan oktober sebesar Rp. 6 Milyar yang hingga tanggal 31 Desember 2015 belum dilakukan pengesahan ke KPPN.

Atas kas yang ada di bendahara BLU yang diperoleh dari pendapatan operasional BLU, harus dilakukan pengesahan ke KPPN untuk dicatat sebagai Kas di BLU, namun apabila hingga akhir tanggal periode pelaporan belum dilakukan pengesahan ke KPPN, maka kas tersebut harus dicatat sebagai akun Kas Lainnya di BLU pada Laporan Neraca Satker BLU.

Langkah-langkah Pencatatan

- Bendahara BLU menyampaikan sisa kas yang merupakan pendapatan yang belum dilakukan pengesahan hingga akhir periode pelaporan untuk dibuatkan memo penyesuaian;
- Atas dasar memo penyesuaian yang telah ditandatangani, mencatat jurnal Kas Lainnya di BLU seperti di bawah ini :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------------------------|---------------|
| 111826 | Dr | Kas Lainnya BLU | 6.000.000.000 |
| 521111 | Cr | Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit | 6.000.000.000 |

19. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja merupakan belanja/beban yang dikarenakan sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima prestasi dari penyedia barang/jasa.

- ✓ Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 22) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------------------|--------|
| 11421x | Dr | Uang Muka Belanja... | xxx |
| 117911 | Cr | Persediaan Belum Diregister | xxx |
| 13xxxx | Cr | Aset Tetap Belum Diregister | xxx |
| 16xxxx | Cr | Aset Lainnya Belum Diregister | xxx |
| 51xxxx | Cr | Beban Pegawai | xxx |
| 52xxxx | Cr | Beban Barang | xxx |
| 53xxxx | Cr | Beban Modal | xxx |

Contoh:

Satker ABC mengajukan SP2D Belanja 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan) senilai Rp30 juta atas pembayaran uang muka pembangunan gedung.

Hingga akhir tahun anggaran, rekanan gagal menyelesaikan pembangunan gedung tersebut, sehingga tidak terdapat pekerjaan fisik yang diserahkan kepada Satker ABC oleh rekanan

Uang yang telah keluar dari Kas Negara untuk barang/jasa yang diharapkan diterima oleh pemerintah namun hingga tanggal yang telah ditentukan belum diterima oleh pemerintah pada saat pelaporan keuangan, uang yang telah keluar tersebut harus disajikan sebagai aset lancar sebagai uang muka belanja dan beban yang telah diakui dengan terbitnya SPM/SP2D harus dikoreksi.

Langkah-langkah Pencatatan:

- a. Buat memo penyesuaian atas pencatatan Uang Muka Belanja
- b. Atas dasar memo penyesuaian yang telah ditandatangani, mencatat Uang Muka Belanja seperti di bawah ini :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------------------------------|------------|
| 114213 | Dr | Uang Muka Belanja Modal (Prepayment) | 30.000.000 |
| 133211 | Cr | Gedung dan Bangunan Belum di Register | 30.000.000 |

20. Perolehan Aset

Perolehan Aset untuk mencatat perolehan aset (aset tetap/aset lainnya/persediaan) yang berasal dari hasil sitaan/rampasan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan sehingga akan membentuk jurnal sebagai berikut :

(D) Aset Tetap/Aset Lain/ Persediaan

(K) Pendapatan Aset Sitaan/ Rampasan

Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 23) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---------------------------------|--------|
| 117xxx | Dr | Persediaan | Xxx |
| 13xxxx | Dr | Aset Tetap | Xxx |
| 166xxx | Dr | Aset Lainnya | Xxx |
| 491421 | Cr | Pendapatan Aset Sitaan/Rampasan | xxx |

21. Koreksi Piutang

Koreksi pendapatan dan beban yang berpengaruh terhadap koreksi nilai Utang/Piutang.

Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 24) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|--|--------|----------------------------------|--------|
| Koreksi Utang-Persediaan Belum Diregister | | | |
| 117911 | Dr | Persediaan Belum Diregister | xxx |
| 391119 | Cr | Koreksi Lainnya | xxx |
| Koreksi Piutang-Pendapatan | | | |
| 391119 | Dr | Koreksi Lainnya | xxx |
| 423xxx | Cr | Pendapatan Negara Bukan Pajak... | xxx |
| 424xxx | Cr | Pendapatan BLU... | xxx |
| Koreksi Utang-Beban | | | |
| 51xxxx | Dr | Beban Pegawai... | xxx |
| 52xxxx | Dr | Beban Barang... | xxx |
| 57xxxx | Dr | Beban Bansos... | xxx |
| 391119 | Cr | Koreksi Lainnya | xxx |

Contoh:

Pada 31 Desember 2014 satker ABC mencatat Belanja Tagihan Listrik yang Masih Harus Dibayar (akun kewajiban) untuk bulan Desember 2014 sebesar Rp7.500.000,- , di bulan Januari 2015 diterima tagihan langganan listrik bulan Desember 2015 sebesar Rp8.000.000,- dan diterbitkan SP2D menggunakan akun 522111 sebesar nominal tagihan.

Koreksi beban tagihan listrik diperlukan agar tidak ada beban tagihan listrik bulan Desember 2014 yang diakui ditahun 2015.

Langkah-langkah Pencatatan:

1. Lakukan jurnal balik di awal tahun pada Beban yang Masih Harus Dibayar sebagai berikut :

| Kode | posisi | Uraian | Jumlah |
|--------|--------|---|-------------|
| 522111 | Dr | Beban Langganan Listrik | (7.500.000) |
| 212112 | Cr | Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar | (7.500.000) |

2. Pastikan SPM/SP2D terkait pembayaran langganan listrik tersebut telah di-input
3. Dari SP2D Input Jurnal koreksi tersebut menggunakan jurnal sebagai berikut :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|-------------------------|--------|
| 522111 | Dr | Beban Langganan Listrik | -500 |
| 391119 | Cr | Koreksi Lainnya | -500 |

22. Hibah Langsung

Hibah langsung adalah hibah yang diberikan langsung oleh donor kepada Kementerian Negara/ Lembaga (satker). Kategori Hibah Langsung pada menu Jurnal Penyesuaian digunakan mencatat hibah langsung, baik berupa uang maupun barang pada saat terjadinya penyerahan.

Jurnal penyesuaian hibah langsung :

1. Pencatatan Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan yakni pencatatan ketika uang yang berasal dari hibah tersebut diserahkan dari donor dalam bentuk hibah uang;
2. Pencatatan Aset Tetap/ Aset Lainnya/ Persediaan yang belum definitifkan (belum diregister) atas Aset Tetap/ Aset Lainnya/ Persediaan berdasarkan BAST/ Dokumen Penyerahan Lainnya yang diterima dari donor dalam bentuk hibah barang;

Diinput melalui jurnal penyesuaian (kategori 25) sebagai berikut:

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|--|--------|---|--------|
| Hibah Langsung Uang | | | |
| 111827 | Dr | Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum Disahkan | xxx |
| 218211 | Cr | Hibah Langsung yang Belum Disahkan | xxx |
| Hibah Langsung Persediaan | | | |
| 117911 | Dr | Persediaan Belum Diregister | xxx |
| 218211 | Cr | Hibah Langsung yang Belum Disahkan | xxx |
| Hibah Langsung Aset Tetap/ Aset Lainnya | | | |
| 13xxxx | Dr | Aset Tetap Belum Diregister | xxx |
| 16xxxx | Dr | Aset Lainnya Belum Diregister | xxx |
| 218211 | Cr | Hibah Langsung yang Belum Disahkan | xxx |
| Hibah Langsung Barang | | | |
| 52xxxx | Dr | Beban Barang... | xxx |
| 218211 | Cr | Hibah Langsung yang Belum Disahkan | xxx |

Contoh:

Diterima hibah langsung berupa uang dari donor sebesar Rp25 juta pada tanggal 15 Desember 2015

Diperlukan pencatatan kas atas penerimaan hibah berupa uang.

Langkah-langkah Pencatatan:

1. Catat penerimaan hibah uang dalam Buku Pengawasan Hibah Langsung Berupa Uang;

2. Buat memo penyesuaian untuk mencatat penerimaan kas tersebut;
3. Lakukan jurnal atas dasar memo penyesuaian menggunakan kategori 25 pada menu Jurnal Penyesuaian seperti di bawah ini :

| Kode Akun | Posisi | Uraian | Jumlah |
|-----------|--------|---|------------|
| 111827 | Dr | Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Di Sah kan | 25.000.000 |
| 218211 | Cr | Hibah Langsung yang Belum Disahkan | 25.000.000 |

BAB IV
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

A. Definisi

Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Transaksi BMN diproses melalui aplikasi Persediaan dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Secara manual disusun juga Catatan atas Barang Milik Negara (CaLBMN). Catatan atas Laporan Barang Milik Negara disampaikan Unit Akuntansi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan sebagai bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, Kementerian Kesehatan membentuk Unit Akuntansi BMN pada setiap jenjang pelaporan.

B. Kebijakan Akuntansi Barang Persediaan

1. Pengakuan

Persediaan diakui sebagai unsur yang akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, yaitu pada saat terpenuhinya hal-hal berikut ini:

- a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral, dan/atau

- b. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

2. Pengukuran

Persediaan dicatat sebesar jumlah uang yang menjadi nilai dari persediaan tersebut. Jumlah uang tersebut menunjukkan biaya yang dapat diukur secara andal atas perolehan/kepemilikan persediaan. Pada akhir periode, apabila terdapat sisa persediaan, metode yang digunakan untuk mengukur nilai persediaan akhir tersebut adalah metode *First In First Out* (FIFO) dan metode harga pembelian terakhir.

Metode FIFO digunakan untuk jenis persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda, sedangkan harga pembelian terakhir digunakan untuk persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam, seperti barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku dan barang dalam proses/setengah jadi.

Beban Persediaan

Ciri khusus berkaitan dengan basis akrual untuk persediaan adalah diakuinya beban persediaan. Beban persediaan diakui dari penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan. Beban persediaan ini diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan.

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

Persediaan yang diperoleh dari pembelian disajikan sebesar harga perolehan, yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan ditambah dengan biaya lain yang secara langsung dapat dibebankan pada persediaan serta dikurangi apabila ada potongan harga, rabat, atau pengurang lain yang serupa.

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Untuk persediaan yang diproduksi sendiri diukur

sebesar harga pokok produksi, yaitu biaya langsung yang terkait dengan produksi persediaan ditambah biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya, pengukurannya menggunakan nilai wajar.

3. Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan yang disajikan adalah jumlah persediaan hasil opname fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Termasuk dalam persediaan tersebut adalah barang yang dibeli dengan belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk persediaan mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan

Metode pencatatan yang digunakan untuk persediaan dalam basis akrual ini adalah metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).

Pencatatan persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim digunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik tersebut dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang berada di gudang maupun yang sudah ada pada unit pemakai.

- b. Penjelasan lebih lanjut tentang cakupan persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

c. Kondisi persediaan

Persediaan yang dilaporkan di neraca adalah persediaan dalam kondisi baik, sedangkan untuk persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan di neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar jenis, jumlah, dan nilai persediaan rusak atau usang.

d. Hal-hal lain, misalnya peruntukan dan asal persediaan, Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik

4. Ketentuan Lain-Lain Pencatatan Persediaan

a. Pembukuan Persediaan yang diperoleh dari APBN dilakukan pada Aplikasi Persediaan oleh Satker yang mengadakan persediaan.

b. Pengalihan/Hibah persediaan yang berbentuk aset tetap Kemenkes kepada Penerima Hibah tanpa memperoleh penggantian harus dilengkapi dokumen BAST Sementara, Surat Bukti Barang Keluar (SBBK), dan dokumen usulan hibah. Pencatatan dan pelaporan masih tetap dilakukan oleh Satuan Kerja Pemberi Barang sampai dengan terbitnya rekomendasi persetujuan hibah dari Pengelola Barang dengan nilai total usulan BMN di atas Rp.10 Milyar, selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang. Jika nilai total usulan BMN di bawah Rp.10 Milyar surat persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kemenkes dan Surat Keputusan diterbitkan masing-masing Unit Eselon 1 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/264/2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri kesehatan selaku Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan.

c. Pengalihan/Hibah persediaan berupa barang habis pakai dari Kantor Pusat kepada SKPD, Kementerian/Lembaga lain dan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan harus dilengkapi dokumen BAST. Pencatatan dan pelaporan persediaan tersebut dihapus dari Satuan Kerja Pemberi Barang

berdasarkan BAST yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Surat Keputusan Penghapusan dari Pimpinan Unit Eselon 1.

- d. Setiap perubahan/mutasi BMN dan koreksi nilai BMN harus didasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), dokumen kepemilikan dan dokumen lainnya yang sah.
- e. Satker RS BLU dapat membukukan barang persediaan farmasi dengan menggunakan aplikasi barang persediaan farmasi selain Aplikasi Persediaan-subsistem SIMAK BMN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.
- f. Pelaporan barang persediaan Satker RS BLU pada setiap periode pelaporan wajib disajikan melalui Aplikasi Persediaan sebagaimana yang dimaksud dalam surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1284/PB.6/2011 perihal Aplikasi Barang Persediaan sebagai berikut :
 - 1) Untuk kodefikasi barang persediaan yang belum terakomodir dalam database Aplikasi Persediaan dapat menggunakan kodefikasi barang yang mendekati.
 - 2) Barang Persediaan yang dilaporkan secara global per jenis barang dan sub-sub kelompok.

C. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi klasifikasi, yaitu:

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- Aset Tetap Lainnya; dan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan.

1. Tanah

a. Pengakuan

- 1) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL).
- 2) Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.
- 3) Pedoman pengakuan tanah sebagai berikut :
 - a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah

tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
- i) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - ii) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - iii) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - iv) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan

sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 4) Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Pengukuran

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 3) Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 58, aset tetap tanah tidak disusutkan.

Pengungkapan aset tetap tanah dalam CaLK, meliputi :

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah.
 - 2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
 - 3) Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya); perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk 20 tanah; pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya); dan perubahan nilai (jika ada).
2. Peralatan dan Mesin
- a. Pengakuan
 - 1) Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
 - 2) Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
 - b. Pengukuran
 - 1) Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 20, Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
 - 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk

memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) PSAP 07 Paragraf 52 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2) Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dihitung menggunakan Metode Garis Lurus, dengan nilai sisa adalah Rp.0 (nol rupiah).
- 3) Pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin dalam CaLK, meliputi :
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) peralatan dan mesin.
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang terkait peralatan dan mesin.
 - c) Rekonsiliasi nilai tercatat peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi dari KDP, dan lainnya); perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk peralatan dan mesin; pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya); dan perubahan nilai (jika ada).
 - d) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3. Gedung dan Bangunan

a. Klasifikasi

- 1) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Gedung dan Bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.
- 3) Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning)*, dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula.
- 4) Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut :
 - a) Bangunan Fisik;
 - b) Taman, Jalan, dan Tempat Parkir, Pagar;
 - c) Instalasi AC;
 - d) Instalasi Listrik dan Generator;
 - e) Lift;
 - f) Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah;
 - g) Saluran Telepon
- 5) Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa, sehingga setidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjaan borongan bangunan.

b. Pengakuan

- 1) Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- 2) Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya atau Berita Acara Serah Terima.
- 3) Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
- 4) Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca.

c. Pengukuran

- 1) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

- 2) Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
 - 3) Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- d. Penyajian dan Pengungkapan
- 1) PSAP 07 Paragraf 52 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 - 2) Gedung dan bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dihitung menggunakan Metode Garis Lurus, dengan nilai sisa adalah Rp.0 (nol rupiah).
 - 3) Pengungkapan aset tetap gedung dan bangunan dalam CaLK, meliputi:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) gedung dan bangunan.
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang terkait dengan gedung dan bangunan.
 - c) Rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi dari KDP, dan lainnya); perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan; pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran

- aset, reklasifikasi, dan lainnya); dan perubahan nilai (jika ada).
- d) Informasi penyusutan gedung dan bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e) Ketentuan Lain-Lain Terkait Sinkronisasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Yang Berada Dalam Lingkungan Komplek Kantor
- 1) Pencatatan Gedung dan bangunan terkait dengan adanya aset yang masuk kodefikasi kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan berada di lingkungan kantor mengikuti pedoman sesuai surat Direktur Akuntansi dan pelaporan Keuangan DJPB Nomor : S-9356/PB.6/2013 tanggal 24 Desember 2013 hal Jawaban Konsultansi Pencatatan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - 2) Satuan kerja mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMN hanya untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - 3) Pengertian masyarakat umum dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satker tersebut. Masyarakat umum adalah selain dari pegawai satker atau selain dari individu/masyarakat yang menerima layanan dari satker tersebut. hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pembatasan akses terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dimaksud sehingga masyarakat umum dapat juga memanfaatkan aset tersebut.

- 4) Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak digunakan oleh masyarakat umum, maka dicatat sebagai bagian dari aset tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tempat dimana Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut melekat atau menjadi satu kesatuan. Misalnya, apabila Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang melekat pada gedung dan bangunan maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dicatat sebagai penambah nilai gedung dan bangunan. Atau apabila Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut melekat pada peralatan dan mesin (contohnya jaringan AC yang tidak menyatu dengan gedung dan bangunan), maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dicatat sebagai penambah nilai peralatan dan mesin tersebut.
- 5) Jalan di lingkungan kantor yang tidak digunakan oleh masyarakat umum, tidak dicatat tersendiri sebagai jalan melainkan dicatat sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, sepanjang jalan dimaksud dibuat sebagai akses khusus kepada gedung kantor tersebut. Dalam hal jalan dimaksud dibangun tidak sebagai akses khusus kepada gedung kantor, maka jalan dimaksud tetap dicatat sebagai jalan sampai dengan adanya kodefikasi BMN khusus jalan (sekitar gedung kantor) yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 6) Saluran air, turap, saluran drainase dan bangunan air lainnya yang menyatu dengan gedung dan bangunan dan yang berada di lingkungan kantor, tidak dicatat tersendiri sebagai irigasi melainkan dicatat sebagai penambah nilai gedung dan bangunan.
- 7) Instalasi pembuangan air kotor, instalasi air bersih, instalasi generator dan instalasi AC

yang menyatu dengan gedung, tidak dicatat tersendiri sebagai jaringan melainkan dicatat sebagai penambah nilai gedung dan bangunan. Khusus untuk instalasi AC yang tidak menyatu dengan gedung, maka dicatat sebagai bagian dari peralatan dan mesin.

- 8) Jaringan listrik, jaringan telepon yang berada di dalam gedung, tidak dicatat tersendiri sebagai jaringan melainkan dicatat sebagai penambah nilai gedung dan bangunan.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a. Klasifikasi

- 1) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

b. Pengakuan

- 1) Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- 2) Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

c. Pengukuran

- 1) Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya

konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

- 2) Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.
 - 3) Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- d. Penyajian dan Pengungkapan
- 1) PSAP 07 Paragraf 52 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 - 2) Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dihitung menggunakan Metode Garis Lurus, dengan nilai sisa adalah Rp.0 (nol rupiah).
 - 3) Pengungkapan aset tetap gedung dan bangunan dalam CaLK, meliputi:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Jalan, Irigasi dan Jaringan.
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
 - c) Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi dari KDP, dan lainnya); perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal

untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan; pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya); dan perubahan nilai (jika ada).

- d) Informasi penyusutan gedung dan bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

5. Aset Tetap Lainnya

a. Klasifikasi

- 1) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

b. Pengakuan

- 1) Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas.
- 2) Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

- a) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - b) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir a) dan b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
- 3) Pengakuan Aset Tetap Lainnya memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.
- c. Pengukuran
- 1) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 - 2) Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui

kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

- 3) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
 - 4) Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Penyajian dan Pengungkapan
- 1) PSAP 07 Paragraf 52 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 - 2) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - 3) Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
 - 4) Aset Tetap Renovasi disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dihitung menggunakan Metode Garis Lurus, dengan nilai sisa adalah Rp.0 (nol rupiah).
 - 5) Pengungkapan aset tetap gedung dan bangunan dalam CaLK, meliputi:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Aset Tetap Lainnya.
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi dari KDP, dan lainnya); perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya; pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya); dan perubahan nilai (jika ada).
- d) Informasi penyusutan gedung dan bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Klasifikasi

- 1) KDP adalah asset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.
- 2) Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila Pemerintah mengontrakkan pekerjaan melalui Kontrak Konstruksi kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaikan bagian tertentu

(prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP.

- 3) Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Kontrak konstruksi meliputi :
 - a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
 - d) kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.
 - 4) Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak.
- b. Pengakuan
- 1) suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan 3 aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - 2) Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan

proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

- 3) Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan :
 - a) KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
 - b) Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
 - c) Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:
 - i. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan
 - ii. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
 - d) Variasi pencatatan KDP dalam praktek di lapangan :
 - i. Apabila aset telah selesai dibangun, BAPP sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - ii. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, BAPP sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - iii. Apabila aset telah selesai dibangun, namun BAPP belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker, maka aset

- tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- iv. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
 - v. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (KDP), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan.
 - vi. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
- 4) Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan :
- a) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.
 - b) Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - c) Pengukuran
 - 1) Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola :

- a) biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- b) Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - i. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - ii. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - iii. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - iv. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - v. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- c) Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - i. asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
 - ii. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan

- iii. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 2) Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi :
- a) Komponen nilai perolehan KDP meliputi :
 - i. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - ii. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - iii. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 - b) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
- 3) Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman :
- a) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 - b) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

- c) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
 - d) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
 - e) Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan dan tidak ditambahkan sebagai nilai asset.
- d) Penyajian dan Pengungkapan
- 1) KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Pengungkapan aset tetap KDP dalam CaLK, meliputi :
 - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - e) Jumlah Retensi.
- 3) Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam CaLK. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penerapannya sampai tanggal tertentu.
- 4) Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa bahan setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa bahan pasca konstruksi yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

7. Aset Tak Berwujud

a. Klasifikasi

- 1) ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 2) ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- 3) Jenis-jenis ATB :

- i. Berdasarkan sumber daya: *software* komputer, Lisensi dan *franchise*, Hak Paten dan Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya, dan ATB dalam Pengerjaan.
 - ii. Berdasarkan perolehan: pembelian, pengembangan internal, pertukaran, donasi/hibah, dan Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*).
 - b. Pengakuan
 - 1) Sesuatu diakui sebagai ATB, jika dan hanya jika :
 - i. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - ii. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
 - 2) Pengakuan ATB yang diperoleh secara internal, entitas harus menerapkan persyaratan dan pedoman sebagai berikut :
 - i. Tahap penelitian atau riset;
 - ii. Tahap pengembangan.

Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
 - c. Pengukuran
 - 1) Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dan biaya pengembangan terkait dengan ATB sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB.

Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai hal ini.

- 2) Perlakuan khusus untuk *software* komputer :
 - a) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi terpenuhi. Oleh karena itu, *software* yang diakui adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 - b) Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

- 3) Pengeluaran berikutnya setelah perolehan
 - a) Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - i. Meningkatkan fungsi *software*;
 - ii. Meningkatkan efisiensi *software*.
 - b) Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru. Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi, sebagai berikut:
 - i. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - ii. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
- d. Pencatatan, Penyajian dan Pengungkapan
 - 1) ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.
 - 2) Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya, yaitu :
 - a) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah 1 masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
 - b) Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - c) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

- d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e) Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud; dan
 - f) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - i. Penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - ii. Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud;
 - iii. Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - iv. Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
 - g) Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*).
- 3) Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap: periode amortisasi, metode amortisasi; atau nilai sisa.
- 4) Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan :
- a) Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud;
 - b) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
 - c) Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.
8. Renovasi Aset Tetap

Suatu satuan kerja K/L dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun aset tetap lainnya jarang ditemukan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu K/L atau SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

- a. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri
 - 1) Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada K/L yang memenuhi syarat kapitalisasi.
 - 2) Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
 - 3) Atas belum terselesaikannya atau belum diserahterimkannya renovasi dan sudah dibayarkannya seluruh biaya kontrak perlu diungkapkan dalam CaLK.
- b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan
 - 1) Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja K/L yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam

satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- a) Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L; dan
 - b) Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain;
- 2) Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
 - 3) Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik dengan mekanisme penyerahannya melalui BAST. Dalam hal BAST/dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja K/L pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka satuan kerja K/L yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.
- c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan
- 1) Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja K/L, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi :
 - a) Renovasi aset tetap milik pemerintah daerah; dan
 - b) Renovasi aset tetap milik pihak lain (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).
 - 2) Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah

nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

- 3) Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
- 4) Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika BAST/dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan pemilik aset tetap bersangkutan akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

9. Aset Tetap di Luar Negeri

a. Pengakuan

- 1) Pada prinsipnya pengakuan Aset Tetap diluar negeri sama dengan pengakuan aset tetap di dalam negeri.
- 2) Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.
- 3) Apabila pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset tetap diakui ketika aset tetap yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

b. Pengukuran

- 1) Pengukuran Aset Tetap Luar Negeri pada prinsipnya juga mengacu pada nilai perolehan atau apabila penilaian

aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- 2) Dalam hal pembelian aset tetap di luar negeri menggunakan mata uang asing, maka berlaku ketentuan yang menyatakan bahwa transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral (Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- c. Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap Di Luar Negeri
- Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:
- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, termasuk juga nilai mata uang asing dan kurs pada saat perolehan.
 - 2) Jenis dan lokasi aset tetap di luar negeri.

Jika pembelian dilakukan dengan angsuran, maka harus diungkapkan juga uraian mengenai nilai rincian utang pembelian aset secara angsuran tersebut.

10. Hubungan antara Belanja dan Perolehan Aset Tetap

- a. Pada prinsipnya dalam penganggaran dan pelaporan keuangan pemerintahan harus sinkron dan sesuai peruntukannya, misal : pengeluaran untuk pembelian aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang, pengeluaran untuk pemeliharaan rutin dianggarkan dalam Belanja Modal, atau bantuan untuk masyarakat dianggarkan dalam Belanja Modal.
- b. Dalam situasi yang ideal akan terdapat kesesuaian antara Belanja Modal sebagai akun anggaran dengan Aset Tetap sebagai akun finansial. Namun demikian, dalam hal terjadi kontradiksi antara akun anggaran dengan akun finansial, maka akuntansi akan menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
- c. Penggunaan Belanja Barang :
 - 1) Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk

memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

- 2) Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
- 3) Belanja Barang dan Jasa tidak dikapitalisasi, jika pengeluaran tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan dikategorikan sebagai belanja barang operasional dan non-operasional, dan juga sebaliknya.
- 4) Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
- 5) Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa mendatang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam BMN bersangkutan dan penambahan nilai aset tersebut dijelaskan dalam CaLK.
- 6) Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Dalam hal perjalanan dinas tersebut dimaksudkan untuk

tujuan perolehan aset tetap harus dikapitalisasi ke dalam perolehan BMN dan penambahan nilai aset tersebut dijelaskan dalam CaLK.

d. Penggunaan Belanja Modal:

- 1) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- 2) Dikategorikan sebagai belanja modal, jika :
 - a) pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset;
 - b) pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - c) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

11. Penyusutan BMN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 59/KMK.6/2013 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Seluruh Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan melakukan pencatatan dan penyajian penyusutan aset tetap pada Laporan Keuangan Kemenkes Tahun 2015.

Hal hal yang harus diperhatikan dalam pemberlakuan Penyusutan Aset adalah sebagai berikut :

- a. Metode penyusutan menggunakan garis lurus dan penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- b. Aset Tetap yang disusutkan berupa :
 - 1) Gedung dan Bangunan
 - 2) Peralatan dan Mesin
 - 3) Jalan, Jaringan, Irigasi dan Jembatan

- 4) Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi (kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.
 - 5) Aset Tetap yang direklasifikasi menjadi aset lainnya
- c. Aset Tetap yang dikecualikan atau tidak disusutkan adalah sebagai berikut :
- 1) Tanah
 - 2) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
 - 3) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- d. Jika terjadi normalisasi yang diakibatkan proses migrasi penyusutan, Satker harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Identifikasi fisik barang.
 - 2) Jika Barang tersebut secara fisik ada maka dilakukan *entry* pada menu Saldo awal.
 - 3) Apabila barang tersebut tidak diketemukan dan/atau sudah dilakukan penghapusan dan/atau transfer keluar maka petugas SIMAK BMN Satker membuat surat pernyataan yang menjelaskan permasalahan tersebut dan diketahui pimpinan Satker.
 - 4) Berdasarkan surat pernyataan tersebut tidak perlu dilakukan *entry* BMN. Proses tindak lanjut atas hasil normalisasi data BMN diungkapkan dalam CaLBMN dan CaLK.
- e. Proses Penyusutan Reguler dilakukan oleh Satker setiap periode pelaporan (Semester I, Tahunan) menggunakan Aplikasi SIMAK BMN Akrual secara manual dengan menu penyusutan reguler.
- f. Bagi Satker yang memiliki Unit Akuntansi Kuasa Pembantu Pengguna Barang (UAKPPB) harus melakukan penyusutan reguler pada masing-masing UAKPPB terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman kepada UAKPB.
- g. Melakukan pengungkapan akumulasi penyusutan per akun neraca setiap periode pelaporan dalam CaLBMN dan CaLK.

- h. Penyajian akumulasi penyusutan hanya diperuntukan dalam penyajian informasi aset tetap dalam Laporan Keuangan, sedangkan pengelolaan BMN yang telah disusutkan tetap mengikuti peraturan pengelolaan BMN yang berlaku.
- i. Penyusutan BMN dilakukan pada tingkat Satuan Kerja (UAKPB) dan secara umum penyusutan pertama kali dilakukan hanya untuk Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012 dan sesuai nilai buku yang dilaporkan pada Laporan Keuangan TA 2012 (Audited).

12. Kapitalisasi Nilai BMN Akibat Biaya Pemeliharaan

Pemeliharaan BMN dapat dikapitalisasi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas/volume, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan
- b. Memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1) Gedung dan Bangunan : \geq Rp. 10.000.000,-
 - 2) Peralatan dan Mesin, Alat Olahraga : \geq Rp. 300.000,-
 - 3) Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Koleksi Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian : \geq Rp. 1,-

Pemeliharaan BMN tidak dapat dikapitalisasi jika tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi yang tersebut di atas. Demikian juga pemeliharaan yang bertujuan mempertahankan aset tetap/aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal, antara lain pengecatan, kalibrasi alat kesehatan untuk memenuhi keakuratan fungsi alat kesehatan, pembelian suku cadang dan memperbaiki estetika bangunan gedung seperti pembuatan partisi non-permanen, dan pembelian gordyin

D. Kebijakan Lain terkait Barang Milik Negara

1. BMN pada Satuan Kerja Non Aktif/likuidasi

Sekretariat Unit Eselon I bertanggungjawab melaporkan BMN Satuan Kerja Non Aktif di lingkungan masing-masing dan dilakukan proses likuidasi dengan berpedoman pada PMK Nomor 272/PMK.06/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas

Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

2. Akun yang Digunakan

Akun persediaan dan aset yang digunakan sebagaimana terlampir dalam lampiran Bagan Akun Standar Neraca.

3. Pencatatan BMN Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

a. BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sebelum Tahun 2011 dan BMN yang telah diserahkan kepada pihak ketiga yang telah diusulkan untuk dihibahkan maka :

- 1) Direklasifikasi ke dalam daftar BMN DK/TP yang telah diserahkan;
- 2) Tidak lagi disajikan pada Neraca; dan
- 3) Diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dan jika belum diusulkan ke Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang maka BMN tersebut masih disajikan di dalam Neraca SIMAK BMN.

Catatan: Pada Point 1) petugas SIMAK BMN menyiapkan data untuk diserahkan kepada petugas SAIBA sebagai bahan pengungkapan dalam CaLK

b. Proses Hibah BMN DK/TP Sebelum Tahun 2011 mengacu kepada PMK Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

c. BMN yang berasal dari kegiatan penunjang dalam rangka Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan harus menggunakan MAK 5262 dan dicatat dalam aplikasi persediaan. Jika dalam 6 bulan setelah realisasi pengadaan tidak dilakukan serah terima dari Kemenkes kepada Pemerintah Daerah maka harus direklas menjadi aset tetap dalam aplikasi SIMAK BMN

d. BMN yang berasal dari kegiatan penunjang dalam rangka Tugas Dekonsentrasi yang dialokasikan dengan klasifikasi Belanja Modal harus dilakukan pengecekan dokumen

kegiatan yang direncanakan. Jika dibuktikan dialokasikan untuk kegiatan penunjang Dekonsentrasi maka BMN tersebut tetap dicatat dan dibukukan sebagai Persediaan.

- e. Belanja 526 TP BOK menunggu dari Ditjen GKIA (PR)
- f. Proses Hibah BMN DK/TP Setelah Tahun 2011 dengan menggunakan Belanja Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan menggunakan MAK 5262 mengacu kepada PMK Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

4. BMN Pengadaan Pusat Yang Diserahoperasikan Kepada Penerima Hibah

Bagi Satker yang mengadakan BMN dari awalnya untuk diserahkan ke penerima hibah harus menggunakan MAK 52XX dan dicatat dalam Aplikasi Persediaan. Jika pada akhir periode pelaporan tidak selesai proses hibahnya, maka harus dilakukan reklasifikasi dari persediaan menjadi aset tetap kemudian dilakukan proses penghentian BMN dari penggunaan dalam Aplikasi SIMAK BMN

5. Hibah Langsung Barang Dari Pihak Ketiga

- a. BMN berupa aset tetap dan/atau persediaan yang bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) dan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU), di-*entry*/ dicatat sebagai hibah masuk ke dalam Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan berdasarkan BAST dari Donor.
- b. BMN berupa aset tetap dan/atau persediaan yang bersumber dari Hibah Langsung (Luar dan Dalam Negeri) pada Satuan Kerja Non BLU, di-*entry* ke dalam Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan berdasarkan BAST dari Donor. Selanjutnya Satuan Kerja bersangkutan dilakukan segera proses pengesahan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, melalui Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS) dan KPPN setempat untuk memperoleh persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS);

- c. Proses penatausahaan barang Point 2) tersebut menjadi BMN dan telah digunakan (barang habis pakai) sebelum terbit registrasi dari DJPPR Kemenkeu harus diungkapkan dalam CaLBMN dan CaLK.

E. Jenis Transaksi BMN

Jenis Transaksi Barang Milik Negara meliputi : saldo awal, perolehan, perubahan, penghapusan dan penghentian Barang Milik Negara.

Saldo awal merupakan transaksi pada tahun anggaran berjalan yang berasal dari perolehan BMN periode sebelumnya yang belum dibukukan pada tahun perolehannya.

1. Transaksi Perolehan BMN

Perolehan BMN adalah transaksi untuk mencatat penambahan kuantitas BMN. Dokumen yang dipergunakan antara lain : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Surat Perjanjian Kontrak, Faktur/Kuitansi dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan mutasi penambahan BMN. Transaksi perolehan BMN terdiri dari:

- a. Pembelian (101), adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan penyerahan sejumlah uang untuk memperoleh sejumlah barang;
- b. Transfer Masuk (102), merupakan perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari unit lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi;
- c. Hibah Masuk (103), merupakan perolehan BMN dari luar Pemerintah Pusat tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi;
- d. Rampasan (104), merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan;
- e. Penyelesaian Pembangunan Dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) (105), merupakan pengakuan aset yang telah selesai proses pembangunan melalui mekanisme KDP, biasanya pencairan dananya melalui beberapa termin pembayaran;
- f. Pembatalan Penghapusan (106), merupakan pencatatan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/dikeluarkan dari pembukuan;

- g. Reklasifikasi Masuk (107), merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain;
- h. Bangun Serah Guna (108), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati;
- i. Bangun Guna Serah (109), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu;
- j. Kerja Sama Pemanfaatan (110), adalah transaksi perolehan aset yang berasal dari kerja sama pemanfaatan;
- k. Pertukaran (111), adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah pusat dengan pihak lainnya, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
- l. Perolehan Lainnya (112), adalah digunakan untuk merekam perolehan BMN yang tidak termasuk dalam perolehan lainnya selain sudah disebut terdahulu;
- m. Penyelesaian Pembangunan Langsung (113), merupakan perolehan aset melalui proses konstruksi pembangunan dengan pembayaran sekaligus (satu) termin pembayaran.
- n. Perolehan dari Reklasifikasi Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) (114), merupakan perolehan BMN dari proyek pemerintah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diserahterimakan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN tetapi belum ada penetapan status dari proyek Pemerintah tersebut kepada

BUMN. BPYBDS (secara implisit) adalah termasuk dalam pengertian Barang Milik Negara;

Dalam proses perekaman transaksi yang tidak memerlukan SP2D adalah transfer, hibah, rampasan, penyelesaian pembangunan dengan KDP, pembatalan penghapusan, reklasifikasi masuk, bangun serah guna, bangun guna serah, pertukaran, perolehan lainnya dan Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS sedangkan transaksi yang memerlukan SP2D adalah pembelian dan penyelesaian pembangunan langsung.

2. Transaksi Perubahan BMN

Transaksi Perubahan BMN adalah transaksi untuk mencatat perubahan nilai/kuantitas/ kondisi BMN. Dokumen yang dipergunakan antara lain: SP2D, BAST Barang, Surat Keputusan, Surat Perjanjian Kontrak, Faktur, kuitansi dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan mutasi perubahan BMN. Transaksi perubahan BMN meliputi :

- a. Pengurangan Kuantitas/Nilai (201), merupakan transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang;
- b. Pengembangan Langsung (202), merupakan transaksi kapitalisasi yang mengakibatkan pemindahbukuan dari BMN Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN Intrakomptabel.
- c. Perubahan Kondisi (203), merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN;
- d. Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (204), merupakan koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya;
- e. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban (205), adalah jenis transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perekaman atas barang BMN hasil koreksi dari Tim Penertiban Barang Milik Negara (penilaian kembali).
- f. Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi (206), adalah pencatatan aset yang nilai renovasinya sudah diserahkan terimakan dari pihak lain;

- g. Pengembangan Melalui KDP (208), merupakan transaksi kapitalisasi aset yang pencairan dananya melalui beberapa termin pembayaran.

Dalam proses perekaman transaksi yang tidak memerlukan SP2D/SP2B adalah pengurangan nilai aset, perubahan kondisi, koreksi pencatatan nilai/kuantitas dan penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi, dan pengembangan melalui KDP. Sedangkan transaksi yang memerlukan SP2D/SP2B adalah pengembangan langsung.

3. Transaksi Penghapusan BMN

Transaksi Penghapusan BMN adalah transaksi untuk mencatat penghapusan BMN dari pembukuan yang disebabkan penyerahan kepada pihak lain, koreksi terhadap pencatatan maupun penghapusan. Transaksi Penghapusan BMN adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusan BMN (301) dibuat sesuai aset yang dihapuskan per akun seperti: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya;
- b. Transfer Keluar (302), merupakan penyerahan BMN dari hasil transfer keluar dari unit lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa menerima sejumlah sumber daya ekonomi;
- c. Hibah keluar (303), merupakan penyerahan BMN karena pelaksanaan hibah, atau yang sejenis ke luar Pemerintah Pusat tanpa menerima sejumlah sumber daya ekonomi;
- d. Reklasifikasi Keluar (304), merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk;
- e. Koreksi Pencatatan (305), merupakan transaksi untuk mengubah catatan BMN yang telah dilaporkan sebelumnya.

4. Transaksi Penghentian BMN dari Penggunaan

Transaksi Penghentian BMN dari Penggunaan (401), adalah transaksi untuk merubah klasifikasi BMN dari akun Aset Tetap menjadi akun Aset Lainnya. Aset Tetap yang diubah ke Aset Lainnya disebabkan aset tetap tersebut sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak atau tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang dan akan/dalam proses usulan penghapusan.

F. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B

1. Tugas UAKPB

- a. Memproses *entry* data transaksi barang
 - b. Melakukan *stock opname* fisik persediaan setiap semester
 - c. Melakukan rekonsiliasi internal dengan SAIBA setiap bulan
 - d. Melakukan rekonsiliasi eksternal dengan KPKNL Setempat
 - e. Mengirimkan Laporan BMN beserta ADK setiap periode pelaporan
2. Dokumen Sumber UAKPB
- Dokumen sumber untuk penyusunan Laporan Barang tingkat Satuan Kerja, adalah :
- a. Dokumen Pengadaan (SPK)
 - b. SPM / SP2D/Kwitansi
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)
 - d. Dst.
3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B
- a. Prosedur UAKPA
- Kegiatan Harian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan
- 1) Menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dan barang milik negara.
 - 2) Menyampaikan dokumen sumber transaksi keuangan yang mendukung kapitalisasi nilai BMN kepada UAKPB.
 - 3) Menerima dan memproses ADK BMN dari UAKPB setiap bulan.
 - 4) Merekam (*entry*) dokumen sumber.
 - 5) Mencetak dan memverifikasi RTH dengan dokumen sumber, agar dapat diyakini bahwa data yang masuk tidak terjadi kesalahan dan sesuai dokumen sumbernya, sebelum masuk proses *posting* dan verifikasi buku besar.
 - 6) Melakukan *posting* data untuk seluruh transaksi keuangan dan BMN setiap bulan.
 - 7) Mencetak dan memverifikasi buku besar. Verifikasi buku besar sangat diperlukan sebelum disusun laporan keuangan. Hal ini untuk menjamin bahwa data-data realisasi anggaran dan laporan BMN telah sesuai dokumen sumber (SPM/SP2D) dan data BMN.
 - 8) Mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADK ke KPPN setiap bulan.

- 9) Melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAKPA.
 - 10) Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan menyampaikannya ke UAPPA-W/UAPPA-E1 beserta ADK setiap bulan.
 - 11) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikannya ke UAPPA-W/UAPPA-E1 setiap Semester dan Tahunan.
 - 12) Melakukan *Back Up* data.
- b. Prosedur UAKPB
- Kegiatan Harian, Bulanan, Tribulanan Semesteran, dan Tahunan
- 1) Menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dan barang milik negara.
 - 2) Merekam (*entry*) dokumen sumber;
 - 3) Melakukan rekonsiliasi internal dan pengiriman ADK kepada UAKPA setiap bulan dengan membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal;
 - 4) Melakukan rekonsiliasi data per semester dengan KPKNL dan Berita Acara Rekonsiliasi;
 - 5) Mencetak Neraca, Laporan Barang Milik Negara, dan menyampaikannya ke UAPPB-W/UAPPB-E1 beserta ADK setiap bulan;
 - 6) Menyusun Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dan menyampaikannya ke UAPPB-W/ UAPPB-E1 setiap Semester dan Tahunan;
 - 7) Melakukan *Back Up* data.
- G. Verifikasi dan Validasi Data Barang Milik Negara
- Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAPPB bersama UAPPA melakukan rekonsiliasi internal sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per- 07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat. Contoh ilustrasi BAR internal SAK dan SIMAK terlampir.

a. Tingkat Satuan Kerja (UAKPB)

Petugas akuntansi memproses dokumen sumber transaksi BMN untuk menghasilkan data transaksi, Buku Inventaris, Buku Barang Bersejarah, Buku Persediaan, LKB, Laporan Barang, KIB, DIR, dan DIL. Data transaksi diverifikasi dengan dokumen sumber, untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sudah diproses sesuai dengan dokumen sumber yang ada.

Laporan Barang UAKPB Satker Dekonsentrasi dan Satker Vertikal mengirimkan ADK setiap semester dan tahunan ke tingkat UAPPB-W, sedangkan UAKPB Satker Kantor Pusat dan Satker Tugas Pembantuan mengirimkan ADK setiap semester dan tahunan secara langsung ke UAPPB-E1 untuk dilakukan penggabungan data.

UAKPB Dekonsentrasi/Vertikal menyampaikan Laporan Barang beserta ADK ke UAPPB-W Dekonsentrasi/Vertikal maupun UAKPB Satker Kantor Pusat dan Satker Tugas Pembantuan ke UAPPB-E1 secara berjenjang selambat-lambatnya tanggal 10 Juli untuk Semester 1 dan tanggal 17 Januari pada tahun berikut untuk Laporan Semester 2 dan Tahunan.

b. Tingkat Wilayah (UAPPB-W)

Laporan Barang tingkat wilayah (UAPPB-W) Vertikal divalidasi dengan Laporan Barang tingkat satuan kerja (UAKPB) di lingkungan UAPPB-W yang bersangkutan.

Laporan Barang tingkat wilayah (UAPPB-W) Dekonsentrasi divalidasi dengan Laporan Barang tingkat satuan kerja (UAKPB) Satker Dekonsentrasi di lingkungan UAPPB-W yang bersangkutan. Laporan Barang tingkat wilayah beserta ADK setiap semester dan tahunan disampaikan ke tingkat eselon I (UAPPB-E1) dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di wilayah masing-masing. Penyampaian Laporan Barang oleh UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan tidak perlu disertai ADK.

c. Tingkat Eselon I (UAPPB-E1)

Laporan Barang tingkat eselon I (UAPPB-E1) divalidasi dengan Laporan Barang tingkat wilayah (UAPPB-W) di lingkungannya dan juga Laporan Barang tingkat UAKPB di lingkungan UAPPB-E1

yang bersangkutan, termasuk dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang disalurkan melalui provinsi/kotamadya/kabupaten.

Laporan Barang tingkat eselon I beserta ADK setiap semester dan tahunan disampaikan ke Kementerian Kesehatan (UAPB).

d. Tingkat Kementerian Kesehatan (UAPB)

Laporan Barang tingkat Kementerian Kesehatan (UAPB) divalidasi dengan Laporan Barang eselon I (UAPPB-E1) di lingkup Kementerian Kesehatan.

Laporan Barang tingkat Kementerian Kesehatan (UAPB) beserta ADK setiap semester dan tahunan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Dirjen Kekayaan Negara.

Selain itu pada akhir tahun anggaran dilakukan pemutakhiran data dengan Ditjen Kekayaan Negara c.q. Direktorat Barang Milik Negara.

H. Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Negara

Laporan Barang Kementerian Kesehatan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dengan jadwal penyampaian laporan dari tingkat UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1 dan UAPB sebagai berikut:

a. Jadwal Penyampaian Laporan dan Daftar Mutasi BMN Semester I:

| Pelaksana Penatausahaan | Intern | Tanggal Terima | Proses dan Rekonsiliasi | Tanggal Kirim | Waktu Pengiriman |
|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------|
| UPKPB | 1 s.d. 2 Juli | - | s.d. 10 Juli | 12 Juli | 2 hari |
| UPPB-W | | 14 Juli | 4 hari | 18 Juli | 2 hari |
| UPPB-E1 | | 20 Juli | 2 hari | 22 Juli | 1 hari |
| UPPB | | 23 Juli | 3 hari | 26 Juli | 0 hari |
| Menkeu cq. DJKN | | 26 Juli | - | - | |

b. Jadwal Penyampaian Laporan dan Daftar Mutasi BMN Tahunan:

| Pelaksana Penatausahaan | Intern | Tanggal Terima | Proses dan Rekonsiliasi | Tanggal Kirim | Waktu Pengiriman |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| UPKPB | 1 s.d. 15 Januari | - | s.d. 17 Januari | 20 Januari | 3 hari |
| UPPB-W | | 23 Januari | 6 hari | 29 Januari | 4 hari |
| UPPB-E1 | | 02 Februari | 6 hari | 08 Februari | 2 hari |
| UPPB | | 10 Februari | 18 hari | Tanggal Terakhir Februari | 0 hari |
| Menkeu cq. DJKN | | Tanggal Terakhir Februari | | | |

I. Laporan BMN

Laporan Barang Milik Negara disusun dan disampaikan secara berkala dalam periode Semester I dan Semester II, masing-masing Laporan menyajikan data dan informasi :

1. Laporan Barang Kuasa Pengguna

- Laporan Barang UAKPB Semester I dan Tahunan disusun berdasarkan proses perekaman transaksi barang Semester I dan Tahunan termasuk saldo awal.
- Laporan Barang UAKPB Satker Dekonsentrasi/Satker Tugas Pembantuan Semester I dan Semester II disusun berdasarkan proses perekaman transaksi barang Semester I dan Semester II termasuk saldo awal yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
- UAKPB yang membentuk UAPKPB, Laporan Barang UAKPB Semester I dan Semester II adalah hasil penggabungan Laporan Barang Semester I dan Semester II dari seluruh UAPKPB.

- Laporan Barang UAKPB Satker KP, KD, DK dan TP Tahunan disusun berdasarkan proses perekaman transaksi BMN Tahunan termasuk saldo awal.
 - Laporan Barang UAKPB Satker Dekonsentrasi/Satker Tugas Pembantuan Tahunan disusun berdasarkan proses perekaman transaksi BMN termasuk saldo awal yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
 - UAKPB yang membentuk UAPKPB, Laporan Barang UAKPB Tahunan adalah hasil penggabungan Laporan Barang Tahunan dari seluruh UAPKPB.
- a. Laporan Barang Semesteran

| No | Nama Laporan |
|----|--|
| 1 | Laporan Barang Intrakomtabel, Ekstrakomtabel, Gabungan Per Sub-sub Kelompok Barang Satuan Kerja – Semesteran |
| 2 | Laporan Barang-Barang Bersejarah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud Per Kelompok Barang Satuan Kerja – Semesteran |
| 3 | Laporan Persediaan Satuan Kerja – Semesteran |
| 4 | Neraca – Semesteran |
| 5 | Laporan Penyusutan – Semesteran |
| 6 | Laporan Barang Rusak Berat yang Diusulkan ke Pengelola – Semesteran |
| 7 | Laporan Barang Hilang yang Diusulkan ke Pengelola – Semesteran |
| 8 | Laporan BPYBDS – Semesteran |
| 9 | Laporan Usulan Hibah DK/TP yang Sudah Diusulkan – Tahunan |
| 10 | Catatan atas Laporan Barang Milik Negara – Tahunan |

b. Laporan Barang Tahunan

| No | Nama Laporan |
|----|---|
| 1 | Laporan Barang Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja – Tahunan |
| 2 | Laporan Barang-Barang Bersejarah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud Per Kelompok Barang Satuan Kerja – Tahunan |
| 3 | Laporan Persediaan Satuan Kerja – Tahunan |
| 4 | Neraca – Tahunan |
| 5 | Laporan Penyusutan – Tahunan |
| 6 | Laporan Kondisi Barang satuan kerja – Tahunan |
| 7 | Laporan Barang Rusak Berat yang Diusulkan ke Pengelola – Tahunan |
| 8 | Laporan Barang Hilang yang Diusulkan ke Pengelola – Tahunan |
| 9 | Laporan BPYBDS – Tahunan |
| 10 | Laporan Usulan Hibah DK/TP yang Sudah Diusulkan - Tahunan |
| 11 | Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) - Tahunan |

Selain itu juga perlu disiapkan :

1. Arsip Data Komputer (ADK)
 2. Berita Acara Rekonsiliasi Internal UAKPB dan UAKPA
 3. Dokumen Persediaan antara lain : Kartu Persediaan, Buku Persediaan, dan Laporan Persediaan sesudah *Stock Opname* Fisik.
 4. Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan antara lain: Kartu KDP, Laporan KDP, dan Lembar analisis SPM/SP2D.
 5. Laporan PNB dari Pemanfaatan Aset (43214) dan PNB dari Penjualan/Penghapusan (42312)
 6. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan: Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), SK Penghapusan, Laporan Hasil *Opname* Fisik (LHOF), dan lain-lain.
2. Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Wilayah
 - Laporan Barang UAPPB-W Semester I dan Semester II disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari UAKPB Semester I dan Semester II.
 - Laporan Barang UAPPB-W Dekonsentrasi dan Vertikal Semester I dan Semester II disusun berdasarkan hasil

penggabungan Laporan Barang dari UAKPB Satker Dekonsentrasi dan UAKPB Satker Kantor Daerah Semester I dan Tahunan.

- Laporan Barang UAPPB-W Vertikal Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari UAKPB Satker Kantor Daerah Tahunan.
- Laporan Barang UAPPB-W Dekonsentrasi Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari UAKPB Satker Dekonsentrasi Tahunan.

a. Laporan Barang Semesteran

| No | Nama Laporan |
|----|--|
| 1 | Laporan Barang Intrakomptabel, Ekstrakomtabel, Gabungan Per Sub-sub Kelompok Barang Satuan Kerja – Semesteran |
| 2 | Laporan Barang-Barang Bersejarah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud Per Kelompok Barang Satuan Kerja – Semesteran |
| 3 | Laporan Persediaan Satuan Kerja – Semesteran |
| 4 | Neraca – Semesteran |
| 5 | Laporan Penyusutan - Semesteran |
| 6 | Laporan Barang Rusak Berat yang Diusulkan ke Pengelola - Semesteran |
| 7 | Laporan Barang Hilang yang Diusulkan ke Pengelola – Semesteran |
| 8 | Laporan BPYBDS – Semesteran |
| 9 | Laporan Usulan Hibah DK/TP yang Sudah Diusulkan - Tahunan |
| 10 | Catatan atas Laporan Barang Milik Negara – Tahunan |

b. Laporan Barang Tahunan

| No | Nama Laporan |
|----|---|
| 1 | Laporan Barang Intrakomptabel, Ekstrakomtabel, Gabungan Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja – Tahunan |
| 2 | Laporan Barang-Barang Bersejarah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud Per Kelompok Barang Satuan Kerja – Tahunan |
| 3 | Laporan Persediaan Satuan Kerja – Tahunan |
| 4 | Neraca – Tahunan |
| 5 | Laporan Penyusutan – Tahunan |
| 6 | Laporan Kondisi Barang satuan kerja – Tahunan |
| 7 | Laporan Barang Rusak Berat yang Diusulkan ke Pengelola - Tahunan |
| 8 | Laporan Barang Hilang yang Diusulkan ke Pengelola – Tahunan |
| 9 | Laporan BPYBDS – Tahunan |
| 10 | Laporan Usulan Hibah DK/TP yang Sudah Diusulkan - Tahunan |
| 11 | Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) - Tahunan |

Selain itu juga perlu disiapkan :

1. Arsip Data Komputer (ADK)
2. Berita Acara Rekonsiliasi Internal UAPPB-W dan UAPPB-W

3. Dokumen Persediaan antara lain : Kartu Persediaan, Buku Persediaan, dan Laporan Persediaan sesudah *Stock Opname* Fisik.
 4. Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan antara lain: Kartu KDP, Laporan KDP, dan Lembar analisis SPM/SP2D.
 5. Laporan PNBPN dari Pemanfaatan Aset (43214) dan PNBPN dari Penjualan/Penghapusan (42312)
 6. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan: Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), SK Penghapusan, Laporan Hasil *Opname* Fisik (LHOF), dll.
3. Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Eselon I
- Laporan Barang UAPPB-E1 Semester I dan Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari UAPPB-W dan UAKPB di bawah eselon I serta UAKPB Satker Dekonsentrasi/Satker Tugas Pembantuan Semester I dan Tahunan.
 - Laporan Barang UAPPB-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari UAPPB-W Dekonsentrasi/Vertikal dan UAKPB Satker Tugas Pembantuan.
- a. Laporan Barang Semesteran

| No | Nama Laporan |
|----|--|
| 1 | Laporan Barang Intrakomtabel, Ekstrakomtabel, Gabungan Per Sub-sub Kelompok Barang Satuan Kerja – Semesteran |
| 2 | Laporan Barang-Barang Bersejarah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud Per Kelompok Barang Satuan Kerja – Semesteran |
| 3 | Laporan Persediaan Satuan Kerja – Semesteran |
| 4 | Neraca – Semesteran |
| 5 | Laporan Penyusutan – Semesteran |
| 6 | Laporan Barang Rusak Berat yang Diusulkan ke Pengelola – Semesteran |
| 7 | Laporan Barang Hilang yang Diusulkan ke Pengelola – Semesteran |
| 8 | Laporan BPYBDS – Semesteran |
| 9 | Laporan Usulan Hibah DK/TP yang Sudah Diusulkan - Tahunan |
| 10 | Catatan atas Laporan Barang Milik Negara – Tahunan |

b. Laporan Barang Tahunan

| No | Nama Laporan |
|----|---|
| 1 | Laporan Barang Intrakomptabel, Ekstrakomtabel, Gabungan Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja – Tahunan |
| 2 | Laporan Barang-Barang Bersejarah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud Per Kelompok Barang Satuan Kerja – Tahunan |
| 3 | Laporan Persediaan Satuan Kerja – Tahunan |
| 4 | Neraca – Tahunan |
| 5 | Laporan Penyusutan – Tahunan |
| 6 | Laporan Kondisi Barang satuan kerja – Tahunan |
| 7 | Laporan Barang Rusak Berat yang Diusulkan ke Pengelola - Tahunan |
| 8 | Laporan Barang Hilang yang Diusulkan ke Pengelola - Tahunan |
| 9 | Laporan BPYBDS – Tahunan |
| 10 | Laporan Usulan Hibah DK/TP yang Sudah Diusulkan - Tahunan |
| 11 | Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) - Tahunan |

Selain itu juga perlu disiapkan :

1. Arsip Data Komputer (ADK)
 2. Berita Acara Rekonsiliasi Internal UAPPB-E1 dan UAPPB-E1
 3. Dokumen Persediaan antara lain : Kartu Persediaan, Buku Persediaan, dan Laporan Persediaan sesudah *Stock Opname* Fisik.
 4. Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan antara lain: Kartu KDP, Laporan KDP, dan Lembar analisis SPM/SP2D.
 5. Laporan PNB dari Pemanfaatan Aset (43214) dan PNB dari Penjualan/Penghapusan (42312)
 6. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan: Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), SK Penghapusan, Laporan Hasil *Opname* Fisik (LHOF), dll.
4. Laporan Barang Pengguna
- a. Laporan Barang Semesteran

- Laporan Barang Kementerian Kesehatan (UAPB) Semester I dan Semester II disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari UAPPB-E1 Semester I dan Tahunan.
- Laporan Barang Kementerian Kesehatan Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Tahunan dari UAPPB-E1.

| No | Nama Laporan |
|----|--|
| 1 | Laporan Barang Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan Per Sub-sub Kelompok Barang Satuan Kerja - Semesteran |
| 2 | Laporan Barang-Barang Bersejarah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud Per Kelompok Barang Satuan Kerja - Semesteran |
| 3 | Laporan Persediaan Satuan Kerja - Semesteran |
| 4 | Neraca - Semesteran |
| 5 | Laporan Penyusutan - Semesteran |
| 6 | Laporan Barang Rusak Berat yang Diusulkan ke Pengelola - Semesteran |
| 7 | Laporan Barang Hilang yang Diusulkan ke Pengelola - Semesteran |
| 8 | Laporan BPYBDS - Semesteran |
| 9 | Laporan Usulan Hibah DK/TP yang Sudah Diusulkan - Tahunan |
| 10 | Catatan atas Laporan Barang Milik Negara - Tahunan |

b. Laporan Barang Tahunan

| No | Nama Laporan |
|----|---|
| 1 | Laporan Barang Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja - Tahunan |
| 2 | Laporan Barang-Barang Bersejarah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud Per Kelompok Barang Satuan Kerja - Tahunan |
| 3 | Laporan Persediaan Satuan Kerja - Tahunan |
| 4 | Neraca - Tahunan |
| 5 | Laporan Penyusutan - Tahunan |
| 6 | Laporan Kondisi Barang satuan kerja - Tahunan |
| 7 | Laporan Barang Rusak Berat yang Diusulkan ke Pengelola - Tahunan |
| 8 | Laporan Barang Hilang yang Diusulkan ke Pengelola - Tahunan |
| 9 | Laporan BPYBDS - Tahunan |
| 10 | Laporan Usulan Hibah DK/TP yang Sudah Diusulkan - Tahunan |
| 11 | Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) - Tahunan |

Selain itu juga perlu disiapkan :

1. Arsip Data Komputer (ADK)
2. Berita Acara Rekonsiliasi Internal UAPB dan UAPA
3. Dokumen Persediaan antara lain : Kartu Persediaan, Buku Persediaan, dan Laporan Persediaan sesudah *Stock Opname* Fisik.

4. Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan antara lain: Kartu KDP, Laporan KDP, dan Lembar analisis SPM/SP2D.
5. Laporan PNBPN dari Pemanfaatan Aset (43214) dan PNBPN dari Penjualan/Penghapusan (42312)
6. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan: Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), SK Penghapusan, Laporan Hasil *Opname* Fisik (LHOF), dll.

J. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara disusun dan dilaporkan setiap akhir semester ke Unit Akuntansi di atasnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan BMN.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam CaLBMN adalah mutasi BMN yang dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Saldo Awal merupakan saldo BMN periode sebelumnya.
- Mutasi Tambah, berupa penambahan saldo awal pada tahun anggaran dibukukan, pengembangan dan perolehan BMN pada tahun anggaran berjalan. Untuk pengembangan dan perolehan BMN yang berasal dari pembelian harus diperhatikan kesesuaian antara penambahan BMN dengan realisasi belanja modal.
- Mutasi Kurang, merupakan penurunan kuantitas dan/atau nilai BMN yang pada tanggal akhir semester/tahun.
- Saldo Akhir, merupakan saldo laporan BMN pada tanggal akhir semester/tahun.
- Penjelasan dapat juga didasarkan atas daftar transaksi pada periode berjalan.
- Penjelasan yang memadai terkait penambahan BMN yang berasal dari Belanja Modal dan Belanja yang Lain.

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menunjang kelengkapan dan keakuratan data dalam Laporan Keuangan yaitu :

- 1) Laporan Barang Kementerian Kesehatan yang disampaikan termasuk BMN yang diperoleh dari dana dekonsentrasi yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi/Kotamadya/Kabupaten;
- 2) Sebelum melaksanakan proses akuntansi tahun berjalan, dilaksanakan proses tutup tahun untuk tahun anggaran sebelumnya.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan disusun untuk melengkapi ketentuan yang telah ada, sebagai upaya agar Laporan Keuangan dapat disusun dengan lebih informatif, transparan dan akuntabel sehingga pada akhirnya dapat dicapai Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang lebih berkualitas.

Pedoman ini berlaku bagi seluruh Satuan Kerja: Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) yang anggarannya berasal dari Kementerian Kesehatan.

Pedoman ini akan terus diperbaharui dan disempurnakan menyesuaikan perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan lainnya yang relevan serta perkembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Kritik dan saran dari pengguna dan pembaca kiranya dapat disampaikan untuk dapat dipergunakan dalam upaya menyempurnakan buku pedoman ini.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

FORMULIR I
BAGAN AKUN STANDAR LRA

- A. BAGAN AKUN STANDAR “NERACA”
- 1 ASET
- 11 ASET LANCAR
- 111 KAS DAN SETARA KAS
- 1111 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Rupiah
- 1116 Kas di Bendahara Pengeluaran
- 11161 Kas di Bendahara Pengeluaran
- 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran UP
- 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP
- 1117 Kas di Bendahara Penerimaan
- 11171 Kas di Bendahara Penerimaan
- 111711 Kas di Bendahara Penerimaan
- 1118 Kas Lainnya dan Setara Kas
- 11181 Setara Kas
- 111811 Surat Berharga
- 111819 Setara Kas lainnya
- 11182 Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga
- 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
- 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah
- 1119 Kas pada Badan Layanan Umum
- 11191 Kas -BLU
- 111911 Kas dan Bank - BLU
- 111912 Dana yang akan Dijaminkan - BLU
- 111913 Dana yang akan dipadankan - BLU
- 11192 Setara Kas - BLU
- 111921 Surat Berharga - BLU
- 111929 Setara kas Lainnya - BLU
- 113 INVESTASI JANGKA PENDEK
- 1133 Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum
- 11331 Deposito Jangka Pendek - BLU
- 113311 Deposito - BLU
- 113319 Investasi Lainnya - BLU

| | |
|--------|--|
| 114 | BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA, DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA |
| 1141 | Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) |
| 11411 | Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) |
| 114111 | Belanja Pegawai Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) |
| 114112 | Belanja Barang yang Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) |
| 114113 | Belanja Pembayaran Bunga Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) |
| 114114 | Belanja Lain-Lain Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) |
| 1142 | Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>) |
| 11421 | Uang Muka Belanja Pemerintah Pusat (<i>prepayment</i>) |
| 114211 | Uang Muka Belanja Pegawai (<i>prepayment</i>) |
| 114212 | Uang Muka Belanja Barang (<i>prepayment</i>) |
| 114213 | Uang Muka Belanja Modal (<i>prepayment</i>) |
| 114216 | Uang Muka Belanja Hibah (<i>prepayment</i>) |
| 114217 | Uang Muka Belanja Bantuan Sosial (<i>prepayment</i>) |
| 114218 | Uang Muka Belanja Lain-Lain (<i>prepayment</i>) |
| 1143 | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima |
| 11431 | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima |
| 114311 | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima |
| 115 | PIUTANG |
| 1152 | Piutang Bukan Pajak |
| 11521 | Piutang Bukan Pajak |
| 115211 | Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| 115212 | Piutang Lainnya |
| 1154 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi |
| 11541 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan |
| 115411 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan |
| 11542 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi |
| 115421 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi |
| 1157 | Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum |
| 11571 | Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa |
| 115711 | Piutang BLU Pelayanan Kesehatan |
| 115712 | Piutang BLU Pelayanan Pendidikan |
| 15719 | Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya |
| 11579 | Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional |
| 115791 | Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional |

| | |
|--------|---|
| 1158 | Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum |
| 11581 | Piutang Sewa - BLU |
| 115811 | Piutang Sewa Tanah - BLU |
| 115812 | Piutang Sewa Gedung - BLU |
| 115813 | Piutang Sewa Ruangan - BLU |
| 115814 | Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU |
| 115819 | Piutang Sewa Lainnya - BLU |
| 11582 | Piutang dari Penjualan Aset - BLU |
| 115821 | Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU |
| 115829 | Piutang dari Penjualan Aset lainnya - BLU |
| 11589 | Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional |
| 115891 | Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional |
| 116 | PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH |
| 1162 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak |
| 11621 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak |
| 116211 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB |
| 116212 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya |
| 1164 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR |
| 11641 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan |
| 116411 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan |
| 11642 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi |
| 116421 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi |
| 1166 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU |
| 11661 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa |
| 116611 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan |
| 116612 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan |
| 116619 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya |

- 11669 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Operasional Lainnya BLU
- 116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
- 1167 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
- 11671 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa BLU
- 116711 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU
- 116712 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU
- 116713 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU
- 116714 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
- 116719 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU
- 11672 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset BLU
- 116721 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- 116722 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
- 11679 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Operasional Lainnya BLU
- 116791 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
- 117 PERSEDIAAN
- 1171 Persediaan
- 11711 Persediaan Bahan untuk Operasional
- 117111 Barang Konsumsi
- 117112 Amunisi
- 117113 Bahan untuk Pemeliharaan
- 117114 Suku Cadang
- 11712 Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
- 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges
- 117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
- 117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

- 117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
- 117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
- 117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
- 117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
- 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
- 11713 Persediaan Bahan untuk Proses Produksi
- 117131 Bahan Baku
- 117132 Barang dalam Proses
- 11719 Persediaan Bahan Lainnya
- 117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
- 117192 Persediaan Barang Hasil Sitaan
- 117199 Persediaan Lainnya
- 1172 Persediaan Badan Layanan Umum
- 11721 Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa
- 117211 Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
- 117212 Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
- 117219 Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
- 1179 Persediaan yang Belum Diregister
- 11791 Persediaan yang Belum Diregister
- 117911 Persediaan yang Belum Diregister
- 12 INVESTASI JANGKA PANJANG
- 121 INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN
- 1216 Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum
- 12161 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa - Non Permanen
- 121611 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen
- 121613 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen
- 121619 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen
- 122 INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN
- 1222 Investasi Permanen Badan Layanan Umum
- 12221 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa - Permanen
- 122211 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen
- 122212 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen
- 122219 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Permanen

| | |
|--------|--|
| 13 | ASET TETAP |
| 131 | TANAH |
| 1311 | Tanah |
| 13111 | Tanah |
| 131111 | Tanah |
| 131112 | Tanah dari Hibah |
| 1312 | Tanah Belum Diregister |
| 13121 | Tanah Belum Diregister |
| 131211 | Tanah Belum Diregister |
| 1313 | Tanah Badan Layanan Umum |
| 13131 | Tanah - BLU |
| 131311 | Tanah - BLU |
| 1314 | Tanah Belum Diregister – BLU |
| 13141 | Tanah Belum Diregister – BLU |
| 131411 | Tanah Belum Diregister – BLU |
| 132 | PERALATAN DAN MESIN |
| 1321 | Peralatan dan Mesin |
| 13211 | Peralatan dan Mesin |
| 132111 | Peralatan dan Mesin |
| 132112 | Peralatan dan Mesin dari Hibah |
| 1322 | Peralatan dan Mesin Belum Diregister |
| 13221 | Peralatan dan Mesin Belum Diregister |
| 132211 | Peralatan dan Mesin Belum Diregister |
| 1323 | Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum |
| 13231 | Peralatan dan Mesin - BLU |
| 132311 | Peralatan dan Mesin - BLU |
| 1324 | Peralatan dan Mesin Belum Diregister – BLU |
| 13241 | Peralatan dan Mesin Belum Diregister – BLU |
| 132411 | Peralatan dan Mesin Belum Diregister – BLU |
| 133 | GEDUNG DAN BANGUNAN |
| 1331 | Gedung dan Bangunan |
| 13311 | Gedung dan Bangunan |
| 133111 | Gedung dan Bangunan |
| 133112 | Gedung dan Bangunan dari Hibah |
| 1332 | Gedung dan Bangunan Belum Diregister |
| 13321 | Gedung dan Bangunan Belum Diregister |
| 133211 | Gedung dan Bangunan Belum Diregister |

| | |
|--------|--|
| 1333 | Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum |
| 13331 | Gedung dan Bangunan - BLU |
| 133311 | Gedung dan Bangunan - BLU |
| 1334 | Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU |
| 13341 | Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU |
| 133411 | Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU |
| 134 | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN |
| 1341 | Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| 13411 | Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| 134111 | Jalan dan Jembatan |
| 134112 | Irigasi |
| 134113 | Jaringan |
| 1342 | Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister |
| 13421 | Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister |
| 134211 | Jalan dan Jembatan Belum Diregister |
| 134212 | Irigasi Belum Diregister |
| 134213 | Jaringan Belum Diregister |
| 1343 | Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum |
| 13431 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU |
| 134311 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU |
| 1344 | Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU |
| 13441 | Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU |
| 134411 | Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU |
| 135 | ASET TETAP LAINNYA |
| 1351 | Aset Tetap Lainnya |
| 13511 | Aset Tetap Renovasi |
| 135111 | Aset Tetap Renovasi |
| 13512 | Aset Tetap Lainnya |
| 135121 | Aset Tetap Lainnya |
| 135122 | Aset Tetap Lainnya dari Hibah |
| 1352 | Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum |
| 13521 | Aset Tetap Lainnya - BLU |
| 135211 | Aset Tetap Lainnya - BLU |
| 13522 | Aset Tetap Renovasi – BLU |
| 135221 | Aset Tetap Renovasi – BLU |
| 136 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan |
| 1361 | Konstruksi Dalam Pengerjaan |

| | |
|--------|--|
| 13611 | Konstruksi Dalam Pengerjaan |
| 136111 | Konstruksi Dalam pengerjaan |
| 1362 | Konstruksi Dalam Pengerjaan – BLU |
| 13621 | Konstruksi Dalam Pengerjaan– BLU |
| 136211 | Konstruksi Dalam Pengerjaan – BLU |
| 137 | AKUMULASI PENYUSUTAN |
| 1371 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin |
| 13711 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin |
| 137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin |
| 13712 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU |
| 137121 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU |
| 1372 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan |
| 13721 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan |
| 137211 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan |
| 13722 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU |
| 137221 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU |
| 1373 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| 13731 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi |
| 137311 | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan |
| 137312 | Akumulasi Penyusutan Irigasi |
| 137313 | Akumulasi Penyusutan Jaringan |
| 13732 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan – BLU |
| 137321 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan – BLU |
| 1374 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya |
| 13741 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya |
| 137411 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya |
| 13742 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU |
| 137421 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU |
| 139 | ASET TETAP YANG BELUM DIREGISTER |
| 1391 | Aset Tetap yang Belum Diregister |
| 13911 | Aset Tetap yang Belum Diregister |
| 139111 | Aset Tetap yang Belum Diregister |
| 15 | PIUTANG JANGKA PANJANG |
| 152 | PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI |
| 1521 | Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi |

| | |
|--------|---|
| 15211 | Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi |
| 152111 | Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi |
| 1522 | Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU |
| 15221 | Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum |
| 152211 | Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum |
| 156 | PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH JANGKA PANJANG |
| 1563 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi |
| 15631 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi |
| 156311 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi |
| 1564 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU |
| 15641 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU |
| 156411 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU |
| 16 | ASET LAINNYA |
| 162 | ASET TIDAK BERWUJUD |
| 1621 | Aset Tak Berwujud |
| 16211 | <i>Goodwill</i> |
| 162111 | <i>Goodwill</i> |
| 16212 | Hak Cipta |
| 162121 | Hak Cipta |
| 16213 | Royalti |
| 162131 | Royalti |
| 16214 | Paten |
| 162141 | Paten |
| 16215 | <i>Software</i> |
| 162151 | <i>Software</i> |
| 16216 | Lisensi |

| | |
|--------|---|
| 162161 | Lisensi |
| 16217 | Hasil Kajian/Penelitian |
| 162171 | Hasil Kajian/Penelitian |
| 16219 | Aset Tak Berwujud Lainnya |
| 162191 | Aset Tak Berwujud Lainnya |
| 1622 | Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum |
| 16221 | <i>Software</i> -Badan Layanan Umum |
| 162211 | <i>Software</i> -Badan Layanan Umum |
| 16222 | Hak Cipta BLU |
| 162221 | Hak Cipta BLU |
| 16223 | Royalti BLU |
| 162231 | Royalti BLU |
| 16224 | Paten BLU |
| 162241 | Paten BLU |
| 16229 | Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum |
| 162291 | Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum |
| 1623 | Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan |
| 16231 | Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan |
| 162311 | Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan |
| 1624 | Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU |
| 16241 | Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU |
| 162411 | Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU |
| 163 | DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA |
| 1631 | Dana Yang Dibatasi Penggunaannya |
| 16311 | Dana Yang Dibatasi Penggunaannya |
| 163119 | Dana Lainnya |
| 166 | ASET LAIN-LAIN |
| 1661 | Aset Lain-lain |
| 16611 | Aset Lain-lain K/L |
| 166111 | Aset Lain-lain |
| 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan |
| 1662 | Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum |
| 16621 | Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum |
| 166211 | Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum |
| 166212 | Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan- Badan Layanan Umum |
| 166213 | Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya |

| | |
|--------|--|
| 1664 | Aset Lainnya yang Belum Diregister |
| 16641 | Aset Lainnya yang Belum Diregister |
| 166411 | Aset Lainnya yang Belum Diregister |
| 169 | AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA |
| 1691 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya |
| 16911 | Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga |
| 169111 | Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga |
| 16912 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain K/L |
| 169121 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain |
| 169122 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan |
| 1692 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BLU |
| 16921 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum |
| 169211 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum |
| 169212 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Badan Layanan Umum |
| 2 | KEWAJIBAN |
| 21 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK |
| 212 | UTANG KEPADA PIHAK KETIGA |
| 2121 | Utang kepada Pihak Ketiga |
| 21211 | Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar |
| 212111 | Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar |
| 212112 | Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar |
| 212113 | Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar |
| 212114 | Belanja Hibah yang Masih Harus Dibayar |
| 212115 | Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar |
| 212116 | Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Yang Masih Harus Dibayar |
| 212119 | Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar |
| 21212 | Utang kepada Pihak Ketiga BLU |
| 212121 | Utang kepada Pihak Ketiga BLU |
| 21219 | Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya |
| 212191 | Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya |
| 212192 | Dana Pihak Ketiga |
| 212193 | Dana Pihak Ketiga BLU |
| 219 | UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA |
| 2192 | Pendapatan Diterima di Muka |

| | |
|--------|---|
| 21921 | Pendapatan Diterima di Muka |
| 219211 | Pendapatan Sewa Diterima di Muka |
| 219212 | Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka |
| 2195 | Uang Muka dari KPPN |
| 21951 | Uang Muka dari KPPN |
| 219511 | Uang Muka dari KPPN |
| 2196 | Pendapatan Yang Ditangguhkan |
| 21961 | Pendapatan yang Ditangguhkan |
| 219611 | Pendapatan yang Ditangguhkan |
| 2199 | Utang Jangka Pendek Lainnya |
| 21991 | Utang Jangka Pendek lainnya |
| 219911 | Utang Jangka Pendek Perbankan |
| 219913 | Utang Jangka Pendek Lain-lain |
| 21996 | Utang Bendahara |
| 219961 | Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor |
| 219962 | Utang Perwalian Bendahara yang Belum Disampaikan Kepada yang Berhak |
| 219963 | Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor |
| 219964 | Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor |
| 3 | EKUITAS |
| 31 | EKUITAS |
| 313 | TRANSAKSI ANTAR ENTITAS |
| 3131 | Due to - Due from |
| 31311 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| 31312 | Diterima dari Entitas Lain |
| 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| 39 | EKUITAS |
| 391 | EKUITAS |
| 3911 | Ekuitas |
| 39111 | Ekuitas |
| 391111 | Ekuitas |
| 391112 | Surplus/Defisit-LO |
| 391113 | Koreksi Nilai Persediaan |
| 391114 | Revaluasi Aset Tetap |
| 391115 | Dana yang Disediakan Untuk Pengalihan Aset |
| 391116 | Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi |

| | |
|--------|---|
| 391117 | Pengesahan Hibah Langsung |
| 391119 | Koreksi Lainnya |
| 39112 | Ekuitas Transaksi Lainnya |
| 391121 | Ekuitas Transaksi Lainnya |
| B. | BAGAN AKUN STANDAR “LAPORAN REALISASI ANGGARAN” |
| 4 | PENDAPATAN |
| 42 | PENDAPATAN PNBP |
| 423 | PENDAPATAN PNBP LAINNYA |
| 4231 | Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan |
| 423115 | Estimasi Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya |
| 423115 | Estimasi Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya |
| 423115 | Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya |
| 423115 | Pengembalian Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya |
| 423117 | Estimasi Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan |
| 423117 | Estimasi Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan |
| 423117 | Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan |
| 423117 | Pengembalian Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan |
| 423119 | Estimasi Pendapatan Penjualan Lainnya |
| 423119 | Estimasi Pendapatan Penjualan Lainnya Yang Dialokasikan |
| 423119 | Pendapatan Penjualan Lainnya |
| 423119 | Pengembalian Pendapatan Penjualan Lainnya |
| 423121 | Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN |
| 423121 | Estimasi Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan |
| 423121 | Estimasi Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan |
| 423121 | Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan |
| 423121 | Pengembalian Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan |
| 423122 | Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin |

- 423122 Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Yang Dialokasikan
- 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
- 423122 Pengembalian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
- 423123 Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli
- 423123 Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli Yang Dialokasikan
- 423123 Pendapatan Penjualan Sewa Beli
- 423123 Pengembalian Pendapatan Penjualan Sewa Beli
- 423125 Estimasi Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
- 423125 Estimasi Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
- 423125 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
- 423125 Pengembalian Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
- 423126 Estimasi Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
- 423126 Estimasi Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin Yang Dialokasikan
- 423126 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
- 423126 Pengembalian Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
- 423127 Estimasi Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 423127 Estimasi Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Dialokasikan
- 423127 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 423127 Pengembalian Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 423129 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
- 423129 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Yang Dialokasikan
- 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
- 423129 Pengembalian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
- 42314 Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
- 423141 Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

- 423141 Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan
- 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
- 423141 Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
- 423142 Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
- 423142 Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Yang Dialokasikan
- 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
- 423142 Pengembalian Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
- 423143 Estimasi Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 423143 Estimasi Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Dialokasikan
- 423143 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 423143 Pengembalian Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 423144 Estimasi Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
- 423144 Estimasi Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan
- 423144 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
- 423144 Pengembalian Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
- 423145 Estimasi Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
- 423145 Estimasi Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin Yang Dialokasikan
- 423145 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
- 423145 Pengembalian Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
- 423146 Estimasi Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 423146 Estimasi Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Dialokasikan
- 423146 Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 423146 Pengembalian Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 423147 Estimasi Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)

- 423147 Estimasi Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS) Yang Dialokasikan
- 423147 Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)
- 423147 Pengembalian Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)
- 423148 Estimasi Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)

- 423148 Estimasi Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG) Yang Dialokasikan
- 423148 Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)
- 423148 Pengembalian Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)
- 423149 Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
- 423149 Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya Yang Dialokasikan
- 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
- 423149 Pengembalian Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
- 4232 Estimasi Pendapatan Jasa
- 42321 Estimasi Pendapatan Jasa I
- 423211 Estimasi Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
- 423211 Estimasi Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Yang Dialokasikan
- 423211 Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
- 423211 Pengembalian Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
- 423215 Estimasi Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
- 423215 Estimasi Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Yang Dialokasikan
- 423215 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
- 423215 Pengembalian Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
- 423216 Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan Teknologi...
- 423216 Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan Teknologi...
- 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan Teknologi...
- 423216 Pengembalian Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan....
- 42322 Estimasi Pendapatan Jasa II
- 423227 Estimasi Pendapatan Bea Lelang
- 423227 Estimasi Pendapatan Bea Lelang Yang Dialokasikan
- 423227 Pendapatan Bea Lelang

| | |
|--------|--|
| 423227 | Pengembalian Pendapatan Bea Lelang |
| 423229 | Estimasi Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi |
| 423229 | Estimasi Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Yang Dialokasikan |
| 423229 | Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi |
| 423229 | Pengembalian Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi |
| 42329 | Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya |
| 423291 | Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya |
| 423291 | Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya Yang Dialokasikan |
| 423291 | Pendapatan Jasa Lainnya |
| 423291 | Pengembalian Pendapatan Jasa Lainnya |
| 4235 | Estimasi Pendapatan Pendidikan |
| 42351 | Estimasi Pendapatan Pendidikan |
| 423511 | Estimasi Pendapatan Uang Pendidikan |
| 423511 | Estimasi Pendapatan Uang Pendidikan Yang Dialokasikan |
| 423511 | Pendapatan Uang Pendidikan |
| 423511 | Pengembalian Pendapatan Uang Pendidikan |
| 423512 | Estimasi Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan |
| 423512 | Estimasi Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan... |
| 423512 | Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan |
| 423512 | Pengembalian Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan |
| 423513 | Estimasi Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek |
| 423513 | Estimasi Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek Yang Dialokasikan |
| 423513 | Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek |
| 423513 | Pengembalian Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek |
| 423519 | Estimasi Pendapatan Pendidikan Lainnya |
| 423519 | Estimasi Pendapatan Pendidikan Lainnya Yang Dialokasikan |
| 423519 | Pendapatan Pendidikan Lainnya |
| 423519 | Pengembalian Pendapatan Pendidikan Lainnya |
| 4237 | Estimasi Pendapatan Iuran dan Denda |
| 42375 | Estimasi Pendapatan Denda |

- 423752 Estimasi Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
- 423752 Estimasi Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah....
- 423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
- 423752 Pengembalian Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
- 4239 Estimasi Pendapatan Lain-lain
- 42391 Estimasi Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu
- 423911 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
- 423911 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Yang Dialokasikan
- 423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
- 423911 Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
- 423912 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
- 423912 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL Yang Dialokasikan
- 423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
- 423912 Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
- 423913 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
- 423913 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL Yang Dialokasikan
- 423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
- 423913 Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
- 423914 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL
- 423914 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL Yang Dialokasikan
- 423914 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL
- 423914 Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL
- 423915 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL
- 423915 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL Yang Dialokasikan
- 423915 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL
- 423915 Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL

- 423917 Estimasi Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah TAYL
- 423917 Estimasi Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah TAYL Yang Dialokasikan
- 423917 Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah TAYL
- 423917 Pengembalian Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah TAYL
- 42392 Estimasi Pendapatan Pelunasan Piutang
- 423921 Estimasi Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
- 423921 Estimasi Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara Yang Dialokasikan
- 423921 Pengembalian Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
- 423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
- 423922 Estimasi Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
- 423922 Estimasi Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
- 423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
- 423922 Pengembalian Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
- 423991 Estimasi Pendapatan Lain-lain
- 423991 Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
- 423991 Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Yang Dialokasikan
- 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
- 423991 Pengembalian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
- 423992 Estimasi Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
- 423992 Estimasi Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional Yang Dialokasikan
- 423992 Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
- 423992 Pengembalian Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
- 424 ESTIMASI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
- 4241 Estimasi Pendapatan Jasa Layanan Umum
- 42411 Estimasi Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
- 424111 Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
- 424111 Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Yang Dialokasikan

- 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
- 424111 Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
- 424112 Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
- 424112 Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Yang Dialokasikan
- 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
- 424112 Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
- 424118 Estimasi Pendapatan Penyediaan Barang
- 424118 Estimasi Pendapatan Penyediaan Barang Yang Dialokasikan
- 424118 Pendapatan Penyediaan Barang
- 424118 Pengembalian Pendapatan Penyediaan Barang
- 424119 Estimasi Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
- 424119 Estimasi Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Yang Dialokasikan
- 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
- 424119 Pengembalian Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
- 4242 Estimasi Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
- 42421 Estimasi Pendapatan Hibah Terikat
- 424211 Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan
- 424211 Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan Yang Dialokasikan
- 424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan
- 424211 Pengembalian Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan
- 424212 Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/ Badan Usaha
- 424212 Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha yang Dialokasikan
- 424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
- 424212 Pengembalian Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/ Badan Usaha
- 4243 Estimasi Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum
- 42431 Estimasi Pendapatan Hasil Kerjasama BLU
- 424311 Estimasi Pendapatan Hasil Kerjasama - Perorangan
- 424311 Estimasi Pendapatan Hasil Kerjasama - Perorangan Yang Dialokasikan

| | |
|--------|---|
| 424311 | Pendapatan Hasil Kerjasama - Perorangan |
| 424311 | Pengembalian Pendapatan Hasil Kerjasama – Perorangan |
| 424312 | Estimasi Pendapatan Hasil Kerjasama – Lembaga/Badan Usaha |
| 424312 | Estimasi Pendapatan Hasil Kerjasama – Lembaga/Badan Usaha Yang Dialokasikan |
| 424312 | Pendapatan Hasil Kerjasama - Lembaga/Badan Usaha |
| 424312 | Pengembalian Pendapatan Hasil Kerjasama – Lembaga/Badan Usaha |
| 42432 | Estimasi Pendapatan Hasil Sewa Menyewa BLU |
| 424321 | Estimasi Pendapatan Hasil Sewa Menyewa BLU |
| 424321 | Estimasi Pendapatan Hasil Sewa Menyewa BLU Yang Dialokasikan |
| 424321 | Pendapatan Hasil Sewa Menyewa BLU |
| 424321 | Pengembalian Pendapatan Hasil Sewa Menyewa BLU |
| 5 | APPROPRIASI BELANJA NEGARA |
| 51 | APPROPRIASI BELANJA PEGAWAI |
| 511 | APPROPRIASI BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN |
| 5111 | Appropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS |
| 51111 | Appropriasi Belanja Gaji PNS |
| 511111 | Appropriasi Belanja Gaji Pokok PNS |
| 511111 | Allotment Belanja Gaji Pokok PNS |
| 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS |
| 511111 | Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS |
| 511119 | Appropriasi Belanja Pembulatan Gaji PNS |
| 511119 | Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS |
| 511119 | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS |
| 51112 | Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS |
| 511121 | Appropriasi Belanja Tunj. Suami/Istri PNS |
| 511121 | Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS |
| 511121 | Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS |
| 511122 | Appropriasi Belanja Tunj. Anak PNS |
| 511122 | Allotment Belanja Tunj. Anak PNS |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS |
| 511122 | Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS |
| 511123 | Appropriasi Belanja Tunj. Struktural PNS |

| | |
|--------|--|
| 511123 | Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS |
| 511123 | Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS |
| 511124 | Appropriasi Belanja Tunj. Fungsional PNS |
| 511124 | Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS |
| 511124 | Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS |
| 511125 | Appropriasi Belanja Tunj. PPh PNS |
| 511125 | Allotment Belanja Tunj. PPh PNS |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS |
| 511125 | Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS |
| 511126 | Appropriasi Belanja Tunj. Beras PNS |
| 511126 | Allotment Belanja Tunj. Beras PNS |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS |
| 511126 | Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS |
| 511127 | Appropriasi Belanja Tunj. Kemahalan PNS |
| 511127 | Allotment Belanja Tunj. Kemahalan PNS |
| 511127 | Belanja Tunj. Kemahalan PNS |
| 511127 | Pengembalian Belanja Tunj. Kemahalan PNS |
| 511128 | Appropriasi Belanja Tunj. Lauk pauk PNS |
| 511128 | Allotment Belanja Tunj. Lauk pauk PNS |
| 511128 | Belanja Tunj. Lauk pauk PNS |
| 511128 | Pengembalian Belanja Tunj. Lauk pauk PNS |
| 511129 | Appropriasi Belanja Uang Makan PNS |
| 511129 | Allotment Belanja Uang Makan PNS |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS |
| 511129 | Pengembalian Belanja Uang |
| 51113 | Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS |
| 511131 | Appropriasi Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS |
| 511131 | Allotment Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS |
| 511131 | Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS |
| 511131 | Pengembalian Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS |
| 511132 | Appropriasi Belanja Tunj. Cacat PNS |
| 511132 | Allotment Belanja Tunj. Cacat PNS |
| 511132 | Belanja Tunj. Cacat PNS |
| 511132 | Pengembalian Belanja Tunj. Cacat PNS |
| 511133 | Appropriasi Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS |

- 511133 Allotment Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
- 511133 Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
- 511133 Pengembalian Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
- 511134 Appropriasi Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
- 511134 Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
- 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
- 511134 Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
- 511135 Appropriasi Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
- 511135 Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
- 511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
- 511135 Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
- 511137 Appropriasi Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk....
- 511137 Allotment Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti....
- 511137 Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan...
- 511137 Pengembalian Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk.....
- 511138 Appropriasi Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
- 511138 Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
- 511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
- 511138 Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
- 51114 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di LN
- 511141 Appropriasi Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
- 511141 Allotment Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
- 511141 Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
- 511141 Pengembalian Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
- 511142 Appropriasi Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
- 511142 Allotment Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
- 511142 Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
- 511142 Pengembalian Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
- 511143 Appropriasi Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)

- 511143 Allotment Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
- 511143 Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
- 511143 Pengembalian Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
- 511144 Appropriasi Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
- 511144 Allotment Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
- 511144 Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
- 511144 Pengembalian Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
- 511145 Appropriasi Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staf di LN)
- 511145 Allotment Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Staff PNS (Staf di LN)
- 511145 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staf di LN)
- 511145 Pengembalian Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Staff PNS (Staf di LN)
- 511146 Appropriasi Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
- 511146 Allotment Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
- 511146 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
- 511146 Pengembalian Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
- 11147 Appropriasi Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan LN.
- 511147 Allotment Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan LN
- 511147 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan LN.
- 511147 Pengembalian Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan LN
- 511149 Appropriasi Belanja Lokal Staff Lainnya
- 511149 Allotment Belanja Lokal Staff Lainnya
- 511149 Belanja Lokal Staff Lainnya
- 511149 Pengembalian Belanja Lokal Staff Lainnya
- 51115 Appropriasi Belanja Tunjangan Tunjangan IV PNS

| | |
|--------|---|
| 511151 | Appropriasi Belanja Tunjangan Umum PNS |
| 511151 | Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS |
| 511151 | Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS |
| 511152 | Appropriasi Belanja Tunjangan Profesi Guru |
| 511152 | Allotment Belanja Tunjangan Profesi Guru |
| 511152 | Belanja Tunjangan Profesi Guru |
| 511152 | Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Guru |
| 511153 | Appropriasi Belanja Tunjangan Profesi Dosen |
| 511153 | Allotment Belanja Tunjangan Profesi Dosen |
| 511153 | Belanja Tunjangan Profesi Dosen |
| 511153 | Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Dosen |
| 5114 | Appropriasi Belanja Gaji Dokter PTT |
| 51141 | Appropriasi Belanja Gaji Dokter PTT |
| 511411 | Appropriasi Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT |
| 511411 | Allotment Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT |
| 511411 | Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT |
| 511411 | Pengembalian Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT |
| 511412 | Appropriasi Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT |
| 511412 | Allotment Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT |
| 511412 | Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT |
| 511412 | Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT |
| 511413 | Appropriasi Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT |
| 511413 | Allotment Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT |
| 511413 | Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT |
| 511413 | Pengembalian Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan... |
| 511414 | Appropriasi Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT |
| 511414 | Allotment Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT |
| 511414 | Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT |
| 511414 | Pengembalian Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT |
| 5115 | Appropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS |
| 51151 | Appropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS |
| 511511 | Appropriasi Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS |
| 511511 | Allotment Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS |

| | |
|--------|---|
| 511511 | Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS |
| 511511 | Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS |
| 511513 | Appropriasi Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS |
| 511513 | Allotment Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS |
| 511513 | Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS |
| 511513 | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS |
| 512 | APPROPRIASI BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/ VAKASI/TUNJ. KHUSUS DAN BELANJA PEGAWAI |
| 5121 | Appropriasi Belanja Honorarium |
| 51211 | Appropriasi Belanja Honorarium |
| 512111 | Appropriasi Belanja Uang Honor Tetap |
| 512111 | Allotment Belanja Uang Honor Tetap |
| 512111 | Belanja Uang Honor Tetap |
| 512111 | Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap |
| 5122 | Appropriasi Belanja Lembur |
| 51221 | Appropriasi Belanja Lembur |
| 512211 | Appropriasi Belanja Uang Lembur |
| 512211 | Allotment Belanja Uang Lembur |
| 512211 | Belanja Uang Lembur |
| 512211 | Pengembalian Belanja Uang Lembur |
| 5123 | Appropriasi Belanja Vakasi |
| 51231 | Appropriasi Belanja Vakasi |
| 512311 | Appropriasi Belanja Vakasi |
| 512311 | Allotment Belanja Vakasi |
| 512311 | Belanja Vakasi |
| 512311 | Pengembalian Belanja Vakasi |
| 52 | APPROPRIASI BELANJA BARANG |
| 521 | APPROPRIASI BELANJA BARANG |
| 5211 | Appropriasi Belanja Barang Operasional |
| 52111 | Appropriasi Belanja Barang Operasional |
| 521111 | Appropriasi Belanja Keperluan Perkantoran |
| 521111 | Allotment Belanja Keperluan Perkantoran |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran |
| 521111 | Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran |
| 521112 | Appropriasi Belanja Pengadaan Bahan Makanan |
| 521112 | Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan |
| 521112 | Belanja Pengadaan Bahan Makanan |

| | |
|--------|---|
| 521112 | Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan |
| 521113 | Appropriasi Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh |
| 521113 | Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh |
| 521113 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh |
| 521113 | Pengembalian Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh |
| 521114 | Appropriasi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat |
| 521114 | Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat |
| 521114 | Pengembalian Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat |
| 521115 | Appropriasi Belanja Honor Operasional Satuan Kerja |
| 521115 | Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja |
| 521115 | Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja |
| 521119 | Appropriasi Belanja Barang Operasional Lainnya |
| 521119 | Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya |
| 521119 | Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya |
| 5212 | Appropriasi Belanja Barang Non Operasional |
| 52121 | Appropriasi Belanja Barang Non Operasional |
| 521211 | Appropriasi Belanja Bahan |
| 521211 | Allotment Belanja Bahan |
| 521211 | Belanja Bahan |
| 521211 | Pengembalian Belanja Bahan |
| 521213 | Appropriasi Belanja Honor Output Kegiatan |
| 521213 | Allotment Belanja Honor Output Kegiatan |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan |
| 521213 | Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan |
| 521219 | Appropriasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya |
| 521219 | Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya |
| 521219 | Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya |
| 522 | APPROPRIASI BELANJA JASA |
| 5221 | Appropriasi Belanja Jasa |
| 52211 | Appropriasi Belanja Langganan Daya dan Jasa |
| 522111 | Appropriasi Belanja Langganan Listrik |
| 522111 | Allotment Belanja Langganan Listrik |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik |

- 522111 Pengembalian Belanja Langganan Listrik
- 522112 Appropriasi Belanja Langganan Telepon
- 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon
- 522112 Belanja Langganan Telepon
- 522112 Pengembalian Belanja Langganan Telepon
- 522113 Appropriasi Belanja Langganan Air
- 522113 Allotment Belanja Langganan Air
- 522113 Belanja Langganan Air
- 522113 Pengembalian Belanja Langganan Air
- 522119 Appropriasi Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
- 522119 Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
- 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
- 522119 Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
- 52212 Appropriasi Belanja Jasa Pos dan Giro
- 522121 Appropriasi Belanja Jasa Pos dan Giro
- 522121 Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro
- 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro
- 522121 Pengembalian Belanja Jasa Pos dan Giro
- 52213 Appropriasi Belanja Jasa Konsultan
- 522131 Appropriasi Belanja Jasa Konsultan
- 522131 Allotment Belanja Jasa Konsultan
- 522131 Belanja Jasa Konsultan
- 522131 Pengembalian Belanja Jasa Konsultan
- 52214 Appropriasi Belanja Sewa
- 522141 Appropriasi Belanja Sewa
- 522141 Allotment Belanja Sewa
- 522141 Belanja Sewa
- 522141 Pengembalian Belanja Sewa
- 52215 Appropriasi Belanja Jasa Profesi
- 522151 Appropriasi Belanja Jasa Profesi
- 522151 Allotment Belanja Jasa Profesi
- 522151 Belanja Jasa Profesi
- 522151 Pengembalian Belanja Jasa Profesi
- 52219 Appropriasi Belanja Jasa Lainnya
- 522191 Appropriasi Belanja Jasa Lainnya
- 522191 Allotment Belanja Jasa Lainnya
- 522191 Belanja Jasa Lainnya

| | |
|--------|---|
| 522191 | Pengembalian Belanja Jasa Lainnya |
| 523 | APPROPRIASI BELANJA PEMELIHARAAN |
| 5231 | Appropriasi Belanja Pemeliharaan |
| 52311 | Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
| 523111 | Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
| 523111 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
| 523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
| 523111 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
| 523119 | Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya |
| 523119 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya |
| 523119 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya |
| 523119 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya |
| 52312 | Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
| 523121 | Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
| 523121 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
| 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
| 523121 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
| 523129 | Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 523129 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 523129 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 523129 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 52313 | Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| 523131 | Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| 523131 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| 523131 | Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| 523131 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| 523133 | Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan |
| 523133 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan |
| 523133 | Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan |

| | |
|--------|---|
| 523133 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan |
| 52319 | Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya |
| 523199 | Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya |
| 523199 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya |
| 523199 | Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya |
| 523199 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya |
| 52 | APPROPRIASI BELANJA BARANG |
| 524 | APPROPRIASI BELANJA PERJALANAN |
| 5241 | Appropriasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri |
| 52411 | Appropriasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri |
| 524111 | Appropriasi Belanja Perjalanan Biasa |
| 524111 | Allotment Belanja Perjalanan Biasa |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa |
| 524111 | Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa |
| 524112 | Appropriasi Belanja Perjalanan Tetap |
| 524112 | Allotment Belanja Perjalanan Tetap |
| 524112 | Belanja Perjalanan Tetap |
| 524112 | Pengembalian Belanja Perjalanan Tetap |
| 524119 | Appropriasi Belanja Perjalanan Lainnya |
| 524119 | Allotment Belanja Perjalanan Lainnya |
| 524119 | Belanja Perjalanan Lainnya |
| 524119 | Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya |
| 5242 | Appropriasi Belanja Perjalanan Luar Negeri |
| 52421 | Appropriasi Belanja Perjalanan Luar Negeri |
| 524211 | Appropriasi Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri |
| 524211 | Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri |
| 524211 | Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri |
| 524211 | Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri |
| 524212 | Appropriasi Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri |
| 524212 | Allotment Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri |
| 524212 | Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri |
| 524212 | Pengembalian Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri |
| 524219 | Appropriasi Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri |
| 524219 | Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri |
| 524219 | Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri |
| 524219 | Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri |
| 525 | APPROPRIASI BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) |

| | |
|--------|---|
| 5251 | Appropriasi Belanja Barang BLU |
| 52511 | Appropriasi Belanja Barang dan Jasa BLU |
| 525111 | Appropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan |
| 525111 | Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan |
| 525111 | Belanja Gaji dan Tunjangan |
| 525111 | Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan |
| 525112 | Appropriasi Belanja Barang |
| 525112 | Allotment Belanja Barang |
| 525112 | Belanja Barang |
| 525112 | Pengembalian Belanja Barang |
| 525113 | Appropriasi Belanja Jasa |
| 525113 | Allotment Belanja Jasa |
| 525113 | Belanja Jasa |
| 525113 | Pengembalian Belanja Jasa |
| 525114 | Appropriasi Belanja Pemeliharaan |
| 525114 | Allotment Belanja Pemeliharaan |
| 525114 | Belanja Pemeliharaan |
| 525114 | Pengembalian Belanja Pemeliharaan |
| 525115 | Appropriasi Belanja Perjalanan |
| 525115 | Allotment Belanja Perjalanan |
| 525115 | Belanja Perjalanan |
| 525115 | Pengembalian Belanja Perjalanan |
| 525119 | Appropriasi Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya |
| 525119 | Allotment Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya |
| 525119 | Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya |
| 525119 | Pengembalian Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya |
| 526 | APPROPRIASI BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA |
| 5261 | Appropriasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda |
| 52611 | Appropriasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda |
| 526111 | Appropriasi Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda |
| 526111 | Allotment Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda |

- 526111 Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526111 Pengembalian Belanja Tanah Untuk serahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526112 Appropriasi Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 526112 Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Kepada Masyarakat/Pemda
- 526112 Pengembalian Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526113 Appropriasi Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526113 Allotment Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526113 Pengembalian Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526114 Appropriasi Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526114 Allotment Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.
- 526114 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526114 Pengembalian Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada....
- 526115 Appropriasi Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 526115 Allotment Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526115 Pengembalian Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 5262 Appropriasi Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah

| | |
|--------|--|
| 52621 | Appropriasi Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemda |
| 526211 | Appropriasi Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan..... |
| 526211 | Allotment Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada... |
| 526211 | Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemda |
| 526211 | Pengembalian Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan..... |
| 526212 | Appropriasi Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan..... |
| 526212 | Allotment Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada..... |
| 526212 | Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemda |
| 526212 | Pengembalian Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan..... |
| 5263 | Appropriasi Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda |
| 52631 | Appropriasi Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda |
| 526311 | Appropriasi Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda |
| 526311 | Allotment Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda |
| 526311 | Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda |
| 526311 | Pengembalian Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda |
| 53 | APPROPRIASI BELANJA MODAL |
| 531 | APPROPRIASI BELANJA MODAL TANAH |
| 5311 | Appropriasi Belanja Modal Tanah |
| 53111 | Appropriasi Belanja Modal Tanah |
| 531111 | Appropriasi Belanja Modal Tanah |
| 531111 | Allotment Belanja Modal Tanah |
| 531111 | Belanja Modal Tanah |

- 531111 Pengembalian Belanja Modal Tanah
- 531112 Appropriasi Belanja Modal Pembebasan Tanah
- 531112 Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah
- 531112 Belanja Modal Pembebasan Tanah
- 531112 Pengembalian Belanja Modal Pembebasan Tanah
- 531113 Appropriasi Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
- 531113 Allotment Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
- 531113 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
- 531113 Pengembalian Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
- 531115 Appropriasi Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
- 531115 Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
- 531115 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
- 531115 Pengembalian Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
- 531117 Appropriasi Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
- 531117 Allotment Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
- 531117 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
- 531117 Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
- 5321 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 53211 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 532111 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 532111 Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 532113 Appropriasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola....
- 532113 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola....
- 532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis
.....
- 532113 Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola....
- 532118 Appropriasi Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
- 532118 Allotment Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
- 532118 Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
- 532118 Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
- 53212 Appropriasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

| | |
|--------|--|
| 532121 | Appropriasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin |
| 532121 | Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin |
| 532121 | Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin |
| 532121 | Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin |
| 533 | APPROPRIASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN |
| 5331 | Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| 53311 | Apropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| 533111 | Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| 533111 | Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| 533111 | Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| 533112 | Appropriasi Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan |
| 533112 | Allotment Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan |
| 533112 | Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan |
| 533112 | Pengembalian Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan |
| 533113 | Appropriasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung |
| 533113 | Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung |
| 533113 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan |
| 533113 | Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung |
| 533114 | Appropriasi Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan |
| 533114 | Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan |
| 533114 | Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan |
| 533114 | Pengembalian Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan |
| 533115 | Appropriasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan |
| 533115 | Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan |
| 533115 | Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan |

- 533115 Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
- 533116 Appropriasi Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
- 533116 Allotment Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
- 533116 Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
- 533116 Pengembalian Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
- 533118 Apropriasi Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
- 533118 Allotment Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
- 533118 Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
- 533118 Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
- 53312 Appropriasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- 533121 Appropriasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- 533121 Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- 533121 Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- 534 APPROPRIASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
- 5341 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 53411 Appropriasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan
- 534111 Appropriasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan
- 534111 Allotment Belanja Modal Jalan dan Jembatan
- 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
- 534111 Pengembalian Belanja Modal Jalan dan Jembatan
- 534112 Appropriasi Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
- 534112 Allotment Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
- 534112 Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
- 534112 Pengembalian Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
- 534113 Appropriasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan
- 534113 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan
- 534113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan
- 534113 Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan
- 534114 Appropriasi Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
- 534114 Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan

| | |
|--------|--|
| 534114 | Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan |
| 534114 | Pengembalian Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan |
| 534115 | Appropriasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan |
| 534115 | Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan |
| 534115 | Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan |
| 534115 | Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan |
| 534116 | Appropriasi Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan |
| 534116 | Allotment Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan |
| 534116 | Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan |
| 534116 | Pengembalian Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan |
| 534117 | Appropriasi Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan lama Irigasi |
| 534117 | Allotment Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan lama Irigasi |
| 534117 | Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi |
| 534117 | Pengembalian Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran lama Irigasi |
| 534118 | Appropriasi Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan |
| 534118 | Allotment Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan |
| 534118 | Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan |
| 534118 | Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan |
| 53412 | Appropriasi Belanja Modal Irigasi |
| 534121 | Appropriasi Belanja Modal Irigasi |
| 534121 | Allotment Belanja Modal Irigasi |
| 534121 | Belanja Modal Irigasi |
| 534121 | Pengembalian Belanja Modal Irigasi |
| 534122 | Appropriasi Belanja Modal Bahan Baku Irigasi |
| 534122 | Allotment Belanja Modal Bahan Baku Irigasi |
| 534122 | Belanja Modal Bahan Baku Irigasi |
| 534122 | Pengembalian Belanja Modal Bahan Baku Irigasi |

- 534123 Appropriasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
- 534123 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
- 534123 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
- 534123 Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
- 534124 Appropriasi Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
- 534124 Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
- 534124 Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
- 534124 Pengembalian Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
- 534125 Appropriasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
- 534125 Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
- 534125 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
- 534125 Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
- 534126 Appropriasi Belanja Modal Perijinan Irigasi
- 534126 Allotment Belanja Modal Perijinan Irigasi
- 534126 Belanja Modal Perijinan Irigasi
- 534126 Pengembalian Belanja Modal Perijinan Irigasi
- 534127 Appropriasi Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
- 534127 Allotment Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
- 534127 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
- 534127 Pengembalian Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Lama Irigasi
- 534128 Appropriasi Belanja Modal Perjalanan Irigasi
- 534128 Allotment Belanja Modal Perjalanan Irigasi
- 534128 Belanja Modal Perjalanan Irigasi
- 534128 Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Irigasi
- 53413 Appropriasi Belanja Modal Jaringan
- 534131 Appropriasi Belanja Modal Jaringan
- 534131 Allotment Belanja Modal Jaringan
- 534131 Belanja Modal Jaringan

- 534131 Pengembalian Belanja Modal Jaringan
- 534132 Appropriasi Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
- 534132 Allotment Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
- 534132 Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
- 534132 Pengembalian Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
- 534133 Appropriasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
- 534133 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
- 534133 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
- 534133 Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
- 534134 Appropriasi Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
- 534134 Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
- 534134 Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
- 534134 Pengembalian Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
- 534135 Appropriasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
- 534135 Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
- 534135 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
- 534135 Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
- 534136 Appropriasi Belanja Modal Perijinan Jaringan
- 534136 Allotment Belanja Modal Perijinan Jaringan
- 534136 Belanja Modal Perijinan Jaringan
- 534136 Pengembalian Belanja Modal Perijinan Jaringan
- 534137 Appropriasi Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
- 534137 Allotment Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
- 534137 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
- 534137 Pengembalian Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Jaringan
- 534138 Appropriasi Belanja Modal Perjalanan Jaringan

- 534138 Allotment Belanja Modal Perjalanan Jaringan
- 534138 Belanja Modal Perjalanan Jaringan
- 534138 Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Jaringan
- 53416 Appropriasi Belanja Penambahan Nilai Jaringan
- 534161 Appropriasi Belanja Penambahan Nilai Jaringan
- 534161 Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan
- 534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan
- 534161 Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Jaringan
- 536 APPROPRIASI BELANJA MODAL LAINNYA
- 5361 Appropriasi Belanja Modal Lainnya
- 53611 Appropriasi Belanja Modal Lainnya
- 536111 Appropriasi Belanja Modal Lainnya
- 536111 Allotment Belanja Modal Lainnya
- 536111 Belanja Modal Lainnya
- 536111 Pengembalian Belanja Modal Lainnya
- 53612 Appropriasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
- 536121 Appropriasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
- 536121 Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
- 536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
- 536121 Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
- 537 APPROPRIASI BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
- 5371 Appropriasi Belanja Modal BLU
- 53711 Appropriasi Belanja Modal BLU
- 537111 Appropriasi Belanja Modal Tanah - BLU
- 537111 Allotment Belanja Modal Tanah - BLU
- 537111 Belanja Modal Tanah - BLU
- 537111 Pengembalian Belanja Modal Tanah - BLU
- 537112 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- 537112 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- 537112 Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- 537113 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU

| | |
|--------|---|
| 537113 | Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU |
| 537113 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU |
| 537113 | Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU |
| 537114 | Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU |
| 537114 | Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU |
| 537114 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU |
| 537114 | Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU |
| 537115 | Appropriasi Belanja Modal Lainnya - BLU |
| 537115 | Allotment Belanja Modal Lainnya - BLU |
| 537115 | Belanja Modal Lainnya - BLU |
| 537115 | Pengembalian Belanja Modal Lainnya - BLU |
| 572 | APPROPRIASI BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL |
| 5721 | Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial |
| 57211 | Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial |
| 572111 | Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang |
| 572111 | Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang |
| 572111 | Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang |
| 572111 | Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang |
| 572112 | Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa |
| 572112 | Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa |
| 572112 | Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa |
| 572112 | Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa |
| 573 | APPROPRIASI BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| 5731 | Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial |
| 57311 | Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial |
| 573111 | Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang |

- 573111 Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang
- 573111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang
- 573111 Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang

FORMULIR III
ILUSTRASI LAPORAN REALISASI

| No. | URAIAN | 30 JUNI 2016 | | | 30 JUNI 2016 | | | % REAL. ANGG. | REALISASI (DIAVAH) ANGGARAN | % REAL. ANGG. |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIAVAH) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIAVAH) ANGGARAN | | | |
| 1 | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | | | | | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | | | | | | | | | |
| A.1.b | Penerimaan Pajak | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | (423) Pendapatan PNPB Lainnya | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| A.2 | HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| B. | BELANJA | | | | | | | | | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | | | | | | | | | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| B.1.3 | Miscellaneous | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | |

| UNIT ORGANISASI JURUSAN PEMERINTAH DAERAH JENIS KEVENDHIAN | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN - SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2016 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | |
| No. | URAIAN | 30 JUNI 2016 | | | 30 JUNI 2016 | | | % REAL- ANGG. | % REAL- ANGG. |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan PNPB Lainnya | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.2 | HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B. | BELANJA | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.3 | Hibah | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 +B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |

| No. | URAIAN | 30 JUNI 2016 | | | 30 JUNI 2016 | | | % REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN |
|-------|--|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | |
| A.1 | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| A.1.b | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | (423) Pendapatan Bukan Pajak | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | (424) Pendapatan PNBP Lainnya | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| A.2 | (425) Pendapatan Badan Layanan Umum | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| B. | BELANJA | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Barang | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Barang | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Modal | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| B.1.3 | HR/abah | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Barang | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |

| | | 30 JUNI 2014 | | | | 30 JUNI 2010 | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| No. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | % REAL- ANGG. | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | % REAL- ANGG. |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan PNPSP Lainnya | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| A.2 | HIBAH | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| B. | BELANJA | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| B.1.3 | Hibah | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2011 DAN 2010
(DALAM RUPIAH)

| No. | URAIAN | 30 JUNI 2011 | | | 30 JUNI 2010 | | | % REAL. ANGG. | REALISASI DIATAS (KURANG) ANGGARAN | % REAL. ANGG. | REALISASI DIATAS (KURANG) ANGGARAN |
|-------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (KURANG) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (KURANG) ANGGARAN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| A.1.a | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan PNBp Lainnya (424) Pendapatan Badan Layanan Umum | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| A.2 | HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| B. | BELANJA | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| B.1.2 | Pinjaman luar negeri | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| B.1.3 | Hibah | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 +B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | |

| No. | URAIAN | 30 JUNI 2016 | | | 30 JUNI 2016 | | | % REAL- ANGG. |
|-------|---|--------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIAJAS (D) | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIAJAS (D) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | | | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | | | | | | | |
| A.1.a | Penerimaan Negara Bukan Pajak | | | | | | | |
| (423) | Pendapatan PNBp Lainnya | | | | | | | |
| (424) | Pendapatan Badan Layanan Umum | | | | | | | |
| A.2 | HIBAH | | | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1 - A.2) | | | | | | | |
| B. | BELANJA | | | | | | | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 - B.1.2 - B.1.3) | | | | | | | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | |
| B.1.3 | Hibah | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 - B.1.2 - B.1.3) | | | | | | | |

| UNIT ORGANISASI VILAM ORGANISASI JENIS KEWENANGAN | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN – SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | |
| No. | URAIAN | 31 DESEMBER 2011 | | | 31 DESEMBER 2010 | | | % REAL. ANGG. | % REAL. ANGG. |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | | | | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | | | | | | | | |
| A.1.a | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan PNBp Lainnya | | | | | | | | |
| A.2 | HIBAH (424) Pendapatan Badan Layanan Umum | | | | | | | | |
| | Jumlah Pendapatan dan Hibah (A.1+A.2) | | | | | | | | |
| B. | BELANJA | | | | | | | | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | | | | | | | | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | |
| B.1.3 | Hibah | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | |
| | Jumlah Belanja (B.1.1 + B.1.2 +B.1.3) | | | | | | | | |

| LAPORAN REALISASI ANGGARAN - SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|----|
| No. | URAIAN | 31 DESEMBER 20X1 | | | 31 DESEMBER 20X0 | | | REALISASI DIBAWAH ANGGARAN | % REAL- ANGG. | 10 |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| A. 1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| A. 1. b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan Pngbp Lainnya | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| A. 2 | Hibah | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| B. | BELANJA | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 - B.1.2 - B.1.3) | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| B.1.3 | Hibah | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 - B.1.2 - B.1.3) | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | |

| LAPORAN REALISASI ANGGARAN - WILAYAH VERTIKAL PROPINSI : UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------------|----|
| No. | URAIAN | 31 DESEMBER 20X1 | | | 31 DESEMBER 20X0 | | | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | % REAL. ANGG. | 10 |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| A.1.a | Penerimaan Negara Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pajak Bumi dan Bangunan (424) Pendapatan Badan Layanan Umum | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| A.2 | HIBAH | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| B. | BELANJA | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Barang | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Modal | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Barang | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Modal | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| B.1.3 | Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Barang | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Modal | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |

| | | 31 DESEMBER 20X1 | | | 31 DESEMBER 20X0 | | | | |
|-------|---|------------------|-----------|--|------------------|----------|-----------|--|------------------|
| No. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (DIBAWAH) ANGGARAN | % REAL- ANGG. | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (DIBAWAH) ANGGARAN | % REAL- ANGG. |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | | | | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | | | | | | | | |
| A.1.a | Penerimaan Negara Bukan Pajak | | | | | | | | |
| A.1.b | Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan Pajak Lain-lain | | | | | | | | |
| A.2 | HIBAH | | | | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | | | | | | | | |
| B. | BELANJA | | | | | | | | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1 + B.1.2+ B.1.3) | | | | | | | | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | |
| B.1.3 | Hibah | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1 + B.1.2 +B.1.3) | | | | | | | | |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH DEKONSENTRASI PROFINSI :
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(DALAM RUPIAH)

| LAPORAN REALISASI ANGGARAN - ESELON I UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2010 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| No. | URAIAN | 31 DESEMBER 2016 | | | 31 DESEMBER 2010 | | | % REAL. ANGG. | % REAL. ANGG. |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan PNBp Lainnya (424) Pendapatan Badan Layanan Umum | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.2 | HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B. | BELANJA | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.3 | Hibah | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |

| KEMENTERIAN KESEHATAN RI. UNITAS BUDJET DAN PERENCANAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2010 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|---|---|------------------------|
| No. | URAIAN | 31 DESEMBER 2014 | | | 31 DESEMBER 2010 | | | REALISASI DIATAS (% DARI) ANGGARAN | % REAL. ANGG. TO |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (% DARI) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (% DARI) ANGGARAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan PNBP Lainnya (424) Pendapatan Badan Layanan Umum | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.2 | HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B. | BELANJA | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.3 | Hibah | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |

FORMULIR IV
 ILUSTRASI LAPORAN
 OPERASIONAL, LAPORAN
 PERUBAHAN EKUITAS DAN
 NERACA

| LAPORAN OPERASIONAL | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|---|
| Satker | | | | |
| PERIODE 30 Juni 20x1 | | | | |
| URAIAN | KEMENKES | | Kenaikan(Penurunan) | |
| | 20x1 | 20x0 | Jumlah | % |
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN | | | | |
| Pendapatan Usaha Rawat Jalan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha Rawat Inap | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha Rawat Darurat | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Penujangan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| HIBAH/DONASISUMBANGAN NON PEMERINTAH | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENDAPATAN APBN | | | | |
| Operasional | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Investasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Transfer barang dari Kementerian Kesehatan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PHLN | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENDAPATAN USAHA LAINNYA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Diklat | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Sewa | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Lain-lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENDAPATAN LAINNYA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Jasa Keuangan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Lain-lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| JUMLAH PENDAPATAN | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| BEBAN OPERASIONAL | | | | |
| Beban Pegawai | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Persediaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Barang dan Jasa | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Pemeliharaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Perjalanan Dinas | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Bunga | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| beban Subsidi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Hibah | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Bantuan Sosial | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Transfer | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Lain-lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| SURPLUS(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR | | | | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA | | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| POS LUAR BIASA | | | | |
| Beban Luar Biasa | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) - LO | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |

| LAPORAN OPERASIONAL | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|---|
| Satker | | | | |
| PERIODE 31 Desember 20x1 | | | | |
| URAIAN | KEMENKES | | Kenaikan(Penurunan) | |
| | 20x1 | 20x0 | Jumlah | % |
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN | | | | |
| Pendapatan Usaha Rawat Jalan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha Rawat Inap | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha Rawat Darurat | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Penunjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| HIBAH/DONASI/SUMBANGAN NON PEMERINTAH | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENDAPATAN APBN | | | | |
| Operasional | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Investasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Transfer barang dari Kementerian Kesehatan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PHLN | | | | |
| PENDAPATAN USAHA LAINNYA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Diklat | | | | |
| Pendapatan Sewa | | | | |
| Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan | | | | |
| Pendapatan Lain-lain | | | | |
| PENDAPATAN LAINNYA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Jasa Keuangan | | | | |
| Pendapatan Lain-lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| JUMLAH PENDAPATAN | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| BEBAN OPERASIONAL | | | | |
| Beban Pegawai | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Persediaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Barang dan Jasa | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Pemeliharaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Perjalanan Dinas | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Bunga | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Subsidi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Hibah | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Bantuan Sosial | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Transfer | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Lain-lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| SURPLUS(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR | | | | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA | | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| POS LUAR BIASA | | | | |
| Beban Luar Biasa | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) - LO | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |

| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|---|
| Satker..... | | | | |
| Per 30 Juni 20x1 | | | | |
| URAIAN | KEMENKES | | Kenaikan(Penurunan) | |
| | 20x1 | 20x0 | Jumlah | % |
| EKUITAS AWAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS/(DEFISIT) - LO | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Penyesuaian Nilai Aset | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Penyesuaian Nilai Kewajiban | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Koreksi Nilai Persediaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Lain - lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| EKUITAS AKHIR | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |

| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|---|
| Satker | | | | |
| Per 31 Desember 20x1 | | | | |
| URAIAN | KEMENKES | | Kenaikan(Penurunan) | |
| | 20x1 | 20x0 | Jumlah | % |
| EKUITAS AWAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS/(DEFISIT) - LO | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Penyesuaian Nilai Aset | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Penyesuaian Nilai Kewajiban | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Koreksi Nilai Persediaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Lain - lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| EKUITAS AKHIR | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |

| Satker | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| N E R A C A | | | |
| Per 30 Juni 20x1 dan 31 Desember 20x0 | | | |
| URAIAN | 30 JUNI 20x1 | 31 Desember 20x0 <i>Audited</i> | KENAIKAN (PENURUNAN) |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas di Bendahara Penerimaan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas pada BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Investasi jangka pendek BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Belanja dibayar di muka | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Uang Muka Belanja | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Bukan Pajak | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bagian Lancar Tagihan TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Bagian Lancar Tagihan TGR (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Kegiatan Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Kegiatan Non Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Kegiatan Non Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan yang belum diregister | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET LANCAR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tanah BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Peralatan dan Mesin | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Peralatan dan Mesin BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Gedung dan Bangunan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Gedung dan Bangunan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Tetap Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Tetap Lainnya BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Konstruksi dalam Penyerahan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Konstruksi dalam Penyerahan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET TETAP | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | |
| Tagihan TP/TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Tagihan TP/TGR (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tagihan TP/TGR BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Tagihan TP/TGR BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Jangka Panjang Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset tidak berwujud | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset tidak berwujud BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Dana yang Dibatasi Penggunaannya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Lain-lain | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Lain-lain BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET LAINNYA | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET | | | |
| JUMLAH ASET | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang kepada Pihak ketiga | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Hibah yang belum disahkan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Pendapatan Diterima Dimuka | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Uang Muka dari KPPN | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Pendapatan Yang Ditangguhkan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN JK.PENDEK | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| Satker | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| NERACA | | | |
| Per 31 Desember 20x1 dan 31 Desember 20x0 | | | |
| URAIAN | 31 Desember 20x1 | 31 Desember 20x0 | KENAIKAN (PENURUNAN) |
| | | <i>Audited</i> | |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas di Bendahara Penerimaan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas pada BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Investasi jangka pendek BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Belanja dibayar di muka | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Uang Muka Belanja | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Bukan Pajak | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bagian Lancar Tagihan TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Bagian Lancar Tagihan TGR (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Kegiatan Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Kegiatan Non Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Kegiatan Non Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan yang belum diregister | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET LANCAR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tanah BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Peralatan dan Mesin | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Peralatan dan Mesin BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Gedung dan Bangunan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Gedung dan Bangunan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Jalan, Ingasi dan Jaringan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Jalan, Ingasi dan Jaringan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Tetap Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Tetap Lainnya BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET TETAP | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | |
| Tagihan TP/TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Tagihan TP/TGR (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tagihan TP/TGR BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Tagihan TP/TGR BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Jangka Panjang Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset tidak berwujud | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset tidak berwujud BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Dana yang Dibatasi Penggunaannya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Lain-lain | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Lain-lain BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET LAINNYA | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang kepada Pihak ketiga | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Hibah yang belum disahkan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Pendapatan Diterima Dimuka | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Uang Muka dari KPPN | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Pendapatan Yang Ditangguhkan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN JK.PENDEK | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS | | | |
| EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

FORMULIR V
ILUSTRASI LAPORAN BMN

Tanggal : xx-xx-xxxx
Halaman : xx
Kode Lap. : BBS-PB

BUKU BARANG BERSEJARAH

NAMA KELOMPOK BARANG :
KODE KELOMPOK BARANG :
KODE PERKIRAAN : xxxxxx

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
KODE UAKPB : XXX

| No | UAPPBE-1 | | Semester | T/K Ka/K | Jumlah Barang | Harga Barang | Kondisi | | |
|----|----------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------------|---------|----|----|
| | Kode | Uraian | | | | | B | RR | RB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | x.xx.xx.xx.xxx | | X | | X | xxxxxxxxx | X | X | X |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*) Ket: T= Tambah, K=Kurang, Ka=Koreksi Aset, Kk=Koreksi Kondisi
Posisi per xxxxxx

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKT

BUKU BARANG INTRA KOMPTABEL

NAMA SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE PERIKRAAN :

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 KODE UAKPB : XXX

| No. | Tanggal Pembukuan | Identifikasi Barang | | | Perambahan/Perurangan | | | Satuan Barang | | Harga Barang | | Kondisi Barang | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|----------------|----|----|--|
| | | Tanggal Perolehan | NUP | Merk/Type | TRK KAKK | Kode Transaksi | Dasar Mutasi | Jumlah Barang | Satuan | Satuan | Jumlah | B | RR | RB | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | | | | | | | Saldo awal Tahun 20XX | xx | Buah | | xxx | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | xxx | | | xxx | | | | |
| Jumlah per XXXXXX | | | | | | | | | | | | | | | |

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKT

BUKU BARANG EKSTRA KOMPTABEL

NAMA SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE PERIKRAAN :

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 KODE UAKPB : XXX

| No. | Tanggal Pembukuan | Identifikasi Barang | | Penambahan/Pengurangan | | | Jumlah Barang | Satuan Barang | Harga Barang | | Kondisi Barang | | | |
|-----|-------------------|---------------------|-----|------------------------|----------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|----------------|----|----|----|
| | | Tanggal Perolehan | NUP | Merit/Type | TIK KAKK | Kode Transaksi | | | Dasar Mutasi | Satuan | Jumlah | B | RR | RB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | | | | | | Saldo awal Tahun 2XXX | xx | Buah | | xxx | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | xxx | | | xxx | | | |
| | | | | | | | Jumlah per XXXXXX | | | | | | | |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA SEMESTERAN
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
PERIODE : XXXX
TAHUN ANGGARAN XXXX**

Tanggal : xx-xx-xxxx
Halaman : xx
Kode Lap. : LBIKKS

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI.

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | JUMLAH SD XX-XX-XXXX | | PENAMBAHAN | KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF | | JUMLAH SD XX-XX-XXXX | | KETERANGAN |
|-----------------------------|----------------------|--------|------------|---------------------------------|-------|----------------------|-------|------------|
| | KODE | URAIAN | | NILAI | 3 | 4 | NILAI | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| X-XX-XX-XX-XXXX | | | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

....., XX.....,XXXX
Penanggung Jawab UAKPB

.....

KEMENTERIAN KESEHATAN RI.

Tgl Cetak : xx-xx-xxxx
Halaman : xx-xx-xxxx

LAPORAN PERSEDIAAN
PERIODE : XXXX

| Kode | Uraian | Nilai |
|----------------|--------|-------|
| x.xx.xx.xx.xxx | | xx |
| | | xx |
| | | xx |
| | | xx |
| | | xx |
| | | xx |
| | | xx |
| TOTAL | | xx |

Keterangan:

- 1.Persediaan senilai Rp.xxxxxxxxxx dalam kondisi rusak
- 2.Persediaan senilai Rp.xxxxxxxxxx dalam kondisi usang

....., xx..... xxxx
Penanggungjawab UAKPB

.....

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKT

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 INTRA KOMPTABEL
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 PERIODE : XXXX
 TAHUN ANGGARAN 2XXX**

NAMA UAKPB : xxx KEMENTERIAN KESEHATAN RI

| KODE | AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG URAIAN | SAT | SALDO PER XXXXXX | | | NILAI BUKU |
|------|---------------------------------------|------|------------------|-------|----------------|------------|
| | | | KUANTITAS | NILAI | AK. PENYUSUTAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XXX | | Buah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | XXX | XXX | XXX |

Penanggung Jawab UAKPB
 XX 2XXX

.....

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKT

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 PERIODE :
 TAHUN ANGGARAN 2XXX**

NAMA UAKPB : xxx KEMENTERIAN KESEHATAN RI

| KODE | URAIAN | SAT | SALDO PER XXXXXX | | | NILAI BUKU |
|----------|--------|-----------|------------------|----------|----------------|------------|
| | | | KUANTITAS | NILAI | AK. PENYUSUTAN | |
| 1 XXX | 2 | 3 Buah | 4 XXX | 5 XXX | 6 XXX | 7 XXX |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | XXX | XXX | |

Penanggung Jawab UAKPB
 XX 2XXX

.....

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKTT

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA KOMPTABEL
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 PERIODE : XXXXXX
 TAHUN ANGGARAN 2XXX**

NAMA UAKPB : xxx KEMENTERIAN KESEHATAN RI

| KODE | AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG URAIAN | SAT | SALDO PER XXXXX | | | NILAI BUKU |
|------|---------------------------------------|------|-----------------|-------|----------------|------------|
| | | | KUANTITAS | NILAI | AK. PENYUSUTAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XXX | | Buah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | XXX | XXX | |

Penanggung Jawab UAKPB
 XX 2XXX

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
PERIODE : XXXXXX
TAHUN ANGGARAN 2XXX

Tanggal : XX-XX-XXXX
Halaman : XX
Kode Lap : LBIKKT

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI

| KODE | AKUN NERACA | | JUMLAH | | |
|------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| | URAIAN | NILAI BMN | AKM.PENYUSUTAN | NILAI NETTO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| XXX | | XXX | XXX | XXX | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | JUMLAH | XXX | XXX | XXX | XXX |

Penanggung Jawab UAKPB
....., XX 2XXX
.....

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-----|-----------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|----|----------------|----|--|--|----------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Tanggal | : XX-XX-XXXX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Halaman | : XX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Kode Lap | : LBIKT | |
| BUKU BARANG INTRA KOMPTABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA SUB-SUB KELOMPOK BARANG : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KODE SUB-SUB KELOMPOK BARANG : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KODE PERKIRAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KODE UAKPB : XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Tanggal Pembukuan | Identifikasi Barang | | | Penambahan/Pengurangan | | | Satuan Barang | | Harga Barang | | | Kondisi Barang | | | | | | |
| | | Tanggal Perolehan | NUP | Merk/Type | TIK Kalk | Kode Transaksi | Dasar Mutasi | Jumlah Barang | Satuan | Satuan | Jumlah | B | RR | RB | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | | | | | | | Saldo awal Tahun 20XX | xx | Buah | | xxx | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | xxx | | | xxx | | | | | | | | |
| Jumlah per 31 Desember 20xx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKT

BUKU BARANG EKSTRA KOMPTABEL

NAMA SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE PERKIRAAN :

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 KODE UAKPB : XXX

| No. | Tanggal Pembukuan | Identifikasi Barang | | Penambahan/Pengurangan | | | Harga Barang | | Kondisi Barang | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----|------------------------|---------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|--------|--------|----|----|----|
| | | Tanggal Perolehan | NUP | Merk/Type | TK KAKK | Kode Transaksi | Dasar Mutasi | Jumlah Barang | Satuan Barang | Satuan | Jumlah | B | RR | RB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | | | | | | Saldo awal Tahun 2XXX | xx | Buah | | xxx | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | xxx | | | xxx | | | |
| Jumlah per 31 Desember 2xxx | | | | | | | | | | | | | | |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN XXXX**

Tanggal : xx-xx-xxxx
Halaman : xx
Kode Lap. : LBIKKT

NAAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI.

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | JUMLAH SD 1 JANUARI XXXX | | PENAMBAHAN | KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF | | JUMLAH SD 31 DESEMBER XXXX | KETERANGAN |
|-----------------------------|--------------------------|--------|------------|---------------------------------|-------|----------------------------|------------|
| | KODE | URAIAN | | NILAI | NILAI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| X.XX.XX.XX.XXX | | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

....., XX.....XXXX
Penanggung Jawab UAKPB

.....

| | | | | | | | |
|---|--------|------|-----------|-------|----------------|------------|--------------|
| | | | | | | Tanggal | : XX-XX-XXXX |
| | | | | | | Halaman | : XX |
| | | | | | | Kode Lap | : LBIKT |
| LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN | | | | | | | |
| INTRA KOMPTABEL | | | | | | | |
| RINCIAN PER KELOMPOK BARANG | | | | | | | |
| TAHUN ANGGARAN 2XXX | | | | | | | |
| NAMA UAKPB : xxx KEMENTERIAN KESEHATAN RI | | | | | | | |
| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | | | | | | |
| KODE | URAIAN | SAT | KUANTITAS | NILAI | AK. PENYUSUTAN | NILAI BUKU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| XXX | | Buah | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | XXX | XXX | XXX | |
| Penanggung Jawab UAKPB | | | | | | | |
|, XX 2XXX | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | Tanggal | : XX-XX-XXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------------|-----------|-------|---------------|------------|--------------|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|------|--------|-----|-----------|-------|---------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | Halaman | : XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kode Lap | : LBIKT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA KOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA UAKPB : xxx KEMENTERIAN KESEHATAN RI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG</th> <th colspan="6">SALDO PER 31 DESEMBER 2XXX</th> </tr> <tr> <th>KODE</th> <th>URAIAN</th> <th>SAT</th> <th>KUANTITAS</th> <th>NILAI</th> <th>AK PENYUSUTAN</th> <th colspan="2">NILAI BUKU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td colspan="2">7</td> </tr> <tr> <td>XXX</td> <td></td> <td>Buah</td> <td>XXX</td> <td>XXX</td> <td>XXX</td> <td colspan="2">XXX</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>XXX</td> <td>XXX</td> <td colspan="2">XXX</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | SALDO PER 31 DESEMBER 2XXX | | | | | | KODE | URAIAN | SAT | KUANTITAS | NILAI | AK PENYUSUTAN | NILAI BUKU | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | XXX | | Buah | XXX | XXX | XXX | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | XXX | XXX | XXX | |
| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | SALDO PER 31 DESEMBER 2XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KODE | URAIAN | SAT | KUANTITAS | NILAI | AK PENYUSUTAN | NILAI BUKU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXX | | Buah | XXX | XXX | XXX | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | XXX | XXX | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penanggung Jawab UAKPB XX 2XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. BELANJA MODAL TA XXXX PER SATKER

| KODE | | NAMA | ALOKASI | REALISASI | ASET TETAP | | PERSEDIAAN | |
|-------|--------|------|---------|-----------|------------|--------|-----------------|--------------|
| NO | SATKER | | | | INTR | EKSTRA | Telah Digunakan | Sisa / Saldo |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | 0 | | | | |

2. Jenis Belanja (Barang/Bansos) TA XXXX digunakan untuk beli Aset Tetap

| No | Kode | Data Satker | | Belanja | | Aset Tetap | Digunakan Untuk | |
|-------|------|-------------|--------|---------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| | | Nama Satker | Barang | Bansos | Sendiri | | Satker Lain dengan BAST | Tidak Ada BAST |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

3. Pengelolaan Dana Hibah Langsung TA XXXX

| No | Nama Satker | Sumber Donor | Jumlah Terima TA XXXX | Pengelolaan Dana Hibah | | | Realisasi Belanja | | |
|-------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | No Register | No Rekening | Telah Masuk DIPA | Alasan Tidak Masuk DIPA | Terbit SPHL | Belum terbit SPHL |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
(BPYBDS)

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
PERIODE : XXXX

TAHUN ANGGARAN XXXX

Tanggal : xx-xx-xxxx
Halaman : xx
Kode Lap. : LBITKS

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI.

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | SAT | SALDO PER XX-XX-XXXX | | MUTASI | | | | SALDO PER XX-XX-XXXX | | |
|-----------------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|-------|
| | | KUANTITAS | NILAI | BERTAMBAH Kuantitas | NILAI | Berkurang Kuantitas | NILAI | Kuantitas | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| X.XX.XX.XX.XXX | | | XX | XXXXX | XX | XXXXX | XX | XXXXX | XX | XXXXX |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

....., XX.....XXXX
Penanggung Jawab UAKPB

**LAPORAN BARANG HILANG
YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
PERIODE : XXXXX
TAHUN ANGGARAN XXXX**

Tanggal : xx-xx-xxxx
Halaman : xx
Kode Lap. : LBITKS

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI.

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | SAT | SALDO PER XX-XX-XXXX | | MUTASI | | | | SALDO PER XX-XX-XXXX | |
|-----------------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|
| | | KUANTITAS | NILAI | BERTAMBAH Kuantitas | NILAI | Berkurang Kuantitas | NILAI | Kuantitas | NILAI |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| X.XX.XX.XX.XXX | | XX | XXXX | XX | XXXX | XX | XXXX | XX | XXXX |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

....., XX.....XXXX
Penanggung Jawab UAKPB

| |
|---|
| <p>FORMULIR VI BAR REKONSILIASI INTERNAL SAK DAN SIMAK</p> |
|---|

KOP SURAT

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
LINGKUP INTERNAL<NAMA SATKER>
PERIODE :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal,, bulantahun, bertempat di.....,
kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit
akuntansi barang pada<NAMA SATKER>, untuk selanjutnya di
sebut Pihak Pertama;

II. Nama :
NIP :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit
akuntansi keuangan pada<NAMA SATKER>, untuk selanjutnya di
sebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik
Negara (BMN) pada lingkup internal<NAMA SATKER> dengan cara
membandingkan data akuntansi barang dengan data yang disusun oleh unit
akuntansi keuangan untuk periode, dengan hasil sebagai
berikut :

| NO | Akun Neraca | Nilai BMN Periode : | | Saldo Akhir |
|----------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Saldo Awal | Mutasi | |
| I | POSISI BMN DI NERACA | | | |
| A | ASET LANCAR | | | Rp - |
| 1 | Persediaan * | | | Rp - |
| B | ASET TETAP | Rp - | Rp - | Rp - |
| 1 | Tanah | Rp - | Rp - | Rp - |
| 2 | Tanah BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 3 | Peralatan dan Mesin | Rp - | Rp - | Rp - |
| 4 | Peralatan dan Mesin BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 5 | Gedung dan Bangunan | Rp - | Rp - | Rp - |
| 6 | Gedung dan Bangunan BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 7 | Jalan, Irigasi & Jaringan | Rp - | Rp - | Rp - |
| 8 | Jalan, Irigasi & Jaringan BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 9 | Aset Tetap Lainnya | Rp - | Rp - | Rp - |
| 10 | Aset Tetap Lainnya BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 11 | KDP | Rp - | Rp - | Rp - |
| 12 | KDP BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 13 | Akum. Penyusutan Aset Tetap | Rp - | Rp - | Rp - |
| 14 | Akum. Penyusutan Aset Tetap BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| C | ASET LAINNYA | Rp - | Rp - | Rp - |
| 1 | Aset Tidak Berwujud | Rp - | Rp - | Rp - |
| 2 | Aset Lain-lain ** | Rp - | Rp - | Rp - |
| D | Total Intrakomptabel (A+B+C) | Rp - | Rp - | Rp - |
| II | BMN NON NERACA | | | |
| A | Ekstrakomptabel | Rp - | Rp - | Rp - |
| 1 | BMN Ekstrakomptabel | Rp - | Rp - | Rp - |
| 2 | Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel | Rp - | Rp - | Rp - |
| B | BPYBDS | Rp - | Rp - | Rp - |
| C | BARANG HILANG | Rp - | Rp - | Rp - |
| D | BARANG RUSAK BERAT | Rp - | Rp - | Rp - |

* Nilai mutasi persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal persediaan:

** nilai yang disajikan hanya nilai aset tetap yang tidak dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan aset lain-lain berupa BMN

*** Rincian terlampir

III. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait Penyusunan LBP/KP dan LK K/L disajikan dalam Lampiran BERita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode....., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penanggung

Jawab

UAKPB/UAPPB/

Penanggung Jawab UAKPA/UAPPA-W

UAPPB E1/UAPB

UAPPA ES1/UAPA

Nama :

Nama :

NIP.

NIP.

Mengetahui,

Kepala/tgl/bln/th

Nama :

NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

| I. TANDAN TANGAN | |
|------------------|--------|
| keuangan | barang |

| II. PERIODE | |
|-------------------|---------|
| <bulan, semester> | <tahun> |

III. UNIT ORGANISASI

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1 Kode | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <bagian anggaran> | <Eselon 1> | <Wilayah> | <Satuan kerja> | <Pencapaian> | <Jenis keorganisasian> | |
| 2 Nama Satker | <input type="text"/> | | | | | | |

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

| No | PERKIRAAN NERACA | SAK | SIMAK | KESEPAKATAN |
|----|-------------------------------|-----|-------|-------------|
| I | POSISI BMN DI NERACA | Rp | - Rp | - Rp |
| A | ASET LANCAR | Rp | - Rp | - Rp |
| 1 | Persediaan | Rp | - Rp | - Rp |
| B | ASET TETAP | Rp | - Rp | - Rp |
| 1 | Tanah | Rp | - Rp | - Rp |
| 2 | Tanah BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| 3 | Peralatan dan Mesin | Rp | - Rp | - Rp |
| 4 | Peralatan dan Mesin BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| 5 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| 6 | Gedung dan Bangunan | Rp | - Rp | - Rp |
| 7 | Gedung dan Bangunan BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| 8 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| 9 | Jalan, Irigasi & Jaringan | Rp | - Rp | - Rp |
| 10 | Jalan, Irigasi & Jaringan BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| 11 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| 12 | Aset Tetap Lainnya | Rp | - Rp | - Rp |
| 13 | Aset Tetap Lainnya BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| 14 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| 15 | KDP | Rp | - Rp | - Rp |
| 16 | KDP BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| C | ASET LAINNYA | Rp | - Rp | - Rp |
| 1 | Aset Tidak Berwujud | Rp | - Rp | - Rp |
| 2 | Aset Lain-lain | Rp | - Rp | - Rp |
| 3 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| D | SUB JMLAH (A+B+C) | Rp | - Rp | - Rp |
| II | BMN NON NERACA | Rp | - Rp | - Rp |
| A | Ekstrakomptabel | Rp | - Rp | - Rp |
| 1 | BMN Ekstrakomptabel | Rp | - Rp | - Rp |
| 2 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| G | TOTAL (D+E) | Rp | - Rp | - Rp |

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

| I. TANDAN TANGAN | |
|------------------|--------|
| keuangan | barang |

| II. PERIODE | |
|--------------------|---------|
| <bulan, s/mes/thr> | <tahun> |

III. UNIT ORGANISASI

1 Kode

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|----------------|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| <bagian anggaran> | <Eselon 1> | <Wilayah> | <Satuan Kerja> | <Pembantu> | <Jenis Kewenangan> | | | | | | |

2 Nama Satker

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

| No | PERKIRAAN NERACA | SAK | - | SIMAK | - | KESEPAKATAN | - |
|----|-------------------------------|-----|---|-------|---|-------------|---|
| I | POSISI BMN DI NERACA | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| A | ASET LANCAR | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 1 | Persediaan | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| B | ASET TETAP | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 1 | Tanah | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | Tanah BLU | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 3 | Peralatan dan Mesin | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 4 | Peralatan dan Mesin BLU | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 5 | <i>Akum. Penyusutan</i> | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 6 | Gedung dan Bangunan | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 7 | Gedung dan Bangunan BLU | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 8 | <i>Akum. Penyusutan</i> | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 9 | Jalan, Irigasi & Jaringan | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 10 | Jalan, Irigasi & Jaringan BLU | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 11 | <i>Akum. Penyusutan</i> | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 12 | Aset Tetap Lainnya | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 13 | Aset Tetap Lainnya BLU | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 14 | <i>Akum. Penyusutan</i> | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 15 | KDP | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 16 | KDP BLU | | | Rp | | Rp | |
| C | ASET LAINNYA | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 1 | Aset Tidak Berwujud | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | Aset Lain-lain | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 3 | <i>Akum. Penyusutan</i> | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| D | SUB JMLAH (A+B+C) | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| II | BMN NON NERACA | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| E | Ekstrakomptabel | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 1 | BMN Ekstrakomptabel | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | <i>Akum. Penyusutan</i> | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| B | BPYBDS | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| C | BARANG HILANG | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| D | RUSAK BERAT | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| | TOTAL (I+II) | Rp | - | Rp | - | Rp | - |

| VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUKAN BMN | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------|--|
| No | PERKIRAAN NERACA | BELANJA MODAL | BELANJA NON MODAL | | | TOTAL | |
| | | | BELANJA BARANG | BELANJA BANSOS | BELANJA LAINNYA | | |
| A | ASET LANCAR | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | Persediaan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| B | ASET TETAP | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | Tanah | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | Tanah BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 3 | Peralatan dan Mesin | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 4 | Peralatan dan Mesin BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 5 | Gedung dan Bangunan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 6 | Gedung dan Bangunan BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 7 | Jalan, Irigasi & Jaringan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 8 | Jalan, Irigasi & Jaringan BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 9 | Aset Tetap Lainnya | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 10 | Aset Tetap Lainnya BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 11 | KDP | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 12 | KDP BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| C | ASET LAINNYA | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | Kemitraan Dengan Pihak Ke 3 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| 3 | Aset Lain-lain | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| II | BMN NON NERACA | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| A | BMN Ekstrakomptabel | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| B | BPYDDS | | | | | | |
| | TOTAL (I+II) | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode adalah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

- a.
- b.

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode tahun anggaran terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp..... dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- a.
- b.

Terdapat koreksi audit BPK sebesar Rp..... dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- a.
- b.

Terdapat selisih nilai antara mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap selama periode berjalan (pembelian dan pengambangan BMN) dengan

total realisasi belanja modal sebesar Rp..... dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

**FORMULIR VII
ILUSTRASI
PENYESUAIAN DAN
MEMO
KARWAS**

MEMO PENYESUAIAN

| FORMULIR MEMO PENYESUAIAN | |
|---|--|
| Kementerian Negara/Lembaga | : |
| Eselon | : |
| Wilayah | : |
| Satuan Kerja | : |
| No. Dokumen | : |
| Tanggal | : |
| Tahun Anggaran | : |
| Keterangan | : |
| Kategori Jurnal Penyesuaian | : |
| <input type="checkbox"/> pendapatan diterima dimuka | <input type="checkbox"/> koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> pendapatan Yang Masih Harus diterima | <input type="checkbox"/> pendapatan Selisih Kurs belum terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja dibayar dimuka | <input type="checkbox"/> Beban selisih Kurs Belum Teresa |
| <input type="checkbox"/> Belanja yang masih harus dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> koreksi |
| No. D/K | |
| Kode Akun | Uraian Nama Akun |
| | Rupiah Debet |
| | Rupiah Kredit |
| Dibuat oleh | : |
| Tanggal | : |
| | Disetujui |
| | Tanggal |
| | Direkam oleh |
| | Tanggal |

| KARTU PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 31 DESEMBER 20X1 | | | | | KARTU PENGAWASAN | | | |
|---|--------------|------------|--------------|-----|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| No | Nama Rekanan | Nilai SSBP | Jangka Waktu | TMT | Jatuh Tempo | S.d. 31 Desember 20X0 | Daluwarsa Tahun Berjalan | Pendapatan Diterima Di Muka |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Ket :

- Angka pada kolom 7 merupakan porsi pendapatan pada tahun lalu dan tahun berjalan / nilai barang / jasa yang telah diserahkan oleh satker, dan telah di akui se pendapatan operasional
- Angka pada kolom 8 merupakan porsi pendapatan yang belum dapat diakui pada tahun berjalan / nilai barang / jasa yang masih harus diserahkan yang disajikan

| KARTU PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|-----|-------------|----------|--------------------------------------|
| 31 DESEMBER 20X1 | | | | | | | |
| KARTU PENGAWASAN | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| No | Nama Rekanan | Nilai Kontrak | Jangka Waktu | TMT | Jatuh Tempo | Terbayar | Pendapatan yang masih harus diterima |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Ket : | | | | | | | |
| - Angka pada kolom 7 merupakan jumlah pembayaran oleh rekanan pada tahun lalu dan tahun berjalan | | | | | | | |
| - Angka pada kolom 8 merupakan porsi pendapatan yang diakui pada tahun berjalan / nilai barang / jasa yang telah diserahkan kepada rekanan yang disajikan | | | | | | | |

FORMULIR VIII
DEFINISI OPERASIONAL AKUN

- 1 ASET
Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 11 ASET LANCAR
Digunakan untuk mencatat aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
- 111 KAS DAN SETARA KAS
Digunakan untuk mencatat kas dan setara kas berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 1113 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya
- 111322 Kas Pemerintah yang ada di K/L
Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di K/L
- 111323 Kas Pemerintah yang ada di BLU
Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di BLU
- 111324 Kas di Rekening PFK
Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening PFK
- 111327 Kas di rekening PHLN
Digunakan untuk mencatat Kas di rekening PHLN
- 111329 Kas lainnya
Digunakan untuk mencatat Kas lainnya
- 1116 Kas di Bendahara Pengeluaran
- 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran UP
Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening

- bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP)) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
- 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP
Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
- 1117 Kas di Bendahara Penerimaan
- 11171 Kas di Bendahara Penerimaan
- 111711 Kas di Bendahara Penerimaan
Digunakan untuk mencatat Kas di Bendahara Penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara.
- 1118 Kas Lainnya dan Setara Kas
- 11181 Setara Kas
- 111811 Surat Berharga
Digunakan untuk mencatat setara kas Surat Berharga
- 111812 Penempatan di Bank Umum
Digunakan untuk mencatat setara kas Penempatan di Bank Umum
- 111813 Reverse Repo
Digunakan untuk mencatat setara kas Reverse Repo

- 111814 Foreign Exchange
Digunakan untuk mencatat setara kas transaksi Foreign Exchange.
- 111819 Setara Kas lainnya
Digunakan untuk mencatat Setara Kas lainnya
- 11182 Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga
- 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya dan Setara Kas, yang mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.
- 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah Langsung yang telah disahkan.
- 111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
Digunakan untuk mencatat kas lainnya di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan
- 1119 Kas pada Badan Layanan Umum
- 11191 Kas BLU
- 111911 Kas dan Bank BLU
Digunakan untuk mencatat Kas Pada BLU, yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di BLU (yang sudah disahkan BUN).
- 111912 Dana yang akan Dijaminkan BLU
Digunakan untuk mencatat Dana yang akan Dijaminkan BLU
- 111913 Dana yang akan dipadankan BLU
Digunakan untuk mencatat Dana yang akan dipadankan BLU
- 11192 Setara Kas BLU
- 111921 Surat Berharga BLU
Digunakan untuk mencatat Surat Berharga BLU
- 111929 Setara kas Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Setara kas Lainnya BLU
- 113 INVESTASI JANGKA PENDEK
- 1131 Investasi dalam Deposito
- 11311 Investasi dalam Deposito

- 113111 Investasi dalam Deposito Jangka pendek
Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Deposito Jangka pendek
- 1133 Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum
- 11331 Deposito Jangka Pendek BLU
- 113311 Deposito BLU
Digunakan untuk mencatat Deposito BLU
- 113319 Investasi Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Investasi Lainnya BLU
- 1139 Investasi Jangka Pendek Lainnya
- 11391 Investasi Jangka Pendek Lainnya
- 113911 Investasi Jangka Pendek Lainnya
Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Pendek Lainnya
- 114 BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA, DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
- 1141 Belanja Dibayar di Muka (prepaid)
- 11411 Belanja Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut. Dan atas pengeluaran tersebut telah terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen² yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan dari pihak ketiga seperti kwitansi, invoice, dll.
- 114111 Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)
- 114112 Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)
- 114113 Belanja Pembayaran Bunga Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja pembayaran bunga dibayar di muka (prepaid)
- 114114 Belanja Lain-lain Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-Lain Dibayar di Muka (prepaid)

- 114115 Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)
- 114116 Belanja Hibah Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Dibayar di Muka (prepaid)
- 114117 Belanja Subsidi Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Dibayar di Muka (prepaid)
- 114118 Belanja Bantuan Sosial Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial Dibayar di Muka (prepaid)
- 1142 Uang muka belanja (prepayment)
- 11421 Uang muka belanja pemerintah pusat (prepayment)
Digunakan untuk mencatat pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat.
- 114211 Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja pegawai (prepayment)
- 114212 Uang Muka Belanja Barang (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja barang (prepayment)
- 114213 Uang Muka Belanja Modal (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja modal (prepayment)
- 114214 Uang Muka Belanja Pembayaran Bunga (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja pembayaran bunga (prepayment)
- 114215 Uang Muka Belanja Subsidi (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja subsidi (prepayment)
- 114216 Uang Muka Belanja Hibah (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja hibah (prepayment)
- 114217 Uang Muka Belanja Bantuan Sosial (Prepayment)

| | |
|--------|---|
| | Digunakan untuk mencatat uang muka belanja bantuan sosial (prepayment) |
| 114218 | Uang Muka Belanja Lain lain (prepayment) Digunakan untuk mencatat Uang Muka Belanja Lain-Lain (prepayment) |
| 1143 | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima |
| 11431 | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima |
| 114311 | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Digunakan untuk mencatat penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima pada akhir periode pelaporan. |
| 115 | PIUTANG Digunakan untuk mencatat Piutang, meliputi jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara/Lembaga dan/atau Hak Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian atau akibat lainnya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. |
| 1152 | Piutang Bukan Pajak Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari PNBPN, meliputi seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah |
| 11521 | Piutang Bukan Pajak |
| 115211 | Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Digunakan untuk mencatat Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| 1153 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran |
| 11531 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran |
| 115311 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran |
| 1154 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi |
| 11541 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan |
| 115411 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi |
| 11542 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi |

- 115421 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
- 1156 Piutang dari KUN
- 11561 Piutang dari KUN
- 115611 Piutang dari BUN
Digunakan untuk mencatat Piutang dari BUN
- 115612 Piutang dari KPPN
Digunakan untuk mencatat Piutang dari KPPN
- 115613 Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima
Digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Uang Persediaan. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Kas Di Bendahara Pengeluaran UP.
- 115614 Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan diterima
Digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Tambahan Uang Persediaan. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP.
- 115615 Piutang dari Uang Muka Belanja Barang yang akan diterima
Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait permintaan uang muka belanja barang. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun uang muka belanja barang.
- 115616 Piutang dari Uang Muka Belanja Modal yang akan diterima
Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait uang muka belanja modal. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Uang Muka Belanja Modal.
- 115617 Piutang dari Persekot Gaji yang akan diterima
Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait persekot gaji. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Uang Muka Belanja Pegawai.
- 11563 Piutang dari Kas BLU

- 115631 Piutang dari Kas BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang dari Kas BLU
- 1157 Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum
- 11571 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa
- 115711 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
- 115712 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
- 115719 Piutang BLU penyedia Barang dan Jasa Lainnya
Digunakan untuk mencatat Piutang BLU penyedia Barang dan Jasa Lainnya
- 11579 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
- 115791 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
- 1158 Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
- 11581 Piutang Sewa BLU
- 115811 Piutang Sewa Tanah BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Tanah BLU
- 115812 Piutang Sewa Gedung BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Gedung BLU
- 115813 Piutang Sewa Ruang BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Ruang BLU
- 115814 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
- 115819 Piutang Sewa Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Lainnya BLU
- 11582 Piutang dari Penjualan Aset BLU
- 115821 Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- 115829 Piutang dari penjualan Aset lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang dari penjualan Aset lainnya BLU
- 11589 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional

- 115891 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
- 116 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
- 1162 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak
- 11621 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak
- 116211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang PNBPN
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang PNBPN
- 116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lainnya
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lainnya
- 1163 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- 11631 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- 116311 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- 1164 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
- 11641 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
- 116411 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 11642 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
- 116421 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
- 1165 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Investasi Permanen

- 11651 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Investasi Permanen
- 116511 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Investasi Permanen
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Investasi Permanen
- 1166 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
- 11661 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa
- 116611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
- 116612 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
- 11669 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Operasional Lainnya BLU
- 116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
- 1167 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
- 11671 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa BLU
- 116711 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Tanah BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Tanah BLU
- 116712 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Gedung BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Gedung BLU
- 116713 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Ruangan BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Ruangan BLU

- 116714 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
- 116719 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Lainnya BLU
- 11672 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset BLU
- 116721 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- 116722 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
- 11679 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Non Operasional Lainnya BLU
- 116791 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
- 117 PERSEDIAAN
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- 1171 Persediaan
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

- 11711 Persediaan Bahan untuk Operasional
- 117111 Barang Konsumsi
Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk kegiatan operasional Satker berupa Barang Konsumsi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN, misalnya : ATK, buku nikah, plat nomor, dll.
- 117112 Amunisi
Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Amunisi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117113 Bahan untuk Pemeliharaan
Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Bahan untuk Pemeliharaan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117114 Suku Cadang
Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Suku Cadang sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 11712 Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
- 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Pita Cukai, Materai dan Leges sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Hewan dan Tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai

- dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses

- Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang dalam proses produksi untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 11713 Persediaan Bahan untuk Proses Produksi
- 117131 Bahan Baku
Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk proses produksi berupa bahan baku sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117132 Barang dalam Proses
Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang dalam proses produksi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
- 11714 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
- 117141 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang yang digunakan dalam rangka Bantuan Sosial.
- 11719 Persediaan Bahan Lainnya
Digunakan untuk mencatat persediaan selain dari bahan untuk operasional, bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, dan bahan untuk proses produksi
- 117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
Digunakan untuk mencatat Persediaan bahan lainnya berupa persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
- 117192 Persediaan Barang Hasil Sitaan
Digunakan untuk mencatat Persediaan bahan lainnya berupa Barang Hasil Sitaan
- 117199 Persediaan Lainnya
Digunakan untuk mencatat Persediaan Lainnya
- 1172 Persediaan Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khusus satker Badan Layanan Umum

- 11721 Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa
Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU sektor Penyedia Barang dan Jasa
- 117211 Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pelayanan Kesehatan
- 117212 Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pelayanan Pendidikan
- 1179 Persediaan yang Belum Diregister
- 11791 Persediaan yang Belum Diregister
- 117911 Persediaan yang Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap persediaan yang diterima.
- 118 PIUTANG PFK
- 1181 Piutang PFK
- 11811 Piutang PFK
- 118111 Piutang PFK 10 % Gaji
Piutang yang berasal dari penerimaan PFK 10% melalui potongan SPM Gaji. Akun ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN.
- 118113 Piutang PFK Beras Bulog
Piutang yang berasal dari penerimaan PFK Beras Bulog melalui potongan SPM Gaji. Akun ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN.
- 118118 Piutang PFK 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
Digunakan untuk mencatat Piutang PFK 2% Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
- 118119 Piutang PFK Lain-lain
Digunakan untuk mencatat Piutang PFK Lain-Lain
- 12 INVESTASI JANGKA PANJANG
Digunakan untuk mencatat investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 121 INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN
- 1214 Investasi dalam Obligasi
- 12141 Investasi dalam Obligasi

- 121411 Investasi dalam Obligasi
Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Obligasi sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
- 1216 Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum
- 12161 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Non Permanen
- 121611 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan Non Permanen
Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Kesehatan Non Permanen
- 121613 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan Non Permanen
Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Pendidikan Non Permanen
- 1219 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen Lainnya yang tidak memenuhi kriteria Investasi dalam Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Obligasi, Penyertaan Modal Pemerintah dan BLU
- 12191 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen Lainnya yang tidak memenuhi kriteria Investasi dalam Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Obligasi, Penyertaan Modal Pemerintah dan BLU
- 121911 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
- 1222 Investasi Permanen Badan Layanan Umum
- 12221 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa ² Permanen
Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada BLU Penyedia Barang dan Jasa mencakup layanan kesehatan, pendidikan, penunjang konstruksi, jasa komunikasi dan penyedia barang dan jasa lainnya.
- 122211 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan Permanen
Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Kesehatan Permanen
- 122212 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan Permanen
Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Pendidikan Permanen

- 1229 Investasi Permanen Lainnya
Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang lainnya, yaitu investasi permanen yang tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dan Badan Layanan Umum.
- 12291 Investasi Permanen Lainnya
Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang lainnya yang terdiri dari Investasi dalam Obligasi, pada Otorita, pada Bank Indonesia dan Investasi Lain-lain.
- 122911 Investasi dalam Obligasi
Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Obligasi
- 122912 Investasi pada Otorita
Digunakan untuk mencatat Investasi pada Otorita
- 122913 Investasi pada Bank Indonesia
Digunakan untuk mencatat Investasi pada Bank Indonesia
- 122919 Investasi Lain4lain
Digunakan untuk mencatat Investasi Lain-lain
- 13 ASET TETAP
Digunakan untuk mencatat aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 131 TANAH
Digunakan untuk mencatat aset tetap berwujud tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.
- 1311 Tanah
Digunakan untuk mencatat tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- 13111 Tanah
- 131111 Tanah
Digunakan untuk mencatat BMN berupa Aset Tetap Tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

- 131112 Tanah dari Hibah
Digunakan untuk mencatat tanah yang berasal dari hibah.
- 1312 Tanah Belum Diregister
- 13121 Tanah Belum Diregister
- 131211 Tanah Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Tanah yang diterima.
- 1313 Tanah Badan Layanan Umum
- 13131 Tanah BLU
- 131311 Tanah BLU
Digunakan untuk mencatat tanah yang dimiliki atau diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- 1314 Tanah Belum Diregister BLU
- 13141 Tanah Belum Diregister BLU
- 131411 Tanah Belum Diregister BLU
Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Tanah yang diterima.
- 132 PERALATAN DAN MESIN
- 1321 Peralatan dan Mesin
- 13211 Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dengan masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
- 132111 Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat Peralatan dan Mesin. Mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai kodefikasi BMN
- 132112 Peralatan dan Mesin dari Hibah
Digunakan untuk mencatat Peralatan dan Mesin dari Hibah.
- 1322 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- 13221 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

- 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Peralatan dan Mesin yang diterima.
- 1323 Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum
- 13231 Peralatan dan Mesin BLU
- 132311 Peralatan dan Mesin BLU
Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dimiliki atau diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
- 1324 Peralatan dan Mesin Belum Diregister BLU
- 13241 Peralatan dan Mesin Belum Diregister BLU
- 132411 Peralatan dan Mesin Belum Diregister BLU
Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Peralatan dan Mesin yang diterima.
- 133 GEDUNG DAN BANGUNAN
- 1331 Gedung dan Bangunan
- 13311 Gedung dan Bangunan
- 133111 Gedung dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan meliputi antara lain bangunan gedung monumen bangunan menara rambu-rambu dan tugu titik kontrol/pasti
- 133112 Gedung dan Bangunan dari Hibah
Digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan yang berasal dari hibah.
- 1332 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- 13321 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- 133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Gedung dan Bangunan yang diterima.
- 1333 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum
- 13331 Gedung dan Bangunan BLU

- 133311 Gedung dan Bangunan BLU
Digunakan untuk mencatat seluruh Gedung dan Bangunan yang dibeli, diperoleh atau dibangun Badan Layanan Umum dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap digunakan.
- 1334 Gedung dan Bangunan Belum Diregister BLU
- 13341 Gedung dan Bangunan Belum Diregister BLU
- 133411 Gedung dan Bangunan Belum Diregister BLU
Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Gedung dan Bangunan yang diterima.
- 134 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
- 1341 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 13411 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 134111 Jalan dan Jembatan
Digunakan untuk mencatat Jalan dan Jembatan. Jalan dan jembatan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 134112 Irigasi
Digunakan untuk mencatat Irigasi. Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
- 134113 Jaringan
Digunakan untuk mencatat Jaringan. Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
- 134114 Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
Digunakan untuk mencatat aset berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang berasal dari hibah.
- 1342 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- 13421 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- 134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Jalan dan Jembatan yang diterima.
- 134212 Irigasi Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Irigasi yang diterima.

- 134213 Jaringan Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Jaringan yang diterima.
- 1343 Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum
- 13431 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU
- 134311 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU
Digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun atau diperoleh oleh Badan Layanan Umum serta dikuasai oleh satker BLU dan dalam kondisi siap digunakan.
- 1344 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister BLU
- 13441 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister BLU
- 134411 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister BLU
Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diterima.
- 135 ASET TETAP LAINNYA
- 1351 Aset Tetap Lainnya
- 13511 Aset Tetap Renovasi
- 135111 Aset Tetap Renovasi
Digunakan untuk mencatat kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya pengembangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik entitas akuntansi, namun digunakan dalam kegiatan operasional entitas akuntansi yang melakukan renovasi. Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap Renovasi memiliki kriteria sbb:
1. Aset yang direnovasi bukan milik entitas akuntansi bersangkutan
 2. Aset yang direnovasi digunakan untuk kegiatan operasional entitas akuntansi yang merenovasi
 3. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan oleh entitas akuntansi perenovasi kepada pemilik Aset.
- 13512 Aset Tetap Lainnya
- 135121 Aset Tetap Lainnya
Digunakan untuk mencatat seluruh Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dengan maksud

- untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan siap digunakan.
- 135122 Aset Tetap Lainnya dari Hibah
Digunakan untuk mencatat aset lainnya yang berasal dari hibah.
- 1352 Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum
- 13521 Aset Tetap Lainnya BLU
- 135211 Aset Tetap Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat seluruh Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional satker BLU dan dalam kondisi siap digunakan.
- 13522 Aset Tetap Renovasi BLU
- 135221 Aset Tetap Renovasi BLU
Digunakan untuk mencatat kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya pengembangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik satker BLU, namun digunakan dalam kegiatan operasional satker BLU yang melakukan renovasi. Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap Renovasi memiliki kriteria sbb:
1. Aset yang direnovasi bukan milik entitas akuntansi bersangkutan
 2. Aset yang direnovasi digunakan untuk kegiatan operasional entitas akuntansi yang merenovasi
 3. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan oleh entitas akuntansi perenovasi kepada pemilik Aset.
- 136 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 1361 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang

- dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 13611 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 1362 Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum
- 13621 Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum
- 136211 Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum. Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan oleh satker BLU, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 137 AKUMULASI PENYUSUTAN
- 1371 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
- 13711 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
- 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli.
- 13712 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 137121 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau

- masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 1372 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
- 13721 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
- 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
- 13722 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan BLU
- 137221 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
- 1373 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 13731 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi
- 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jalan dan Jembatan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
- 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Irigasi mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
- 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jaringan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
- 13732 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
- 137321 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup penurunan kapasitas

- atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
- 1374 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
 - 13741 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
 - 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
 - 13742 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU
 - 137421 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
 - 139 ASET TETAP YANG BELUM DIREGISTER
 - 1391 Aset Tetap yang Belum Diregister
 - 13911 Aset Tetap yang Belum Diregister
 - 139111 Aset Tetap yang Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Aset Tetap yang diterima.
 - 15 PIUTANG JANGKA PANJANG
 - 151 PIUTANG TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN
 - 1511 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
 - 15111 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
 - 151111 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Jumlah TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara.
 - 1512 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU
 - 15121 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Badan Layanan Umum
 - 151211 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah di satker BLU secara angsuran

kepada pegawai pemerintah. Jumlah TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara.

152 PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI

1521 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

15211 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

152111 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri non bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Jumlah TPA/TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan/ Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara/Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan ke kas negara.

1522 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU

15221 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Badan Layanan Umum

152211 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Badan Layanan Umum

Digunakan untuk mencatat jumlah tagihan yang timbul atas proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai non bendahara satker BLU dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/

pegawai non bendahara satker BLU tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Jumlah TPA/TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan/ Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara/Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan ke kas negara.

155 PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

1551 Piutang Jangka Panjang lainnya

15511 Piutang Jangka Panjang lainnya

155111 Piutang Jangka Panjang lainnya

Digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah.

156 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH JANGKA PANJANG

1561 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran

15611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran

156111 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran

Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Penjualan Angsuran

1562 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran
BLU

15621 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran
BLU

156211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran
BLU

Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk satker BLU atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Penjualan Angsuran
BLU

- 1563 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 15631 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 156311 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
- 1564 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
- 15641 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
- 156411 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk satker BLU atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
- 1569 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya
- 15691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya
- 156911 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya
- 16 ASET LAINNYA
- 161 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
- 1611 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- 16111 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- 161111 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan

- yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).
- 162 ASET TIDAK BERWUJUD
- 1621 Aset Tak Berwujud
Digunakan untuk mencatat aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 16211 Goodwill
- 162111 Goodwill
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Goodwill
- 16212 Hak Cipta
- 162121 Hak Cipta
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 16213 Royalti
- 162131 Royalti
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Royalti
- 16214 Paten
- 162141 Paten
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 16215 Software
- 162151 Software
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Software
- 16216 Lisensi

| | | |
|--------|--------------------------------------|---|
| 162161 | Lisensi | Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu |
| 16217 | Hasil Kajian/Penelitian | |
| 162171 | Hasil Kajian/Penelitian | Digunakan untuk mencatat aset tak berwujud lainnya berupa hasil kajian/penelitian. |
| 16219 | Aset Tak Berwujud Lainnya | |
| 162191 | Aset Tak Berwujud Lainnya | Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut |
| 1622 | Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum | |
| 16221 | Software Badan Layanan Umum | |
| 162211 | Software Badan Layanan Umum | Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Software pada Badan Layanan Umum |
| 16222 | Hak Cipta BLU | |
| 162221 | Hak Cipta BLU | Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada BLU |
| 16223 | Royalti BLU | |
| 162231 | Royalti BLU | Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Royalti pada BLU |
| 16224 | Paten BLU | |
| 162241 | Paten BLU | Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) pada satker BLU atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, |

- yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 16229 Aset Tak Berwujud Lainnya Badan Layanan Umum
 - 162291 Aset Tak Berwujud Lainnya Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Lainnya pada Badan Layanan Umum
 - 1623 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
 - 16231 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
 - 162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
 - 1624 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan BLU
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Badan Layanan Umum
 - 16241 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan BLU
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Badan Layanan Umum
 - 162411 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan BLU
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Badan Layanan Umum
 - 163 DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
 - 1631 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
 - 16311 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
 - 165 DANA KELOLAAN BLU
 - 1651 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
 - 16511 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
 - 165111 Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan
Digunakan untuk mencatat Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan
 - 166 ASET LAIN LAIN

- 1661 Aset Lain lain
Digunakan untuk mencatat Aset Lain4lain milik pemerintah sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- 16611 Aset Lain lain K/L
Digunakan untuk mencatat Aset Lain lain
- 166111 Aset Lain lain
Digunakan untuk mencatat Aset Lain lain
- 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
Digunakan untuk mencatat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
- 1662 Aset Lain lain Badan Layanan Umum
- 16621 Aset Lain lain Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain milik BLU sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- 166211 Aset Lain lain Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat Aset Lain lain Badan Layanan Umum
- 166212 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
Digunakan untuk mencatat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi BLU
- 166213 Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
Digunakan untuk mencatat Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
- 1663 Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP
- 16631 Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP
Digunakan untuk mencatat Aset Lain4lain sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas yang berasal dari Reklasifikasi UP/TUP.
- 1664 Aset Lainnya yang Belum Diregister
- 16641 Aset Lainnya yang Belum Diregister
- 166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Aset lainnya yang diterima.
- 169 AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA

- 1691 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli.
- 16911 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga
- 169111 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 16912 Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain K/L
- 169121 Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Lain lain mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169133 Akumulasi Penyusutan Aset dari BUMN yang belum ditetapkan statusnya
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset dari BUMN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169134 Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset yang berasal dari KKS mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.

- 169138 Akumulasi Penyusutan Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Idle yang diserahkan ke DJKN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 1692 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BLU
- 16921 Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain Badan Layanan Umum
- 169211 Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset lain-lain mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 169212 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset tetap tidak digunakan dalam operasi pemerintah mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 1693 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
- 16931 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
- 169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi tak berwujud mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi hak cipta yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.
- 169313 Akumulasi Amortisasi Royalti
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi royalti yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.

- 169314 Akumulasi Amortisasi Paten
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi paten yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.
- 169315 Akumulasi Amortisasi Software
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi software mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi lisensi mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi aset tak berwujud lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 1694 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya BLU
- 16941 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum
- 169411 Akumulasi Amortisasi Software Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi software mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 169412 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi hak cipta yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.
- 169413 Akumulasi Amortisasi Royalti BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi royalti yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.

- 169414 Akumulasi Amortisasi Paten BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi paten yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.
- 169415 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi aset tak berwujud lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 2 KEWAJIBAN
Digunakan untuk mencatat kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
- 211 UTANG PERHITUNGAN Fihak KETIGA
- 2111 Utang Perhitungan Fihak Ketiga
- 21111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) I
Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pungutan Iuran Askes, Bulog, Taspen/Asabri dan Taperum serta badan lainnya. Termasuk akun ini antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen, Bulog, Bapertarum, dan Askes.
- 211111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
- 211118 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
Digunakan untuk mencatat Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % AsKes Bidan/Dokter PTT
- 211119 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lain lain
Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lain-lain

- 21112 Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya
- 212 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
- 2121 Utang kepada Pihak Ketiga
- 21211 Belanja pemerintah pusat yang masih harus dibayar
- 212111 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya belanja pegawai oleh pemerintah yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat utang karena belanja barang yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 212113 Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat utang karena belanja modal yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 212114 Belanja Hibah Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat utang karena belanja hibah yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 212115 Belanja Bantuan Sosial Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat Belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar
- 212116 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Yang Masih Harus Dibayar
- 212119 Belanja Lain Lain Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain yang masih harus dibayar
- 21212 Utang kepada Pihak Ketiga BLU
- 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU
Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh BLU yang dapat berasal dari antara lain

- kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 21219 Utang kepada Pihak Ketiga lainnya
- 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja diluar kategori belanja pemerintah pusat dan BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 212192 Dana Pihak Ketiga
Digunakan untuk mencatat saldo kas di rekening Bendahara Penerimaan yang akan disetorkan kepada pihak ketiga.
- 219 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di Muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan dan utang jangka pendek lainnya.
- 2192 Pendapatan Diterima di Muka
- 21921 Pendapatan Diterima di Muka
Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang telah diterima dan disetor ke rekening kas umum negara namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak
- 219211 Pendapatan Sewa Diterima di Muka
Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Sewa yang telah Diterima di Muka
- 2195 Uang Muka dari KPPN
- 21951 Uang Muka dari KPPN
- 219511 Uang Muka dari KPPN
Digunakan untuk mencatat Uang Muka yang berasal dari KPPN (uang persediaan dan tambahan uang persediaan) yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca
- 2196 Pendapatan Yang Ditangguhkan
- 21961 Pendapatan Yang Ditangguhkan

- 219611 Pendapatan Yang Ditangguhkan
Digunakan untuk mencatat pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke kas negara
- 21967 Hibah Langsung yang Belum Disahkan
- 219671 Hibah Langsung yang Belum Disahkan
Digunakan untuk mencatat Hibah Langsung yang Belum Disahkan.
- 2197 Utang Kepada KUN
- 21971 Utang Kepada KUN
- 219711 Utang Kepada KUN
Digunakan untuk mencatat utang4utang kepada Kas Umum Negara
- 21972 Utang Kepada kas BLU
- 219721 Utang Kepada kas BLU
Digunakan untuk mencatat Utang kepada Kas BLU.
- 2199 Utang Jangka Pendek Lainnya
- 21991 Utang Jangka Pendek lainnya
- 219912 Dana yang akan diserahkan kepada BLU Bidang Pendidikan
Digunakan untuk mencatat Dana yang akan diserahkan kepada BLU di Bidang Pendidikan
- 219913 Utang Jangka Pendek Lain lain
Digunakan untuk mencatat utang-utang Jangka Pendek Lain lain
- 21996 Utang Bendahara
- 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara.
- 219962 Utang perwalian Bendahara yang belum disampaikan kepada yang berhak
Utang yang berasal dari dana titipan pihak ketiga yang berada dalam catatan bendahara pengeluaran.
- 219963 Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor
Utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara penerimaan sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara.

| | | |
|--------|----------------------------|---|
| 3 | EKUITAS | Digunakan untuk mencatat pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. |
| 31 | EKUITAS | |
| 313 | TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | |
| 3131 | Due to Due from | |
| 31311 | Ditagihkan ke Entitas Lain | |
| 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | Penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksi tersebut akan diseimbangkan dengan ditagihkan ke entitas lainnya. |
| 31312 | Diterima dari Entitas Lain | |
| 313121 | Diterima dari Entitas Lain | Penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksinya akan diseimbangkan dengan diterima dari entitas lainnya |
| 3132 | Transfer | |
| 31321 | Transfer Keluar | |
| 313211 | Transfer Keluar | Digunakan untuk mencatat Transfer Keluar |
| 31322 | Transfer Masuk | |
| 313221 | Transfer Masuk | Digunakan untuk mencatat Transfer Keluar |
| 39 | EKUITAS | |
| 391 | EKUITAS | |
| 3911 | Ekuitas | |
| 39111 | Ekuitas | |
| 391111 | Ekuitas | Digunakan untuk mencatat Surplus/Defisit Laporan Operasional. |
| 391112 | Surplus/Defisit LO | Digunakan untuk mencatat Surplus/Defisit LO. |
| 391113 | Koreksi Nilai Persediaan | Digunakan untuk mencatat koreksi nilai persediaan. |
| 391114 | Revaluasi Aset Tetap | Digunakan untuk mencatat revaluasi aset tetap. |

- 391115 Dana yang Disediakan Untuk Pengalihan Aset
Digunakan untuk mencatat ekuitas dana yang disediakan untuk pengalihan aset.
- 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Digunakan untuk mencatat Koreksi Nilai Aset Tetap yang dilakukan selain karena revaluasi.
- 4 PENDAPATAN NEGARA
- 42 PENDAPATAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
- 423 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA
- 4231 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta
Pendapatan dari Penjualan
- 42311 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
- 423115 Pendapatan Penjualan Obat;obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
Penjualan vaksin dan antigen hewan ternak pada Kementerian Pertanian (BA 018) termasuk di dalamnya Penjualan radioisotop pada BATAN (BA 042.03), dan pada Kementerian Negara/Lembaga lainnya.
- 423119 Pendapatan Penjualan Lainnya
Penjualan yang tidak termasuk ke dalam kelompok pendapatan atas penjualan; penjualan di atas.
- 42312 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
- 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah dinas, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli
Digunakan untuk mencatat pendapatan kompensasi sewa beli, termasuk pendapatan dari kompensasi rumah dinas melalui kontrak sewa beli.

- 423125 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Tanah, Gedung dan Bangunan, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423126 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Peralatan dan Mesin, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423127 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar jalan, irigasi dan jaringan, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 42314 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
- 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian, termasuk pendapatan sewa rumah dinas.
- 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423143 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423144 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423145 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin, merupakan pendapatan umum yang bisa ada di semua Kementerian Negara/Lembaga.

- 423146 Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423147 Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)
Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 423148 Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)
Digunakan untuk mencatat pendapatan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 42315 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
- 423151 Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengelolaan barang, berupa pemanfaatan, pemindahtanganan, serta penjualan BMN pada Pengelola Barang.
- 4232 Pendapatan Jasa
- 42321 Pendapatan Jasa I
- 423211 Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan maupun kementerian lainnya.

- 42322 Pendapatan Jasa II
- 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah.
- 423229 Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
Merupakan pendapatan yang berasal dari Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang diselenggarakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Masuk pendapatan Kementerian Kesehatan (024).
- 42323 Pendapatan Jasa Luar Negeri
- 423231 Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
Pendapatan dari surat perjalanan RI dan masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
- 42324 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
- 42329 Pendapatan Jasa Lainnya
- 423291 Pendapatan Jasa Lainnya
Pendapatan jasa yang tidak termasuk kelompok pendapatan jasa I dan II.
- 4235 Pendapatan Pendidikan
- 42351 Pendapatan Pendidikan
- 423511 Pendapatan Uang Pendidikan
Uang pendidikan berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lain.
- 4239 Pendapatan Lain lain
- 42391 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I
- 423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
Digunakan untuk mencatat pengembalian belanja 89ias89a89 TAYL.
- 42392 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi/ Tuntutan Perbendaharaan
- 423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan Piutang Non Bendahara. Piutang non bendahara terjadi karena kelalaian pegawai yang menyebabkan kerugian 89ias89a di luar pengurusan keuangan 89ias89a.

- 423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan Tuntutan Perbendaharaan kepada Bendahara. Tuntutan Perbendaharaan terjadi karena ada kerugian 89ias89a yang disebabkan kesalahan atau kelalaian bendahara dalam rangka pengurusan Keuangan Negara. Merupakan pendapatan umum yang 89ias ada di semua kementerian.
- 42394 Pendapatan dari Selisih Kurs
- 423941 Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN
Digunakan untuk mencatat untung selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
- 423942 Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI
Digunakan untuk mencatat realisasi kentungan selisih kurs uang persediaan pada satker perwakilan RI di Luar Negeri dan Atase Teknis.
- 423943 Pendapatan dari Selisih Kurs yang terealisasi
Selisih transaksi belanja dalam valuta asing antara antara resume tagihan dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda.
- 42395 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II
- 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Modal TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 423954 Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu

- Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL.
- 423955 Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Subsidi TAYL.
- 423956 Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Hibah TAYL.
- 423957 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Bantuan Sosial TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 423958 Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Lain-lain TAYL.
- 42399 Pendapatan Lain-lain
- 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
PNBP yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 423997 Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi.
- 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain
Merupakan pendapatan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 424 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
- 4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum
- 42411 Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU bagi BLU Penyedia Barang dan Jasa dari hasil pelayanan jasa yang merupakan core bussinessHnya sebagaimana terlampir.
- 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang

berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan (BA 024) maupun kementerian lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan core business rumah sakit/instansi kesehatan walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti rumah sakit yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan core business layanan pendidikan, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti perguruan tinggi yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.

424118 Pendapatan Penyediaan Barang

Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan penyediaan barang untuk kepentingan masyarakat atau instansi pengguna lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan core business layanan penyediaan barang, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan penyediaan barang yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

Pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan di luar penyediaan barang dan jasa lainnya selain dari yang telah dijelaskan pada akun 424111, 424112, 424113, 424114, 424115, 424116, 424117, dan 424118. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan core business layanan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa penyediaan

- barang dan jasa lainnya yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
- 424136 Pendapatan Investasi
Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan investasi atas bidang;bidang tertentu.
- 424139 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana khusus lainnya.
- 4242 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang diterima oleh Satker BLU.
- 42421 Pendapatan Hibah Terikat
- 424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri;Perorangan
Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.
- 424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri;Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Lembaga / Badan Usaha.
- 424213 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri;Pemda
Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Pemda.
- 424214 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri;Perorangan
Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
- 424215 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri;Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
- 424216 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri;Negara
Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara.
- 424219 Pendapatan Hibah Terikat Lainnya
Pendapatan Hibah terikat Dalam/Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.
- 42422 Pendapatan Hibah Tidak Terikat
- 424221 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri;Perorangan
Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.

- 424222 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri;Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari lembaga/Badan Usaha.
- 424223 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri;Pemda
Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari pemda.
- 424224 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri;Perorangan
Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
- 424225 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri;Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
- 424226 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri;Negara
Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara lain.
- 424229 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Lainnya
Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.
- 4243 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dan sewa menyewa bagi semua BLU selain Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu.
- 42431 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
- 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain perorangan.
- 424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain Lembaga/Badan Usaha.
- 424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain :Pemda.

- 4249 Pendapatan BLU Lainnya
Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hasil kerja sama BLU, dan pendapatan hibah BLU, dengan rincian sesuai dengan kode akun 6 digitnya
- 42491 Pendapatan BLU Lainnya
- 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
Kode akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum.
- 424912 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari penempatan endowment fund dan dana cadangan pendidikan oleh BLU bidang pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan.
- 5 BEBAN NEGARA
- 51 BEBAN PEGAWAI
- 511 BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN
- 5111 Beban Gaji dan Tunjangan PNS
- 51111 Beban Gaji PNS
- 511111 Beban Gaji Pokok PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
- 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
- 51112 Beban Tunjangan tunjangan I PNS
- 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri PNS.
- 511122 Beban Tunj. Anak PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anak PNS.
- 511123 Beban Tunj. Struktural PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural PNS.

- 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan fungsional PNS.
- 511125 Beban Tunj. PPh PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh PNS.
- 511126 Beban Tunj. Beras PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
- 511127 Beban Tunj. Kemahalan PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kemahalan PNS.
- 511128 Beban Tunjangan Lauk Pauk PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
- 511129 Beban Uang Makan PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang makan PNS.
- 51113 Beban Tunjangan tunjangan II PNS
- 511131 Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan perbaikan penghasilan PNS.
- 511132 Beban Tunj. Cacat PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan cacat PNS.
- 511133 Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus peralihan PNS.
- 511134 Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28V 05V1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15V11V1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02V 12V1987 No. SE

- 83V/A.198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka).
- 511135 Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
- 51113 Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
- 511131 Beban Gaji Pejabat Negara
- 5111311 Beban Gaji Pokok Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok pejabat Negara.
- 5111319 Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok pejabat negara.
- 511132 Beban Tunjangan-Tunjangan I Pejabat Negara
- 5111321 Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri pejabat negara.
- 5111322 Beban Tunj. Anak Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anak pejabat negara.
- 5111323 Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural pejabat negara.
- 5111324 Beban Tunj. PPh Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh pejabat negara.
- 5111325 Beban Tunj. Beras Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras pejabat negara.
- 511133 Beban Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
- 5111331 Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan komunikasi intensif pejabat negara.

- 511332 Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang
 kehormatan pejabat negara.
- 511333 Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan
 paket harian pejabat negara.
- 511337 Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat
 Negara
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lain-
 lain termasuk uang duka pejabat negara.
- 511339 Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas tunjangan
 penghasilan untuk Pejabat Negara (TPPN).
- 5114 Beban Gaji Dokter PTT
- 51141 Beban Gaji Dokter PTT
- 511411 Beban Gaji Dokter dan Bidan PTT
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji Dokter dan
 Bidan PTT.
- 511412 Beban Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan pajak
 PPh Dokter dan Bidan PTT.
- 511413 Beban Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan
 Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT.
- 511414 Beban Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Dokter
 dan Bidan PTT termasuk tunjangan uang duka wafat (UDW).
- 5115 Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
- 51151 Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
- 511511 Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok
 Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
- 511512 Beban Tunjangan Pegawai Non PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan
 Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.

- 511513 Beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
- 511519 Beban Tunjangan Lainnya Non PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lainnya Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
- 512 BEBAN HONORARIUM/LEMBUR/TUNJ. KHUSUS & BEBAN PEGAWAI TRANSITO
- 5121 Beban Honorarium
- 51211 Beban Honorarium
- 512111 Beban Uang Honor Tetap
Digunakan untuk pengakuan beban honor tetap, termasuk honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan.
- 5122 Beban Lembur
- 51221 Beban Lembur
- 512211 Beban Uang Lembur
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
- 5124 Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito
- 51241 Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito
- 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus/kegiatan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 512412 Beban Pegawai Transito
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor/kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
- 512413 Beban Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan Sebagai Dampak Reformasi Birokrasi
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas uang kompensasi kepada PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia

- pensium yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 513 BEBAN KONTRIBUSI SOSIAL
- 5131 Beban Pensiun dan Uang Tunggu
- 51311 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
- 513111 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun PNS Pusat dan uang tunggu bagi PNS yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
- 513112 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban pensiun PNS Daerah dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
- 513113 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan
Digunakan untuk pembayaran Beban pensiun PNS TNI/Kemhan dan uang tunggu bagi PNS TNI/Kemhan yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
- 513114 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun PNS Polri dan uang tunggu bagi PNS Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
- 52 BEBAN BARANG DAN BARANG
- 521 BEBAN BARANG
- 5211 Beban Barang Operasional
- 52111 Beban Barang Operasional
- 521111 Beban Keperluan Perkantoran
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain :
- a. Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/ berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu.
 - b. Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning

- service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB.
- c. Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.
- 521112 Beban Pengadaan Bahan Makanan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan bahan makanan.
- 521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan bahan makanan/ minuman/ obatVobatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.
- 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.
- 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja
Digunakan untuk mencatat mencatat pengakuan beban atas honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBPN (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAKVBMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honoronya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.

- 521119 Beban Barang Operasional Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang operasional yang tidak dapat ditampung dalam akun dalam kelompok Akun Beban Barang Operasional dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.
- 5212 Beban Barang Non Operasional
- 52121 Beban Barang Non Operasional
- 521211 Beban Bahan
Pengeluaran yang digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti :
- a. Konsumsi/bahan makanan
 - b. Dokumentasi
 - c. Spanduk
 - d. Biaya fotokopi
- yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.
- 521212 Beban Barang Transito
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban barang pada satuan kerja satuan kerja yang baru dibentuk /UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi atau satker yang tidak melekat pada Bagian Anggaran/ Kementerian Negara/ Lembaga serta bisa digunakan oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.
- 521213 Beban Honor Output Kegiatan
Digunakan untuk mencatat mencatat pengakuan beban atas honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak

- menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
- 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun lainnya dalam kelompok Akun Beban Barang Non Operasional. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Beban Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.
- 522 BEBAN JASA
- 5221 Beban Jasa
- 52211 Beban Langganan Daya dan Jasa
- 522111 Beban Langganan Listrik
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan listrik, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.
- 522112 Beban Langganan Telepon
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan telepon, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.
- 522113 Beban Langganan Air
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan air, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.
- 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan daya dan jasa lainnya, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.

- 52212 Beban Jasa Pos dan Giro
- 522121 Beban Jasa Pos dan Giro
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.
- 52213 Beban Jasa Konsultan
- 522131 Beban Jasa Konsultan
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
- 52214 Beban Sewa
- 522141 Beban Sewa
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).
- 52215 Beban Jasa Profesi
- 522151 Beban Jasa Profesi
Beban untuk mencatat pengakuan beban honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.
- 52219 Beban Jasa Lainnya
- 522191 Beban Jasa Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang

- 523 BEBAN PEMELIHARAAN
- 5231 Beban Pemeliharaan
- 52311 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas:
- a. Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2% dan
 - b. Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).
- 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementerian/ TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.
- 52312 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- 523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.

- 52313 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 523131 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan.
- 523132 Beban Pemeliharaan Irigasi
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.
- 52319 Beban Pemeliharaan Lainnya
- 523199 Beban Pemeliharaan Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar alam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat.
- 524 BEBAN PERJALANAN DINAS
- 5241 Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 52411 Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan

pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
- b. Pengumandahan (detasering)
- c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan
- d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan
- e. Memperoleh pengobatan
- f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
- g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
- h. Mengikuti diklat
- i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas
- j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

524112 Beban Perjalanan Dinas Tetap

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
- b. Pengumandahan (Detasering)
- c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan

- d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan
- e. Memperoleh pengobatan
- f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
- g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
- h. Mengikuti diklat
- i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.!

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi:

- a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota
- b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard)
- c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja
- d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/ atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan

di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

- a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota
- b) Biaya paket meeting (fullboard)
- c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota
- d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

5242 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri

52421 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri

524211 Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.

524212 Beban Perjalanan Dinas Tetap Luar Negeri

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di/ ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase.

524219 Beban Perjalanan Dinas Lainnya Luar Negeri

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos Beban perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.

- 525 BEBAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
- 5251 Beban Barang BLU
- 52511 Beban Barang dan Jasa BLU
- 525111 Beban Gaji dan Tunjangan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji dan tunjangan pegawai BLU.
- 525112 Beban Barang
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
- 525113 Beban Jasa
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
- 525114 Beban Pemeliharaan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemeliharaan BMN BLU.
- 525115 Beban Perjalanan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas pegawai BLU.
- 525116 Beban atas Pengelolaan Endowment Fund
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya biaya yang digunakan untuk pengelolaan Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan oleh BLU Bidang Pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan sesuai maksud pembentukannya.
- 525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan.
- 526 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA
- 5261 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 52611 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526111 Beban Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan barang berupa tanah oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.

- 526112 Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- 526113 Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan Barang berupa Gedung dan Bangunan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- 526114 Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk pengadaan Barang berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- 526115 Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan Barang Fisik Lainnya oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, termasuk Beban barang fisik lain Tugas Pembantuan.
- 5262 Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
- 52621 Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
- 526211 Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Dekonsentrasi. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak

- bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
- 526212 Beban Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
- 5263 Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 52631 Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526311 Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang tidak dapat dialokasikan pada kelompok akun 5261 dan 5262.
- 57 BEBAN BANTUAN SOSIAL
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
- 571 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL
- 5711 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
- 57111 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
- 571111 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang

- mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 571112 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 572 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL
- 5721 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
- 57211 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
- 572111 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
- 572112 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
- 574 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL

- 5741 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
- 57411 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
- 574111 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:
- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
1. bantuan langsung
 2. penyediaan aksesibilitas dan/atau
 3. penguatan kelembagaan.
- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- 574112 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:
- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
1. bantuan langsung
 2. penyediaan aksesibilitas dan/atau
 3. penguatan kelembagaan.
- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- 59 BEBAN PENYESUAIAN

| | |
|--------|--|
| 591 | BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP |
| 5911 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin |
| 59111 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin |
| 591111 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Transaksi ini terjadi di satker yang non BLU |
| 59112 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin BLU |
| 591121 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin BLU Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Transaksi ini terjadi di satker BLU |
| 5912 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan |
| 59121 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan |
| 591211 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan. Transaksi ini terjadi di satker yang non BLU |
| 59122 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan BLU |
| 591221 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan BLU Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan. Transaksi ini terjadi di satker BLU |
| 5913 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| 59131 | Beban Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi |
| 591311 | Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jalan dan Jembatan. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU |
| 591312 | Beban Penyusutan Irigasi Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Irigasi. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU |
| 591313 | Beban Penyusutan Jaringan Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jaringan. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU |
| 59132 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU |
| 591321 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan. Transaksi ini terjadi di satker BLU |
| 5914 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya |

- 59141 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
- 591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap dalam kelompok aset lainnya. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU
- 59142 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU
- 591421 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU
Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap dalam kelompok aset lainnya. Transaksi ini terjadi di satker BLU
- 592 BEBAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA/AMORTISASI ASET LAINNYA
- 5921 Beban Amortisasi Aset Lainnya
- 59211 Beban Amortisasi Aset Lainnya
- 592111 Beban Amortisasi Goodwill
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Goodwill pada satker Non BLU
- 592112 Beban Amortisasi Hak Cipta
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Hak Cipta pada satker Non BLU
- 592113 Beban Amortisasi Royalti
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Royalti pada satker Non BLU
- 592114 Beban Amortisasi Paten
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa paten pada satker Non BLU
- 592115 Beban Amortisasi Software
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa software pada satker Non BLU
- 592116 Beban Amortisasi Lisensi
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa lisensi pada satker Non BLU
- 592117 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset dalam kelompok aset tak berwujud lainnya pada satker Non BLU
- 59212 Beban Amortisasi Aset Lainnya Badan Layanan Umum
- 592121 Beban Amortisasi Software Badan Layanan Umum
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Software pada satker BLU

- 592122 Beban Amortisasi Hak Cipta BLU
 Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak
 berwujud berupa Hak Cipta pada satker BLU
- 592123 Beban Amortisasi Royalti BLU
 Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak
 berwujud berupa Royalti pada satker BLU
- 592124 Beban Amortisasi Paten BLU
 Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak
 berwujud berupa paten pada satker BLU
- 592125 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya Badan Layanan
 Umum
 Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset dalam kelompok
 aset tak berwujud lainnya pada satker BLU
- 5922 Beban Penyusutan Aset Lainnya
- 59221 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 592211 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Kemitraan dengan
 Pihak Ketiga.
- 59222 Beban Penyusutan Aset Lain lain K/L
- 592221 Beban Penyusutan Aset Lain lain
 Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Lain lain.
- 592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak
 Digunakan dalam Operasional Pemerintah
 Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Tetap yang
 Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.
- 59224 Beban Penyusutan Aset Lain lain BLU
- 592241 Beban Penyusutan Aset Lain lain BLU
 Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Lain lain BLU
- 592242 Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam
 Operasi Pemerintahan BLU
 Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Tetap yang
 Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU
- 593 BEBAN PERSEDIAAN
- 5931 Beban Persediaan
- 59311 Beban Persediaan Bahan untuk Operasional

- 593111 Beban Persediaan Konsumsi
 Penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan
 konsumsi karena sifat dan jenis barang
- 593112 Beban Persediaan amunisi
 penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan
 amunisi karena sifat dan jenis barang
- 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
 penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai bahan
 pemeliharaan karena sifat dan jenis barang
- 593114 Beban Persediaan suku cadang
 penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan
 suku cadang karena sifat dan jenis barang
- 59312 Beban Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
- 593121 Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges
 penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan
 pita cukai, materai dan leges ke pihak lainnya
- 593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau
 diserahkan kepada Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan tanah bangunan ke
 pihak lainnya
- 593123 Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau
 diserahkan kepada Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan hewan dan
 tanaman ke pihak lainnya
- 593124 Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau
 diserahkan kepada Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan peralatan dan
 mesin ke pihak lainnya
- 593125 Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk
 diserahkan kepada Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan jalan, irigasi dan
 jaringan ke pihak lainnya
- 593126 Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada
 Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan aset tetap lainnya
 ke pihak lainnya

- 593127 Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
Penjualan atau penyerahan aset persediaan aset lain-lain ke pihak lainnya
- 593128 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
Penjualan atau penyerahan aset persediaan lainnya ke pihak lainnya
- 59313 Beban Persediaan untuk proses produksi
- 593131 Beban Persediaan bahan baku
Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan bahan baku ke pihak lainnya
- 593132 Beban Persediaan barang dalam proses
Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan barang dalam proses ke pihak lainnya
- 59314 Beban Persediaan Bahan Lainnya
- 593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga jaga
Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan untuk tujuan strategis ke pihak lainnya
- 593142 Beban Persediaan barang hasil sitaan
Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan barang hasil sitaan ke pihak lainnya
- 593149 Beban persediaan lainnya
Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan ke pihak lainnya
- 5932 Beban Persediaan Badan Layanan Umum
- 59321 Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa
- 593211 Beban Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pelayanan Kesehatan ke pihak lainnya
- 593212 Beban Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pelayanan Pendidikan ke pihak lainnya
- 594 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
- 5942 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak
- 59421 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak

- 594211 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang PNBP
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PNBP
- 594212 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lainnya
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang piutang lainnya
- 5943 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Penjualan Angsuran
- 59431 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Penjualan Angsuran
- 594311 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Penjualan Angsuran
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
- 5944 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 59441 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 594411 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 5946 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU
- 59461 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Penyedia
Barang dan Jasa
- 594611 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU
Pelayanan Kesehatan
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pelayanan
Kesehatan
- 594612 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU
Pelayanan Pendidikan
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pelayanan
Pendidikan
- 594613 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU
Penunjang Konstruksi
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Penunjang
Konstruksi

- 594614 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU
 Penyedia Jasa Telekomunikasi
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU
 Penyedia Jasa Telekomunikasi
- 594619 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Penyedia
 Barang dan Jasa Lainnya
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Penyedia
 Barang dan Jasa Lainnya
- 59464 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Operasional
 Lainnya BLU
- 594641 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan
 Operasional Lainnya BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Kegiatan
 Operasional Lainnya BLU
- 5947 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Non
 Operasional BLU
- 59471 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa BLU
- 594711 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Tanah
 BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Tanah
 BLU
- 594712 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Gedung
 BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Gedung
 BLU
- 594713 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa
 Ruangan BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Ruangan
 BLU
- 594714 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa
 Peralatan dan Mesin BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Peralatan
 dan Mesin BLU
- 594719 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Lainnya
 BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Lainnya
 BLU

- 59472 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset BLU
- 594721 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- 594722 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
- 59479 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Non Operasional Lainnya BLU
- 594791 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
- 595 BEBAN REKLASIFIKASI ASET
- 5951 Beban Aset Ekstrakomtabel
- 59511 Beban Aset Ekstrakomtabel
- 595111 Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable tanah. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal tanah yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable peralatan dan mesin. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal peralatan dan mesin yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable gedung dan bangunan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal gedung dan bangunan yang seharusnya tidak dikapitalisasi.

- 595114 Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomptabel jalan, irigasi, dan jaringan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal jalan, irigasi, dan jaringan yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 595115 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomptabel aset tetap lainnya. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal lainnya yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 595116 Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomptabel konstruksi dalam pengerjaan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal yang menghasilkan KDP yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 595117 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomptabel aset tak berwujud. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal lainnya yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 596 KERUGIAN PELEPASAN ASET DAN KERUGIAN BELUM TEREALISASI
- 5961 Kerugian Pelepasan Aset
- 59611 Kerugian Pelepasan Aset
- 596111 Kerugian Pelepasan Aset
Transaksi akrual atas kerugian pelepasan aset dari nilai bukunya.
- 596112 Tuntutan Ganti Rugi
Transaksi atas kerugian Tuntutan Ganti Rugi.
- 5962 Kerugian Belum Terealisasi
- 59621 Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
- 596211 Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
Penyesuaian Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
- 597 PEMBULATAN
- 5971 Pembulatan
- 59711 Pembulatan

597111 Pembulatan
Akun penyeimbang pada proses transfer rekening kas
negara valas ke dalam rekening rupiah.

| | |
|-------------|----------|
| FORMULIR IX | |
| ILUSTRASI | TELAAH |
| LAPORAN | KEUANGAN |

| KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Periode : | | | |
| Kode Satker | : | | |
| Nama Satker | : | | |
| Nama Eselon 1 | : | | |
| Nama Kementerian | : | | |
| Objek Penelaahan | | Kondisi LK | Seharusnya |
| <i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan.</i> | | | |
| <i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i> | | | |
| NERACA PERCOBAAN | | | |
| Pengecekan Akun-akun: | | Ada | Tidak |
| 1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) | | | Tidak |
| 2. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah) | | | Tidak |
| 3. Adakah akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. | | | Tidak |
| <i>KHUSUS BUKAN Satker BLU</i> | | Ada | Tidak |
| 4a. Adakah akun 424xxx | | | Tidak |
| 4b. Adakah akun 525xxx | | | Tidak |
| 4c. Adakah akun 537xxx | | | Tidak |
| Pengecekan Saldo Tidak Normal | | Ada | Tidak |
| 5. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya | | | Tidak |
| Pengecekan Saldo Debet/Kredit | | Ya | tidak |
| 6. Apakah Akun Aset (1xxxx) bersaldo (D) (<i>kec.Penyisihan dan Akumulasi</i>) | | | Ya |
| Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| Apakah Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| Apakah Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) (<i>kec.Pengembalian Pendapatan</i>) | | | Ya |
| Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxxx) bersaldo (D) | | | Ya |
| Apakah Akun Belanja/beban (5xxxxx) bersaldo (D) (<i>kecuali Beban Penyisihan Piutang</i>) | | | Ya |
| Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| <i>KHUSUS BUKAN Satker BLU</i> | | Ya | Tidak |
| 7a. Apakah Akun 313111 (ditagihkan ke EL) = Total Belanja Netto di LRA Face | | | Ya |
| 8a. Apakah Akun 313121 (diterima dari EL) = Total Pendapatan Netto di LRA Face | | | Ya |
| <i>KHUSUS Satker BLU:</i> | | Ya | Tidak |
| 7b. Apakah Akun 313111 (ditagihkan ke EL) = Total Belanja Netto di LRA Face dikurangi (Netto 525xxx + Netto 537xxx) | | | Ya |
| 8b. Apakah Akun 313121 (diterima dari EL) = Total Pendapatan Netto di LRA Face dikurangi Netto 424xxx | | | Ya |
| Pengecekan akun tertentu | | Ya | Tidak |
| 9. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) | | | Ya/Tidak |
| Apakah akun 491429 berasal dari Jurnal di Aplikasi SAIBA | | | Tidak |
| Apakah akun 491429 berasal dari Jurnal kiriman dari SIMAK | | | Ya |
| <i>Akun 491429 sangat jarang terjadi, apabila ada, konfirmasi kebenarannya, uraikan dalam lampiran.</i> | | | |

| LAPORAN OPERASIONAL | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---------|---------|------------|
| Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada | | | | | | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1. | Adakah pendapatan Perpajakan | | | | | | | Tidak |
| 2. | Adakah pendapatan Hibah | | | | | | | Tidak |
| 3. | Adakah beban bunga | | | | | | | Tidak |
| 4. | Adakah beban subsidi | | | | | | | Tidak |
| 5. | Adakah beban hibah | | | | | | | Tidak |
| 6. | Adakah beban transfer | | | | | | | Tidak |
| 7. | Adakah beban lain-lain | | | | | | | Tidak |
| Pengecekan saldo Normal | | | | | | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 8. | Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya | | | | | | | Tidak |
| <i>Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyesihan piutang dapat bernilai negatif</i> | | | | | | | | |
| 9. | Kegiatan Operasional | | | | | Positif | Negatif | Seharusnya |
| - | Pendapatan | | | | | | | Positif |
| - | Beban Pegawai | | | | | | | Positif |
| - | Beban Persediaan | | | | | | | Positif |
| - | Beban Barang dan Jasa | | | | | | | Positif |
| - | Beban Pemeliharaan | | | | | | | Positif |
| - | Beban Perjalanan Dinas | | | | | | | Positif |
| - | Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat | | | | | | | Positif |
| - | Beban Penyusutan dan Amortisasi | | | | | | | Positif |
| - | Beban Penyesihan Piutang Tak Tertagih | | | | | | | Pos/Neg |
| 10. | Kegiatan Non Operasional | | | | | Positif | Negatif | Seharusnya |
| - | Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | | | | | | | Positif |
| - | Beban Pelepasan Aset non Lancar | | | | | | | Positif |
| - | Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang | | | | | | | Positif |
| - | Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang | | | | | | | Positif |
| - | Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya | | | | | | | Positif |
| - | Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya | | | | | | | Positif |
| Pengecekan antar Laporan | | | | | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 11. | Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE | | | | | | | Sama |
| 12. | Beban Persediaan di LO = Beban Persediaan di Persediaan/SIMAK-BMN | | | | | | | Sama |

| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | | | |
|--|--|------|-------|------------|
| Pengecekan antar Laporan | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. | Saldo Ekuitas Awal di LPE = Jumlah Ekuitas di Neraca 2014 <i>Audited</i> | | | Sama |
| 2. | Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca | | | Sama |
| Pengecekan akun tertentu | | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 3. | Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ? | | | Tidak |
| <i>Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK</i> | | | | |
| NERACA | | | | |
| Pengecekan Persamaan Akuntansi | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. | Aset = Kewajiban + Ekuitas | | | Sama |
| 2. | Saldo Awal = Angka Audited Laporan 2014 | | | Sama |
| 3. | Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN | | | Sama |
| Pengecekan Akun tertentu | | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 4. | Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan" ? | | | Tidak |
| Pengecekan Keterkaitan Transaksi | | Ada | Tidak | Seharusnya |
| <i>Jika jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i> | | | | |
| 5. | Ada Akun Piutang maka akan ada akun: | | | Ada/Tidak |
| - | Penyisihan Piutang | | | Ada/Tidak |
| - | Beban Penyisihan Piutang | | | Ada/Tidak |
| 6. | Ada persediaan maka akan ada akun: | | | Ada/Tidak |
| - | Beban Persediaan | | | Ada/Tidak |
| 7. | Ada Aset Tetap/Aset Lainnya maka akan ada akun: | | | Ada/Tidak |
| - | Akumulasi AT/AL | | | Ada/Tidak |
| - | Beban Penyusutan/Amortisasi | | | Ada/Tidak |
| TELAAH KESESUAIAN DENGAN L-BMN (APLIKASI PERSEDIAAN/SIMAK) | | | | |
| Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK) untuk: | | | | |
| | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. | Persediaan | | | Sama |
| 2. | Aset Tetap | | | Sama |
| 3. | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | | Sama |
| 4. | Aset Lainnya | | | Sama |
| 5. | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | | Sama |
| Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk: | | | | |
| | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. | Beban Penyusutan 591xxx (SAIBA) dengan kolom 7 (SIMAK) | | | Sama |
| 2. | Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan kolom 9 (SIMAK) | | | Sama |
| Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Jurnal Persediaan PerAkun (Jurnal Kiriman Persediaan ke SIMAK bulanan) dari Aplikasi Persediaan untuk: | | | | |
| | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. | Beban Persediaan 593xxx (SAIBA) dengan 593xxx (Persediaan) | | | Sama |
| 2. | Penyesuaian Nilai Persediaan 391117 (SAIBA) dengan 391117 (Persediaan) | | | Sama |

| LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA (LRA/B) | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|-------------|-------------------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | Ada | Tidak | |
| | | | | | | Seharusnya | |
| 1 | Adakah saldo negatif di LRAB | | | | | | Tidak |
| 2 | Ada uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " | | | | | | Tidak |
| | | | | | | | |
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Sama | Tidak | |
| | | | | | | Seharusnya | |
| 1. | Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan) | | | | | | Sama |
| | | | | | | | |
| | | | | | Ya | Tidak | |
| | | | | | | Seharusnya | |
| 2. | Apakan semua akun di LO dan LPE telah dijelaskan? | | | | | | Ya |
| | | | | | | | |
| | Mengetahui | | |, 20.... | | | |
| | Kepala Satker, | | | Penelaah, | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | NIP | | | NIP | | | |

FORMULIR II
 JURNAL AKRUAL LRA DAN JURNAL
 AKRUAL NERACA

JURNAL AKRUAL REALISASI

| D/K | AKUN | URAIAN |
|-----|--------|---|
| D | 411121 | Pendapatan PPh Pasal 21 |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411122 | Pendapatan PPh Pasal 22 |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411123 | Pendapatan PPh Pasal 22 Impor |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411124 | Pendapatan PPh Pasal 23 |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411125 | Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411126 | Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411127 | Pendapatan PPh Pasal 26 |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411128 | Pendapatan PPh Final |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411141 | Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411142 | Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411143 | Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411144 | Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411145 | Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411146 | Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |

| | | |
|---|--------|--|
| D | 411147 | Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411148 | Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411149 | Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411211 | Pendapatan PPN Dalam Negeri |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411212 | Pendapatan PPN Impor |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 411219 | Pendapatan PPN Lainnya |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 412112 | Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423115 | Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423116 | Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakannya Lainnya |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423117 | Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423119 | Pendapatan Penjualan Lainnya |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423121 | Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423123 | Pendapatan Kompensasi Sewa Beli |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423125 | Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |

| | | |
|---|--------|---|
| D | 423126 | Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423127 | Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423141 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423142 | Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423143 | Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423144 | Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423145 | Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423146 | Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423147 | Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS) |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423148 | Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG) |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423149 | Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423151 | Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423211 | Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423215 | Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |

- D 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423227 Pendapatan Bea Lelang
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423228 Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423229 Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423319 Pendapatan Bunga Lainnya
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423511 Pendapatan Uang Pendidikan
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423512 Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423513 Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423519 Pendapatan Pendidikan Lainnya
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
- K 313121 Diterima dari Entitas Lain
- D 423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

| | | |
|---|--------|--|
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423954 | Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423955 | Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423956 | Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423957 | Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423958 | Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423991 | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 423999 | Pendapatan Anggaran Lain-lain |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 424111 | Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424112 | Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424119 | Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424121 | Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424123 | Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424136 | Pendapatan Investasi |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424139 | Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424211 | Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan |

| | | |
|---|--------|---|
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424212 | Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424213 | Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424214 | Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424215 | Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424216 | Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424219 | Pendapatan Hibah Terikat Lainnya |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424221 | Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424222 | Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424223 | Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424224 | Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424225 | Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424226 | Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424229 | Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424311 | Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424312 | Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |

| | | |
|---|--------|--|
| D | 424313 | Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424911 | Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 424912 | Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 431111 | Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Perorangan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431112 | Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lembaga/Badan Usaha |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431119 | Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lainnya |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431121 | Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431122 | Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Jasa |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431123 | Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Surat Berharga |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431211 | Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Perorangan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431212 | Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Bilateral |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431213 | Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431219 | Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Lainnya |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431221 | Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431222 | Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa |

| | | |
|---|--------|--|
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431223 | Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Surat Berharga |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431241 | Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431242 | Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 431243 | Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan |
| K | 313121 | Diterima dari Entitas Lain |
| D | 511111 | Beban Gaji Pokok PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511119 | Beban Pembulatan Gaji PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511121 | Beban Tunj. Suami/Istri PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511122 | Beban Tunj. Anak PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511123 | Beban Tunj. Struktural PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511124 | Beban Tunj. Fungsional PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511125 | Beban Tunj. PPh PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511126 | Beban Tunj. Beras PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511127 | Beban Tunj. Kemahalan PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511128 | Beban Tunj. Lauk pauk PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511129 | Beban Uang Makan PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511131 | Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS |

| | | |
|---|--------|--|
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511132 | Beban Tunj. Cacat PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511133 | Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511134 | Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511135 | Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511136 | Beban Tunj. Guru/Dosen/PNS yang Dipekerjakan pada Sekolah/ PT Swasta/ Badan/Komisi |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511137 | Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511138 | Beban Tunjangan Khusus Papua PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511139 | Beban Tunjangan SAR PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511141 | Beban Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN) |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511142 | Beban Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN) |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511143 | Beban Tunj. Social Security PNS (Staff di LN) |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511144 | Beban Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN) |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511145 | Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN) |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511146 | Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN) |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511147 | Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |

| | | |
|---|--------|---|
| D | 511149 | Beban Lokal Staff Lainnya |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511151 | Beban Tunjangan Umum PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511153 | Beban Tunjangan Profesi Dosen |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511156 | Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511246 | Beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/ Perbatasan Polri |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511311 | Beban Gaji Pokok Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511319 | Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511321 | Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511322 | Beban Tunj. Anak Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511323 | Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511324 | Beban Tunj. PPh Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511325 | Beban Tunj. Beras Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511331 | Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511332 | Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511333 | Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511334 | Beban Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |

| | | |
|---|--------|---|
| D | 511335 | Beban Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511336 | Beban Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511337 | Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511338 | Beban Tunjangan Fasilitas KPK |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511339 | Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511411 | Beban Gaji Dokter dan Bidan PTT |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511412 | Beban Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511413 | Beban Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511414 | Beban Tunjangan Dokter dan Bidan PTT |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511511 | Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511512 | Beban Tunjangan Pegawai Non PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511513 | Beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511519 | Beban Tunjangan Lainnya Non PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511521 | Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 511522 | Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 512111 | Beban Uang Honor Tetap |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |

| | | |
|---|--------|--|
| D | 512211 | Beban Uang Lembur |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 512411 | Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 512412 | Beban Pegawai Transito |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 512413 | Beban Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan sebagai Dampak Reformasi Birokrasi |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513111 | Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513112 | Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513113 | Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513114 | Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513115 | Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513121 | Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama) |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513122 | Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513123 | Beban Pensiun dan Uang Tunggu Polri |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513131 | Beban Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513132 | Beban Pensiun dan Uang Tunggu Hakim |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513151 | Beban Tunjangan Veteran |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513152 | Beban Dana Kehormatan Veteran |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513161 | Beban Tunjangan Hari Tua (Unfunded Liability) |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513211 | Beban Askes PNS |

| | | |
|---|--------|--|
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513212 | Beban Askes Pejabat Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 513221 | Beban Askes Penerima Pensiun |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521111 | Beban Keperluan Perkantoran |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521112 | Beban Pengadaan Bahan Makanan |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521113 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521114 | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521115 | Beban Honor Operasional Satuan Kerja |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521119 | Beban Barang Operasional Lainnya |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521211 | Beban Bahan |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521212 | Beban Barang Transito |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521213 | Beban Honor Output Kegiatan |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521217 | Beban Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521219 | Beban Barang Non Operasional Lainnya |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521511 | Beban Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521512 | Beban Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521513 | Beban Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |

| | | |
|---|--------|---|
| D | 521711 | Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 521721 | Beban Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund) |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 522111 | Beban Langganan Listrik |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 522112 | Beban Langganan Telepon |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 522113 | Beban Langganan Air |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 522119 | Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 522121 | Beban Jasa Pos dan Giro |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 522131 | Beban Jasa Konsultan |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 522141 | Beban Sewa |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 522151 | Beban Jasa Profesi |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 522191 | Beban Jasa Lainnya |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 523111 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 523119 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 523121 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 523122 | Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 523129 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 523131 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |

| | | |
|---|--------|---|
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 523132 | Beban Pemeliharaan Irigasi |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 523133 | Beban Pemeliharaan Jaringan |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 523199 | Beban Pemeliharaan Lainnya |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 524111 | Beban Perjalanan Biasa |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 524112 | Beban Perjalanan Tetap |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 524113 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 524114 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 524119 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 524211 | Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 524212 | Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 524219 | Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 525111 | Beban Gaji dan Tunjangan |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 525112 | Beban Barang |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 525113 | Beban Jasa |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 525114 | Beban Pemeliharaan |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 525115 | Beban Perjalanan |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 525116 | Beban atas Pengelolaan Endowment Fund |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 525119 | Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya |

K 111911 Kas dan Bank – BLU

| D/K | AKUN | URAIAN |
|-----|--------|---|
| D | 117911 | Persediaan yang Belum Diregister |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 131211 | Tanah Belum Diregister |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 131411 | Tanah Belum Diregister – BLU |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 132211 | Peralatan dan Mesin Belum Diregister |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 132411 | Peralatan dan Mesin Belum Diregister – BLU |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 133211 | Gedung dan Bangunan Belum Diregister |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 133411 | Gedung dan Bangunan Belum Diregister – BLU |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 134211 | Jalan dan Jembatan Belum Diregister |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 134212 | Irigasi Belum Diregister |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 134213 | Jaringan Belum Diregister |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| D | 134411 | Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister – BLU |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 139111 | Aset Tetap yang Belum Diregister |
| K | 111911 | Kas dan Bank – BLU |
| D | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |
| K | 166411 | Aset Lainnya yang Belum Diregister |
| D | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain |

JURNAL ANGGARAN

| D/K | AKUN | URAIAN |
|-----|--------|---|
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511111 | Allotment Belanja Gaji Pokok PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511119 | Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511121 | Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511122 | Allotment Belanja Tunj. Anak PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511123 | Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511124 | Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511125 | Allotment Belanja Tunj. PPh PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511126 | Allotment Belanja Tunj. Beras PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511129 | Allotment Belanja Uang Makan PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511131 | Allotment Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511132 | Allotment Belanja Tunj. Cacat PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511133 | Allotment Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511134 | Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511135 | Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511137 | Allotment Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT .. |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511138 | Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS |

| | | |
|---|--------|--|
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511147 | Allotment Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PN Dalam dan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511151 | Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511153 | Allotment Belanja Tunjangan Profesi Dosen |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511411 | Allotment Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511412 | Allotment Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511413 | Allotment Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511414 | Allotment Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511511 | Allotment Belanja Gaji Pokok Pegawai |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511512 | Allotment Belanja Tunjangan Pegawai |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511513 | Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511519 | Allotment Belanja Tunjangan Lainnya |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 512111 | Allotment Belanja Uang Honor Tetap |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 512211 | Allotment Belanja uang lembur |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 512411 | Allotment Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 512412 | Allotment Belanja Pegawai Transito |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521111 | Allotment Belanja Keperluan Perkantoran |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|--|
| K | 521112 | Allotment Belanja pengadaan bahan makanan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521113 | Allotment Belanja untuk menambah daya tahan tubuh |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521114 | Allotment Belanja pengiriman surat dinas pos pusat |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521119 | Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521211 | Allotment Belanja Bahan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521212 | Allotment Belanja Barang Transito |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521213 | Allotment Belanja Honor Output Kegiatan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521219 | Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522111 | Allotment Belanja Langganan daya dan jasa |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522112 | Allotment Belanja Jasa pos dan giro |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522113 | Allotment Belanja Jasa Konsultan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522114 | Allotment Belanja Sewa |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522115 | Allotment Belanja Jasa Profesi |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522119 | Allotment Belanja Jasa Lainnya |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523111 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523119 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|--|
| K | 523121 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523129 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523131 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523132 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523133 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523199 | Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524111 | Allotment Belanja perjalanan biasa |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524112 | Allotment Belanja perjalanan tetap |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524119 | Allotment Belanja perjalanan lainnya |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524211 | Allotment Belanja perjalanan biasa |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524212 | Allotment Belanja perjalanan tetap |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524219 | Allotment Belanja perjalanan lainnya |
| D | 113731 | Piutang dari Kas BLU |
| K | 525111 | Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan |
| D | 113731 | Piutang dari Kas BLU |
| K | 525112 | Allotment Belanja Barang |
| D | 113731 | Piutang dari Kas BLU |
| K | 525113 | Allotment Belanja Jasa |
| D | 113731 | Piutang dari Kas BLU |
| K | 525114 | Allotment Belanja Pemeliharaan |
| D | 113731 | Piutang dari Kas BLU |
| K | 525115 | Allotment Belanja Perjalanan |

| | | |
|---|--------|---|
| D | 113731 | Piutang dari Kas BLU |
| K | 525119 | Allotment Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 526112 | Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin U/ Diserahkan Ke Masyarakat/Pemda |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 526115 | Allotment Belanja Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 526211 | Allotment Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekoni U/ Diserahkan Ke |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 526212 | Allotment Belanja Barang Penunjang Kegiatan TP U/ Diserahkan ke Pemda |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531111 | Allotment Belanja Modal Tanah |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531112 | Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531113 | Allotment Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531114 | Allotment Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531115 | Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531116 | Allotment Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531117 | Allotment Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531121 | Allotment Belanja Modal Penambahan Nilai Tanah |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532111 | Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|--|
| K | 532112 | Allotment Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532113 | Allotment Bel. Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Peralatan & Mesin |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532114 | Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532115 | Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532116 | Allotment Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532117 | Allotment Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532118 | Allotment Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532121 | Allotment Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533111 | Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533112 | Allotment Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533113 | Allotment Belanja Modal Upah Naker & Honor Pengelola Gedung & Bangunan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533114 | Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533115 | Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan |

| | | |
|---|--------|---|
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533116 | Allotment Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533117 | Allotment Bel. Modal Kosongkan/Bongkar Bangunan Lama, Gedung & Bangunan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533118 | Allotment Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534111 | Allotment Belanja Modal Jalan dan Jembatan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534112 | Allotment Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534113 | Allotment Bel. Modal Upah Naker & Honor Pengelola Teknis Jalan & Jembatan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534114 | Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534115 | Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534116 | Allotment Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534117 | Allotment Bel. Modal Kosongkan & Bongkar Bangunan Lama Jalan & Jembatan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534118 | Allotment Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534121 | Allotment Belanja Modal Irigasi |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534122 | Allotment Belanja Modal Bahan Baku Irigasi |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|---|
| K | 534123 | Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534124 | Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534125 | Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534126 | Allotment Belanja Modal Perijinan Irigasi |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534127 | Allotment Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534128 | Allotment Belanja Modal Perjalanan Irigasi |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534131 | Allotment Belanja Modal Jaringan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534132 | Allotment Belanja Modal Bahan Baku Jaringan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534133 | Allotment Belanja Modal Upah Naker dan Honor Pengelola Teknis Jaringan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534134 | Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534135 | Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534136 | Allotment Belanja Modal Perijinan Jaringan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534137 | Allotment Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534138 | Allotment Belanja Modal Perjalanan Jaringan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534161 | Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|---|
| K | 536111 | Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 536121 | Allotment Belanja Penambahan Fisik Lainnya |
| D | 113731 | Piutang dari Kas BLU |
| K | 537111 | Allotment Belanja Modal Tanah |
| D | 113731 | Piutang dari Kas BLU |
| K | 537112 | Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
| D | 113731 | Piutang dari Kas BLU |
| K | 537113 | Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| D | 113731 | Piutang dari Kas BLU |
| K | 537114 | Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| D | 113731 | Piutang dari Kas BLU |
| K | 537115 | Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 572113 | Allotment Belanja Bantuan Beasiswa |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 573119 | Allotment Belanja Lembaga Sosial Lainnya |

JURNAL REALISASI

| D/K | AKUN | URAIAN |
|-----|--------|--|
| D | 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511111 | Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS |
| D | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511119 | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS |
| D | 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511121 | Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS |
| D | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511122 | Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS |

| | | |
|---|--------|---|
| D | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511123 | Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS |
| D | 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511124 | Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS |
| D | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511125 | Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS |
| D | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511126 | Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS |
| D | 511129 | Belanja Uang Makan PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511129 | Pengembalian Belanja Uang Makan PNS |
| D | 511131 | Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511131 | Pengembalian Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS |
| D | 511134 | Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511134 | Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS |
| D | 511135 | Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511135 | Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS |

| | | |
|---|--------|--|
| D | 511137 | Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 511138 | Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511138 | Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS |
| D | 511147 | Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511147 | Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PN Dalam/Luar Negeri |
| D | 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511151 | Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS |
| D | 511153 | Belanja Tunjangan Profesi Dosen |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511153 | Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Dosen |
| D | 511192 | Belanja Tunjangan Lain - Lain |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511192 | Pengembalian Belanja Tunjangan Lain - Lain |
| D | 511411 | Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511411 | Pengembalian Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT |
| D | 511412 | Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511412 | Pengembalian Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT |

| | | |
|---|--------|--|
| D | 511413 | Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511413 | Pengembalian Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT |
| D | 511414 | Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511414 | Pengembalian Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT |
| D | 511511 | Belanja Gaji Pokok Pegawai |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511511 | Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pegawai |
| D | 511512 | Belanja Tunjangan Pegawai |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511512 | Pengembalian Belanja Tunjangan Pegawai |
| D | 511513 | Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511513 | Pengembalian Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS |
| D | 511519 | Belanja Tunjangan Lainnya |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 511519 | Pengembalian Belanja Tunjangan Lainnya |
| D | 512111 | Belanja Uang Honor Tetap |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 512111 | Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap |
| D | 512211 | Belanja uang lembur |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 512211 | Pengembalian Belanja uang lembur |
| D | 512411 | Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) |

| | | | | | |
|---|--------|---|---------|---------|--------|
| K | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| K | 512411 | Pengembalian | Belanja | pegawai | (Tunj. |
| | | Khusus/kegiatan) | | | |
| D | 512412 | Belanja Pegawai Transito | | | |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| K | 512412 | Pengembalian Belanja Pegawai Transito | | | |
| D | 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | | | |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| K | 521111 | Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran | | | |
| D | 521112 | Belanja pengadaan bahan makanan | | | |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| K | 521112 | Pengembalian Belanja pengadaan bahan makanan | | | |
| D | 521113 | Belanja untuk menambah daya tahan tubuh | | | |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| K | 521113 | Pengembalian Belanja untuk menambah daya tahan tubuh | | | |
| D | 521114 | Belanja pengiriman surat dinas pos pusat | | | |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| K | 521114 | Pengembalian Belanja pengiriman surat dinas pos pusat | | | |
| D | 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | | | |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| K | 521119 | Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya | | | |
| D | 521211 | Belanja Bahan | | | |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |
| K | 521211 | Pengembalian Belanja Bahan | | | |
| D | 521212 | Belanja Barang Transito | | | |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN | | | |

| | | |
|---|--------|---|
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521212 | Pengembalian Belanja Barang Transito |
| D | 521213 | Belanja Honor Terkait Kegiatan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521213 | Pengembalian Honor Terkait Kegiatan |
| D | 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 521219 | Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya |
| D | 522111 | Belanja Langganan daya dan jasa |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522111 | Pengembalian Belanja Langganan daya dan jasa |
| D | 522112 | Belanja Jasa pos dan giro |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522112 | Pengembalian Belanja Jasa pos dan giro |
| D | 522113 | Belanja Jasa Konsultan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522113 | Pengembalian Belanja Jasa Konsultan |
| D | 522114 | Belanja Sewa |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522114 | Pengembalian Belanja Sewa |
| D | 522115 | Belanja Jasa Profesi |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522115 | Pengembalian Belanja Jasa Profesi |
| D | 522119 | Belanja Jasa Lainnya |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 522119 | Pengembalian Belanja Jasa Lainnya |
| D | 523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|---|
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523111 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
| D | 523119 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523119 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya |
| D | 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523121 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
| D | 523129 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523129 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| D | 523131 | Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523131 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| D | 523132 | Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523132 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi |
| D | 523133 | Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 523133 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan |
| D | 523199 | Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|---|
| K | 523199 | Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya |
| D | 524111 | Belanja perjalanan biasa |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524111 | Pengembalian Belanja perjalanan biasa |
| D | 524112 | Belanja perjalanan tetap |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524112 | Pengembalian Belanja perjalanan tetap |
| D | 524119 | Belanja perjalanan lainnya |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524119 | Pengembalian Belanja perjalanan lainnya |
| D | 524211 | Belanja perjalanan biasa |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524211 | Pengembalian Belanja perjalanan biasa |
| D | 524212 | Belanja perjalanan tetap |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524212 | Pengembalian Belanja perjalanan tetap |
| D | 524219 | Belanja perjalanan lainnya |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 524219 | Pengembalian Belanja perjalanan lainnya |
| D | 525111 | Belanja Gaji dan Tunjangan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 525111 | Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan |
| D | 525112 | Belanja Barang |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 525112 | Pengembalian Belanja Barang |
| D | 525113 | Belanja Jasa |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|--|
| K | 525113 | Pengembalian Belanja Jasa |
| D | 525114 | Belanja Pemeliharaan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 525114 | Pengembalian Belanja Pemeliharaan |
| D | 525115 | Belanja Perjalanan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 525115 | Pengembalian Belanja Perjalanan |
| D | 525119 | Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 525119 | Pengembalian Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya |
| D | 531111 | Belanja Modal Tanah |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531111 | Pengembalian Belanja Modal Tanah |
| D | 531112 | Belanja Modal Pembebasan Tanah |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531112 | Pengembalian Belanja Modal Pembebasan Tanah |
| D | 531113 | Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531113 | Pengembalian Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah |
| D | 531114 | Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531114 | Pengembalian Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah |
| D | 531115 | Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|---|
| K | 531115 | Pengembalian Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah |
| D | 531116 | Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 531116 | Pengembalian Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah |
| D | 531117 | Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532111 | Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
| D | 532112 | Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532112 | Pengembalian Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin |
| D | 532113 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan/Mesin |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532113 | Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin |
| D | 532114 | Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532114 | Pengembalian Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin |
| D | 532115 | Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532115 | Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan/Mesin |
| D | 532116 | Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|---|
| K | 532116 | Pengembalian Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin |
| D | 532117 | Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532117 | Pengembalian Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin |
| D | 532118 | Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532118 | Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin |
| D | 532121 | Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 532121 | Pengembalian Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin |
| D | 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533111 | Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| D | 533112 | Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533112 | Pengembalian Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan |
| D | 533113 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja & Honor Pengelola Teknis Gedung/Bangunan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533113 | Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan |
| D | 533114 | Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|---|
| K | 533114 | Pengembalian Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan |
| D | 533115 | Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533115 | Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan |
| D | 533116 | Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533116 | Pengembalian Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan |
| D | 533118 | Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533118 | Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan |
| D | 533121 | Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 533121 | Pengembalian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan |
| D | 534111 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534111 | Pengembalian Belanja Modal Jalan dan Jembatan |
| D | 534112 | Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534112 | Pengembalian Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan |
| D | 534113 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|--|
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534113 | Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan |
| D | 534114 | Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534114 | Pengembalian Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan |
| D | 534115 | Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534115 | Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan/Jembatan |
| D | 534116 | Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534116 | Pengembalian Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan |
| D | 534117 | Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534117 | Pengembalian Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan |
| D | 534118 | Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534118 | Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan |
| D | 534121 | Belanja Modal Irigasi |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534121 | Pengembalian Belanja Modal Irigasi |
| D | 534122 | Belanja Modal Bahan Baku Irigasi |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |

| | | |
|---|--------|---|
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534122 | Pengembalian Belanja Modal Bahan Baku Irigasi |
| D | 534123 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534123 | Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi |
| D | 534124 | Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534124 | Pengembalian Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi |
| D | 534125 | Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534125 | Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi |
| D | 534126 | Belanja Modal Perijinan Irigasi |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534126 | Pengembalian Belanja Modal Perijinan Irigasi |
| D | 534127 | Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534127 | Pengembalian Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi |
| D | 534128 | Belanja Modal Perjalanan Irigasi |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534128 | Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Irigasi |
| D | 534131 | Belanja Modal Jaringan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534131 | Pengembalian Belanja Modal Jaringan |
| D | 534132 | Belanja Modal Bahan Baku Jaringan |

| | | |
|---|--------|--|
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534132 | Pengembalian Belanja Modal Bahan Baku Jaringan |
| D | 534133 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534133 | Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan |
| D | 534134 | Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534134 | Pengembalian Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan |
| D | 534135 | Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534135 | Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan |
| D | 534136 | Belanja Modal Perijinan Jaringan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534136 | Pengembalian Belanja Modal Perijinan Jaringan |
| D | 534137 | Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534137 | Pengembalian Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan |
| D | 534138 | Belanja Modal Perjalanan Jaringan |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 534138 | Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Jaringan |
| D | 536111 | Belanja Modal Fisik Lainnya |
| K | 113712 | Piutang dari KPPN |
| D | 113712 | Piutang dari KPPN |
| K | 536111 | Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya |

- D 571111 Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM
- K 113712 Piutang dari KPPN
- D 113712 Piutang dari KPPN
- K 571111 Pengembalian Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM
- D 572113 Belanja Bantuan Bea Siswa
- K 113712 Piutang dari KPPN
- D 113712 Piutang dari KPPN
- K 572113 Pengembalian Belanja Bantuan Bea Siswa
- D 573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya
- K 113712 Piutang dari KPPN
- D 113712 Piutang dari KPPN
- K 572113 Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya

JURNAL STANDARD - DALAM APLIKASI SAIBA

| AKUN YANG MUNCUL SAAT INPUT DATA TRANSAKSI | | | AKUN PILIHAN SEBAGAI AKUN LAWAN | | |
|---|-----|-------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|
| KODE | | NAMA AKUN | KODE | | NAMA AKUN |
| AKUN | D/K | | AKUN | D/K | |
| 1116 | | Kas Di Bendahara Pengeluaran | 2195 | | Uang Muka dari KPPN |
| 111611 | D | <i>Kas di Bendahara Pengeluaran</i> | 219511 | K | <i>Uang Muka dari KPPN</i> |
| | | | | | |
| 1117 | | Kas Di Bendahara Penerimaan | 3911 | | Ekuitas |
| 111711 | D | <i>Kas di Bendahara Penerimaan</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1118 | | Kas Lainnya dan Setara Kas | 3911 | | Ekuitas |
| 111811 | D | <i>Surat Berharga</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 111819 | D | <i>Setara Kas lainnya</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------|-----------------------------|---|
| 1118 | Kas Lainnya dan Setara Kas | | 2199 | Utang Jangka Pendek Lainnya | |
| 111821 | D | <i>Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran</i> | 219961 | K | <i>Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor</i> |
| | | | 2121 | | Utang Kepada Pihak Ketiga |
| | | | 212191 | K | <i>Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya</i> |
| | | | | | |
| 1118 | Kas Lainnya dan Setara Kas | | 2121 | | Utang Kepada Pihak Ketiga |
| 111825 | D | <i>Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan</i> | 212192 | K | <i>Dana Pihak Ketiga</i> |
| | | | 2199 | Utang Jangka Pendek Lainnya | |
| | | | 219963 | K | Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor |
| | | | | | |
| 1118 | Kas Lainnya dan Setara Kas | | 2121 | | Utang Kepada Pihak Ketiga |

| | | | | | |
|--------|---|---|--------|---|--|
| 111826 | D | Kas Lainnya di BLU | 212121 | K | Utang Kepada Pihak Ketiga BLU |
| | | | 212193 | K | Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU |
| | | | 219964 | K | Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor |
| | | | | | |
| 1118 | | Kas Lainnya dan Setara Kas | 2182 | | Hibah yang Belum Disahkan |
| 111827 | D | Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan | 218211 | K | Hibah Langsung Yang Belum Disahkan |
| | | | | | |
| 1119 | | Kas Pada BLU | 3911 | | Ekuitas |
| 111911 | D | Kas dan Bank - BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| 111921 | D | Surat Berharga - BLU | | | |
| 111929 | D | Setara kas Lainnya - BLU | | | |
| | | | | | |
| 1131 | | Investasi dalam Deposito | 3911 | | Ekuitas |
| 113111 | D | Investasi dalam Deposito Jangka pendek | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| | | | 3911 | | Ekuitas |
| 113311 | D | Deposito - BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | | Ekuitas |

| | | | | | |
|--------|--|---|--------|---------|---------|
| 113319 | D | Investasi Lainnya - BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1134 | Bagian Lancar Investasi Non Permanen | | 3911 | Ekuitas | |
| 113411 | D | Bagian Lancar Investasi Non Permanen | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1139 | Investasi Jangka Pendek Lainnya | | 3911 | Ekuitas | |
| 113911 | D | Investasi Jangka Pendek Lainnya | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1141 | Belanja di Bayar di Muka (prepaid) | | 3911 | Ekuitas | |
| 114111 | D | Belanja Pegawai Dibayar di muka (prepaid) | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| | | | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| 114112 | D | Belanja barang yang dibayar dimuka (prepaid) | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| | | | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| 114113 | D | Belanja pembayaran bunga dibayar dimuka (prepaid) | 391111 | K | Ekuitas |

| | | | | | |
|--------|-------------------|---|--------|---------|---------|
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| | | | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| 114114 | D | <i>Belanja Lain-Lain Dibayar Dimuka (prepaid)</i> | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| | | | 391111 | K | Ekuitas |
| 114115 | D | <i>Belanja Modal Dibayar Dimuka</i> | 3911 | Ekuitas | |
| | | | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1142 | Uang Muka Belanja | | 3911 | Ekuitas | |
| 114211 | D | <i>Uang muka belanja pegawai (prepayment)</i> | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| | | | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| 114212 | D | <i>Uang muka belanja barang (prepayment)</i> | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| | | | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| 114213 | D | <i>Uang muka belanja modal (prepayment)</i> | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| | | | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| 114216 | D | <i>Uang muka belanja hibah (prepayment)</i> | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |

| | | | | | |
|--------|------------------------|---|--------|---------|---------|
| | | | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| 114217 | D | Uang muka belanja bantuan sosial (prepayment) | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| | | | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| 114218 | D | Uang Muka Belanja Lain-Lain (prepayment) | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | 3911 | Ekuitas | |
| | | | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1152 | Piutang Bukan Pajak | | 3911 | Ekuitas | |
| 115211 | D | Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak | 391111 | K | Ekuitas |
| 115212 | D | Piutang Lainnya | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1154 | Bagian Lancar TP - TGR | | 3911 | Ekuitas | |
| 115411 | D | Bagian Lancar Tagihan TP-TGR | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1156 | Piutang dari KUN | | 3911 | Ekuitas | |
| 115631 | D | Piutang dari kas BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| 115641 | D | Piutang kas lainnya di Kementerian/Lembaga dari hibah | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|--|--------|---------|----------------|
| 1157 | Piutang dari kegiatan Operasional – BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 115711 | D | <i>Piutang BLU Pelayanan Kesehatan</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 115712 | D | <i>Piutang BLU Pelayanan Pendidikan</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 115719 | D | <i>Piutang BLU penyedia Barang dan Jasa Lainnya</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 115791 | D | <i>Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1158 | Piutang dari kegiatan non Operasional - BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 115811 | D | <i>Piutang Sewa Tanah - BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 115812 | D | <i>Piutang Sewa Gedung - BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 115813 | D | <i>Piutang Sewa Ruangan - BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 115814 | D | <i>Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 115819 | D | <i>Piutang Sewa Lainnya - BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 115821 | D | <i>Piutang dari Penjualan Aset Tetap – BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 115829 | D | <i>Piutang dari penjualan Aset lainnya - BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 115891 | D | <i>Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1162 | Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang Bukan Pajak | | 3911 | Ekuitas | |
| 116211 | D | <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNPB</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |

| | | | | | |
|--------|---|---|--------|---------|----------------|
| 116212 | D | <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lainnya</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1164 | Penyisihan Piutang Tak tertagih - Bagian Lancar TP-TGR | | 3911 | Ekuitas | |
| 116411 | D | <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP-TGR</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1166 | Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang Operasional BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 116611 | D | <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 116612 | D | <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 116691 | D | <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Operasional Lainnya BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1167 | Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang Non Operasional BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 116711 | D | <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 116712 | D | <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 116713 | D | <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |

| | | | | | |
|--------|---|--|--------|---|---------|
| 116714 | D | Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan & Mesin BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| 116719 | D | Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| 116721 | D | Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Penjualan Aset Tetap BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| 116722 | D | Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Penjualan Aset Lainnya BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| 116791 | D | Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Oprasional Lain BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| | | Persediaan | 3911 | | Ekuitas |
| 1171 | | | | | |
| 117111 | D | Barang Konsumsi | 391111 | K | Ekuitas |
| 117112 | D | Amunisi | 391111 | K | Ekuitas |
| 117113 | D | Bahan untuk Pemeliharaan | 391111 | K | Ekuitas |
| 117114 | D | Suku Cadang | 391111 | K | Ekuitas |
| 117121 | D | Pita Cukai, Materai dan Leges | 391111 | K | Ekuitas |
| 117122 | D | Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat | 391111 | K | Ekuitas |

| | | | | | |
|--------|----------------|--|--------|---------|---------|
| 117123 | D | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat | 391111 | K | Ekuitas |
| 117124 | D | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat | 391111 | K | Ekuitas |
| 117125 | D | Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat | 391111 | K | Ekuitas |
| 117126 | D | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | 391111 | K | Ekuitas |
| 117127 | D | Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | 391111 | K | Ekuitas |
| 117128 | D | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | 391111 | K | Ekuitas |
| 117131 | D | Bahan Baku | 391111 | K | Ekuitas |
| 117132 | D | Barang dalam Proses | 391111 | K | Ekuitas |
| 117191 | D | Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga - jaga | 391111 | K | Ekuitas |
| 117192 | D | Persediaan Barang Hasil Sitaan | 391111 | K | Ekuitas |
| 117199 | D | Persediaan Lainnya | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1172 | Persediaan BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 117211 | D | Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan | 391111 | K | Ekuitas |
| 117212 | D | Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan | 391111 | K | Ekuitas |

| | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------|---------|---------|
| 117219 | D | Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1216 | Investasi Non Permanen BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 121611 | D | Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen | 391111 | K | Ekuitas |
| 121613 | D | Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen | 391111 | K | Ekuitas |
| 121619 | D | Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1222 | Investasi Permanen BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 122211 | D | Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen | 391111 | K | Ekuitas |
| 122212 | D | Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen | 391111 | K | Ekuitas |
| 122219 | D | Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Permanen | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1311 | Tanah | | 3911 | Ekuitas | |
| 131111 | D | Tanah | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1312 | Tanah Sebelum di Sesuaikan | | 3911 | Ekuitas | |
| 131211 | D | Tanah Sebelum Disesuaikan | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|--|--------|----------|----------------|
| 1313 | Tanah BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 131311 | <i>D</i> | <i>Tanah - BLU</i> | 391111 | <i>K</i> | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1321 | Peralatan dan Mesin | | 3911 | Ekuitas | |
| 132111 | <i>D</i> | <i>Peralatan dan Mesin</i> | 391111 | <i>K</i> | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1322 | Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan | | 3911 | Ekuitas | |
| 132211 | <i>D</i> | <i>Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan</i> | 391111 | <i>K</i> | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1323 | Peralatan dan Mesin - BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 132311 | <i>D</i> | <i>Peralatan dan Mesin - BLU</i> | 391111 | <i>K</i> | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1331 | Gedung dan Bangunan | | 3911 | Ekuitas | |
| 133111 | <i>D</i> | <i>Gedung dan Bangunan</i> | 391111 | <i>K</i> | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1332 | Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan | | 3911 | Ekuitas | |
| 133211 | <i>D</i> | <i>Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan</i> | 391111 | <i>K</i> | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1333 | Gedung dan Bangunan - BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 133311 | <i>D</i> | <i>Gedung dan Bangunan - BLU</i> | 391111 | <i>K</i> | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1341 | Jalan Irigasi dan Jaringan | | 3911 | Ekuitas | |
| 134111 | <i>D</i> | <i>Jalan dan Jembatan</i> | 391111 | <i>K</i> | <i>Ekuitas</i> |

| | | | | | |
|--------|---|--|--------|---------|---------|
| 134112 | D | Irigasi | 391111 | K | Ekuitas |
| 134113 | D | Jaringan | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1342 | Jalan Irigasi dan Jaringan Sebelum di sesuaikan | | 3911 | Ekuitas | |
| 134211 | D | Jalan dan Jembatan Sebelum Disesuaikan | 391111 | K | Ekuitas |
| 134212 | D | Irigasi Sebelum Disesuaikan | 391111 | K | Ekuitas |
| 134213 | D | Jaringan Sebelum Disesuaikan | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1343 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 134311 | D | Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1351 | Aset Tetap Lainnya | | 3911 | Ekuitas | |
| 135111 | D | Aset Tetap dalam Renovasi | 391111 | K | Ekuitas |
| 135121 | D | Aset Tetap Lainnya | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1352 | Aset Tetap Lainnya - BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 135211 | D | Aset Tetap Lainnya - BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1361 | Konstruksi Dalam pengerjaan | | 3911 | Ekuitas | |
| 136111 | D | Konstruksi Dalam pengerjaan | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|---|--------|---------|----------------|
| 1362 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum | | 3911 | Ekuitas | |
| 136211 | D | <i>Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1371 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | | 3911 | Ekuitas | |
| 137111 | D | <i>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 137121 | D | <i>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1372 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | | 3911 | Ekuitas | |
| 137211 | D | <i>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 137221 | D | <i>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1373 | Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan | | 3911 | Ekuitas | |
| 137311 | D | <i>Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 137312 | D | <i>Akumulasi Penyusutan Irigasi</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 137313 | D | <i>Akumulasi Penyusutan Jaringan</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 137321 | D | <i>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1374 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | 3911 | Ekuitas | |

| | | | | | |
|--------|--|---|--------|---------|---------|
| 137411 | D | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 391111 | K | Ekuitas |
| 137421 | D | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| 1521 | Tagihan TP-TGR | | 3911 | Ekuitas | |
| 152111 | D | Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | 391111 | K | Ekuitas |
| 1522 | Tagihan TP-TGR BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 152211 | D | Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| 1563 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP-TGR | | 3911 | Ekuitas | |
| 156311 | D | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP-TGR | 391111 | K | Ekuitas |
| 1564 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 156411 | D | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP-TGR BLU | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|--------|---------|----------------|
| 1611 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | | 3911 | Ekuitas | |
| 161111 | D | <i>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1621 | Aset Tak Berwujud | | 3911 | Ekuitas | |
| 162111 | D | <i>Goodwill</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 162121 | D | <i>Hak Cipta</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 162131 | D | <i>Royalti</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 162141 | D | <i>Paten</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 162151 | D | <i>Software</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 162161 | D | <i>Lisensi</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 162171 | D | <i>Hasil Kajian/ Penelitian</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 162191 | D | <i>Aset Tak Berwujud Lainnya</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1622 | Aset Tak Berwujud - BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 162211 | D | <i>Software-Badan Layanan Umum</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 162221 | D | <i>Hak Cipta BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 162231 | D | <i>Royalti BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 162241 | D | <i>Paten BLU</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| 162291 | D | <i>Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 1631 | Dana Yang di batasi Penggunaannya | | 3911 | Ekuitas | |
| 163119 | D | <i>Dana lainnya</i> | 391111 | K | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| 1651 | Dana Kelolaan BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 165111 | D | Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1661 | Aset Lain-lain | | 3911 | Ekuitas | |
| 166111 | D | Aset Lain-lain | 391111 | K | Ekuitas |
| 166112 | D | Aset Tetap yang Tak digunakan dalam operasi pemerintahan | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 1662 | Aset Lain-lain-BLU | | 3911 | Ekuitas | |
| 166211 | D | Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum | 391111 | K | Ekuitas |
| 166212 | D | Aset Tetap yang Tak digunakan dalam operasi pemerintahan | 391111 | K | Ekuitas |
| | | | | | |
| 2121 | Utang Kepada Pihak Ketiga | | 3911 | Ekuitas | |
| 212111 | K | Belanja pegawai yang masih harus dibayar | 391111 | D | Ekuitas |
| 212112 | K | Belanja barang yang masih harus dibayar | 391111 | D | Ekuitas |
| 212113 | K | Belanja modal yang masih harus dibayar | 391111 | D | Ekuitas |
| 212114 | K | Belanja hibah yang masih harus dibayar | 391111 | D | Ekuitas |
| 212115 | K | Belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar | 391111 | D | Ekuitas |
| 212191 | K | Belanja Lain - lain yang masih harus dibayar | 391111 | D | Ekuitas |
| 212121 | K | Utang kepada Pihak Ketiga BLU | 391111 | D | Ekuitas |

| | | | | | |
|--------|---|---|--------|---|----------------|
| 212191 | K | <i>Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya</i> | 391111 | D | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 2192 | | Pendapatan diTerima diMuka | 3911 | | Ekuitas |
| 219211 | K | <i>Pendapatan Sewa Diterima Dimuka</i> | 391111 | D | <i>Ekuitas</i> |
| | | | 3911 | | Ekuitas |
| 219212 | K | <i>Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka</i> | 391111 | D | <i>Ekuitas</i> |
| | | | 3911 | | Ekuitas |
| | | | 391111 | D | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 2196 | | Pendapatan Yang Ditangguhkan | 3911 | | Ekuitas |
| 219611 | K | <i>Pendapatan Yang Ditangguhkan</i> | 391111 | D | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 2199 | | Utang Jangka Pendek Lainnya | 3911 | | Ekuitas |
| 219911 | K | <i>Utang Jangka Pendek Perbankan</i> | 391111 | D | <i>Ekuitas</i> |
| 219913 | K | <i>Utang Jangka Pendek Lain-lain</i> | 391111 | D | <i>Ekuitas</i> |
| | | | | | |
| 2211 | | Utang Jangka panjang perbankan Dalam Negeri Lainnya | 3911 | | Ekuitas |
| 221111 | K | <i>Utang Perbankan Jangka Panjang</i> | 391111 | D | <i>Ekuitas</i> |

| | | | | | |
|--------|--|--|--------|----------|----------------|
| 2219 | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya | | 3911 | | Ekuitas |
| 221919 | <i>K</i> | <i>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya</i> | 391111 | <i>D</i> | <i>Ekuitas</i> |

FORMULIR III
ILUSTRASI LAPORAN REALISASI

| No. | URAIAN | 30 JUNI 2016 | | | 30 JUNI 2016 | | | % REAL. ANGG. | REALISASI (DIAVAH) ANGGARAN | % REAL. ANGG. |
|-------|---|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIAVAH) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIAVAH) ANGGARAN | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | | | | | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | | | | | | | | | |
| A.1.a | Penerimaan Pajak | | | | | | | | | |
| | (423) Pendapatan PNBSP Lainnya | | | | | | | | | |
| A.2 | HIBAH | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pendapatan dan Hibah (A.1+A.2) | | | | | | | | | |
| B. | BELANJA | | | | | | | | | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | | | | | | | | | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | | |
| B.1.3 | Miscellaneous | | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | | |
| | Jumlah Belanja (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | | | | | | | | | |

| UNIT ORGANISASI JILANG (KEMENTERIAN KEMENTERIAN) JENIS KEVENDIKAN | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN - SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2016 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | |
| No. | URAIAN | 30 JUNI 2016 | | | 30 JUNI 2016 | | | % REAL- ANGG. | % REAL- ANGG. |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | | | | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | | | | | | | | |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan PNPB Lainnya | | | | | | | | |
| A.2 | HIBAH | | | | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | | | | | | | | |
| B. | BELANJA | | | | | | | | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | | | | | | | | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | |
| B.1.3 | Hibah | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 +B.1.3) | | | | | | | | |

| No. | URAIAN | 30 JUNI 2016 | | | 30 JUNI 2016 | | | % REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN |
|-------|--|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | |
| A.1 | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| A.1.b | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | (423) Pendapatan Bukan Pajak | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | (424) Pendapatan PNBP Lainnya | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| A.2 | (425) Pendapatan Badan Layanan Umum | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| B. | BELANJA | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Barang | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Barang | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Modal | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| B.1.3 | HR/abah | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Barang | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | |

| | | 30 JUNI 2014 | | | | 30 JUNI 2010 | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--|------------------|
| No. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (DIBAWAH) ANGGARAN | % REAL- ANGG. | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (DIBAWAH) ANGGARAN | % REAL- ANGG. |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| A.2 | HIBAH | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| B. | BELANJA | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| B.1.3 | Hibah | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2011 DAN 2010
(DALAM RUPIAH)

| No. | URAIAN | 30 JUNI 2011 | | | 30 JUNI 2010 | | | % REAL. ANGG. | REALISASI DIATAS (KURANG) ANGGARAN | % REAL. ANGG. | REALISASI DIATAS (KURANG) ANGGARAN |
|-------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (KURANG) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (KURANG) ANGGARAN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| A.1.a | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan PNBp Lainnya (424) Pendapatan Badan Layanan Umum | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| A.2 | HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| B. | BELANJA | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| B.1.2 | Pinjaman luar Negeri | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| B.1.3 | Hibah | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 +B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xx | xxx.xx | |

| No. | URAIAN | 30 JUNI 2016 | | | 30 JUNI 2016 | | | % REAL- ANGG. |
|-------|--|--------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------|----------------------------|------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIAJAS (%) | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIAJAS (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | | | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | | | | | | | |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan PNBp Lainnya | | | | | | | |
| A.2 | HIBAH | | | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1- A.2) | | | | | | | |
| B. | BELANJA | | | | | | | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 - B.1.2- B.1.3) | | | | | | | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | |
| | Belanja Sosial | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | |
| | Belanja Sosial | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | |
| B.1.3 | Hibah | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | |
| | Belanja Sosial | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 - B.1.2 -B.1.3) | | | | | | | |

| UNIT ORGANISASI VILAM ORGANISASI JENIS KEWENANGAN | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN – SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | | |
| No. | URAIAN | 31 DESEMBER 2011 | | | 31 DESEMBER 2010 | | | % REAL. ANGG. | REALISASI DIATAS ANGGARAN | % REAL. ANGG. |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | | | | | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | | | | | | | | | |
| A.1.a | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan PNBp Lainnya | | | | | | | | | |
| A.2 | HIBAH | | | | | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | | | | | | | | | |
| B. | BELANJA | | | | | | | | | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | | | | | | | | | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | | |
| B.1.3 | Hibah | | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | | |
| | Belanja Lain-lain | | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 +B.1.3) | | | | | | | | | |

| LAPORAN REALISASI ANGGARAN - SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|----|
| No. | URAIAN | 31 DESEMBER 20X1 | | | 31 DESEMBER 20X0 | | | REALISASI DIBAWAH ANGGARAN | % REAL- ANGG. | 10 |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| A | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan Pngbp Lainnya | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| A.2 | HIBAH | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| B | BELANJA | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 - B.1.2 - B.1.3) | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| B.1.3 | Hibah | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Pegawai | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Barang | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Modal | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Bantuan Sosial | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | Belanja Lain-lain | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 - B.1.2 - B.1.3) | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xxx. xxx. xxx. xxx. | xxx. xx. | |

| LAPORAN REALISASI ANGGARAN - WILAYAH VERTIKAL PROPINSI : UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------------|----|
| No. | URAIAN | 31 DESEMBER 20X1 | | | 31 DESEMBER 20X0 | | | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | % REAL. ANGG. | 10 |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI (DIBAWAH) ANGGARAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| A.1.a | Penerimaan Negara Berbasis Pajak | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Penerimaan Pajak | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| A.2 | HIBAH (424) Pendapatan Badan Layanan Umum | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| B. | BELANJA | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Barang | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Modal | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Barang | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Modal | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| B.1.3 | Hibah | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Pegawai | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Barang | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Modal | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Bantuan Sosial | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | Belanja Lain-lain | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 +B.1.3) | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |

| | | 31 DESEMBER 20X1 | | | 31 DESEMBER 20X0 | | | | |
|-------|---|------------------|-----------|--|------------------|----------|-----------|--|------------------|
| No. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (DIBAWAH) ANGGARAN | % REAL- ANGG. | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (DIBAWAH) ANGGARAN | % REAL- ANGG. |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | | | | |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | | | | | | | | |
| A.1.a | Penerimaan Negara Bukan Pajak | | | | | | | | |
| A.1.b | Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan Pajak Lainnya | | | | | | | | |
| A.2 | HIBAH | | | | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | | | | | | | | |
| B. | BELANJA | | | | | | | | |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1 + B.1.2+ B.1.3) | | | | | | | | |
| B.1.1 | Rupiah Murni | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Bantuan Lain-lain | | | | | | | | |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Bantuan Lain-lain | | | | | | | | |
| B.1.3 | Hibah | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | | | |
| | Belanja Barang | | | | | | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | Bantuan Lain-lain | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA (B.1 + B.1.2 +B.1.3) | | | | | | | | |

LAPOPAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH DEKONSENTRASI PROFINSI :
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(DALAM RUPIAH)

| LAPORAN REALISASI ANGGARAN - ESELON I UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| No. | URAIAN | 31 DESEMBER 20X1 | | | 31 DESEMBER 20X0 | | | % REAL. ANGG. | % REAL. ANGG. |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS ANGGARAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan PNBp Lainnya (424) Pendapatan Badan Layanan Umum | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.2 | HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B. | BELANJA | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2+ B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.3 | Hibah | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |

| KEMENTERIAN KESEHATAN RI. UNITAS BUDJET (KEMERDEKAAN) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2010 (DALAM RUPIAH) | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| No. | URAIAN | 31 DESEMBER 2014 | | | 31 DESEMBER 2010 | | | % REAL. ANGG. | % REAL. ANGG. |
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (G) ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DIATAS (G) ANGGARAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.1 | PENERIMAAN DALAM NEGERI | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak (423) Pendapatan PNBP Lainnya (424) Pendapatan Badan Layanan Umum | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| A.2 | HIBAH | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B. | BELANJA | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1 | BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.1 | Rupiah Murni | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.2 | Pinjaman Luar Negeri | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| B.1.3 | Hibah | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Barang | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Modal | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Bantuan Sosial | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | Belanja Lain-lain | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |
| | JUMLAH BELANJA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3) | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx |

FORMULIR IV
 ILUSTRASI LAPORAN
 OPERASIONAL, LAPORAN
 PERUBAHAN EKUITAS DAN
 NERACA

| LAPORAN OPERASIONAL | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|---|
| Satker | | | | |
| PERIODE 30 Juni 20x1 | | | | |
| URAIAN | KEMENKES | | Kenaikan(Penurunan) | |
| | 20x1 | 20x0 | Jumlah | % |
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN | | | | |
| Pendapatan Usaha Rawat Jalan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha Rawat Inap | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha Rawat Darurat | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Penujangan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| HIBAH/DONASISUMBANGAN NON PEMERINTAH | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENDAPATAN APBN | | | | |
| Operasional | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Investasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Transfer barang dari Kementerian Kesehatan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PHLN | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENDAPATAN USAHA LAINNYA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Diklat | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Sewa | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Lain-lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENDAPATAN LAINNYA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Jasa Keuangan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Lain-lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| JUMLAH PENDAPATAN | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| BEBAN OPERASIONAL | | | | |
| Beban Pegawai | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Persediaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Barang dan Jasa | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Pemeliharaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Perjalanan Dinas | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Bunga | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| beban Subsidi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Hibah | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Bantuan Sosial | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Transfer | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Lain-lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| SURPLUS(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR | | | | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA | | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| POS LUAR BIASA | | | | |
| Beban Luar Biasa | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) - LO | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |

| LAPORAN OPERASIONAL | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|---|
| Satker | | | | |
| PERIODE 31 Desember 20x1 | | | | |
| URAIAN | KEMENKES | | Kenaikan(Penurunan) | |
| | 20x1 | 20x0 | Jumlah | % |
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN | | | | |
| Pendapatan Usaha Rawat Jalan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha Rawat Inap | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha Rawat Darurat | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Penunjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| HIBAH/DONASI/SUMBANGAN NON PEMERINTAH | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENDAPATAN APBN | | | | |
| Operasional | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Investasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Transfer barang dari Kementerian Kesehatan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PHLN | | | | |
| PENDAPATAN USAHA LAINNYA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Diklat | | | | |
| Pendapatan Sewa | | | | |
| Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan | | | | |
| Pendapatan Lain-lain | | | | |
| PENDAPATAN LAINNYA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Jasa Keuangan | | | | |
| Pendapatan Lain-lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| JUMLAH PENDAPATAN | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| BEBAN OPERASIONAL | | | | |
| Beban Pegawai | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Persediaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Barang dan Jasa | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Pemeliharaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Perjalanan Dinas | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Bunga | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Subsidi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Hibah | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Bantuan Sosial | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Transfer | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Lain-lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| SURPLUS(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Jumlah Surplus(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| POS LUAR BIASA | | | | |
| Beban Luar Biasa | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS(DEFISIT) - LO | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |

| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|---|
| Satker..... | | | | |
| Per 30 Juni 20x1 | | | | |
| URAIAN | KEMENKES | | Kenaikan(Penurunan) | |
| | 20x1 | 20x0 | Jumlah | % |
| EKUITAS AWAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS/(DEFISIT) - LO | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Penyesuaian Nilai Aset | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Penyesuaian Nilai Kewajiban | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Koreksi Nilai Persediaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Lain - lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| EKUITAS AKHIR | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |

| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|---|
| Satker | | | | |
| Per 31 Desember 20x1 | | | | |
| URAIAN | KEMENKES | | Kenaikan(Penurunan) | |
| | 20x1 | 20x0 | Jumlah | % |
| EKUITAS AWAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| SURPLUS/(DEFISIT) - LO | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Penyesuaian Nilai Aset | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Penyesuaian Nilai Kewajiban | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Koreksi Nilai Persediaan | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Lain - lain | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| EKUITAS AKHIR | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |

| Satker | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| N E R A C A | | | |
| Per 30 Juni 20x1 dan 31 Desember 20x0 | | | |
| URAIAN | 30 JUNI 20x1 | 31 Desember 20x0 | KENAIKAN (PENURUNAN) |
| | | <i>Audited</i> | |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas di Bendahara Penerimaan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas pada BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Investasi jangka pendek BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Belanja dibayar di muka | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Uang Muka Belanja | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Bukan Pajak | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bagian Lancar Tagihan TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Bagian Lancar Tagihan TGR (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Kegiatan Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Kegiatan Non Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Kegiatan Non Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan yang belum diregister | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET LANCAR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tanah BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Peralatan dan Mesin | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Peralatan dan Mesin BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Gedung dan Bangunan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Gedung dan Bangunan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Tetap Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Tetap Lainnya BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET TETAP | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | |
| Tagihan TP/TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Tagihan TP/TGR (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tagihan TP/TGR BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Tagihan TP/TGR BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Jangka Panjang Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset tidak berwujud | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset tidak berwujud BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Dana yang Dibatasi Penggunaannya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Lain-lain | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Lain-lain BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET LAINNYA | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang kepada Pihak ketiga | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Hibah yang belum disahkan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Pendapatan Diterima Dimuka | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Uang Muka dari KPPN | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Pendapatan Yang Ditangguhkan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN JK.PENDEK | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| Satker | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| NERACA | | | |
| Per 31 Desember 20x1 dan 31 Desember 20x0 | | | |
| URAIAN | 31 Desember 20x1 | 31 Desember 20x0 | KENAIKAN (PENURUNAN) |
| | | <i>Audited</i> | |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas di Bendahara Penerimaan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kas pada BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Investasi jangka pendek BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Belanja dibayar di muka | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Uang Muka Belanja | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Bukan Pajak | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bagian Lancar Tagihan TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Bagian Lancar Tagihan TGR (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Kegiatan Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Kegiatan Non Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Kegiatan Non Operasional BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Persediaan yang belum diregister | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET LANCAR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tanah BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Peralatan dan Mesin | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Peralatan dan Mesin BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Gedung dan Bangunan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Gedung dan Bangunan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Jalan, Ingasi dan Jaringan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Jalan, Ingasi dan Jaringan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Tetap Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Tetap Lainnya BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Konstruksi dalam Pengerjaan BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET TETAP | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | |
| Tagihan TP/TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Tagihan TP/TGR (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tagihan TP/TGR BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Tagihan TP/TGR BLU (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Piutang Jangka Panjang Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset tidak berwujud | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset tidak berwujud BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Dana yang Dibatasi Penggunaannya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Lain-lain | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aset Lain-lain BLU | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya</i> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET LAINNYA | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH ASET | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang kepada Pihak ketiga | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Hibah yang belum disahkan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Pendapatan Diterima Dimuka | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Uang Muka dari KPPN | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Pendapatan Yang Ditangguhkan | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN JK.PENDEK | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS | | | |
| EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKT

BUKU BARANG INTRA KOMPTABEL

NAMA SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE PERIKRAAN :

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 KODE UAKPB : XXX

| No. | Tanggal Pembukuan | Identifikasi Barang | | | Perambahan/Perurangan | | | Jumlah Barang | | Satuan Barang | | Harga Barang | | Kondisi Barang | | | |
|-----|-------------------|---------------------|-----|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|----|----------------|--|--|--|
| | | Tanggal Perolehan | NUP | Merk/Type | TRK KAKK | Kode Transaksi | Dasar Mutasi | Jumlah | Satuan | Satuan | Jumlah | B | RR | RB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | | | | | | | Saldo awal Tahun 20XX | xx | Buah | | xxx | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | xxx | | | xxx | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah per XXXXXX | | | | | | | | | | |

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKT

BUKU BARANG EKSTRA KOMPTABEL

NAMA SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE PERIKRAAN :

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 KODE UAKPB : XXX

| No. | Tanggal Pembukuan | Identifikasi Barang | | Penambahan/Pengurangan | | | Satuan Barang | | Harga Barang | | Kondisi Barang | | | |
|-----|-------------------|---------------------|-----|------------------------|----------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----|----|
| | | Tanggal Perolehan | NUP | Merit/Type | TIK KAKK | Kode Transaksi | Dasar Mutasi | Jumlah Barang | Satuan Barang | Satuan | Jumlah | B | RR | RB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | | | | | | Saldo awal Tahun 2XXX | xx | Buah | | xxx | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | xxx | | | xxx | | | |
| | | | | | | | Jumlah per XXXXXX | | | | | | | |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA SEMESTERAN
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
PERIODE : XXXXX
TAHUN ANGGARAN XXXX**

Tanggal : xx-xx-xxxx
Halaman : xx
Kode Lap. : LBIKKS

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI.

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | JUMLAH SD XX-XX-XXXX | | PENAMBAHAN | KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF | | JUMLAH SD XX-XX-XXXX | | KETERANGAN |
|-----------------------------|----------------------|--------|------------|---------------------------------|-------|----------------------|-------|------------|
| | KODE | URAIAN | | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| X-XX-XX-XX-XXXX | | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

....., XX.....,XXXX
Penanggung Jawab UAKPB

.....

KEMENTERIAN KESEHATAN RI.

Tgl Cetak : xx-xx-xxxx

Halaman : xx-xx-xxxx

LAPORAN PERSEDIAAN
PERIODE : XXXX

| Kode | Uraian | Nilai |
|----------------|--------|-------|
| x.xx.xx.xx.xxx | | xx |
| | | xx |
| | | xx |
| | | xx |
| | | xx |
| | | xx |
| | | xx |
| | | xx |
| TOTAL | | xx |

Keterangan:

- 1.Persediaan senilai Rp.xxxxxxxxxx dalam kondisi rusak
- 2.Persediaan senilai Rp.xxxxxxxxxx dalam kondisi usang

....., xx..... xxxx
Penanggungjawab UAKPB

.....

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKTT

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 INTRA KOMPTABEL
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 PERIODE : XXXX
 TAHUN ANGGARAN 2XXX**

NAMA UAKPB : xxx KEMENTERIAN KESEHATAN RI

| KODE | AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG URAIAN | SAT | SALDO PER XXXXXX | | | NILAI BUKU |
|------|---------------------------------------|------|------------------|-------|----------------|------------|
| | | | KUANTITAS | NILAI | AK. PENYUSUTAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XXX | | Buah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | XXX | XXX | XXX |

Penanggung Jawab UAKPB
 XX 2XXX

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKT

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 PERIODE :
 TAHUN ANGGARAN 2XXX**

NAMA UAKPB : xxx KEMENTERIAN KESEHATAN RI

| KODE | URAIAN | SAT | SALDO PER XXXXXX | | | |
|------|--------|------|------------------|-------|----------------|------------|
| | | | KUANTITAS | NILAI | AK. PENYUSUTAN | NILAI BUKU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XXX | | Buah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | XXX | XXX | |

Penanggung Jawab UAKPB
 XX 2XXX

.....

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKT

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA KOMPTABEL
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 PERIODE : XXXXXX
 TAHUN ANGGARAN 2XXX**

NAMA UAKPB : xxx KEMENTERIAN KESEHATAN RI

| KODE | AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG URAIAN | SAT | SALDO PER XXXXX | | | NILAI BUKU |
|------|---------------------------------------|------|-----------------|-------|----------------|------------|
| | | | KUANTITAS | NILAI | AK. PENYUSUTAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XXX | | Buah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | XXX | XXX | |

Penanggung Jawab UAKPB
 XX 2XXX

.....

Tanggal : XX-XX-XXXX
 Halaman : XX
 Kode Lap : LBIKT

BUKU BARANG EKSTRA KOMPTABEL

NAMA SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE SUB-SUB KELOMPOK BARANG :
 KODE PERKIRAAN :

NAMA UAKPB : XXX KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 KODE UAKPB : XXX

| No. | Tanggal Pembukuan | Identifikasi Barang | | Penambahan/Pengurangan | | | Harga Barang | | Kondisi Barang | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----|------------------------|---------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|--------|--------|----|----|----|
| | | Tanggal Perolehan | NUP | Merk/Type | TK KAKK | Kode Transaksi | Dasar Mutasi | Jumlah Barang | Satuan Barang | Satuan | Jumlah | B | RR | RB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | | | | | | Saldo awal Tahun 2XXX | xx | Buah | | xxx | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | xxx | | | xxx | | | |
| Jumlah per 31 Desember 2xxx | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|------|-----------|-------|----------------|------------|--------------|
| | | | | | | Tanggal | : XX-XX-XXXX |
| | | | | | | Halaman | : XX |
| | | | | | | Kode Lap | : LBIKT |
| LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN | | | | | | | |
| INTRA KOMPTABEL | | | | | | | |
| RINCIAN PER KELOMPOK BARANG | | | | | | | |
| TAHUN ANGGARAN 2XXX | | | | | | | |
| NAMA UAKPB : xxx KEMENTERIAN KESEHATAN RI | | | | | | | |
| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | | | | | | |
| KODE | URAIAN | SAT | KUANTITAS | NILAI | AK. PENYUSUTAN | NILAI BUKU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| XXX | | Buah | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | XXX | XXX | XXX | |
| Penanggung Jawab UAKPB | | | | | | | |
|, XX 2XXX | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | Tanggal | : XX-XX-XXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------------------|------------|-------|---------------|--------------|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|------|--------|-----|------------|-------|---------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|-----|-----|-----|
| | | | | | Halaman | : XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kode Lap | : LBIKT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA KOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA UAKPB : xxx KEMENTERIAN KESEHATAN RI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">SALDO PER 31 DESEMBER 2XXX</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">KODE</th> <th style="width: 15%;">URAIAN</th> <th style="width: 5%;">SAT</th> <th style="width: 10%;">KUANITITAS</th> <th style="width: 10%;">NILAI</th> <th style="width: 10%;">AK PENYUSUTAN</th> <th style="width: 5%;">NILAI BUKU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>XXX</td> <td></td> <td>Buah</td> <td>XXX</td> <td>XXX</td> <td>XXX</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>XXX</td> <td>XXX</td> <td>XXX</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | SALDO PER 31 DESEMBER 2XXX | | | | | KODE | URAIAN | SAT | KUANITITAS | NILAI | AK PENYUSUTAN | NILAI BUKU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | XXX | | Buah | XXX | XXX | XXX | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | XXX | XXX | XXX |
| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | SALDO PER 31 DESEMBER 2XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KODE | URAIAN | SAT | KUANITITAS | NILAI | AK PENYUSUTAN | NILAI BUKU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXX | | Buah | XXX | XXX | XXX | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | XXX | XXX | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penanggung Jawab UAKPB XX 2XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. BELANJA MODAL TA XXXX PER SATKER

| KODE | | NAMA | ALOKASI | REALISASI | ASET TETAP | | PERSEDIAAN | |
|-------|--------|------|---------|-----------|------------|--------|-----------------|--------------|
| NO | SATKER | | | | INTR | EKSTRA | Telah Digunakan | Sisa / Saldo |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | 0 | | | | |

2. Jenis Belanja (Barang/Bansos) TA XXXX digunakan untuk beli Aset Tetap

| No | Kode | Data Satker | | Belanja | | Aset Tetap | Digunakan Untuk | |
|-------|------|-------------|--------|---------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| | | Nama Satker | Barang | Bansos | Sendiri | | Satker Lain dengan BAST | Tidak Ada BAST |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

3. Pengelolaan Dana Hibah Langsung TA XXXX

| No | Nama Satker | Sumber Donor | Jumlah Terima TA XXXX | Pengelolaan Dana Hibah | | | Realisasi Belanja | | |
|-------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | No Register | No Rekening | Telah Masuk DIPA | Alasan Tidak Masuk DIPA | Terbit SPHL | Belum terbit SPHL |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

| |
|--|
| FORMULIR VI BAR REKONSILIASI INTERNAL SAK DAN SIMAK |
|--|

KOP SURAT

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
 LINGKUP INTERNAL<NAMA SATKER>
 PERIODE :
 NOMOR :

Pada hari ini, tanggal,, bulantahun, bertempat di....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada<NAMA SATKER>, untuk selanjutnya di sebut Pihak Pertama;

II. Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada<NAMA SATKER>, untuk selanjutnya di sebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal<NAMA SATKER> dengan cara membandingkan data akuntansi barang dengan data yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode, dengan hasil sebagai berikut :

| NO | Akun Neraca | Nilai BMN Periode : | | Saldo Akhir |
|----------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Saldo Awal | Mutasi | |
| I | POSISI BMN DI NERACA | | | |
| A | ASET LANCAR | | | Rp - |
| 1 | Persediaan * | | | Rp - |
| B | ASET TETAP | Rp - | Rp - | Rp - |
| 1 | Tanah | Rp - | Rp - | Rp - |
| 2 | Tanah BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 3 | Peralatan dan Mesin | Rp - | Rp - | Rp - |
| 4 | Peralatan dan Mesin BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 5 | Gedung dan Bangunan | Rp - | Rp - | Rp - |
| 6 | Gedung dan Bangunan BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 7 | Jalan, Irigasi & Jaringan | Rp - | Rp - | Rp - |
| 8 | Jalan, Irigasi & Jaringan BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 9 | Aset Tetap Lainnya | Rp - | Rp - | Rp - |
| 10 | Aset Tetap Lainnya BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 11 | KDP | Rp - | Rp - | Rp - |
| 12 | KDP BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| 13 | Akum. Penyusutan Aset Tetap | Rp - | Rp - | Rp - |
| 14 | Akum. Penyusutan Aset Tetap BLU | Rp - | Rp - | Rp - |
| C | ASET LAINNYA | Rp - | Rp - | Rp - |
| 1 | Aset Tidak Berwujud | Rp - | Rp - | Rp - |
| 2 | Aset Lain-lain ** | Rp - | Rp - | Rp - |
| D | Total Intrakomptabel (A+B+C) | Rp - | Rp - | Rp - |
| II | BMN NON NERACA | | | |
| A | Ekstrakomptabel | Rp - | Rp - | Rp - |
| 1 | BMN Ekstrakomptabel | Rp - | Rp - | Rp - |
| 2 | Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel | Rp - | Rp - | Rp - |
| B | BPYBDS | Rp - | Rp - | Rp - |
| C | BARANG HILANG | Rp - | Rp - | Rp - |
| D | BARANG RUSAK BERAT | Rp - | Rp - | Rp - |

* Nilai mutasi persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal persediaan:

** nilai yang disajikan hanya nilai aset tetap yang tidak dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan aset lain-lain berupa BMN

*** Rincian terlampir

III. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait Penyusunan LBP/KP dan LK K/L disajikan dalam Lampiran BERita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode....., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab UAKPB/UAPPB/
 Penanggung Jawab UAKPA/UAPPA-W UAPPA ES1/UAPA
 UAPPB E1/UAPB

Nama : Nama :
 NIP. NIP.

Mengetahui,
 Kepala/tgl/bln/th

Nama :
 NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA
 REKONSILIASI INTERNAL

| I. TANDAN TANGAN | |
|------------------|--------|
| | |
| keuangan | barang |

| II. PERIODE | |
|--------------|---------|
| | |
| <bulan, s/d> | <tahun> |

| III. UNIT ORGANISASI | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Kode | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <bagian anggaran> | <Eselon 1> | <Wilayah> | <Satuan kerja> | <Pencantun> | <jenis keuangan> |
| 2 Nama Satker | <input type="text"/> | | | | | |

| IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN | | | | |
|--|-------------------------------|-----|-------|-------------|
| No | PERKIRAAN NERACA | SAK | SIMAK | KESEPAKATAN |
| I | POSISI BMN DI NERACA | Rp | - | Rp |
| A | ASET LANCAR | Rp | - | Rp |
| 1 | Persediaan | Rp | - | Rp |
| B | ASET TETAP | Rp | - | Rp |
| 1 | Tanah | Rp | - | Rp |
| 2 | Tanah BLU | Rp | - | Rp |
| 3 | Peralatan dan Mesin | Rp | - | Rp |
| 4 | Peralatan dan Mesin BLU | Rp | - | Rp |
| 5 | Akum. Penyusutan | Rp | - | Rp |
| 6 | Gedung dan Bangunan | Rp | - | Rp |
| 7 | Gedung dan Bangunan BLU | Rp | - | Rp |
| 8 | Akum. Penyusutan | Rp | - | Rp |
| 9 | Jalan, Irigasi & Jaringan | Rp | - | Rp |
| 10 | Jalan, Irigasi & Jaringan BLU | Rp | - | Rp |
| 11 | Akum. Penyusutan | Rp | - | Rp |
| 12 | Aset Tetap Lainnya | Rp | - | Rp |
| 13 | Aset Tetap Lainnya BLU | Rp | - | Rp |
| 14 | Akum. Penyusutan | Rp | - | Rp |
| 15 | KDP | Rp | - | Rp |
| 16 | KDP BLU | Rp | - | Rp |
| C | ASET LAINNYA | Rp | - | Rp |
| 1 | Aset Tidak Berwujud | Rp | - | Rp |
| 2 | Aset Lain-lain | Rp | - | Rp |
| 3 | Akum. Penyusutan | Rp | - | Rp |
| D | SUB JMLAH (A+B+C) | Rp | - | Rp |
| II | BMN NON NERACA | Rp | - | Rp |
| A | Ekstrakomptabel | Rp | - | Rp |
| 1 | BMN Ekstrakomptabel | Rp | - | Rp |
| 2 | Akum. Penyusutan | Rp | - | Rp |
| G | TOTAL (D+E) | Rp | - | Rp |

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

| I. TANDAN TANGAN | |
|------------------|--------|
| keuangan | barang |

| II. PERIODE | |
|----------------|---------|
| <bulan, s/m/t> | <tahun> |

III. UNIT ORGANISASI

1 Kode

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <bagian anggaran> | <Eselon I> | <Wilayah> | <Satuan Kerja> | <Pembantu> | <Jenis Kewenangan> | | |

2 Nama Satker

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

| No | PERKIRAAN NERACA | SAK | SIMAK | KESEPAKATAN |
|----|-------------------------------|-----|-------|-------------|
| I | POSISI BMN DI NERACA | Rp | - Rp | - Rp |
| A | ASET LANCAR | Rp | - Rp | - Rp |
| 1 | Persediaan | Rp | - Rp | - Rp |
| B | ASET TETAP | Rp | - Rp | - Rp |
| 1 | Tanah | Rp | - Rp | - Rp |
| 2 | Tanah BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| 3 | Peralatan dan Mesin | Rp | - Rp | - Rp |
| 4 | Peralatan dan Mesin BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| 5 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| 6 | Gedung dan Bangunan | Rp | - Rp | - Rp |
| 7 | Gedung dan Bangunan BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| 8 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| 9 | Jalan, Irigasi & Jaringan | Rp | - Rp | - Rp |
| 10 | Jalan, Irigasi & Jaringan BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| 11 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| 12 | Aset Tetap Lainnya | Rp | - Rp | - Rp |
| 13 | Aset Tetap Lainnya BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| 14 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| 15 | KDP | Rp | - Rp | - Rp |
| 16 | KDP BLU | Rp | - Rp | - Rp |
| C | ASET LAINNYA | Rp | - Rp | - Rp |
| 1 | Aset Tidak Berwujud | Rp | - Rp | - Rp |
| 2 | Aset Lain-lain | Rp | - Rp | - Rp |
| 3 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| D | SUB JMLAH (A+B+C) | Rp | - Rp | - Rp |
| II | BMN NON NERACA | Rp | - Rp | - Rp |
| E | Ekstrakomptabel | Rp | - Rp | - Rp |
| 1 | BMN Ekstrakomptabel | Rp | - Rp | - Rp |
| 2 | Akum. Penyusutan | Rp | - Rp | - Rp |
| B | BPYBDS | Rp | - Rp | - Rp |
| C | BARANG HILANG | Rp | - Rp | - Rp |
| D | RUSAK BERAT | Rp | - Rp | - Rp |
| | TOTAL (I+II) | Rp | - Rp | - Rp |

| VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUKAN BMN | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------|--|
| No | PERKIRAAN NERACA | BELANJA MODAL | BELANJA NON MODAL | | | TOTAL | |
| | | | BELANJA BARANG | BELANJA BANSOS | BELANJA LAINNYA | | |
| A | ASET LANCAR | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | Persediaan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| B | ASET TETAP | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | Tanah | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | Tanah BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 3 | Peralatan dan Mesin | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 4 | Peralatan dan Mesin BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 5 | Gedung dan Bangunan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 6 | Gedung dan Bangunan BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 7 | Jalan, Irigasi & Jaringan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 8 | Jalan, Irigasi & Jaringan BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 9 | Aset Tetap Lainnya | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 10 | Aset Tetap Lainnya BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 11 | KDP | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 12 | KDP BLU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| C | ASET LAINNYA | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | Kemitraan Dengan Pihak Ke 3 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| 3 | Aset Lain-lain | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| II | BMN NON NERACA | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| A | BMN Ekstrakomptabel | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| B | BPYDDS | | | | | | |
| | TOTAL (I+II) | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode adalah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

- a.
- b.

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode tahun anggaran terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp..... dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- a.
- b.

Terdapat koreksi audit BPK sebesar Rp..... dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- a.
- b.

Terdapat selisih nilai antara mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap selama periode berjalan (pembelian dan pengambangan BMN) dengan

total realisasi belanja modal sebesar Rp..... dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

**FORMULIR VII
ILUSTRASI
PENYESUAIAN DAN
MEMO
KARWAS**

MEMO PENYESUAIAN

| FORMULIR MEMO PENYESUAIAN | |
|---|--|
| Kementerian Negara/Lembaga | |
| Eselon I | : |
| Wilayah | : |
| Satuan Kerja | : |
| No. Dokumen | : |
| Tanggal | : |
| Tahun Anggaran | : |
| Keterangan | : |
| Kategori Jurnal Penyesuaian | |
| <input type="checkbox"/> pendapatan diterima dimuka | <input type="checkbox"/> koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> pendapatan Yang Masih Harus diterima | <input type="checkbox"/> pendapatan Selisih Kurs belum terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja dibayar dimuka | <input type="checkbox"/> Beban selisih Kurs Belum Teresa |
| <input type="checkbox"/> Belanja Yang masih harus dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> koreksi |
| No. D/K | |
| Kode Akun | |
| Uraian Nama Akun | Rupiah Debet Rupiah Kredit |
| | |
| | |
| Dibuat oleh | : |
| Tanggal | : |
| | Disetujui |
| | Tanggal |
| | : |
| | : |
| | Direkam oleh |
| | Tanggal |
| | : |
| | : |

| KARTU PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA | | | | | KARTU PENGAWASAN | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|-----|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 31 DESEMBER 20X1 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| No | Nama Rekanan | Nilai SSBP | Jangka Waktu | TMT | Jatuh Tempo | S.d. 31 Desember 20X0 | Daluwarsa Tahun Berjalan | Pendapatan Diterima Di Muka |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Ket :

- Angka pada kolom 7 merupakan porsi pendapatan pada tahun lalu dan tahun berjalan / nilai barang / jasa yang telah diserahkan oleh satker, dan telah di akui se pendapatan operasional
- Angka pada kolom 8 merupakan porsi pendapatan yang belum dapat diakui pada tahun berjalan / nilai barang / jasa yang masih harus diserahkan yang disajikan

| KARTU PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|-----|-------------|----------|--------------------------------------|
| 31 DESEMBER 20X1 | | | | | | | |
| KARTU PENGAWASAN | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| No | Nama Rekanan | Nilai Kontrak | Jangka Waktu | TMT | Jatuh Tempo | Terbayar | Pendapatan yang masih harus diterima |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Ket : | | | | | | | |
| - Angka pada kolom 7 merupakan jumlah pembayaran oleh rekanan pada tahun lalu dan tahun berjalan | | | | | | | |
| - Angka pada kolom 8 merupakan porsi pendapatan yang diakui pada tahun berjalan / nilai barang / jasa yang telah diserahkan kepada rekanan yang disajikan | | | | | | | |

FORMULIR VIII
DEFINISI OPERASIONAL AKUN

- 1 ASET
Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 11 ASET LANCAR
Digunakan untuk mencatat aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
- 111 KAS DAN SETARA KAS
Digunakan untuk mencatat kas dan setara kas berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 1113 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya
- 111322 Kas Pemerintah yang ada di K/L
Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di K/L
- 111323 Kas Pemerintah yang ada di BLU
Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di BLU
- 111324 Kas di Rekening PFK
Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening PFK
- 111327 Kas di rekening PHLN
Digunakan untuk mencatat Kas di rekening PHLN
- 111329 Kas lainnya
Digunakan untuk mencatat Kas lainnya
- 1116 Kas di Bendahara Pengeluaran
- 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran UP
Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening

- bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP)) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
- 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP
Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
- 1117 Kas di Bendahara Penerimaan
- 11171 Kas di Bendahara Penerimaan
- 111711 Kas di Bendahara Penerimaan
Digunakan untuk mencatat Kas di Bendahara Penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara.
- 1118 Kas Lainnya dan Setara Kas
- 11181 Setara Kas
- 111811 Surat Berharga
Digunakan untuk mencatat setara kas Surat Berharga
- 111812 Penempatan di Bank Umum
Digunakan untuk mencatat setara kas Penempatan di Bank Umum
- 111813 Reverse Repo
Digunakan untuk mencatat setara kas Reverse Repo

- 111814 Foreign Exchange
Digunakan untuk mencatat setara kas transaksi Foreign Exchange.
- 111819 Setara Kas lainnya
Digunakan untuk mencatat Setara Kas lainnya
- 11182 Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga
- 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya dan Setara Kas, yang mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.
- 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah Langsung yang telah disahkan.
- 111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
Digunakan untuk mencatat kas lainnya di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan
- 1119 Kas pada Badan Layanan Umum
- 11191 Kas BLU
- 111911 Kas dan Bank BLU
Digunakan untuk mencatat Kas Pada BLU, yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di BLU (yang sudah disahkan BUN).
- 111912 Dana yang akan Dijaminkan BLU
Digunakan untuk mencatat Dana yang akan Dijaminkan BLU
- 111913 Dana yang akan dipadankan BLU
Digunakan untuk mencatat Dana yang akan dipadankan BLU
- 11192 Setara Kas BLU
- 111921 Surat Berharga BLU
Digunakan untuk mencatat Surat Berharga BLU
- 111929 Setara kas Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Setara kas Lainnya BLU
- 113 INVESTASI JANGKA PENDEK
- 1131 Investasi dalam Deposito
- 11311 Investasi dalam Deposito

- 113111 Investasi dalam Deposito Jangka pendek
Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Deposito Jangka pendek
- 1133 Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum
- 11331 Deposito Jangka Pendek BLU
- 113311 Deposito BLU
Digunakan untuk mencatat Deposito BLU
- 113319 Investasi Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Investasi Lainnya BLU
- 1139 Investasi Jangka Pendek Lainnya
- 11391 Investasi Jangka Pendek Lainnya
- 113911 Investasi Jangka Pendek Lainnya
Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Pendek Lainnya
- 114 BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA, DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
- 1141 Belanja Dibayar di Muka (prepaid)
- 11411 Belanja Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut. Dan atas pengeluaran tersebut telah terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen² yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan dari pihak ketiga seperti kwitansi, invoice, dll.
- 114111 Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)
- 114112 Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)
- 114113 Belanja Pembayaran Bunga Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja pembayaran bunga dibayar di muka (prepaid)
- 114114 Belanja Lain-lain Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-Lain Dibayar di Muka (prepaid)

- 114115 Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)
- 114116 Belanja Hibah Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Dibayar di Muka (prepaid)
- 114117 Belanja Subsidi Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Dibayar di Muka (prepaid)
- 114118 Belanja Bantuan Sosial Dibayar di Muka (prepaid)
Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial Dibayar di Muka (prepaid)
- 1142 Uang muka belanja (prepayment)
- 11421 Uang muka belanja pemerintah pusat (prepayment)
Digunakan untuk mencatat pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat.
- 114211 Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja pegawai (prepayment)
- 114212 Uang Muka Belanja Barang (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja barang (prepayment)
- 114213 Uang Muka Belanja Modal (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja modal (prepayment)
- 114214 Uang Muka Belanja Pembayaran Bunga (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja pembayaran bunga (prepayment)
- 114215 Uang Muka Belanja Subsidi (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja subsidi (prepayment)
- 114216 Uang Muka Belanja Hibah (Prepayment)
Digunakan untuk mencatat uang muka belanja hibah (prepayment)
- 114217 Uang Muka Belanja Bantuan Sosial (Prepayment)

| | |
|--------|---|
| | Digunakan untuk mencatat uang muka belanja bantuan sosial (prepayment) |
| 114218 | Uang Muka Belanja Lain lain (prepayment) Digunakan untuk mencatat Uang Muka Belanja Lain-Lain (prepayment) |
| 1143 | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima |
| 11431 | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima |
| 114311 | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Digunakan untuk mencatat penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima pada akhir periode pelaporan. |
| 115 | PIUTANG Digunakan untuk mencatat Piutang, meliputi jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara/Lembaga dan/atau Hak Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian atau akibat lainnya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. |
| 1152 | Piutang Bukan Pajak Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari PNBPN, meliputi seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah |
| 11521 | Piutang Bukan Pajak |
| 115211 | Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Digunakan untuk mencatat Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| 1153 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran |
| 11531 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran |
| 115311 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran |
| 1154 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi |
| 11541 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan |
| 115411 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi |
| 11542 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi |

- 115421 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
- 1156 Piutang dari KUN
- 11561 Piutang dari KUN
- 115611 Piutang dari BUN
Digunakan untuk mencatat Piutang dari BUN
- 115612 Piutang dari KPPN
Digunakan untuk mencatat Piutang dari KPPN
- 115613 Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima
Digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Uang Persediaan. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Kas Di Bendahara Pengeluaran UP.
- 115614 Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan diterima
Digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Tambahan Uang Persediaan. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP.
- 115615 Piutang dari Uang Muka Belanja Barang yang akan diterima
Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait permintaan uang muka belanja barang. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun uang muka belanja barang.
- 115616 Piutang dari Uang Muka Belanja Modal yang akan diterima
Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait uang muka belanja modal. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Uang Muka Belanja Modal.
- 115617 Piutang dari Persekot Gaji yang akan diterima
Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait persekot gaji. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Uang Muka Belanja Pegawai.
- 11563 Piutang dari Kas BLU

- 115631 Piutang dari Kas BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang dari Kas BLU
- 1157 Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum
- 11571 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa
- 115711 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
- 115712 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
- 115719 Piutang BLU penyedia Barang dan Jasa Lainnya
Digunakan untuk mencatat Piutang BLU penyedia Barang dan Jasa Lainnya
- 11579 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
- 115791 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
- 1158 Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
- 11581 Piutang Sewa BLU
- 115811 Piutang Sewa Tanah BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Tanah BLU
- 115812 Piutang Sewa Gedung BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Gedung BLU
- 115813 Piutang Sewa Ruang BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Ruang BLU
- 115814 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
- 115819 Piutang Sewa Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Lainnya BLU
- 11582 Piutang dari Penjualan Aset BLU
- 115821 Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- 115829 Piutang dari penjualan Aset lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Piutang dari penjualan Aset lainnya BLU
- 11589 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional

- 115891 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
- 116 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
- 1162 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak
- 11621 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak
- 116211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang PNBPN
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang PNBPN
- 116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lainnya
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lainnya
- 1163 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- 11631 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- 116311 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- 1164 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
- 11641 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
- 116411 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 11642 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
- 116421 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
- 1165 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Investasi Permanen

- 11651 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Investasi Permanen
- 116511 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Investasi Permanen
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Investasi Permanen
- 1166 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
- 11661 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa
- 116611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
- 116612 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
- 11669 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Operasional Lainnya BLU
- 116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
- 1167 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
- 11671 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa BLU
- 116711 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Tanah BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Tanah BLU
- 116712 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Gedung BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Gedung BLU
- 116713 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Ruangan BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Ruangan BLU

- 116714 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
- 116719 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Lainnya BLU
- 11672 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset BLU
- 116721 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- 116722 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
- 11679 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Non Operasional Lainnya BLU
- 116791 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
- 117 PERSEDIAAN
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- 1171 Persediaan
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

- 11711 Persediaan Bahan untuk Operasional
- 117111 Barang Konsumsi
Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk kegiatan operasional Satker berupa Barang Konsumsi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN, misalnya : ATK, buku nikah, plat nomor, dll.
- 117112 Amunisi
Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Amunisi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117113 Bahan untuk Pemeliharaan
Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Bahan untuk Pemeliharaan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117114 Suku Cadang
Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Suku Cadang sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 11712 Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
- 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Pita Cukai, Materai dan Leges sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Hewan dan Tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai

- dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses

- Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang dalam proses produksi untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 11713 Persediaan Bahan untuk Proses Produksi
- 117131 Bahan Baku
Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk proses produksi berupa bahan baku sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
- 117132 Barang dalam Proses
Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang dalam proses produksi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
- 11714 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
- 117141 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang yang digunakan dalam rangka Bantuan Sosial.
- 11719 Persediaan Bahan Lainnya
Digunakan untuk mencatat persediaan selain dari bahan untuk operasional, bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, dan bahan untuk proses produksi
- 117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
Digunakan untuk mencatat Persediaan bahan lainnya berupa persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
- 117192 Persediaan Barang Hasil Sitaan
Digunakan untuk mencatat Persediaan bahan lainnya berupa Barang Hasil Sitaan
- 117199 Persediaan Lainnya
Digunakan untuk mencatat Persediaan Lainnya
- 1172 Persediaan Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khusus satker Badan Layanan Umum

- 11721 Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa
Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU sektor Penyedia Barang dan Jasa
- 117211 Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pelayanan Kesehatan
- 117212 Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pelayanan Pendidikan
- 1179 Persediaan yang Belum Diregister
- 11791 Persediaan yang Belum Diregister
- 117911 Persediaan yang Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap persediaan yang diterima.
- 118 PIUTANG PFK
- 1181 Piutang PFK
- 11811 Piutang PFK
- 118111 Piutang PFK 10 % Gaji
Piutang yang berasal dari penerimaan PFK 10% melalui potongan SPM Gaji. Akun ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN.
- 118113 Piutang PFK Beras Bulog
Piutang yang berasal dari penerimaan PFK Beras Bulog melalui potongan SPM Gaji. Akun ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN.
- 118118 Piutang PFK 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
Digunakan untuk mencatat Piutang PFK 2% Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
- 118119 Piutang PFK Lain-lain
Digunakan untuk mencatat Piutang PFK Lain-Lain
- 12 INVESTASI JANGKA PANJANG
Digunakan untuk mencatat investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 121 INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN
- 1214 Investasi dalam Obligasi
- 12141 Investasi dalam Obligasi

- 121411 Investasi dalam Obligasi
Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Obligasi sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
- 1216 Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum
- 12161 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Non Permanen
- 121611 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan Non Permanen
Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Kesehatan Non Permanen
- 121613 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan Non Permanen
Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Pendidikan Non Permanen
- 1219 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen Lainnya yang tidak memenuhi kriteria Investasi dalam Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Obligasi, Penyertaan Modal Pemerintah dan BLU
- 12191 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen Lainnya yang tidak memenuhi kriteria Investasi dalam Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Obligasi, Penyertaan Modal Pemerintah dan BLU
- 121911 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
- 1222 Investasi Permanen Badan Layanan Umum
- 12221 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa ² Permanen
Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada BLU Penyedia Barang dan Jasa mencakup layanan kesehatan, pendidikan, penunjang konstruksi, jasa komunikasi dan penyedia barang dan jasa lainnya.
- 122211 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan Permanen
Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Kesehatan Permanen
- 122212 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan Permanen
Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Pendidikan Permanen

- 1229 Investasi Permanen Lainnya
Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang lainnya, yaitu investasi permanen yang tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dan Badan Layanan Umum.
- 12291 Investasi Permanen Lainnya
Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang lainnya yang terdiri dari Investasi dalam Obligasi, pada Otorita, pada Bank Indonesia dan Investasi Lain-lain.
- 122911 Investasi dalam Obligasi
Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Obligasi
- 122912 Investasi pada Otorita
Digunakan untuk mencatat Investasi pada Otorita
- 122913 Investasi pada Bank Indonesia
Digunakan untuk mencatat Investasi pada Bank Indonesia
- 122919 Investasi Lain-lain
Digunakan untuk mencatat Investasi Lain-lain
- 13 ASET TETAP
Digunakan untuk mencatat aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 131 TANAH
Digunakan untuk mencatat aset tetap berwujud tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.
- 1311 Tanah
Digunakan untuk mencatat tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- 13111 Tanah
- 131111 Tanah
Digunakan untuk mencatat BMN berupa Aset Tetap Tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

- 131112 Tanah dari Hibah
Digunakan untuk mencatat tanah yang berasal dari hibah.
- 1312 Tanah Belum Diregister
- 13121 Tanah Belum Diregister
- 131211 Tanah Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Tanah yang diterima.
- 1313 Tanah Badan Layanan Umum
- 13131 Tanah BLU
- 131311 Tanah BLU
Digunakan untuk mencatat tanah yang dimiliki atau diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- 1314 Tanah Belum Diregister BLU
- 13141 Tanah Belum Diregister BLU
- 131411 Tanah Belum Diregister BLU
Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Tanah yang diterima.
- 132 PERALATAN DAN MESIN
- 1321 Peralatan dan Mesin
- 13211 Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dengan masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
- 132111 Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat Peralatan dan Mesin. Mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai kodefikasi BMN
- 132112 Peralatan dan Mesin dari Hibah
Digunakan untuk mencatat Peralatan dan Mesin dari Hibah.
- 1322 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- 13221 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

- 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Peralatan dan Mesin yang diterima.
- 1323 Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum
- 13231 Peralatan dan Mesin BLU
- 132311 Peralatan dan Mesin BLU
Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dimiliki atau diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
- 1324 Peralatan dan Mesin Belum Diregister BLU
- 13241 Peralatan dan Mesin Belum Diregister BLU
- 132411 Peralatan dan Mesin Belum Diregister BLU
Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Peralatan dan Mesin yang diterima.
- 133 GEDUNG DAN BANGUNAN
- 1331 Gedung dan Bangunan
- 13311 Gedung dan Bangunan
- 133111 Gedung dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan meliputi antara lain bangunan gedung monumen bangunan menara rambu-rambu dan tugu titik kontrol/pasti
- 133112 Gedung dan Bangunan dari Hibah
Digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan yang berasal dari hibah.
- 1332 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- 13321 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- 133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Gedung dan Bangunan yang diterima.
- 1333 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum
- 13331 Gedung dan Bangunan BLU

- 133311 Gedung dan Bangunan BLU
Digunakan untuk mencatat seluruh Gedung dan Bangunan yang dibeli, diperoleh atau dibangun Badan Layanan Umum dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap digunakan.
- 1334 Gedung dan Bangunan Belum Diregister BLU
- 13341 Gedung dan Bangunan Belum Diregister BLU
- 133411 Gedung dan Bangunan Belum Diregister BLU
Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Gedung dan Bangunan yang diterima.
- 134 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
- 1341 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 13411 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 134111 Jalan dan Jembatan
Digunakan untuk mencatat Jalan dan Jembatan. Jalan dan jembatan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 134112 Irigasi
Digunakan untuk mencatat Irigasi. Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
- 134113 Jaringan
Digunakan untuk mencatat Jaringan. Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
- 134114 Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
Digunakan untuk mencatat aset berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang berasal dari hibah.
- 1342 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- 13421 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- 134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Jalan dan Jembatan yang diterima.
- 134212 Irigasi Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Irigasi yang diterima.

- 134213 Jaringan Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Jaringan yang diterima.
- 1343 Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum
- 13431 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU
- 134311 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU
Digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun atau diperoleh oleh Badan Layanan Umum serta dikuasai oleh satker BLU dan dalam kondisi siap digunakan.
- 1344 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister BLU
- 13441 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister BLU
- 134411 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister BLU
Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diterima.
- 135 ASET TETAP LAINNYA
- 1351 Aset Tetap Lainnya
- 13511 Aset Tetap Renovasi
- 135111 Aset Tetap Renovasi
Digunakan untuk mencatat kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya pengembangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik entitas akuntansi, namun digunakan dalam kegiatan operasional entitas akuntansi yang melakukan renovasi. Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap Renovasi memiliki kriteria sbb:
1. Aset yang direnovasi bukan milik entitas akuntansi bersangkutan
 2. Aset yang direnovasi digunakan untuk kegiatan operasional entitas akuntansi yang merenovasi
 3. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan oleh entitas akuntansi perenovasi kepada pemilik Aset.
- 13512 Aset Tetap Lainnya
- 135121 Aset Tetap Lainnya
Digunakan untuk mencatat seluruh Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dengan maksud

- untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan siap digunakan.
- 135122 Aset Tetap Lainnya dari Hibah
Digunakan untuk mencatat aset lainnya yang berasal dari hibah.
- 1352 Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum
- 13521 Aset Tetap Lainnya BLU
- 135211 Aset Tetap Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat seluruh Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional satker BLU dan dalam kondisi siap digunakan.
- 13522 Aset Tetap Renovasi BLU
- 135221 Aset Tetap Renovasi BLU
Digunakan untuk mencatat kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya pengembangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik satker BLU, namun digunakan dalam kegiatan operasional satker BLU yang melakukan renovasi. Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap Renovasi memiliki kriteria sbb:
1. Aset yang direnovasi bukan milik entitas akuntansi bersangkutan
 2. Aset yang direnovasi digunakan untuk kegiatan operasional entitas akuntansi yang merenovasi
 3. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan oleh entitas akuntansi perenovasi kepada pemilik Aset.
- 136 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 1361 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang

- dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 13611 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 1362 Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum
- 13621 Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum
- 136211 Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum. Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan oleh satker BLU, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 137 AKUMULASI PENYUSUTAN
- 1371 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
- 13711 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
- 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli.
- 13712 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 137121 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau

- masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 1372 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
- 13721 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
- 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
- 13722 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan BLU
- 137221 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
- 1373 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 13731 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi
- 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jalan dan Jembatan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
- 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Irigasi mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
- 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jaringan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
- 13732 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
- 137321 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup penurunan kapasitas

- atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
- 1374 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
 - 13741 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
 - 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
 - 13742 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU
 - 137421 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
 - 139 ASET TETAP YANG BELUM DIREGISTER
 - 1391 Aset Tetap yang Belum Diregister
 - 13911 Aset Tetap yang Belum Diregister
 - 139111 Aset Tetap yang Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Aset Tetap yang diterima.
 - 15 PIUTANG JANGKA PANJANG
 - 151 PIUTANG TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN
 - 1511 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
 - 15111 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
 - 151111 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Jumlah TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara.
 - 1512 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU
 - 15121 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Badan Layanan Umum
 - 151211 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah di satker BLU secara angsuran

kepada pegawai pemerintah. Jumlah TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara.

152 PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI

1521 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

15211 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

152111 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri non bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Jumlah TPA/TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan/ Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara/Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan ke kas negara.

1522 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU

15221 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Badan Layanan Umum

152211 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Badan Layanan Umum

Digunakan untuk mencatat jumlah tagihan yang timbul atas proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai non bendahara satker BLU dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/

pegawai non bendahara satker BLU tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Jumlah TPA/TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan/ Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara/Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan ke kas negara.

155 PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

1551 Piutang Jangka Panjang lainnya

15511 Piutang Jangka Panjang lainnya

155111 Piutang Jangka Panjang lainnya

Digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah.

156 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH JANGKA PANJANG

1561 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran

15611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran

156111 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran

Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Penjualan Angsuran

1562 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran
BLU

15621 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran
BLU

156211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Penjualan Angsuran
BLU

Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk satker BLU atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Penjualan Angsuran
BLU

- 1563 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 15631 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 156311 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
- 1564 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
- 15641 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
- 156411 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk satker BLU atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
- 1569 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya
- 15691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya
- 156911 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya
- 16 ASET LAINNYA
- 161 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
- 1611 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- 16111 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- 161111 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan

- yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).
- 162 ASET TIDAK BERWUJUD
- 1621 Aset Tak Berwujud
Digunakan untuk mencatat aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 16211 Goodwill
- 162111 Goodwill
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Goodwill
- 16212 Hak Cipta
- 162121 Hak Cipta
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 16213 Royalti
- 162131 Royalti
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Royalti
- 16214 Paten
- 162141 Paten
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 16215 Software
- 162151 Software
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Software
- 16216 Lisensi

- 162161 Lisensi
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu
- 16217 Hasil Kajian/Penelitian
- 162171 Hasil Kajian/Penelitian
Digunakan untuk mencatat aset tak berwujud lainnya berupa hasil kajian/penelitian.
- 16219 Aset Tak Berwujud Lainnya
- 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut
- 1622 Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum
- 16221 Software Badan Layanan Umum
- 162211 Software Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Software pada Badan Layanan Umum
- 16222 Hak Cipta BLU
- 162221 Hak Cipta BLU
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada BLU
- 16223 Royalti BLU
- 162231 Royalti BLU
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Royalti pada BLU
- 16224 Paten BLU
- 162241 Paten BLU
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) pada satker BLU atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi,

- yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 16229 Aset Tak Berwujud Lainnya Badan Layanan Umum
 - 162291 Aset Tak Berwujud Lainnya Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Lainnya pada Badan Layanan Umum
 - 1623 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
 - 16231 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
 - 162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
 - 1624 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan BLU
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Badan Layanan Umum
 - 16241 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan BLU
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Badan Layanan Umum
 - 162411 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan BLU
Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Badan Layanan Umum
 - 163 DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
 - 1631 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
 - 16311 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
 - 165 DANA KELOLAAN BLU
 - 1651 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
 - 16511 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
 - 165111 Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan
Digunakan untuk mencatat Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan
 - 166 ASET LAIN LAIN

- 1661 Aset Lain lain
Digunakan untuk mencatat Aset Lain4lain milik pemerintah sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- 16611 Aset Lain lain K/L
Digunakan untuk mencatat Aset Lain lain
- 166111 Aset Lain lain
Digunakan untuk mencatat Aset Lain lain
- 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
Digunakan untuk mencatat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
- 1662 Aset Lain lain Badan Layanan Umum
- 16621 Aset Lain lain Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain milik BLU sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- 166211 Aset Lain lain Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat Aset Lain lain Badan Layanan Umum
- 166212 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
Digunakan untuk mencatat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi BLU
- 166213 Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
Digunakan untuk mencatat Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
- 1663 Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP
- 16631 Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP
Digunakan untuk mencatat Aset Lain4lain sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas yang berasal dari Reklasifikasi UP/TUP.
- 1664 Aset Lainnya yang Belum Diregister
- 16641 Aset Lainnya yang Belum Diregister
- 166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister
Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Aset lainnya yang diterima.
- 169 AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA

- 1691 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli.
- 16911 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga
- 169111 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 16912 Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain K/L
- 169121 Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Lain lain mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169133 Akumulasi Penyusutan Aset dari BUMN yang belum ditetapkan statusnya
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset dari BUMN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169134 Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset yang berasal dari KKS mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.

- 169138 Akumulasi Penyusutan Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Idle yang diserahkan ke DJKN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 1692 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BLU
- 16921 Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain Badan Layanan Umum
- 169211 Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset lain-lain mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 169212 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset tetap tidak digunakan dalam operasi pemerintah mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 1693 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
- 16931 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
- 169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi tak berwujud mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi hak cipta yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.
- 169313 Akumulasi Amortisasi Royalti
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi royalti yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.

- 169314 Akumulasi Amortisasi Paten
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi paten yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.
- 169315 Akumulasi Amortisasi Software
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi software mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi lisensi mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi aset tak berwujud lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
- 1694 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya BLU
- 16941 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum
- 169411 Akumulasi Amortisasi Software Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi software mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 169412 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi hak cipta yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.
- 169413 Akumulasi Amortisasi Royalti BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi royalti yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.

- 169414 Akumulasi Amortisasi Paten BLU
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi paten yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.
- 169415 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi aset tak berwujud lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
- 2 KEWAJIBAN
Digunakan untuk mencatat kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
- 211 UTANG PERHITUNGAN Fihak KETIGA
- 2111 Utang Perhitungan Fihak Ketiga
- 21111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) I
Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pungutan Iuran Askes, Bulog, Taspen/Asabri dan Taperum serta badan lainnya. Termasuk akun ini antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen, Bulog, Bapertarum, dan Askes.
- 211111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
- 211118 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
Digunakan untuk mencatat Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % AsKes Bidan/Dokter PTT
- 211119 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lain lain
Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lain-lain

- 21112 Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya
- 212 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
- 2121 Utang kepada Pihak Ketiga
- 21211 Belanja pemerintah pusat yang masih harus dibayar
- 212111 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya belanja pegawai oleh pemerintah yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat utang karena belanja barang yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 212113 Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat utang karena belanja modal yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 212114 Belanja Hibah Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat utang karena belanja hibah yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 212115 Belanja Bantuan Sosial Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat Belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar
- 212116 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Yang Masih Harus Dibayar
- 212119 Belanja Lain Lain Yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain yang masih harus dibayar
- 21212 Utang kepada Pihak Ketiga BLU
- 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU
Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh BLU yang dapat berasal dari antara lain

- kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 21219 Utang kepada Pihak Ketiga lainnya
- 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja diluar kategori belanja pemerintah pusat dan BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 212192 Dana Pihak Ketiga
Digunakan untuk mencatat saldo kas di rekening Bendahara Penerimaan yang akan disetorkan kepada pihak ketiga.
- 219 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di Muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan dan utang jangka pendek lainnya.
- 2192 Pendapatan Diterima di Muka
- 21921 Pendapatan Diterima di Muka
Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang telah diterima dan disetor ke rekening kas umum negara namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak
- 219211 Pendapatan Sewa Diterima di Muka
Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Sewa yang telah Diterima di Muka
- 2195 Uang Muka dari KPPN
- 21951 Uang Muka dari KPPN
- 219511 Uang Muka dari KPPN
Digunakan untuk mencatat Uang Muka yang berasal dari KPPN (uang persediaan dan tambahan uang persediaan) yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca
- 2196 Pendapatan Yang Ditangguhkan
- 21961 Pendapatan Yang Ditangguhkan

- 219611 Pendapatan Yang Ditangguhkan
Digunakan untuk mencatat pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke kas negara
- 21967 Hibah Langsung yang Belum Disahkan
- 219671 Hibah Langsung yang Belum Disahkan
Digunakan untuk mencatat Hibah Langsung yang Belum Disahkan.
- 2197 Utang Kepada KUN
- 21971 Utang Kepada KUN
- 219711 Utang Kepada KUN
Digunakan untuk mencatat utang4utang kepada Kas Umum Negara
- 21972 Utang Kepada kas BLU
- 219721 Utang Kepada kas BLU
Digunakan untuk mencatat Utang kepada Kas BLU.
- 2199 Utang Jangka Pendek Lainnya
- 21991 Utang Jangka Pendek lainnya
- 219912 Dana yang akan diserahkan kepada BLU Bidang Pendidikan
Digunakan untuk mencatat Dana yang akan diserahkan kepada BLU di Bidang Pendidikan
- 219913 Utang Jangka Pendek Lain lain
Digunakan untuk mencatat utang-utang Jangka Pendek Lain lain
- 21996 Utang Bendahara
- 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara.
- 219962 Utang perwalian Bendahara yang belum disampaikan kepada yang berhak
Utang yang berasal dari dana titipan pihak ketiga yang berada dalam catatan bendahara pengeluaran.
- 219963 Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor
Utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara penerimaan sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara.

| | | |
|--------|----------------------------|---|
| 3 | EKUITAS | Digunakan untuk mencatat pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. |
| 31 | EKUITAS | |
| 313 | TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | |
| 3131 | Due to Due from | |
| 31311 | Ditagihkan ke Entitas Lain | |
| 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | Penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksi tersebut akan diseimbangkan dengan ditagihkan ke entitas lainnya. |
| 31312 | Diterima dari Entitas Lain | |
| 313121 | Diterima dari Entitas Lain | Penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksinya akan diseimbangkan dengan diterima dari entitas lainnya |
| 3132 | Transfer | |
| 31321 | Transfer Keluar | |
| 313211 | Transfer Keluar | Digunakan untuk mencatat Transfer Keluar |
| 31322 | Transfer Masuk | |
| 313221 | Transfer Masuk | Digunakan untuk mencatat Transfer Keluar |
| 39 | EKUITAS | |
| 391 | EKUITAS | |
| 3911 | Ekuitas | |
| 39111 | Ekuitas | |
| 391111 | Ekuitas | Digunakan untuk mencatat Surplus/Defisit Laporan Operasional. |
| 391112 | Surplus/Defisit LO | Digunakan untuk mencatat Surplus/Defisit LO. |
| 391113 | Koreksi Nilai Persediaan | Digunakan untuk mencatat koreksi nilai persediaan. |
| 391114 | Revaluasi Aset Tetap | Digunakan untuk mencatat revaluasi aset tetap. |

- 391115 Dana yang Disediakan Untuk Pengalihan Aset
Digunakan untuk mencatat ekuitas dana yang disediakan untuk pengalihan aset.
- 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Digunakan untuk mencatat Koreksi Nilai Aset Tetap yang dilakukan selain karena revaluasi.
- 4 PENDAPATAN NEGARA
- 42 PENDAPATAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
- 423 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA
- 4231 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta
Pendapatan dari Penjualan
- 42311 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
- 423115 Pendapatan Penjualan Obat;obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
Penjualan vaksin dan antigen hewan ternak pada Kementerian Pertanian (BA 018) termasuk di dalamnya Penjualan radioisotop pada BATAN (BA 042.03), dan pada Kementerian Negara/Lembaga lainnya.
- 423119 Pendapatan Penjualan Lainnya
Penjualan yang tidak termasuk ke dalam kelompok pendapatan atas penjualan; penjualan di atas.
- 42312 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
- 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah dinas, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli
Digunakan untuk mencatat pendapatan kompensasi sewa beli, termasuk pendapatan dari kompensasi rumah dinas melalui kontrak sewa beli.

- 423125 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Tanah, Gedung dan Bangunan, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423126 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Peralatan dan Mesin, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423127 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar jalan, irigasi dan jaringan, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 42314 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
- 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian, termasuk pendapatan sewa rumah dinas.
- 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423143 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423144 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423145 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin, merupakan pendapatan umum yang bisa ada di semua Kementerian Negara/Lembaga.

- 423146 Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 423147 Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)
Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 423148 Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)
Digunakan untuk mencatat pendapatan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya, merupakan pendapatan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- 42315 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
- 423151 Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengelolaan barang, berupa pemanfaatan, pemindahtanganan, serta penjualan BMN pada Pengelola Barang.
- 4232 Pendapatan Jasa
- 42321 Pendapatan Jasa I
- 423211 Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan maupun kementerian lainnya.

- 42322 Pendapatan Jasa II
- 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah.
- 423229 Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
Merupakan pendapatan yang berasal dari Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang diselenggarakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Masuk pendapatan Kementerian Kesehatan (024).
- 42323 Pendapatan Jasa Luar Negeri
- 423231 Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
Pendapatan dari surat perjalanan RI dan masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
- 42324 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
- 42329 Pendapatan Jasa Lainnya
- 423291 Pendapatan Jasa Lainnya
Pendapatan jasa yang tidak termasuk kelompok pendapatan jasa I dan II.
- 4235 Pendapatan Pendidikan
- 42351 Pendapatan Pendidikan
- 423511 Pendapatan Uang Pendidikan
Uang pendidikan berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lain.
- 4239 Pendapatan Lain lain
- 42391 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I
- 423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
Digunakan untuk mencatat pengembalian belanja 89ias89a89 TAYL.
- 42392 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi/ Tuntutan Perbendaharaan
- 423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan Piutang Non Bendahara. Piutang non bendahara terjadi karena kelalaian pegawai yang menyebabkan kerugian 89ias89a di luar pengurusan keuangan 89ias89a.

- 423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan Tuntutan Perbendaharaan kepada Bendahara. Tuntutan Perbendaharaan terjadi karena ada kerugian 89ias89a yang disebabkan kesalahan atau kelalaian bendahara dalam rangka pengurusan Keuangan Negara. Merupakan pendapatan umum yang 89ias ada di semua kementerian.
- 42394 Pendapatan dari Selisih Kurs
- 423941 Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN
Digunakan untuk mencatat untung selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
- 423942 Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI
Digunakan untuk mencatat realisasi kentungan selisih kurs uang persediaan pada satker perwakilan RI di Luar Negeri dan Atase Teknis.
- 423943 Pendapatan dari Selisih Kurs yang terealisasi
Selisih transaksi belanja dalam valuta asing antara antara resume tagihan dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda.
- 42395 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II
- 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Modal TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 423954 Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu

- Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL.
- 423955 Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Subsidi TAYL.
- 423956 Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Hibah TAYL.
- 423957 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Bantuan Sosial TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 423958 Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu
Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Lain-lain TAYL.
- 42399 Pendapatan Lain-lain
- 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
PNBP yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 423997 Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi.
- 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain
Merupakan pendapatan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
- 424 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
- 4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum
- 42411 Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU bagi BLU Penyedia Barang dan Jasa dari hasil pelayanan jasa yang merupakan core bussinessHnya sebagaimana terlampir.
- 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang

berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan (BA 024) maupun kementerian lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan core business rumah sakit/instansi kesehatan walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti rumah sakit yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan core business layanan pendidikan, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti perguruan tinggi yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.

424118 Pendapatan Penyediaan Barang

Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan penyediaan barang untuk kepentingan masyarakat atau instansi pengguna lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan core business layanan penyediaan barang, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan penyediaan barang yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

Pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan di luar penyediaan barang dan jasa lainnya selain dari yang telah dijelaskan pada akun 424111, 424112, 424113, 424114, 424115, 424116, 424117, dan 424118. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan core business layanan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa penyediaan

- barang dan jasa lainnya yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
- 424136 Pendapatan Investasi
Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan investasi atas bidang;bidang tertentu.
- 424139 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana khusus lainnya.
- 4242 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang diterima oleh Satker BLU.
- 42421 Pendapatan Hibah Terikat
- 424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri;Perorangan
Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.
- 424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri;Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Lembaga / Badan Usaha.
- 424213 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri;Pemda
Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Pemda.
- 424214 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri;Perorangan
Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
- 424215 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri;Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
- 424216 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri;Negara
Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara.
- 424219 Pendapatan Hibah Terikat Lainnya
Pendapatan Hibah terikat Dalam/Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.
- 42422 Pendapatan Hibah Tidak Terikat
- 424221 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri;Perorangan
Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.

- 424222 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri;Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari lembaga/Badan Usaha.
- 424223 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri;Pemda
Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari pemda.
- 424224 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri;Perorangan
Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
- 424225 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri;Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
- 424226 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri;Negara
Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara lain.
- 424229 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Lainnya
Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.
- 4243 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dan sewa menyewa bagi semua BLU selain Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu.
- 42431 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
- 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain perorangan.
- 424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain Lembaga/Badan Usaha.
- 424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain :Pemda.

- 4249 Pendapatan BLU Lainnya
Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hasil kerja sama BLU, dan pendapatan hibah BLU, dengan rincian sesuai dengan kode akun 6 digitnya
- 42491 Pendapatan BLU Lainnya
- 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
Kode akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum.
- 424912 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari penempatan endowment fund dan dana cadangan pendidikan oleh BLU bidang pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan.
- 5 BEBAN NEGARA
- 51 BEBAN PEGAWAI
- 511 BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN
- 5111 Beban Gaji dan Tunjangan PNS
- 51111 Beban Gaji PNS
- 511111 Beban Gaji Pokok PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
- 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
- 51112 Beban Tunjangan tunjangan I PNS
- 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri PNS.
- 511122 Beban Tunj. Anak PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anak PNS.
- 511123 Beban Tunj. Struktural PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural PNS.

- 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan fungsional PNS.
- 511125 Beban Tunj. PPh PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh PNS.
- 511126 Beban Tunj. Beras PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
- 511127 Beban Tunj. Kemahalan PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kemahalan PNS.
- 511128 Beban Tunjangan Lauk Pauk PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
- 511129 Beban Uang Makan PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang makan PNS.
- 51113 Beban Tunjangan tunjangan II PNS
- 511131 Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan perbaikan penghasilan PNS.
- 511132 Beban Tunj. Cacat PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan cacat PNS.
- 511133 Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus peralihan PNS.
- 511134 Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28V 05V1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15V11V1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02V 12V1987 No. SE

- 83V/A.198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka).
- 511135 Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
- 51113 Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
- 511131 Beban Gaji Pejabat Negara
- 5111311 Beban Gaji Pokok Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok pejabat Negara.
- 5111319 Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok pejabat negara.
- 511132 Beban Tunjangan-Tunjangan I Pejabat Negara
- 5111321 Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri pejabat negara.
- 5111322 Beban Tunj. Anak Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anak pejabat negara.
- 5111323 Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural pejabat negara.
- 5111324 Beban Tunj. PPh Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh pejabat negara.
- 5111325 Beban Tunj. Beras Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras pejabat negara.
- 511133 Beban Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
- 5111331 Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan komunikasi intensif pejabat negara.

- 511332 Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang
 kehormatan pejabat negara.
- 511333 Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan
 paket harian pejabat negara.
- 511337 Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat
 Negara
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lain-
 lain termasuk uang duka pejabat negara.
- 511339 Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas tunjangan
 penghasilan untuk Pejabat Negara (TPPN).
- 5114 Beban Gaji Dokter PTT
- 51141 Beban Gaji Dokter PTT
- 511411 Beban Gaji Dokter dan Bidan PTT
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji Dokter dan
 Bidan PTT.
- 511412 Beban Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan pajak
 PPh Dokter dan Bidan PTT.
- 511413 Beban Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan
 Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT.
- 511414 Beban Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Dokter
 dan Bidan PTT termasuk tunjangan uang duka wafat (UDW).
- 5115 Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
- 51151 Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
- 511511 Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok
 Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
- 511512 Beban Tunjangan Pegawai Non PNS
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan
 Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.

- 511513 Beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
- 511519 Beban Tunjangan Lainnya Non PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lainnya Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
- 512 BEBAN HONORARIUM/LEMBUR/TUNJ. KHUSUS & BEBAN PEGAWAI TRANSITO
- 5121 Beban Honorarium
- 51211 Beban Honorarium
- 512111 Beban Uang Honor Tetap
Digunakan untuk pengakuan beban honor tetap, termasuk honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan.
- 5122 Beban Lembur
- 51221 Beban Lembur
- 512211 Beban Uang Lembur
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
- 5124 Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito
- 51241 Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito
- 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus/kegiatan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 512412 Beban Pegawai Transito
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor/kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
- 512413 Beban Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan Sebagai Dampak Reformasi Birokrasi
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas uang kompensasi kepada PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia

- pensium yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 513 BEBAN KONTRIBUSI SOSIAL
- 5131 Beban Pensiun dan Uang Tunggu
- 51311 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
- 513111 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun PNS Pusat dan uang tunggu bagi PNS yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
- 513112 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban pensiun PNS Daerah dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
- 513113 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan
Digunakan untuk pembayaran Beban pensiun PNS TNI/Kemhan dan uang tunggu bagi PNS TNI/Kemhan yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
- 513114 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun PNS Polri dan uang tunggu bagi PNS Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
- 52 BEBAN BARANG DAN BARANG
- 521 BEBAN BARANG
- 5211 Beban Barang Operasional
- 52111 Beban Barang Operasional
- 521111 Beban Keperluan Perkantoran
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain :
- a. Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/ berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu.
 - b. Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning

- service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB.
- c. Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.
- 521112 Beban Pengadaan Bahan Makanan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan bahan makanan.
- 521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan bahan makanan/ minuman/ obatVobatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.
- 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.
- 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja
Digunakan untuk mencatat mencatat pengakuan beban atas honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBPN (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAKVBMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honor nya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.

- 521119 Beban Barang Operasional Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang operasional yang tidak dapat ditampung dalam akun dalam kelompok Akun Beban Barang Operasional dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.
- 5212 Beban Barang Non Operasional
- 52121 Beban Barang Non Operasional
- 521211 Beban Bahan
Pengeluaran yang digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti :
- a. Konsumsi/bahan makanan
 - b. Dokumentasi
 - c. Spanduk
 - d. Biaya fotokopi
- yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.
- 521212 Beban Barang Transito
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban barang pada satuan kerja satuan kerja yang baru dibentuk /UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi atau satker yang tidak melekat pada Bagian Anggaran/ Kementerian Negara/ Lembaga serta bisa digunakan oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.
- 521213 Beban Honor Output Kegiatan
Digunakan untuk mencatat mencatat pengakuan beban atas honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak

- menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
- 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun lainnya dalam kelompok Akun Beban Barang Non Operasional. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Beban Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.
- 522 BEBAN JASA
- 5221 Beban Jasa
- 52211 Beban Langganan Daya dan Jasa
- 522111 Beban Langganan Listrik
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan listrik, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.
- 522112 Beban Langganan Telepon
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan telepon, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.
- 522113 Beban Langganan Air
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan air, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.
- 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan daya dan jasa lainnya, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.

- 52212 Beban Jasa Pos dan Giro
- 522121 Beban Jasa Pos dan Giro
 Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.
- 52213 Beban Jasa Konsultan
- 522131 Beban Jasa Konsultan
 Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
- 52214 Beban Sewa
- 522141 Beban Sewa
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).
- 52215 Beban Jasa Profesi
- 522151 Beban Jasa Profesi
 Beban untuk mencatat pengakuan beban honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.
- 52219 Beban Jasa Lainnya
- 522191 Beban Jasa Lainnya
 Digunakan untuk mencatat pengakuan beban jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang

- 523 BEBAN PEMELIHARAAN
- 5231 Beban Pemeliharaan
- 52311 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas:
- a. Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2% dan
 - b. Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).
- 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementerian/ TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.
- 52312 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- 523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.

- 52313 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 523131 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan.
- 523132 Beban Pemeliharaan Irigasi
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.
- 52319 Beban Pemeliharaan Lainnya
- 523199 Beban Pemeliharaan Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar alam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat.
- 524 BEBAN PERJALANAN DINAS
- 5241 Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 52411 Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan

pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
- b. Pengumandahan (detasering)
- c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan
- d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan
- e. Memperoleh pengobatan
- f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
- g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
- h. Mengikuti diklat
- i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas
- j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

524112 Beban Perjalanan Dinas Tetap

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
- b. Pengumandahan (Detasering)
- c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan

- d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan
- e. Memperoleh pengobatan
- f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
- g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
- h. Mengikuti diklat
- i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.!

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi:

- a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota
- b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard)
- c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja
- d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/ atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan

di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

- a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota
- b) Biaya paket meeting (fullboard)
- c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota
- d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

5242 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri

52421 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri

524211 Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.

524212 Beban Perjalanan Dinas Tetap Luar Negeri

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di/ ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase.

524219 Beban Perjalanan Dinas Lainnya Luar Negeri

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos Beban perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.

- 525 BEBAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
- 5251 Beban Barang BLU
- 52511 Beban Barang dan Jasa BLU
- 525111 Beban Gaji dan Tunjangan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji dan tunjangan pegawai BLU.
- 525112 Beban Barang
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
- 525113 Beban Jasa
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
- 525114 Beban Pemeliharaan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemeliharaan BMN BLU.
- 525115 Beban Perjalanan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas pegawai BLU.
- 525116 Beban atas Pengelolaan Endowment Fund
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya biaya yang digunakan untuk pengelolaan Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan oleh BLU Bidang Pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan sesuai maksud pembentukannya.
- 525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan.
- 526 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA
- 5261 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 52611 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526111 Beban Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan barang berupa tanah oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.

- 526112 Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- 526113 Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan Barang berupa Gedung dan Bangunan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- 526114 Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk pengadaan Barang berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- 526115 Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan Barang Fisik Lainnya oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, termasuk Beban barang fisik lain Tugas Pembantuan.
- 5262 Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
- 52621 Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
- 526211 Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Dekonsentrasi. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak

- bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
- 526212 Beban Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
- 5263 Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 52631 Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
- 526311 Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang tidak dapat dialokasikan pada kelompok akun 5261 dan 5262.
- 57 BEBAN BANTUAN SOSIAL
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
- 571 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL
- 5711 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
- 57111 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
- 571111 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang

- mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 571112 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 572 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL
- 5721 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
- 57211 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
- 572111 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
- 572112 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
- 574 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL

- 5741 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
- 57411 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
- 574111 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:
- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
1. bantuan langsung
 2. penyediaan aksesibilitas dan/atau
 3. penguatan kelembagaan.
- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- 574112 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
- Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:
- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
1. bantuan langsung
 2. penyediaan aksesibilitas dan/atau
 3. penguatan kelembagaan.
- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- 59 BEBAN PENYESUAIAN

| | |
|--------|--|
| 591 | BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP |
| 5911 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin |
| 59111 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin |
| 591111 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Transaksi ini terjadi di satker yang non BLU |
| 59112 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin BLU |
| 591121 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin BLU Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Transaksi ini terjadi di satker BLU |
| 5912 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan |
| 59121 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan |
| 591211 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan. Transaksi ini terjadi di satker yang non BLU |
| 59122 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan BLU |
| 591221 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan BLU Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan. Transaksi ini terjadi di satker BLU |
| 5913 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| 59131 | Beban Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi |
| 591311 | Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jalan dan Jembatan. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU |
| 591312 | Beban Penyusutan Irigasi Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Irigasi. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU |
| 591313 | Beban Penyusutan Jaringan Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jaringan. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU |
| 59132 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU |
| 591321 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan. Transaksi ini terjadi di satker BLU |
| 5914 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya |

- 59141 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
- 591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap dalam kelompok aset lainnya. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU
- 59142 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU
- 591421 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU
Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap dalam kelompok aset lainnya. Transaksi ini terjadi di satker BLU
- 592 BEBAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA/AMORTISASI ASET LAINNYA
- 5921 Beban Amortisasi Aset Lainnya
- 59211 Beban Amortisasi Aset Lainnya
- 592111 Beban Amortisasi Goodwill
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Goodwill pada satker Non BLU
- 592112 Beban Amortisasi Hak Cipta
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Hak Cipta pada satker Non BLU
- 592113 Beban Amortisasi Royalti
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Royalti pada satker Non BLU
- 592114 Beban Amortisasi Paten
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa paten pada satker Non BLU
- 592115 Beban Amortisasi Software
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa software pada satker Non BLU
- 592116 Beban Amortisasi Lisensi
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa lisensi pada satker Non BLU
- 592117 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset dalam kelompok aset tak berwujud lainnya pada satker Non BLU
- 59212 Beban Amortisasi Aset Lainnya Badan Layanan Umum
- 592121 Beban Amortisasi Software Badan Layanan Umum
Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Software pada satker BLU

- 592122 Beban Amortisasi Hak Cipta BLU
 Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak
 berwujud berupa Hak Cipta pada satker BLU
- 592123 Beban Amortisasi Royalti BLU
 Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak
 berwujud berupa Royalti pada satker BLU
- 592124 Beban Amortisasi Paten BLU
 Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak
 berwujud berupa paten pada satker BLU
- 592125 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya Badan Layanan
 Umum
 Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset dalam kelompok
 aset tak berwujud lainnya pada satker BLU
- 5922 Beban Penyusutan Aset Lainnya
- 59221 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 592211 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Kemitraan dengan
 Pihak Ketiga.
- 59222 Beban Penyusutan Aset Lain lain K/L
- 592221 Beban Penyusutan Aset Lain lain
 Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Lain lain.
- 592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak
 Digunakan dalam Operasional Pemerintah
 Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Tetap yang
 Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.
- 59224 Beban Penyusutan Aset Lain lain BLU
- 592241 Beban Penyusutan Aset Lain lain BLU
 Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Lain lain BLU
- 592242 Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam
 Operasi Pemerintahan BLU
 Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Tetap yang
 Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU
- 593 BEBAN PERSEDIAAN
- 5931 Beban Persediaan
- 59311 Beban Persediaan Bahan untuk Operasional

- 593111 Beban Persediaan Konsumsi
 Penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan
 konsumsi karena sifat dan jenis barang
- 593112 Beban Persediaan amunisi
 penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan
 amunisi karena sifat dan jenis barang
- 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
 penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai bahan
 pemeliharaan karena sifat dan jenis barang
- 593114 Beban Persediaan suku cadang
 penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan
 suku cadang karena sifat dan jenis barang
- 59312 Beban Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
- 593121 Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges
 penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan
 pita cukai, materai dan leges ke pihak lainnya
- 593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau
 diserahkan kepada Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan tanah bangunan ke
 pihak lainnya
- 593123 Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau
 diserahkan kepada Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan hewan dan
 tanaman ke pihak lainnya
- 593124 Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau
 diserahkan kepada Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan peralatan dan
 mesin ke pihak lainnya
- 593125 Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk
 diserahkan kepada Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan jalan, irigasi dan
 jaringan ke pihak lainnya
- 593126 Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada
 Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan aset tetap lainnya
 ke pihak lainnya

- 593127 Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan aset lain-lain ke pihak lainnya
- 593128 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
 Penjualan atau penyerahan aset persediaan lainnya ke pihak lainnya
- 59313 Beban Persediaan untuk proses produksi
- 593131 Beban Persediaan bahan baku
 Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan bahan baku ke pihak lainnya
- 593132 Beban Persediaan barang dalam proses
 Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan barang dalam proses ke pihak lainnya
- 59314 Beban Persediaan Bahan Lainnya
- 593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga jaga
 Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan untuk tujuan strategis ke pihak lainnya
- 593142 Beban Persediaan barang hasil sitaan
 Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan barang hasil sitaan ke pihak lainnya
- 593149 Beban persediaan lainnya
 Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan ke pihak lainnya
- 5932 Beban Persediaan Badan Layanan Umum
- 59321 Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa
- 593211 Beban Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
 Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pelayanan Kesehatan ke pihak lainnya
- 593212 Beban Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
 Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pelayanan Pendidikan ke pihak lainnya
- 594 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
- 5942 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak
- 59421 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak

- 594211 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang PNBP
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PNBP
- 594212 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lainnya
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang piutang lainnya
- 5943 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Penjualan Angsuran
- 59431 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Penjualan Angsuran
- 594311 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Penjualan Angsuran
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
- 5944 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 59441 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 594411 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 5946 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU
- 59461 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Penyedia
Barang dan Jasa
- 594611 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU
Pelayanan Kesehatan
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pelayanan
Kesehatan
- 594612 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU
Pelayanan Pendidikan
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pelayanan
Pendidikan
- 594613 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU
Penunjang Konstruksi
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Penunjang
Konstruksi

- 594614 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU
 Penyedia Jasa Telekomunikasi
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU
 Penyedia Jasa Telekomunikasi
- 594619 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Penyedia
 Barang dan Jasa Lainnya
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Penyedia
 Barang dan Jasa Lainnya
- 59464 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Operasional
 Lainnya BLU
- 594641 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan
 Operasional Lainnya BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Kegiatan
 Operasional Lainnya BLU
- 5947 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Non
 Operasional BLU
- 59471 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa BLU
- 594711 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Tanah
 BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Tanah
 BLU
- 594712 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Gedung
 BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Gedung
 BLU
- 594713 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa
 Ruangan BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Ruangan
 BLU
- 594714 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa
 Peralatan dan Mesin BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Peralatan
 dan Mesin BLU
- 594719 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Sewa Lainnya
 BLU
 Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Lainnya
 BLU

- 59472 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset BLU
- 594721 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- 594722 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
- 59479 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Non Operasional Lainnya BLU
- 594791 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
- 595 BEBAN REKLASIFIKASI ASET
- 5951 Beban Aset Ekstrakomtabel
- 59511 Beban Aset Ekstrakomtabel
- 595111 Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable tanah. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal tanah yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable peralatan dan mesin. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal peralatan dan mesin yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable gedung dan bangunan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal gedung dan bangunan yang seharusnya tidak dikapitalisasi.

- 595114 Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomptabel jalan, irigasi, dan jaringan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal jalan, irigasi, dan jaringan yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 595115 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomptabel aset tetap lainnya. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal lainnya yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 595116 Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomptabel konstruksi dalam pengerjaan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal yang menghasilkan KDP yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 595117 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud
Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomptabel aset tak berwujud. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal lainnya yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
- 596 KERUGIAN PELEPASAN ASET DAN KERUGIAN BELUM TEREALISASI
- 5961 Kerugian Pelepasan Aset
- 59611 Kerugian Pelepasan Aset
- 596111 Kerugian Pelepasan Aset
Transaksi akrual atas kerugian pelepasan aset dari nilai bukunya.
- 596112 Tuntutan Ganti Rugi
Transaksi atas kerugian Tuntutan Ganti Rugi.
- 5962 Kerugian Belum Terealisasi
- 59621 Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
- 596211 Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
Penyesuaian Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
- 597 PEMBULATAN
- 5971 Pembulatan
- 59711 Pembulatan

597111 Pembulatan
Akun penyeimbang pada proses transfer rekening kas
negara valas ke dalam rekening rupiah.

| | |
|-------------|----------|
| FORMULIR IX | |
| ILUSTRASI | TELAAH |
| LAPORAN | KEUANGAN |

| KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Periode : | | | |
| Kode Satker | : | | |
| Nama Satker | : | | |
| Nama Eselon 1 | : | | |
| Nama Kementerian | : | | |
| Objek Penelaahan | | Kondisi LK | Seharusnya |
| <i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan.</i> | | | |
| <i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i> | | | |
| NERACA PERCOBAAN | | | |
| Pengecekan Akun-akun: | | Ada | Tidak |
| 1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) | | | Tidak |
| 2. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah) | | | Tidak |
| 3. Adakah akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. | | | Tidak |
| <i>KHUSUS BUKAN Satker BLU</i> | | Ada | Tidak |
| 4a. Adakah akun 424xxx | | | Tidak |
| 4b. Adakah akun 525xxx | | | Tidak |
| 4c. Adakah akun 537xxx | | | Tidak |
| Pengecekan Saldo Tidak Normal | | Ada | Tidak |
| 5. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya | | | Tidak |
| Pengecekan Saldo Debet/Kredit | | Ya | tidak |
| 6. Apakah Akun Aset (1xxxx) bersaldo (D) (<i>kec.Penyisihan dan Akumulasi</i>) | | | Ya |
| Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| Apakah Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| Apakah Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) (<i>kec.Pengembalian Pendapatan</i>) | | | Ya |
| Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxxx) bersaldo (D) | | | Ya |
| Apakah Akun Belanja/beban (5xxxxx) bersaldo (D) (<i>kecuali Beban Penyisihan Piutang</i>) | | | Ya |
| Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| <i>KHUSUS BUKAN Satker BLU</i> | | Ya | Tidak |
| 7a. Apakah Akun 313111 (ditagihkan ke EL) = Total Belanja Netto di LRA Face | | | Ya |
| 8a. Apakah Akun 313121 (diterima dari EL) = Total Pendapatan Netto di LRA Face | | | Ya |
| <i>KHUSUS Satker BLU:</i> | | Ya | Tidak |
| 7b. Apakah Akun 313111 (ditagihkan ke EL) = Total Belanja Netto di LRA Face dikurangi (Netto 525xxx + Netto 537xxx) | | | Ya |
| 8b. Apakah Akun 313121 (diterima dari EL) = Total Pendapatan Netto di LRA Face dikurangi Netto 424xxx | | | Ya |
| Pengecekan akun tertentu | | Ya | Tidak |
| 9. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) | | | Ya/Tidak |
| Apakah akun 491429 berasal dari Jurnal di Aplikasi SAIBA | | | Tidak |
| Apakah akun 491429 berasal dari Jurnal kiriman dari SIMAK | | | Ya |
| <i>Akun 491429 sangat jarang terjadi, apabila ada, konfirmasi kebenarannya, uraikan dalam lampiran.</i> | | | |

| LAPORAN OPERASIONAL | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---------|---------|------------|
| Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada | | | | | | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1. | Adakah pendapatan Perpajakan | | | | | | | Tidak |
| 2. | Adakah pendapatan Hibah | | | | | | | Tidak |
| 3. | Adakah beban bunga | | | | | | | Tidak |
| 4. | Adakah beban subsidi | | | | | | | Tidak |
| 5. | Adakah beban hibah | | | | | | | Tidak |
| 6. | Adakah beban transfer | | | | | | | Tidak |
| 7. | Adakah beban lain-lain | | | | | | | Tidak |
| Pengecekan saldo Normal | | | | | | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 8. | Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya | | | | | | | Tidak |
| <i>Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyesihan piutang dapat bernilai negatif</i> | | | | | | | | |
| 9. | Kegiatan Operasional | | | | | Positif | Negatif | Seharusnya |
| - | Pendapatan | | | | | | | Positif |
| - | Beban Pegawai | | | | | | | Positif |
| - | Beban Persediaan | | | | | | | Positif |
| - | Beban Barang dan Jasa | | | | | | | Positif |
| - | Beban Pemeliharaan | | | | | | | Positif |
| - | Beban Perjalanan Dinas | | | | | | | Positif |
| - | Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat | | | | | | | Positif |
| - | Beban Penyusutan dan Amortisasi | | | | | | | Positif |
| - | Beban Penyesihan Piutang Tak Tertagih | | | | | | | Pos/Neg |
| 10. | Kegiatan Non Operasional | | | | | Positif | Negatif | Seharusnya |
| - | Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | | | | | | | Positif |
| - | Beban Pelepasan Aset non Lancar | | | | | | | Positif |
| - | Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang | | | | | | | Positif |
| - | Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang | | | | | | | Positif |
| - | Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya | | | | | | | Positif |
| - | Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya | | | | | | | Positif |
| Pengecekan antar Laporan | | | | | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 11. | Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE | | | | | | | Sama |
| 12. | Beban Persediaan di LO = Beban Persediaan di Persediaan/SIMAK-BMN | | | | | | | Sama |

| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | | | |
|--|--|------|-------|------------|
| Pengecekan antar Laporan | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. Saldo Ekuitas Awal di LPE = Jumlah Ekuitas di Neraca 2014 <i>Audited</i> | | | | Sama |
| 2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca | | | | Sama |
| Pengecekan akun tertentu | | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 3. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ? | | | | Tidak |
| <i>Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK</i> | | | | |
| NERACA | | | | |
| Pengecekan Persamaan Akuntansi | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. Aset = Kewajiban + Ekuitas | | | | Sama |
| 2. Saldo Awal = Angka Audited Laporan 2014 | | | | Sama |
| 3. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN | | | | Sama |
| Pengecekan Akun tertentu | | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 4. Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan" ? | | | | Tidak |
| Pengecekan Keterkaitan Transaksi | | Ada | Tidak | Seharusnya |
| <i>Jika jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i> | | | | |
| 5. Ada Akun Piutang maka akan ada akun: | | | | Ada/Tidak |
| - Penyisihan Piutang | | | | Ada/Tidak |
| - Beban Penyisihan Piutang | | | | Ada/Tidak |
| 6. Ada persediaan maka akan ada akun: | | | | Ada/Tidak |
| - Beban Persediaan | | | | Ada/Tidak |
| 7. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya maka akan ada akun: | | | | Ada/Tidak |
| - Akumulasi AT/AL | | | | Ada/Tidak |
| - Beban Penyusutan/Amortisasi | | | | Ada/Tidak |
| TELAAH KESESUAIAN DENGAN L-BMN (APLIKASI PERSEDIAAN/SIMAK) | | | | |
| Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK) untuk: | | | | |
| | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. Persediaan | | | | Sama |
| 2. Aset Tetap | | | | Sama |
| 3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | | | Sama |
| 4. Aset Lainnya | | | | Sama |
| 5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | | | Sama |
| Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk: | | | | |
| | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. Beban Penyusutan 591xxx (SAIBA) dengan kolom 7 (SIMAK) | | | | Sama |
| 2. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan kolom 9 (SIMAK) | | | | Sama |
| Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Jurnal Persediaan PerAkun (Jurnal Kiriman Persediaan ke SIMAK bulanan) dari Aplikasi Persediaan untuk: | | | | |
| | | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. Beban Persediaan 593xxx (SAIBA) dengan 593xxx (Persediaan) | | | | Sama |
| 2. Penyesuaian Nilai Persediaan 391117 (SAIBA) dengan 391117 (Persediaan) | | | | Sama |

| LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA (LRA/B) | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | Ada | Tidak |
| | | | | | | Seharusnya |
| 1 | Adakah saldo negatif di LRAB | | | | | Tidak |
| 2 | Ada uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " | | | | | Tidak |
| | | | | | | |
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sama | Tidak |
| | | | | | | Seharusnya |
| 1. | Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan) | | | | | Sama |
| | | | | | | |
| | | | | | Ya | Tidak |
| | | | | | | Seharusnya |
| 2. | Apakan semua akun di LO dan LPE telah dijelaskan? | | | | | Ya |
| | | | | | | |
| | Mengetahui | | | |, | 20.... |
| | Kepala Satker, | | | | Penelaah, | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | NIP | | | | NIP | |